



LKj

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT



TAHUN 2020

SETELAH EVALUASI



“Saya ingin Sekretariat Daerah menjadi Teladan (Role Model) Bagi Perangkat Daerah Lain dengan Menerapkan Nilai Budaya”

SMART dalam Bekerja;

SIMPATIK dalam Melayani; dan

TUNTAS dalam Tugas.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
Drs.H. DAHNIAL KIFLI, M.AP



KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah, kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Karunia Nya sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun kinerja yang diukur dalam laporan ini didasarkan atas Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sekretariat Daerah Tahun 2020.

Pada Tahun Anggaran 2020 capaian kinerja Sekretariat Daerah adalah **85,95%** dengan kategori *Sangat Berhasil*, yang di dukung dengan 27 (dua puluh tujuh) Sasaran Strategis dan 42 (empat puluh dua) Indikator Sasaran serta didukung oleh 15 (lima belas) Program 46 (empat puluh lima) Kegiatan.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 yang disusun ini tentunya masih jauh dari sempurna, sehingga perlu adanya masukan, saran, atau kritik yang membangun sehingga kedepan akan dapat disusun Laporan Kinerja yang lebih berkualitas, komprehensif dan bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi Aparatur lingkup Sekretariat Daerah dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Daerah di masa yang akan datang.

Pelaihari, 26 Januari 2021

Sekretaris Daerah,
Kabupaten Tanah Laut

Drs. H. DAHNIAL KIFLI, MAP
NIP. 19640425 1987033 1 012

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pendekatan yang digunakan adalah dengan menyajikan dokumen perencanaan jangka menengah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Penetapan Kinerja, serta Pengukuran Pencapaian Sasaran yang dilengkapi dengan identifikasi faktor - faktor yang mendukung keberhasilan dan atau kegagalan.

Di samping itu LKj ini juga melaporkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2020. Penyusunan LKj ini berpedoman pada dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, yang mana dalam Renstra tersebut tercantum Visi “**Terwujudnya Tanah Laut yang "BERINTERAKSI" (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi)**”. Dengan Misi :

- 1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;**
- 2. Menciptakan Inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;**
- 3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);**
- 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat; dan**
- 5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.**

Keempat Misi yang di ampu oleh Sekretariat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang mana masing- masing sasaran strategis yang ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaiannya. Untuk Tahun 2020 Sekretariat Daerah mempunyai anggaran belanja sebesar **Rp 48.427.767.828,00,-** dengan capaian realisasi sebesar **Rp 41.622.508.206,00,- (85,95%)**.

Berikut anggaran dan capaian realisasi di masing-masing bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 :

No	Bagian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tata Pemerintahan	1.825.944.200,00	1.018.174.144,00	55,76
2	Hukum	869.806.500,00	785.472.800,00	90,30
3	Organisasi	409.816.840,00	198.325.300,00	48,39
4	Perekonomian Pembangunan	579.517.620,00	495.803.760,00	85,55
5	Pengadaan Barang dan Jasa	736.109.060,00	564.037.766,00	76,62
6	Kesejahteraan Rakyat	19.774.259.800,00	18.582.115.400,00	93,97
7	Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan	3.429.958.100,00	3.152.605.602,00	91,91
8	Umum	15.530.710.185,00	11.927.749.227,00	76,80
9	Tata Usaha dan Keuangan	5.271.645.523,00	4.898.224.207,00	92,92
	Jumlah	48.427.767.828,00	41.622.508.206,00	85,95

Diharapkan LKj ini telah mempresentasikan kinerja nyata Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut sekaligus sebagai perwujudan Akuntabilitas dan Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dapat memberikan informasi pengambilan keputusan Pimpinan guna peningkatan kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi	1
C. Isu Strategis	11
D. Produk dan Layanan	21
E. Sistematika Penyajian	23
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Visi	24
B. Misi	27
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	27
D. Indikator Kinerja Utama	36
E. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020	37
F. Program dan Kegiatan	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	42
1. Sasaran RPJMD	42
2. Eselon II	46
2.1 Eselon II (Sekretaris Daerah)	46
2.2 Eselon II (Asisten Sekretaris Daerah)	70
3. Eselon III (Kepala Bagian) dan Eselon IV (Kasubbag)	80
3.1 Bagian Tata Usaha dan Keuangan	80
3.2 Bagian Tata Pemerintahan	122
3.3 Bagian Organisasi	159
3.4 Bagian Pengadaan Barang/Jasa	203
3.5 Bagian Hukum	220

3.6 Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	240
3.7 Bagian Umum	255
3.8 Bagian Kesejahteraan Rakyat	268
3.9 Bagian Perekonomian Pembangunan	305
4. Perbandingan Realisasi Capaian Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020.....	327
5. Laporan Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020.....	332
B. Akuntabilitas Keuangan	347
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2020	347
2. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Tahun 2020	348
3. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program	356
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	361
B. Strategi Peningkatan Kinerja	365
C. Penyelamatan UMKM dan Pemberian Pelayanan Publik di Era Pandemi Covid-19.....	368

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. IKU Sekretariat Daerah Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Pelaksana Tahun 2020
2. Pernyataan Hasil Reviu Tahun 2019
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ber tanda tangan
4. Pohon Kinerja Sekretariat Daerah
5. Matrik Keselarasan Tahun 2020
6. Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah Tahun 2020
7. Rencana Aksi Sekretariat Daerah Tahun 2020
8. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
9. SOP Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam mencapai rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Disamping itu LAPKIN juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Akuntabilitas Sekretariat Daerah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik dan pertanggungjawaban instansi serta tekad seluruh PNS Setda untuk mencapai misi tujuan organisasi yang transparan guna mendukung tercapainya Good Governance.

B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi

Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang Bupati dan didampingi seorang Wakil Bupati, ***Bupati Tanah Laut dipimpin oleh H. Sukamta dengan Wakilnya Abdi Rahman yang dilantik pada tanggal 19 September 2018.*** Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah membentuk lembaga-lembaga

pemerintahan berupa Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, badan, dinas, kantor kecamatan, dan kantor kelurahan serta unit kerja lainnya sesuai kebutuhan Pemerintahan Kabupaten.

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi tata kerja Sekretariat serta Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 119 Tahun 2019 tentang uraian Tugas Sekretariat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Sesuai Pada BAB II Peraturan Bupati Tanah Laut tentang uraian tugas, dan Susunan Organisasi.

- (1) Sekretariat Daerah terdiri dari 1 (satu) Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Asisten dan 9 (Sembilan) Bagian, 27 (dua puluh tujuh) Sub Bagian yakni :
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) dalam pasal ini dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.
- (3) Asisten sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Bagian pada masing – masing asisten dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten.
- (5) Sub Bagian pada masing – masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (6) Susunan Organisasi pada pasal 3 Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Asisten Bidang Pemerintahan terdiri dari :
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:

- a) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan; dan
 - c) Sub Bagian Kerjasama Pemerintahan.
- 2) Bagian Hukum, terdiri dari:
- a) Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia(HAM); dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum.
- 3) Bagian Organisasi, terdiri dari:
- a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik; dan
 - c) Sub Bagian Pemberdayaan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja
- c. Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
- 1) Bagian Perekonomian Pembangunan, terdiri dari:
- a) Sub Bagian Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
 - c) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Perekonomian Pembangunan
- 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
- a) Sub Bagian Sosial Kebudayaan;
 - b) Sub Bagian Pendidikan dan Agama; dan
 - c) Sub Bagian Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat
- 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
- a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan barang/jasa;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE); dan
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
- d. Asisten Bidang Administrasi Umum, terdiri dari:
- 1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari
- a) Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 - b) Sub Bagian Pemberitaan; dan
 - c) Sub Bagian Keprotokolan.
- 2) Bagian Umum, terdiri dari:
- a) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 - c) Sub Bagian Aset.
- 3) Bagian Tata Usaha dan Keuangan, terdiri dari:

- a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli; dan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah adalah :
- 1) Asisten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukandi bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah
 - 2) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten.
 - 3) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bagian
 - 4) Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa secara *ex-officio* sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP).

1. Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah

Sekretariat mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan Administratif.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
- e. pembinaan administrasi pemerintahan, hukum dan organisasi;
- f. fasilitasi administrasi perekonomian pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, hubungan masyarakat dan protokol serta tata usaha dan keuangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(1) Asisten Bidang Pemerintahan

Asisten Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina dan mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pemerintahan melalui:

- a. **Bagian Tata Pemerintahan** (dengan ruang lingkup kegiatan meliputi bidang pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah daerah, penyelenggaraan otonomi daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Bidang Pemerintahan Desa di DPMPD, penyusunan laporan pertanggung jawaban, koordinasi dan kerja sama antar instansi pemerintah);
- b. **Bagian Hukum** (dengan ruang lingkup kegiatan meliputi penyusunan produk hukum daerah, sosialisasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pemberian koreksi produk hukum daerah dan produk hukum lainnya, memberikan masukan/input dan telaahan produk hukum, melaksanakan kajian atas rumusan produk hukum daerah maupun produk hukum lainnya serta kebijakan daerah yang dikonstruksikan dalam norma, melakukan pembinaan penyusunan produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, fasilitasi dan pelayanan bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) pemerintah daerah, mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum serta harmonisasi Peraturan Perundang – undangan); dan
- c. **Bagian Organisasi** (dengan ruang lingkup kegiatan meliputi menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pelaksanaan peningkatan kapasitas dan evaluasi kelembagaan, analisis jabatan, tata laksana, pelayanan publik, pemberdayaan aparatur dan akuntabilitas kinerja).

(2) Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan

Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina dan mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan Pemerintahan melalui :

- a. **Bagian Perekonomian Pembangunan** (dengan ruang lingkup kegiatan meliputi fasilitasi pengembangan potensi perekonomian, bina badan usaha milik daerah, monitoring dan evaluasi perekonomian pembangunan lingkup kabupaten);
- b. **Bagian Layanan Pengadaan barang/ jasa** (dengan ruang lingkup kegiatan meliputi pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa); dan
- c. **Bagian Kesejahteraan Rakyat** (dengan ruang lingkup kegiatan meliputi fasilitasi dan pembinaan sosial kemasyarakatan dan kebudayaan, penyelenggaraan pembinaan bidang pendidikan dan agama dan kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat).

(3) Asisten Bidang Administrasi Umum

Asisten Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina dan mengevaluasi serta melaporkan penyelenggaraan Pemerintahan bidang :

- a. **Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan** (dengan ruang lingkup kegiatan meliputi penyelenggaraan bidang hubungan masyarakat, pemberitaan dan penyelenggaraan keprotokolan);
- b. **Bagian Umum** (dengan ruang lingkup kegiatan meliputi pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan, penyelenggaraan rumah tangga dan dan penataan aset); dan
- c. **Bagian Tata Usaha** (dengan ruang lingkup kegiatan meliputi penyelenggaraan ketatausahaan sekretariat daerah, ketatausahaan staf ahli, administrasi kepegawaian, dan perencanaan dan penyelenggaraan administrasi keuangan).

(4) Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dankebutuhan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.
- e. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- g. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah

Sumber daya aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan pendidikan dan golongan ruang sebagai berikut :

a. Aspek Strategis Organisasi

1) Sumber Daya SKPD

Susunan Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada akhir tahun 2020 berdasarkan jabatan struktural dan non struktural berjumlah 226 orang yang terdiri 105 PNS dan 121 orang Non PNS, yang meliputi :

1. Sekretaris Daerah	: 1 orang
2. Asisten	: 3 orang
3. Staf Ahli Bupati	: 3 orang
4. Kepala Bagian Umum	: 1 orang
5. Kepala Bagian Organisasi	: 1 orang
6. Kepala Bagian Hukum	: 1 orang
7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	: 1 orang
8. Kepala Bagian Pengadaan Baranga dan Jasa	: 1 orang
9. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan	: 1 orang
10. Kepala Bagian Humas Protokol	: 1 orang
11. Kepala Bagian Tata Pemerintahan	: 1 orang
12. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	: 1 orang
13. Kasubbag Tata Usaha Staf Ahli	: 0 orang
14. Ksubbag Perencanaan dan Keuangan	: 1 orang
15. Kasubbag Umum dan Rumah Tangga	: 1 orang
16. Kasubbag Perlengkapan	: 1 orang
17. Kasubbag Aset	: 0 orang
18. Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan	: 1 orang
19. Kasubbag Tata Laksana dan Pelayanan Publik	: 1 orang
20. Kasubbag Pemberdayaan Aparatur & Akuntabilitas Kinerja	: 1 orang
21. Kasubbag Kasubbag Dokumentasi & Informasi Hukum	: 1 orang



22. Kasubbag Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia	: 1 orang
23. Kasubbag Sosial dan Kebudayaan	: 1 orang
24. Kasubbag Pendidikan dan Agama	: 1 orang
25. Kasubbag Kemasyarakatan dan Kesra	: 1 orang
26. Kasubbag Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	: 1 orang
27. Kasubbag Pengadaan Barang dan Jasa	: 1 orang
28. Kasubbag Kompetensi dan Evaluasi Pelaporan	: 1 orang
29. Kasubbag Fasilitasi pengembangan Potensi Perekonomian	: 1 orang
30. Kasubbag Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	: 1 orang
31. Kasubbag Monev Perekonomian Pembangunan	: 1 orang
32. Kasubbag Humas	: 0 orang
33. Kasubbag Pemberitaan	: 0 orang
34. Kasubbag Keprotokolan	: 1 orang
35. Kasubbag Otonomi Daerah	: 1 orang
36. Kasubbag Administrasi Pemerintahan	: 1 orang
37. Kasubbag Kerjasama Pemerintahan	: 1 orang
38. JFU	: 64 orang
39. Non PNS	: 121 orang

Sedangkan susunan kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel Jumlah PNS berdasarkan Golongan dan Kualifikasi Pendidikan per 31 Desember 2020

NO	BAGIAN	GOLONGAN																JML
		IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b	I/a	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Sekretaris Daerah	1																1
2	Asisten Sekda		3															3
3	Staf Ahli		3															3
4	Tata Pemerintahan				1	1	1	1	2		2							8
5	Hukum			1		1	1	1	1									5
6	Organisasi			1		2		1	1									5
7	Pengadaan Barang Jasa				1	5	6	2	2	1	4							21
8	Perekonomian Pembangunan					2	1	2		1								6
9	Kesejahteraan Rakyat			1		1	2		1	3								8
10	Umum				1	1	1	1	2	5	3	2	1	1		1		19
11	Tata Usaha dan Keuangan			1		2			2	3	4		1					13



12	Humas dan Protokol				1		1	2	5	2	2							13
JUMLAH		1	6	4	4	15	13	10	16	15	15	2	2	1	0	1	-	105

b. Aspek SDM Sekretariat Daerah

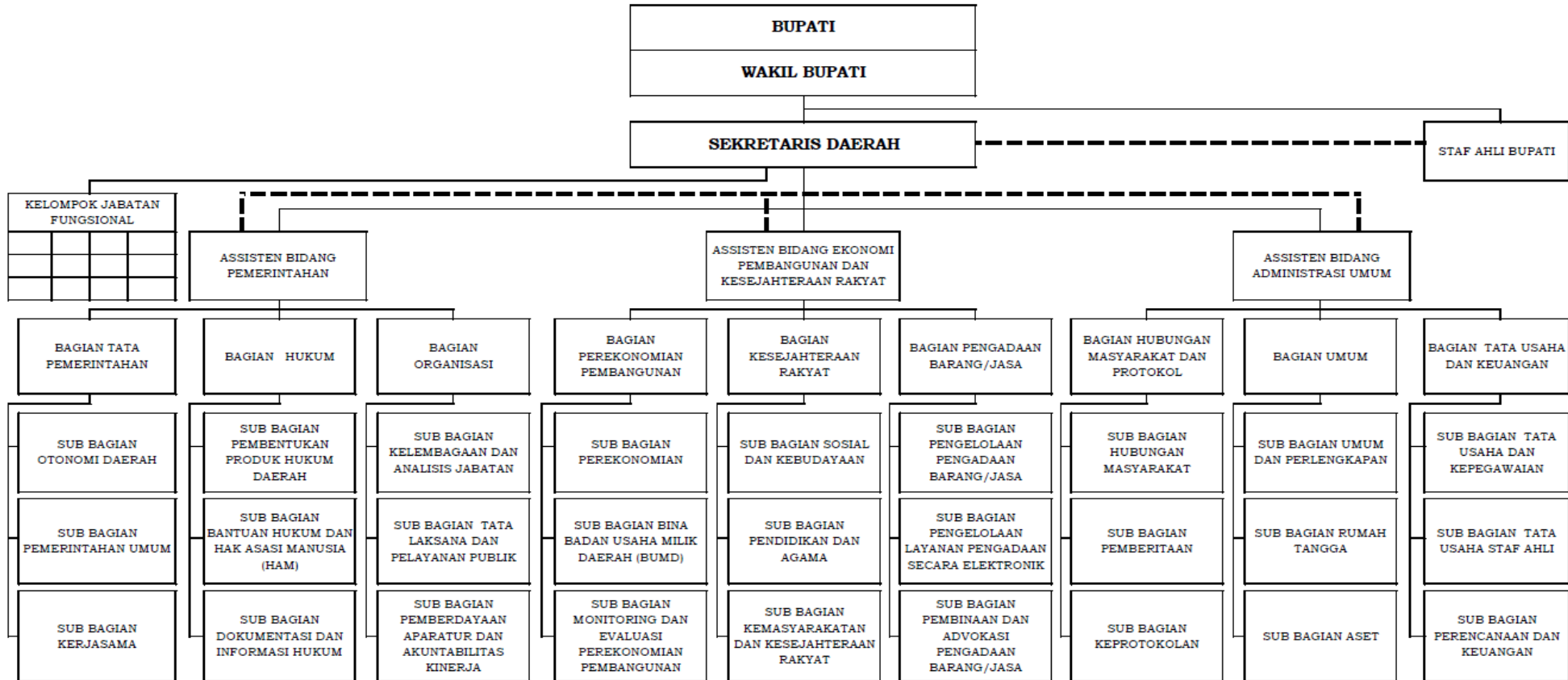
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan pendidikan dan golongan ruang sebagai berikut :

NO	BAGIAN	PENDIDIKAN								JUMLAH
		S2	S1	DIV	D3	D2	SMU	SMP	SD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Sekretaris Daerah	1								1
2	Asisten Sekda	3								3
3	Staf Ahli	1	2							3
4	Tata Pemerintahan	2	4				2			8
5	Hukum	1	4							5
6	Organisasi	1	4							5
7	Pengadaan Barang Jasa	2	13		5		1			21
8	Perekonomian Pembangunan		4		1		1			6
9	Kesejahteraan Rakyat	1	4		1		2			8
10	Umum		4		2		11	1	1	19
11	Tata Usaha dan Keuangan		4	1	1		6		1	13
12	Humas dan Protokol	1	3	2	1	1	5			13
JUMLAH		13	46	3	11	1	28	1	2	105



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 36 Tahun 2019
TANGGAL : 02 Mei 2019



KETERANGAN
 - - - - - : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH

Alfiri
 ALFIRIAL, S.I., MH
 NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

C. Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka mewujudkan pemerintahan yg Good Governance diperlukan penelaahan dan implementasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang merupakan unsur Staf.

Isu-isu strategis pada Sekretariat Daerah antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya Sampai dengan Rp 200 Juta Dengan Menggunakan Sumber Dana APBDes Kurang Transparan

❖ Rencana pengembangan Aplikasi Sosialita

Dana desa merupakan sejumlah anggaran dana yang diber ikan kepada desa dari pemerintah. Tujuan dana desa yang disalurkan kepada masyarakat desa antara lain:

- 1) Membantu mengatasi permasalahan ekonomi di Desa, antara lain kemiskinan bisa dikurangi, angka pengangguran bisa diturunkan, laju urbanisasi bisa dihambat dan ketimpangan bisa dipersempit;
- 2) Membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, membantu pemerataan pembangunan dan hasilnya, membangun infrastruktur dan menciptakan peluang serta lapangan kerja baru;
- 3) Selain menggunakan untuk pembangunan desa, tetapi juga untuk membangun sumber daya manusia (SDM) di desa seperti melaksanakan pembinaan, bimbingan serta pendampingan, dan pemantauan yang lebih tertata dan saling berhubungan;
- 4) Memperkuat koordinasi, konsolidasi, dan sinergi terhadap pelaksanaan program yang menjadi prioritas pembangunan desa dari tingkat pemerintah pusat, daerah, kecamatan, hingga desa itu sendiri;

5) Membangun infrastruktur dan layanan fasilitas publik serta memberdayakan dan mengembangkan perekonomian yang ada di desa tersebut.

Dana desa diprioritaskan manfaatnya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana desa, melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasar prinsip. Segala bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, dalam pengelolaan dana desa masih ada kendala besar dalam pelaksanaannya seperti meningkatnya laporan masyarakat terkait dana desa yang disebabkan adanya dugaan tidak transparans, *mark-up*, fiktif, proyek tidak sesuai kebutuhan, tidak sesuai aturan dalam pengelolaan dana desa oleh oknum kepala desa sehingga menimbulkan permasalahan hingga ke ranah hukum.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa lainnya yang sampai dengan Rp. 200 Juta menggunakan sumber dana APBDes maka solusinya adalah dengan penggunaan aplikasi belanja sosialita, yang dalam aplikasi, alur processing berbeda dengan sumber dana APBDes.

2. Belum Optimalnya Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi

Di era globalisasi saat ini teknologi digital berkembang sangat pesat tidak terkecuali dunia pemerintahan banyak instansi sekarang yang berlomba-lomba memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, hal ini diharapkan agar pelayanan publik dapat lebih transparan dan memudahkan masyarakat terhubung dengan layanan pemerintah.

Adapun Sekretariat Daerah belum sepenuhnya menciptakan inovasi layanan publik berbasis teknologi informasi hal ini dikarenakan terbatasnya sarana prasarana penunjang layanan publik berbasis TI dan terbatasnya SDM dengan keahlian TI.

Sehubungan hal tersebut di atas Sekretariat Daerah Tahun 2020 telah mengajukan inovasi pelayanan publik berbasis TI sebagaimana tabel di bawah ini :



NO	JUDUL INOVASI	TAHUN PEMBUATAN	GAMBARAN UMUM	PENANGGUNG JAWAB
1.	Sosialitas (Sistem Order Semua Instansi Lingkup Tanah Laut)	2020	Sosialita adalah sistem order semua instansi lingkup Tanah Laut untuk pengadaan barang /jasa dengan nilai sampai dengan 50 juta. Metode pengadaan di aplikasi sosialita ini adalah metode pengadaan langsung yng menggunakan dana APBD. Konsep sosialita ini adalah <i>e-marketplace</i> , seperti halnya Shopee, Tokopedia atau Bukalapak. Sosialita ini berperan sebagai jembatan proses pengadaan barang/jasa antara SKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan penyedia yang diantaranya usaha menengah kecil lokal yang terdaftar dalam sosialita. Pada sosialita ini SKPD bisa juga mencari jasa perorangan seperti tukang cat, tukang perbaiki AC dan Lain-lain. Sosialita AMAN (Akuntabel, Mudah dan Nyaman).	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
2.	Dandaman Tarus (Bapandiran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serious Tapi Santai	2020	Kegiatan Dandaman Tarus lahir sebagai bentuk Inovasi kegiatan pembinaan pelaku pengadaan ketika pandemi Covid-19 terjadi. Pandemi yang membatasi kerumunan sosial dan menciptakan kebiasaan baru ini memaksa UKPBJ Kab. Tala untuk melaksanakan pembinaan pelaku pengadaan melalui <i>webinar online</i> . Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah supaya kegiatan pembinaan pelaku pengadaan tetap dilaksanakan dengan format kegiatan <i>webinar online</i> sehingga pemahaman pelaku pengadaan di Kabupaten Tanah Laut tetap bertambah dan semakin membaik. Dengan memperhatikan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan para pelaku pengadaan, UKPBJ Kabupaten Tanah Laut mengadakan kegiatan Dandaman Tarus ini secara kontinu.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
3.	Aplikasi SI-PERJAKA	2020	SIPERJAKA (Sistem Informasi Perjanjian Kinerja)	Bagian Organisasi

3. Fasilitas Kebijakan Pemerintah Daerah Bidang Perekonomian Dalam Rangka Revitalisasi Manajemen dan Operasional BUMD PT. Tanah Laut Manuntung

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Tanah Laut Manuntung Kabupaten Tanah Laut didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan untuk menciptakan lapangan kerja serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu untuk membentuk BUMD dalam bentuk Perseroan Terbatas yang berorientasi bisnis mandiri dan mempunyai daya saing yang tinggi baik tingkat nasional maupun internasional.

Perseroan Terbatas (PT) Tanah Laut Manuntung kemudian berubah bentuk menjadi PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda) melalui peraturan daerah kabupaten tanah laut Nomor 13 Tahun 2019. Latar belakang perubahan ini disebabkan karena

adanya perubahan komposisi pemegang saham dan modal serta perubahan penyebutan nama perusahaan. Adapun komposisi kepemilikan saham adalah Pemerintah Daerah sebesar 60% dan PT. Cahaya Marhan Naya sebesar 40%. Bidang usaha PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda) adalah pengelolaan kepelabuhan. PT. Tanah Laut Manuntung (Perseroda) dibentuk dengan tujuan :

- 1) melaksanakan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan sarana perekonomian daerah dibidang usaha kepelabuhanan memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan perekonomian daerah;
- 2) memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan
- 3) memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka, perusahaan menyusun strategi usaha dan program kegiatan dengan skala prioritas yaitu :

a. Prioritas jangka pendek (1-2 tahun pertama)

- 1) Penyediaan dan /atau pelayanan pengisian bahan bakar
- 2) Penyediaan dan / atau pelayanan pelayanan air bersih
- 3) Penyediaan dan / atau jasa lapangan penumpukan
- 4) Penyediaan dan / atau pelayanan jasa angkutan

b. Prioritas jangka menengah (3-5 tahun pertama)

- 1) Penyediaan dan /atau pelayanan storage tank untuk CPO untuk keperluan bongkar muat di pelabuhan.
- 2) Penyediaan jasa pengelolaan limbah CPO
- 3) Penyediaan jasa pembersihan tangki kapal untuk CPO.

c. Prioritas jangka Panjang (6-10 tahun kedepan)

- 1) Pengelolaan jalan akses menuju kepelabuhan
- 2) Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di Pelabuhan Pelaihari
- 3) Pengajuan konsesi pengelolaan pelabuhan pelaihari/ atau TUKS di pelabuhan pelaihari.

Isu Strategis terkait BUMD PT. Tala Manuntung

- 1) Belum optimalnya kinerja direksi PT. Tala Manuntung terutama dalam hal penyiapan administrasi perusahaan (Business Plan dan AD/ART) sehingga perusahaan tersebut belum bisa beroperasi.
- 2) Adanya regulasi baru terkait BUMD yaitu berlakunya PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD yang menggantikan UU nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah,

sehingga BUMD harus berbentuk *Perusahaan Umum Daerah; atau Perusahaan Perseroan Daerah*

- 3) PT. Tanah Laut Manuntung berbentu Perusahaan Perseroan Daerah sehingga Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Dalam rangka menjawab isu strategis tersebut dan menunjang kerangka bisnis BUMD PT. Tala Manuntung tersebut perlu dilakukan beberapa langkah Kebijakan dalam rangka percepatan oprasional BUMD PT. Tala Manuntung antara lain :

- 1) Melakukan konsultansi dengan tenaga ahli untuk penyesuaian hasil kajian investasi Pemerintah Daerah kepada PT. Tala Manuntung yang telah disusun sebelumnya.
- 2) Pengajuan Raperda Penyertaan Modal Pemerintah ke PT. Tala Manuntung sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada pihak legislatif sebagai modal awal.
- 3) Melakukan restrukturisasi manajemen PT. Tala Manuntung agar manajemen mempunyai daya saing.
- 4) Fasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelesaian administrasi perusahaan (pendaftran dan pengesahan di Ditjen AHU Kemenkumham).
- 5) Mempersiapkan kajian/analisa tambahan yang diperlukan dalam rangka oprasional PT. Tala Manuntung
- 6) Memfasilitasi penjajakan peluang kerjasama BUMD dengan para investor
- 7) Menkuatkan sistem monev oleh Tim Pembina BUMD

4. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah

Tuntutan penyelenggaraan reformasi birokrasi belum tuntas untuk terus dilaksanakan sebagai langkah telah melaksanakan sebagian agenda reformasi birokrasi, dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023.

Reformasi Birokrasi yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), sistem pengelolaan keuangan, manajemen

kepegawaian, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah belum optimal dilaksanakan, hal ini dikarenakan terbatasnya kompetensi SDM untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi tersebut.

Sampai saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah belum dilaksanakan secara optimal, ada beberapa komponen Area Perubahan Reformasi Birokrasi yang belum dilaksanakan, hal tersebut dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :

- 1) Manajemen Perubahan; sosialisasi dan internalisasi RB belum dilaksanakan secara terus menerus
- 2) Regulasi Kebijakan; Identifikasi dan analisis pemutkhiran pemetaan seluruh peraturan perundang undangan yang tidak harmonis/sinkron belum dilaksanakan secara berkelanjutan
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi; Tindak lanjut evaluasi penyesuaian beban kerja SKPD belum maksimal
- 4) Penataan Tata Laksana; Belum disusunnya Peta Proses Bisnis Setda, SOP belum sesuai dengan Peta Proses Bisnis
- 5) Penataan Sistem Manajemen SDM; Belum adanya rewiu terhadap standar kompetensi jabatan PNS Setda dan kinerja individu belum dilakukan monev secara berkala
- 6) Penguatan Akuntabilitas; Belum terlibatnya pimpinan secara menyeluruh dalam penyusunan dokumen perencanaan
- 7) Penguatan Pengawasan;
 - Penerapan SPIP belum optimal
 - Monev pembangunan Zona Integritas belum dilakukan secara berkala
 - Belum optimalnya penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat
- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 - Belum maksimalnya pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi
 - Belum maksimalnya penerapan budaya pelayanan prima

Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki terkait dengan upaya untuk

menjalankan program Reformasi Birokrasi Lingkup Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

NO.	AREA PERUBAHAN RB	HASIL EVALUASI
1.	Manajemen Perubahan	Melakukan Kegiatan Sosialisasi dan Internalisasi RB secara terus menerus/berkala pada seluruh aparatur pemerintah serta melakukan monitoring dan tindak lanjut realisasi Rencana Kerja/Rencana Aksi secara berkala.
2.	Regulasi Kebijakan	a. Melakukan Identifikasi dan analisis kembali untuk pemutakhiran pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron secara berkelanjutan; b. Revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah selesai dilakukan identifikasi.
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	a. Penataan kelembagaan berbasis kinerja; b. Evaluasi kelembagaan kesesuaian beban kerja SKPD; c. Memaksimalkan Tindak lanjut Evaluasi penyesuaian beban kerja SKPD
4.	Penataan Tatalaksana	a. Melakukan reviu terhadap SOP; b. Penyusunan Peta Proses Bisnis; c. Penyusunan SOP sesuai Peta Proses Bisnis; d. Melakukan Evaluasi Peta Proses dan Penerapan SOP; e. Melakukan pemuktahiran data dan informasi data.
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	a. Reviu secara terus menerus terkait Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai upaya perbaikan secara berkelanjutan; b. Reviu penghitungan kebutuhan pegawai dilakukan secara berkala sebagai upaya perbaikan secara berkelanjutan; c. Pengembangan Kompetensi seluruh aparatur secara berkelanjutan; d. Memaksimalkan Penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi; e. Reviu terhadap standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil; f. Pemanfaatan system informasi kepegawaian; g. Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala.
6.	Penguatan Akuntabilitas	a. Keterlibatan Pimpinan secara menyeluruh dalam penyusunan Dokumen perencanaan ; b. Pemenuhan dokumen data dukung capaian target kinerja SKPD; c. Komitmen pimpinan dan seluruh ASN dalam Implementasi SAKIP.
7.	Penguatan Pengawasan	a. Membangun komitmen anti Gratifikasi; b. Meningkatkan penerapan SPIP; c. Meningkatkan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat; d. Meningkatkan Penanganan Pelaporan Benturan Kepentingan; e. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala atas pembangunan Zona Integritas.
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	a. Melakukan monitoring dan evaluasi atas Pengembangan system informasi layanan masyarakat; b. Meningkatkan penerapan budaya pelayanan prima; c. Terus melakukan inovasi pelayanan yang lebih baik dan efektif; d. Meningkatkan dan menindak lanjuti nilai atas persepsi Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam rangka upaya peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat, maka diperlukan komitmen bersama antara Pimpinan dan jajarannya

untuk menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN.

Disamping itu, selain komitmen bersama, pimpinan sebagai *role model* dapat menjadi panutan bagi PNS di Lingkup Sekretariat Daerah dengan membangun Nilai Budaya bagi seluruh Aparatur Sekretariat Daerah dalam bentuk slogan Budaya yaitu:

- **SMART** dalam bekerja
- **SIMPATIK** dalam melayani
- **TUNTAS** dalam tugas

5. Belum Optimalnya Pelaksanaan Budaya Kerja Lingkup Sekretariat Daerah

Budaya kerja diartikan sebagai cara pandang seseorang dalam memberi makna terhadap “kerja”. Dengan demikian budaya kerja diartikan sebagai sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Pada prakteknya, budaya kerja diturunkan dari budaya organisasi. Budaya Kerja merupakan suatu komitmen organisasi, dalam upaya membangun sumber daya manusia, proses kerja, dan hasil kerja yang lebih baik.

Adapun penerapan nilai-nilai budaya kerja lingkup Sekretariat Daerah belum dapat maksimal dilaksanakan terkait pada **Pola Pikir dan Cara Kerja, Kepemimpinan dan Manajemen serta Perilaku Bekerja**, pada penilaian pelaksanaan budaya kerja tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah memperoleh nilai sebagai berikut :

NO	NAMA SKPD	KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN		POLA PIKIR DAN CARA KERJA		PERILAKU BEKERJA	
		TOTAL	KATEGORI	TOTAL	KATEGORI	TOTAL	KATEGORI
1.	SEKERTARIAT DAERAH	12,05	BB	13,02	KB	23,88	BB

1) Pada nilai-nilai dasar budaya kerja dalam pola pikir dan cara kerja Sekretariat Daerah memperoleh **Nilai 13,02** dengan kategori **KURANG BAGUS**, hal ini dikarenakan masih adanya :

- Pola pikir dan cara kerja yang masih bersifat terkotak kotak

- Pola pikir dan cara kerja yang hanya menjalankan wewenang
- Pola pikir dan cara kerja yang hanya berpikir jangka pendek/ sesaat
- Pola pikir dan cara kerja yang memerintah
- Pola pikir dan cara kerja yang bersifat melaksanakan rutinitas saja

Untuk ini budaya kerja Sekretariat Daerah terkait pola pikir dan cara kerja diperlukan sosialisasi, pelatihan dan penerapannya secara konsisten agar kedepannya terjadi perubahan pola pikir dan cara kerja :

- dari yang hanya menjalankan wewenang menjadi menjalankan peran
- dari yang bersifat terkotak-kotak menjadi sinergis
- dari yang hanya berpikir jangka pendek/sesaat menjadi berpikir jangka panjang/strategis
- dari yang bersifat memerintah menjadi bersifat melayani
- dari yang bersifat melaksanakan rutinitas menjadi bersifat melakukan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan

2) Untuk nilai-nilai Dasar Budaya Kerja dalam Kepemimpinan dan Manajemen Sekretariat Daerah memperoleh **Nilai 12,05** dengan kategori **BELUM BAGUS**, hal ini dikarenakan :

- Pengembangan SDM dalam bentuk pola pikir, sikap dan cara kerja belum dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan.
- Penerapan Nilai-nilai Budaya kerja dalam sistem kebijakan publik belum dilaksanakan secara berkelanjutan.
- Belum maksimalnya tindak lanjut atas hasil evaluasi terhadap kebijakan dan program kerja dan pelayanan publik.
- Belum sepenuhnya dipahami secara jelas visi misi organisasi oleh aparatur Sekretariat Daerah
- Penerapan standar kualitas pelayanan masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan masyarakat.
- Belum dilaksanakannya secara konsisten dialog dua arah antara pimpinan dan seluruh aparatur terkait evaluasi kinerja strategi kebijakan dan program kerja dalam pencapaian visi misi.

Budaya kerja Sekretariat Daerah terkait Kepemimpinan dan Manajemen diperlukan peningkatan nilai-nilai budaya kerja (sosialisasi) agar kedepannya terjadi perubahan :

- Pengembangan SDM dalam membentuk pola pikir, sikap dan cara kerja yang produktif dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan
 - Penerapan Nilai-nilai Budaya kerja dalam sistem kebijakan publik dilaksanakan secara berkelanjutan
 - adanya tindak lanjut atas hasil evaluasi terhadap kebijakan dan program kerja dan pelayanan publik.
 - Visi misi organisasi telah dipahami secara jelas oleh aparatur Sekeratriat Daerah
 - Penerapan standar kualitas pelayanan masyarakat sesuai dengan tuntutan masyarakat.
 - Pimpinan melaksanakan dialog dua arah secara konsisten dengan seluruh aparatur terkait evaluasi kinerja strategi kebijakan dan program kerja dalam pencapaian visi misi.
- 3) Nilai-nilai Dasar Budaya Kerja dalam Perilaku Bekerja Sekretariat Daerah memperoleh **Nilai 23,88** dengan kategori **BELUM BAGUS** hal ini dikarenakan :
- Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum sepenuhnya berdasarkan pada Nilai-nilai dasar budaya kerja antara lain terkait :
 1. Komitmen dan Konsistensi
 2. Wewenang dan tanggung jawab
 3. Keikhlasan dan kejujuran
 4. Integritas dan Profesionalisme
 5. Kreatifitas dan Kepekaan terhadap lingkungan tugas
 6. Kepemimpinan dan Keteladanan
 7. Rasionalitas dan Kecerdasan Emosi
 8. Disiplin dan Keteraturan Bekerja
 9. Keberanian dan Kearifan dalam mengambil keputusan dan manangani konflik
 10. Dedikasi dan loyalitas
 11. Semangat dan Motivasi
 12. Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 13. Keadilan dan Keterbukaan

Budaya kerja Sekretariat Daerah terkait Perilaku Bekerja diperlukan peningkatan (Sosialisasi) nilai-nilai budaya kerja agar kedepannya Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sepenuhnya berdasarkan pada Nilai-nilai dasar budaya kerja.

D. Produk Layanan sesuai Tupoksi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut bahwa kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf dan bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati, maka kegiatan yang dilaksanakan adalah membantu Bupati antara lain dalam melaksanakan pelayanan administratif melalui pelayanan yang dilaksanakan oleh Bagian-bagian lingkup Sekretariat Daerah.

Adapun jenis pelayanan sebagaimana maksud tersebut di atas adalah sebagai berikut :

NO	BAGIAN	JENIS LAYANAN
1.	Pelayanan Bagian PBJ	<ul style="list-style-type: none"> a) Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa ke SKPD b) Konsultasi Bagi Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa (PA/KPA, PPK dan PENYEDIA) c) Pendampingan Penggunaan Aplikasi SPSE Untuk Pelaku Pengadaan d) Pendampingan Pengimputan RUP Pada Aplikasi SIRUP e) Sosialisasi dan Pendampingan Kepada Penyedia Dalam Penggunaan Aplikasi SOSIALITA f) Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Pengadaan Untuk Peningkatan Wawasan Tentang Pengadaan Barang dan Jasa
2.	Pelayanan Bagian Kesejahteraan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> a) Pembinaan Terhadap Penerima Hibah b) Pemberian Insentif Bagi Guru TPA, Pondok Pesantren dan Penyuluh Agama c) Memfasilitasi Kegiatan Keagamaan Bagi Organisasi/kelembagaan Keagamaan, Hari Santri, dan Lain-lain d) Memfasilitasi Kegiatan Keagamaan Seperti Betamat Al- Qur'an e) Memfasilitasi Kegiatan UKS yang Berkerja Sama dengan Dinas Kesehatan.
3.	Pelayanan Bagian Tata Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> a) Pembinaan Kecamatan b) Fasilitas Kerja Sama Daerah c) Sosialisasi Penyusunan IKK LPPD d) Fasilitas Kegiatan Coffee Morning e) Fasilitas Kegiatan Forkopimda dan Instansi Vertikal
4.	Pelayanan Bagian Perekonomian Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> a) Memfasilitasi Pembiayaan Pelaku Usah Mikro (Gapura Koromah, Kredit Usaha Rakyat, dan UMI) b) Memfasilitasi Genta Sambung Rasa c) Pengendalian Distribusi Harga Bahan Pokok



		d) Konsultasi dan Pengendalian Distribusi Gas Bersubsidi 3Kg e) Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) f) Pembinaan BLUD g) Fasilitasi Promosi Daerah
5.	Pelayanan Bagian Humas dan Keprotokolan	a) Memfasilitasi Kegiatan Pimpinan b) Dokumentasi Kegiatan Pimpinan c) Memfasilitasi Pemberitaan Kegiatan Pimpinan d) Memfasilitasi Pembuatan Naskah Pidato
6.	Pelayanan Bagian Hukum	a) Memfasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah b) Memfasilitasi Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia c) Koreksi Drat MOU, NPHD dan Naskah Keperdataan Lainnya
7.	Pelayanan Bagian Umum	a) Memfasilitasi Penyewaan Gedung b) Memfasilitasi Penyewaan Bus c) Pelayanan Tamu Daerah
8.	Pelayanan Bagian Organisasi	a) Pembuatan ID Card b) Memfasilitasi Penyusunan laporan SAKIP c) Memfasilitasi Laporan Surpey Kepuasan Masyarakat d) Pendampingan Penyusunan Anjab dan ABK
9.	Pelayanan Bagian TU dan Keuangan	a) Fasilitasi Administrasi Kepegawaian PNS Sekretariat Daerah b) Fasilitasi Pendapatan/Gaji Pimpinan c) Fasilitasi Pembayaran Perjalanan Dinas ASN d) Pencatatan Surat Masuk dan Surat Keluar e) Fasilitasi Pendapatan/Gaji ASN Sekretariat Daerah

Diharapkan dengan layanan yang telah dilaksanakan oleh Bagian-bagian dapat memberikan pelayanan secara maksimal dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut baik bagi masyarakat, instansi vertikal maupun untuk layanan Perangkat Daerah.

E. Sistematika Penyajian

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, menggambarkan struktur organisasi tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, aspek strategis organisasi, produk dan layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan program/kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian sasaran strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan (ringkasan realisasi anggaran menurut program tahun 2019 dan 2020 serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program).

BAB IV PENUTUP

Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya serta Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pelayanan Publik dan penyelamatan UMKM.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Sekretariat Daerah bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Sekretariat Daerah.

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 sekaligus menjadi Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023 adalah:

Terwujudnya Tanah Laut yang “**BERINTERAKSI**”

- **Berkarya**
- **Inovasi**
- **Tertata**
- **Religius**
- **Aktual**
- **Sinergi**

Visi tersebut menunjukkan adanya keinginan yang kuat dari segenap unsur aparatur pemerintah di Lingkungan Sekretariat Daerah sebagai motor penggerak penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut.

Dengan demikian Sekretariat Daerah diharapkan mampu menampilkan dirinya sebagai motor penggerak, sebagai koordinator perumusan kebijakan pemerintah daerah, sehingga dapat bergerak cepat, penuh energi dan menghasilkan kebijakan yang akurat dan memberi daya dorong yang kuat bagi pembangunan daerah serta mampu memberi dorongan yang kuat bagi semua perangkat daerah agar senantiasa bertenaga, mampu menyesuaikan dengan perkembangan keadaan yang selalu bergerak maju menuju kemajuan masa depan.

Komitmen untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut. Sekretariat Daerah menetapkan misi sebagai gambaran aktivitas yang sudah seharusnya dilaksanakan. Dengan misi maka akan terlihat secara jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana cara memenuhinya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Oleh karena itu, sebuah Visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian Misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Tanah Laut dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

BERKARYA : Makna kata “berkarya” lebih tinggi daripada kata “bekerja”; yaitu merujuk pada hasil kerja. Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Secara makro, indikasi dari adanya karya dalam peningkatan taraf kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita, yang diiringi dengan laju inflasi di Daerah yang semakin terkendali; tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional yang semakin menurun; rasio kesenjangan kemiskinan serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang semakin menurun; pembangunan manusia yang semakin baik; dan meningkatnya daya saing daerah;

INOVASI : Inovasi adalah solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu,

inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan / ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka inovasi tersebut, maka percepatan pembangunan inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui penjangkaran dan penumbuhan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus kembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.

- TERTATA** : Secara umum, makna “tertata” adalah *tertib administrasi dan tertib substansi*. Artinya, aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.
- RELIGIUS** : Pada aspek religius ini, peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.
- AKTUAL** : Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- SINERGI** : Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi,

dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di tingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

B. Misi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut memegang Misi :

- 1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;**
- 2. Menciptakan Inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;**
- 3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);**
- 4. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.**

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan atau dihasilkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan strategis ini dapat menjadi sarana bagi Sekretariat daerah untuk secara cepat dan tepat mengetahui apa yang harus segera diwujudkan oleh segenap jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis Sekretaris Daerah kepada Bupati Tanah Laut atas capaian kinerja untuk indikator-indikator sebagaimana tertuang dalam dokumen penetapan kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga diharapkan dapat dijadikan sarana bagi Bagian-Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan pengukuran sejauh mana kegiatan yang dilakukan telah memberikan akses terhadap pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang telah ditetapkan.

Adapun rumusan Tujuan Strategis yang ingin dicapai sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah tahun 2018 s/d 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas layanan masyarakat dengan berbasis teknologi informasi dalam rangka mendukung pembangunan;
2. Meningkatkan kualitas layanan Sekretariat Daerah;
3. Meningkatkan Inovasi dalam Pelayanan Publik;
4. Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
5. Meningkatkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik;
6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan umum dan pengembangan kerjasama;
7. Meningkatkan kualitas peningkatan kapasitas dan evaluasi kelembagaan, analisis jabatan, tatalaksana, pelayanan publik, pemberdayaan aparatur dan akuntabilitas kinerja;
8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Bidang Tata Usaha, Kepegawaian, Perencanaan, Program dan Keuangan;
9. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pengawasan pengadaan barang/jasa;
10. Meningkatkan penyelenggaraan pembentukan produk hukum, telaahan hukum dan kajian hukum, bantuan hukum dan HAM, dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan hukum;
11. Meningkatkan kinerja pembinaan, pengawasan dan mengevaluasi publikasi dan pemberitaan pimpinan, pengelolaan informasi dan mengatur keprotokolan pimpinan dan tamu pimpinan;
12. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan bidang urusan umum dan perlengkapan, penyelenggaraan rumah tangga dan penataan asset;

13. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bidang sosial, kebudayaan, pendidikan, agama, kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat;
14. Meningkatkan sinergitas pengelolaan perekonomian dan investasi;
15. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang fasilitasi pengembangan potensi perekonomian, Bina BUMD dan monitoring evaluasi perekonomian pembangunan.

Sasaran strategis yang telah dirumuskan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra sebanyak 27 (dua puluh tujuh) sasaran adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA					KET
						2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya	Meningkatkan kualitas layanan masyarakat dengan berbasis teknologi informasi dalam rangka mendukung pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat	BAIK (85)	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80	81	81.5	82	Sekda dan Bagian Tata Usaha dan Keuangan
	Meningkatkan kualitas layanan Sekretariat Daerah	Persentase kualitas layanan Sekretariat Daerah	100%	Meningkatnya kualitas pelaksanaan layanan Sekretariat Daerah	Persentase Bagian dengan nilai IKM Minimal Baik	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian TU dan Keuangan
Menciptakan Inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif	Meningkatnya Inovasi dalam Pelayanan Publik	Persentase peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik	100%	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	1	1	1	1	1	Sekda dan Bagian Organisasi



MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA					KET
						2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	BAIK (75)	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	ST 3,060	ST 3,075	ST 3,100	ST 3,125	ST 3,150	Sekda dan Bagian Tata Pemerintahan
				Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	75	80	85	90	100	Sekda dan Bagian Organisasi
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	85	90	95	100	100	
	Meningkatkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	BB (85)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	80	85	90	95	95	Sekda dan Bagian Tata Usaha dan Keuangan
					Nilai ZI Sekretariat Daerah	80	82	83	84	85	
					Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	80	82	82	83	85	
					Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7	
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan umum, dan pengembangan kerjasama	Persentase kualitas penyelenggaraan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan umum, dan pengembangan kerjasama	100%	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Tata Pemerintahan
					Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Tata Pemerintahan
					Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Tata Pemerintahan
Persentase fasilitasi pelaksanaan pilkada (Presiden/Gubernur/Bupati)					100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Tata Pemerintahan	



MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA					KET
						2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Tata Pemerintahan
				Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga	Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Tata Pemerintahan
	Meningkatkan kualitas peningkatan kapasitas dan evaluasi kelembagaan, analisis jabatan, tatalaksana, pelayanan publik, pemberdayaan aparatur dan akuntabilitas kinerja	Persentase kualitas peningkatan kapasitas dan evaluasi kelembagaan, analisis jabatan, tatalaksana, pelayanan publik, pemberdayaan aparatur dan akuntabilitas kinerja	100%	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	65%	70%	80%	90%	100%	Bagian Organisasi
				Meningkatnya Nilai Area Perubahan RB SKPD	Nilai Komponen Area Perubahan RB SKPD	65	70	80	90	100	Bagian Organisasi
					Persentase SKPD dengan budaya kerja baik	10%	15%	20%	25%	30%	Bagian Organisasi
				Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi
	Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur(SOP)	100%	100%		100%	100%	100%	Bagian Organisasi			



MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA					KET
						2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi
					Persentase Analisa dan evauasi jabatan sesuai proporsinya	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Bidang Tata Usaha, Kepegawaian, Perencanaan Program dan Keuangan	Predikat Akuntabilitas Kenerja Bagian Tata Usaha dan Keuangan	BB	Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Peningkatan komponen Area Perubahan RB Sekretariat Daerah	80	85	90	95	95	Bagian Tata Usaha dan Keuangan
					Peningkatan komponen Area Perubahan ZI Sekretariat Daerah	80	82	83	84	85	Bagian Tata Usaha dan Keuangan
					Peningkatan komponen SAKIP Sekretariat Daerah	80	82	82	83	85	Bagian Tata Usaha dan Keuangan
					Peningkatan unsur SPIP Sekretariat Daerah	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7	Bagian Tata Usaha dan Keuangan
					Meningkatnya layanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Tata Usaha dan Keuangan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pengawasan pengadaan barang/jasa	Persentase kualitas penyelenggaraan dan pengawasan pengadaan barang/jasa	100%	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian PBJ	



MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA					KET
						2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	-	65%	75%	85%	100%	Bagian PBJ
	Meningkatkan penyelenggaraan pembentukan produk hukum, telaahan hukum dan kajian hukum, bantuan hukum dan HAM, dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan hukum	Persentase penyelenggaraan pembentukan produk hukum, telaahan hukum dan kajian hukum, bantuan hukum dan HAM, dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan hukum	100%	Meningkatnya Pelayanan terhadap stakeholder dalam hal produk hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Produk hukum Daeah/lainnya yang harmonis	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Hukum
			Tingkat Penanganan masalah hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Persentase masalah hukum yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Hukum
			Peningkatan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Hasil Penilaian atas Pemenuhan HAM	Nilai 75	Nilai 75	Nilai 75	Nilai 75	Nilai 76		Bagian Hukum
			Produk Hukum Daerah yang terdokumentasi dan di publikasikan	Persentase Produk Hukum Daerah yang terdokumentasi dan di publikasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Hukum
	Meningkatkan kinerja pembinaan, pengawasan dan mengevaluasi publikasi dan pemberitaan pimpinan,	Persentase kinerja pembinaan, pengawasan dan mengevaluasi publikasi dan pemberitaan pimpinan,	100%	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah, kehumasan dan keprotokolan	Persentase penyebaran informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Humas dan Keprotokolan



MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA					KET
						2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	pengelolaan informasi dan mengatur keprotokolan pimpinan dan tamu pimpinan	pengelolaan informasi dan mengatur keprotokolan pimpinan dan tamu pimpinan			Persentase kegiatan kehumasan KDH/WKDH/SKPD/ Masyarakat yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Humas dan Keprotokolan
					Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu daerah yang terlayani keprokolannya	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Humas dan Keprotokolan
					Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Humas dan Keprotokolan
Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan bidang urusan umum dan perlengkapan, penyelenggaraan rumah tangga dan penataan asset	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda	Baik	Baik	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/ SKPD/ Masyarakat dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Umum
				Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda terkait sarana prasarana/ aset milik Setda dikelola dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Umum
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bidang sosial, kebudayaan, pendidikan, agama, kemasyarakatan dan	Persentase kualitas penyelenggaraan bidang sosial, kebudayaan, pendidikan, agama, kemasyarakatan dan kesejahteraan	100%	100%	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Persentase peningkatan lembaga keagamaan	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
				Meningkatnya peran Organisasi/lembaga pendidikan keagamaan dan kesejahteraan sosial	Persentase layanan kesejahteraan sosial bagi lembaga pendidikan keagamaan	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat



MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA					KET
						2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	kesejahteraan rakyat	rakyat sesuai ketentuan		Meningkatnya peran Organisasi/Lembaga Keagamaan/OPD bidang pemuda dan olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan sinergitas pengelolaan perekonomian dan investasi	Persentase pengelolaan kebijakan perekonomian dan pembangunan	100%	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	100%	100%	100%	100%	100%	Sekda dan Bagian Perekonomian Pembangunan
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang fasilitasi pengembangan potensi perekonomian, Bina BUMD dan monitoring evaluasi perekonomian pembangunan	Persentase kualitas penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang fasilitasi pengembangan potensi perekonomian, Bina BUMD dan monitoring evaluasi perekonomian pembangunan	100%	Meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Presentase fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Perekonomian Pembangunan
				Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja positif	60%	75%	75%	100%	100%	Bagian Perekonomian Pembangunan
				Meningkatnya kualitas manajemen administrasi pembangunan yang proporsional sesuai dengan kewenangan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan	60%	75%	75%	100%	100%	Bagian Perekonomian Pembangunan
				Meningkatnya hasil promosi potensi Daerah	Persentase peningkatan investasi	80%	50%	75%	100%	100%	Bagian Perekonomian Pembangunan

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang digunakan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Selain itu, indikator kinerja utama digunakan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Sekretaris Daerah

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Rumus	Penanggung jawab/ Sumber Data
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM Sekretariat Daerah	Sekda dan Bagian Tata Usaha dan Keuangan
2.	Inovasi Publik yang diciptakan SKPD	Jumlah Inovasi SKPD yang didaftarkan	Jumlah Inovasi SKPD yang didaftarkan dalam kompetisi Inovasi	Sekretaris Daerah dan Kabag Organisasi
3.1	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	Skor yang diperoleh dari hasil penilaian LPPD oleh Kemendagri	Sekretaris Daerah dan Kabag Tata Pemerintahan
3.2	Meningkatkannya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Presentase SKPD dengan nilai RB minimal B	$\frac{\text{Jumlah SKPD dengan Nilai RB Minimal B}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	Sekda dan Bagian Organisasi
3.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Presentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	$\frac{\sum \text{SKPD dengan Nilai SAKIP Minimal BB}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	Sekretaris Daerah dan Kabag Organisasi
3.4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	Nilai yang diperoleh dari penilaian RB oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Sekda dan Bagian Tata Usaha dan Keuangan
		Nilai ZI Sekretariat Daerah	Nilai yang diperoleh dari penilaian ZI oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Sekda dan Bagian Tata Usaha dan Keuangan
		Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai yang diperoleh dari penilaian SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut	Sekda dan Bagian Tata Usaha dan Keuangan
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	Nilai yang diperoleh dari penilaian SPIP oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut	Sekda dan Bagian Tata Usaha dan Keuangan
4.	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	$\frac{\sum \text{kebijakan perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{kebijakan perekonomian dan}} \times 100\%$	Sekretaris Daerah dan Kabag Perekonomian Pembangunan

			pembangunan yang dihasilkan	
--	--	--	-----------------------------	--

Sumber: Bagian Tata Usaha & Keuangan Setda Kabupaten Tanah Laut

IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk Eselon II, Eselon III dan Eselon IV (data terlampir)

E. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020

Perjanjian Kinerja adalah lembaga/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah. Untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudkan komitmen penerimaan amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 yang telah disepakati baik oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV dan Pelaksana Lingkup Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

Dokumen Perjanjian Kinerja Pejabat Lingkup Sekretariat Daerah Tahun 2020 Terlampir

F. Program dan Kegiatan

Sehubungan dengan adanya pandemi Covid -19 di Indonesia, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 atau *Refocusing* di Kabupaten Tanah Laut dengan menginstruksikan antara lain :

- 1) Melakukan percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*) untuk program kegiatan 2020.
- 2) Melakukan Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja SKPD.
- 3) Melakukan Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja SKPD.

Terkait Instruksi Bupati Tanah Laut tersebut di atas Sekretariat Daerah telah melakukan rasionalisasi anggaran Belanja Langsung sebesar **48,76%**.

Dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis maka untuk mencapai sasaran tersebut memerlukan dukungan anggaran yang dirincikan dalam program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel Anggaran APBD Murni, APBD *Refocusing* dan APBD Perubahan
Tahun Anggaran 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI	ANGGARAN APBD <i>REFOCUSING</i>	ANGGARAN APBD PERUBAHAN	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama antar Pemerintahan	1.165.623.700	939.164.200	1.613.792.200	55,76	Tata Pemerintahan
1a	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Pengamanan Batas Daerah	118.421.700	68.056.700	115.374.700	83,40	
1b	Kegiatan Pembinaan dan Tata Kelola Pemerintahan Umum	169.852.100	107.992.600	154.787.600	51,19	
1c	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama	877.349.900	763.114.900	1.343.629.900	51,02	
2	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	217.287.800	82.380.000	212.152.000	74,07	
2a	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Budaya Bangsa	217.287.800	82.380.000	212.152.000	74,07	
3	Program Pembinaan, Pengembangan, Penataan Kelembagaan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan	807.166.540	409.816.840	409.816.840	48,39	Organisasi
3a	Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja	169.924.800	107.445.800	107.445.800	30,13	
3b	Kegiatan Pembuatan ID Card Pegawai	129.136.600	37.720.800	37.720.800	99,65	
3c	Kegiatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	117.210.560	56.090.560	56.090.560	38,88	



3d	Kegiatan Pengembangan dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	69.293.020	48.339.020	48.339.020	70,60	
3e	Kegiatan Pengembangan dan Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan	246.646.900	121.086.000	121.086.000	51,42	
3f	Kegiatan Pengembangan dan Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	74.954.660	39.134.660	39.134.660	25,97	
4	Program Fasilitas Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan HAM, Dokumentasi Hukum	1.271.198.000	635.589.200	869.806.500	90,30	Hukum
4a	Kegiatan Fasilitas Produk Hukum	392.329.800	295.479.800	366.442.000	93,11	
4b	Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum dan HAM Pemerintah Daerah	439.528.700	234.539.600	313.479.600	89,65	
4c	Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum	439.339.500	105.569.800	189.884.900	85,97	
5	Program Pembinaan, Pengelolaan, Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	1.535.120.780	518.109.060	736.109.060	76,62	Barang/Jasa
5a	Kegiatan Pembinaan, Pengelolaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	206.698.000	189.948.000	311.531.840	93,82	
5b	Kegiatan Pembinaan dan Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	940.588.080	142.923.020	180.954.020	45,31	
5c	Kegiatan Pembinaan Kompetensi dan Evaluasi Pelaporan	387.834.700	185.238.040	243.623.200	77,90	
6	Program Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitas Perekonomian Pembangunan Daerah	793.405.120	409.517.620	579.517.620	85,55	Perekonomian Pembangunan
6a	Kegiatan Pembinaan, Fasilitas dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah	292.269.700	111.669.700	198.751.200	85,55	
6b	Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitas Usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	283.047.460	145.264.960	193.439.060	73,88	
6c	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perekonomian Pembangunan	218.087.960	152.582.960	187.327.360	97,39	
7	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Rakyat	22.661.024.850	10.348.030.300	19.774.259.800	93,97	Kesejahteraan Rakyat



7a	Kegiatan Pembinaan, Pengembangan, Pemberdayaa Sosail dan Kebudayaan	250.000.000	131.869.000	131.869.000	61,76	
7b	Kegiatan Pembinaan, Pengembangan, Pemberdayaan Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	18.629.024.850	9.413.100.700	18.485.415.200	99,35	
7c	Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Agama	3.782.000.000	803.060.600	1.156.975.600	11,77	
8	Program Kerjasama Informasi dan Mass Media	2.603.640.000	1.222.309.300	2.392.390.200	97,35	Humas dan Keprotokolan
8a	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	2.603.640.000	1.222.309.300	2.392.390.200	97,35	
9	Program Pembinaan, Pengembangan, Fasilitasi Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan	826.890.000	496.572.800	1.037.567.900	79,38	
9a	Kegiatan Pengembangan Hubungan Masyarakat	321.817.600	196.393.400	586.311.700	79,60	
9b	Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Permanen Pembangunan	125.000.000	0	71.183.800	0,00	
9c	Fasilitasi dan Pelayanan Protokoler Pemerintah Daerah	380.072.400	300.179.400	380.072.400	93,89	
10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.546.688.660	2.176.514.460	3.479.413.560	65,00	Umum
10a	Kegiatan Penyediaan Jasa, Bahan, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	3.427.188.660	2.116.889.460	3.356.913.560	64,02	
10c	Kegiatan Penyusunan Tabulasi Aset Daerah	119.500.000	59.625.000	119.500.000	92,57	
11	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	7.185.813.818	4.853.182.218	9.830.296.625	80,44	
11a	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prarana Perkantoran	386.091.000	290.413.400	2.625.542.724	87,22	
11b	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	3.440.087.818	2.757.897.818	3.796.123.591	73,24	
11c	Rehabilitas sedang/berat gedung kantor	0	655.481.00	655.481.000	98,33	
11d	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	2.076.898.000	1.240.064.000	1.240.064.000	84,34	
11e	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	454.372.000	14.722.000	690.098.600	83,17	



11f	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Jabatan/Dinas	383.645.000	323.365.000	493.665.000	56,63	
11f	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas	444.720.000	226.720.000	329.321.710	89,05	
12	Program Fasilitas Kegiatan dan Kebijakan KDH dan WKDH	4.210.680.000	2.077.760.000	2.221.000.000	79,19	
12a	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan dan Jasa Bagi KDH/WKDH	75.000.000	59.000.000	75.000.000	98,27	
12b	Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi KDH/WKDH	2.798.000.000	890.000.000	890.000.000	73,29	
12c	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Rumah Jabatan	1.137.680.000	1.028.760.000	1.056.000.000	96,63	
12d	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH	200.000.000	100.000.000	200.000.000	6,20	
13	Program Pelayanan Administasi Perkantoran	8.662.303.014	4.407.131.423	5.190.124.423	94,07	Tata Usaha dan Keuangan
13a	Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi	5.209.173.814	1.526.352.223	1.802.745.223	99,16	
13b	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	3.387.379.200	2.880.779.200	3.387.379.200	91,37	
13c	Kegiatan Fasilitas Kegiatan Staf Ahli Bupati	65.750.000	0	0	0,00	
14	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	281.250.000	0	20.000.000	0,00	
14	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	75.000.000	0	20.000.000	0,00	
14	Kegiatan Penagdaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	206.250.000	0	0	0,00	
15	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	78.162.300	39.634.100	61.521.100	25,47	
15a	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD	45.800.000	30.760.000	40.550.000	19,15	
15b	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	13.312.300	5.274.100	10.171.100	45,35	
15c	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	19.050.000	3.600.000	10.800.000	30,49	
JUMLAH		48.427.767.828	46385.77.047	41.622.508.206	85,95	Sekretariat Daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggung jawaban selama Tahun 2020 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas sasaran - sasaran kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2020. Selain itu, realisasi keuangan yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2020.

Sehubungan dengan adanya pandemik *Covid-19*, pada tahun 2020 anggaran untuk mendukung Tugas Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 55.846.254.582,- dilakukan *refocusing* terhadap anggaran program dan kegiatan sebesar Rp 27.230.543.061 atau sebesar 48.76%, meskipun anggaran telah di *refocusing* tetapi capaian kinerja pada tahun 2020 tetap mencapai target indikator sasaran.

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD

Sasaran RPJMD akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan instansi Pemerintah. Dimana Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2020 Sekretariat Daerah mengampu Misi ke-3 (tiga) RPJMD yaitu “**Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)**” sebagai berikut :

Tabel Sasaran RPJMD Sekretariat Daerah Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI	CAPAIAN	Penanggung jawab/ Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
MISI 3 : Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)						
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Reformasi Pelayanan Publik	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	70%	55%	78,57%	Sekretaris Daerah dan Kabag Organisasi
		Persentase SKPD dengan Nilai SAKIP Minimal BB	95%	92,5%	97,37%	Sekretaris Daerah dan Kabag Organisasi

SASARAN Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Reformasi Pelayanan Publik

Indikator 1 : Persentase SKPD dengan Nilai RB Minimal BB

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI	CAPAIAN	Penanggung jawab/ Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
MISI 3 : Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)						
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Reformasi Pelayanan Publik	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	70%	55%	78,57%	Sekretaris Daerah dan Kabag Organisasi

Reformasi birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur Negara.

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dengan tiga sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu:

- 1) Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
- 2) Birokrasi yang Kapabel;
- 3) Pelayanan Publik yang Prima; dan
- 4) Pemerintah Kabupaten Tanah laut telah menerapkan Reformasi.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan berdasarkan *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023. Reformasi Birokrasi (RB) telah dilaksanakan terhadap 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yaitu manajemen perubahan, peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penguatan tatalaksana, penguatan sistem manajemen SDM ASN, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan *quick wins*.

Atas penerapan Reformasi Birokrasi tersebut maka Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada seluruh SKPD sebanyak 40 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan 1

(satu) UPTD RSUD. H. Boedjasin Pelaihari. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2020

Kategori	Jumlah SKPD	Persentase	Interpretasi
AA	4	10	Istimewa
A	4	10	Sangat Baik
BB	6	15	Baik
B	8	20	Cukup Baik
CC	3	7,5	Cukup
C	6	15	Buruk
D	9	22,5	Sangat Buruk

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 22 SKPD dengan nilai RB minimal Cukup Baik atau sebesar 55% dari seluruh SKPD (40 SKPD). Di dalam RPJMD 2018-2023 Kabupaten Tanah Laut telah ditargetkan untuk Indeks Reformasi Birokrasi adalah 68 (Cukup Baik). Ini merupakan Tahun ke-3 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dilakukan evaluasi oleh KemenpanRB terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Untuk Hasil evaluasi tahun 2020 sampai saat ini belum disampaikan oleh KemenpanRB kepada seluruh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se Indonesia. Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019 adalah 53,48 dengan kategori Cukup.

Indikator 2 : Persentase SKPD dengan Nilai SAKIP Minimal BB

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI	CAPAIAN	Penanggung jawab/ Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
MISI 3 : Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)						
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Reformasi Pelayanan Publik	Persentase SKPD dengan Nilai SAKIP Minimal BB	95%	92,5%	97,37%	Sekretaris Daerah dan Kabag Organisasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah berupaya maksimal dari tahun ke tahun dalam menerapkan SAKIP. Ini dapat dilihat dari terus meningkatnya SKPD dengan hasil evaluasi SAKIP minimal BB. Evaluasi SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

Berikut disajikan hasil evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2020 oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Katagori	Jumlah SKPD	Persentase	Interprestasi
A	7	17,5	Memuaskan
BB	30	75	Sangat Baik
B	3	7,5	Baik

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di tahun 2020 terdapat 37 SKPD atau sebesar 92,5% dengan nilai SAKIP minimal BB, 3 SKPD dengan nilai SAKIP Baik dan tidak ada lagi SKPD yang memiliki nilai SAKIP dibawah Baik.

Di dalam RPJMD 2018-2023 Kabupaten Tanah Laut telah ditargetkan untuk NILAI SAKIP Kabupaten Tanah Laut tahun 2020 adalah BB (74), ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar bagi seluruh SKPD terutama bagi Tim SAKIP Kabupaten untuk merealisasikannya. Dengan melihat hasil evaluasi SAKIP di atas semoga saja nilai SAKIP Kabupaten dapat terealisasi sesuai target. Sampai saat ini hasil evaluasi SAKIP dari KemenpanRB belum disampaikan oleh KemenpanRB kepada seluruh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se Indonesia.

Indikator ini juga merupakan indikator Sekretaris Daerah, dimana Sekretariat Daerah merupakan fasilitator pelaksanaan SAKIP Kabupaten dan Sekretariat Tim SAKIP Kabupaten.

2.1 Eselon II (Sekretaris Daerah)

Dari target Indikator Kinerja Utama Eselon II (Sekretaris Daerah) yang telah ditetapkan **Sasaran RPJMD**, maka uraian dan analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dapat di lihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	82.33	102,9%
2	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	1	5	500%
3.1	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	ST 3,075	<i>Masih dalam tahap awal evaluasi</i>	<i>Masih dalam tahap awal evaluasi</i>
3.2	Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	80%	92,5%	97,37%
3.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	90	92,5	102,77%
3.4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	85	91.24	107.3%
		Nilai ZI Sekretariat Daerah	82	84.64	103.2%
		Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	82	84.35	102.8%
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3.5	3.77	107.7%
4	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	100%	100%	100%

SASARAN 1 Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	82.33	102,9%

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan

untuk meningkatkan pelayanan yang berkeadilan, kreadibel, transparan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Adapun sasaran survey ini bertujuan untuk :

- 1) Mendorong penyelenggara layanan untuk meningkatkan kualitas layanan;
- 2) Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah;
- 3) Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di lingkungan Sekretraiat Daerah dalam upaya meningkatkan kinerja pelayan publik;
- 4) Mengetahui dan mempelajari tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan untuk meningkakan kualitas pelayanan publik selanjutnya;
- 5) Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah.

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas unsur - unsur pelayanan diperoleh hasil skor Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah Semester I dengan Nilai 81.99 dan pada Semester II dengan nilai 82.33, dengan angka Indeks tersebut maka kinerja pelayanan pada Bagian-bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut secara umum berada dalam mutu pelayanan B dengan kategori **BAIK**. Dan diharapkan dengan peningkatan indeks kepuasan masyarakat tersebut kinerja pelayanan Sekretariat Daerah kedepannya lebih maksimal lagi.

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NILAI SKM SEKRETARIAT DERAH TAHUN 2019		NILAI SKM SEKRETARIAT DERAH TAHUN 2020	
SEMESTER I	SEMESTER I	SEMESTER I	SEMESTER II
81.84	81.87	81.99	82.33

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Perilaku petugas pelayanan Bagian kurang memahami makna dari *Service Excellent*
- Minimnya wahana informasi tentang persyaratan pelayanan publik
- Kurang memadainya sarana dan prasarana pelayanan publik

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- memperbaiki perilaku petugas layanan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan sehingga dapat lebih memperbaiki sikap dan perilaku dan bisa mengendalikan emosi terhadap publik.
- Memberikan informasi secara jelas kepada publik tentang persyaratan pelayanan publik dengan menambah jumlah wahana informasi dan menempatkannya ditempat yang strategis.
- Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan kualitas sarana prasarana dan prosedur, sistem dan mekanisme pelayanan publik.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Komitmen Pimpinan terhadap mekanisme pelayanan
- Pimpinan sebagai *role model*
- Menanamkan nilai budaya **SMART** dalam berkerja, **SIMPATIK** dalam melayani dan **TUNTAS** dalam tugas
- Kualitas penyelenggara pelayanan publik khususnya pada aspek sikap perilaku akan terus ditingkatkan lebih baik sehingga dapat diterima oleh masyarakat.
- Melakukan survey dengan responden dari Lembaga Independen

SASARAN 2 Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD

Indikator : Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
1	2	3	4	5	6
2	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	1	5	500%

Dari jumlah proposal inovasi pelayanan publik SKPD yang didaftarkan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) ada 5 inovasi dan yang terealisasi 5 inovasi padahal sebenarnya ada beberapa inovasi pelayanan publik dari unit pelayanan SKPD yang mau diikutsertakan akan tetapi karena inovasi tersebut belum berjalan 1 tahun maka tidak bisa diikutsertakan dan juga karena keterbatasan waktu yang diberikan oleh pihak Kemenpan dimana surat yang datang terkadang tenggang waktunya sudah hampir habis dengan proses penginputan pada aplikasi Sinovik sehingga SKPD tidak sempat lagi membuat proposal untuk dimasukkan dalam aplikasi untuk diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Top 99 maupun Top 40 se Indonesia.

Untuk mengatasi hal tersebut kedepannya Sekretaris Daerah akan membuat surat kepada SKPD untuk dapat mempersiapkan proposal inovasi pelayanan publik yang ada di SKPD sehingga pada saat Kemenpan berkirim surat ke daerah dan telah membuka aplikasi untuk Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, proposal tersebut telah selesai dibuat dan dikoreksi sehingga tinggal diinput pada aplikasi Sinovik dan tepat waktu.

Berikut ini disajikan Inovasi pada Sekretariat Daerah untuk Tahun 2019 dan Tahun 2020, sebagai berikut:

NO	JUDUL INOVASI 2019	GAMBARAN UMUM 2019	JUDUL INOVASI 2020	GAMBARAN UMUM 2020	BAGIAN
1	Bidding Corner dan Display Pengunjung	Sebuah tempat atau sudut ruang yang dapat digunakan oleh semua pengunjung dalam mengakses layanan elektronik PBJ pada saat jam kerja, tempat ini disediakan komputer yang telah terkoneksi jaringan internet dan disediakan <i>helpdes</i> sebagai petugas pendamping dan konsumsi tamu lokasi berada di ruang LPSE dan UKPBJ	1 Sosialita (Sistem Order Semua Instansi Lingkup Tanah Laut)	<p>Sosialita adalah sistem order semua instansi lingkup Tanah laut untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai ampai dengan 50 juta.</p> <p>Metode pengadaan di aplikasi sosialita ini adalah metode pengadaan langsung yang menggunakan dana APBD.</p> <p>Konsep sosialita ini adalah e-marketplace, seperti halnya Shopee, Tokopedia atau Bukalapak.</p> <p>Sosialita ini berperan sebagai jembatan proses pengadaan barang/jasa antara SKPD Pemerintah Kab. Tala dengan penyedia yang diantaranya usaha menengah kecil lokal yang terdaftar dalam sosialita. Pada sosialita ini SKPD bisa juga mencari jasa perorangan seperti tukang cat, tukang perbaiki AC dan lain-lain.</p> <p>Sosialita AMAN (Akuntabel, Mudah dan Nyaman)</p>	Pengadaan Barang dan Jasa
2	Ruang Konsultasi	Ruangan yang disediakan bagi pengunjung atau pengguna layanan PBJ untuk dapat berkonsultasi dengan personil pengelola UKPBJ secara khusus	2 Dandaman Tarus (Bepandiran Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Serious Tapi Santai)	Dandaman Tarus lahir sebagai bentuk inovasi kegiatan pembinaan pelaku pengadaan ketika pandemi Covid-19 terjadi. Pandemi yang membatasi kerumunan sosial dan menciptakan kebiasaan baru ini memaksa UKPBJ Kabupaten Tala untuk melaksanakan pembinaan pelaku pengadaan melalui <i>webinar online</i> . Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah supaya kegiatan pembinaan pelaku pengadaan tetap dilaksanakan dengan format kegiatan <i>webinar online</i> sehingga pemahaman pelaku pengadaan di Kabupaten Tala tetap bertambah dan semakin membaik. dengan memperhatikan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan para pelaku pengadaan, UKPBJ Kabupaten Tanah Laut mengadakan kegiatan Dandaman Tarus ini secara kontinu.	Pengadaan Barang dan Jasa

			3	SIPERJAKA (Sistem Informasi Perjanjian Kinerja)	Aplikasi tentang Perjanjian Kinerja	Organisasi
3	Ruang Training Center Berteknologi Client Computer	Ruang yang dikhususkan untuk memberikan pelatihan pada pelaku pengadaan barang atau jasa secara elektronik yang menerapkan teknologi komputer <i>client</i> , implementasi teknologi ini terbukti <i>Lowcost</i> dan dapat diterapkan dalam konsep perkantoran modern.				Pengadaan Barang dan Jasa
4	Pendataan dan Pendistribusian Barang Habis Pakai Berbasis Komputer	Pendataan dan pendistribusian barang habis pakai berbasis komputer adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mengelola persediaan barang habis pakai yakni untuk melakukan pencatatan jenis satuan jumlah harga permintaan dan pemakaian serta pelaporannya sistem ini dibuat dengan dasar <i>Microsoft office Excel</i> sehingga sangat mudah dalam penggunaannya				Umum
5	Jendela Informasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (JEDAH)	Sistem informasi pembentukan produk hukum daerah dengan integrasi dengan website jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH				Hukum
6	Penyampaian Informasi Harga Pokok Hasil Survey pada Pasar Induk Pelaihari melalui Siaran Radio dan Media Sosial Kominfo	Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh sekretariat tim pengendalian inflasi daerah kabupaten tanah laut untuk menyampaikan barang pangan pokok hasil survei dinas teknis di pasar induk pare hari pengumuman harga pangan ini di-update setiap seminggu sekali hal ini dilakukan karena kabupaten tanah laut masih belum memiliki sarana dan prasarana untuk membuat pusat informasi harga pangan strategis sebagai media informasi kepada konsumen tentang perkembangan harga pokok salah satu tujuannya adalah untuk stabilitas harga pangan pada 2020 penyampaian harga pangan ini akan ditambah melalui media cetak yang bekerjasama dengan bagian humas dan protokol				Perekonomian Pembangunan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berkomitmen akan terus meningkatkan inovasi-inovasi di segala sendi kehidupan terutama inovasi dalam hal pelayanan publik. Hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- Timbulnya kesadaran dari ASN untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat.
- Menciptakan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.
- Mempersingkat panjangnya birokrasi terutama dalam hal pelayanan publik

Rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan yaitu:

- melakukan sosialisasi tentang inovasi dan mengajak SKPD berlomba-lomba melakukan inovasi untuk melakukan layanan pemerintahan yang cepat dan adaptif agar mampu memenuhi tuntutan masyarakat.
- melakukan pembinaan inovasi dalam kompetisi sehingga akan mendorong SKPD untuk memunculkan inovasinya lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar pelayanan yang diberikan lebih baik dan berkualitas.

SASARAN 3.1 Meningkatnya Skor LPPD Kabupaten

Indikator : Skor LPPD Kabupaten

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
1	2	3	4	5	6
3.1	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	ST 3,075	Masih dalam tahap awal evaluasi	Masih dalam tahap awal evaluasi

Kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berupa pelaksanaan rapat koordinasi yang dilaksanakan untuk pembentukan Tim Penyusun LKPJ dan LPPD, sosialisasi penyusunan, hingga evaluasi yang dilaksanakan ke masing-masing SKPD. Rapat koordinasi terlaksana dengan baik dengan didukung oleh perhatian dan peran aktif dari seluruh stake holder dan SKPD terkait terutama untuk tingkat kehadiran yang tinggi di setiap rapat koordinasi walaupun terdapat beberapa kekurangan di kelengkapan dokumen serta validasi data yang dikumpulkan.

Program yang mendukung kegiatan ini adalah Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama antar Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp 154.787.600,- dan realisasi sebesar Rp 79.239.000,- (51,19%).

Adapun untuk penilaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 masih dalam tahap awal penilaian.

Capaian Skor LPPD Kabupaten Tanah Laut dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Skor LPPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 s/d 2020

NO	2018	2019	2020
	T (2,995)	Nilai Belum Terbit dari Kemendagri	Dalam Proses Awal Evaluasi

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Bobot nilai IKK LPPD masih banyak yang capaiannya rendah karena realisasi capaian kinerja di masing-masing IKK dari SKPD yang rendah, kegiatannya tidak ada pelaksanaannya atau belum terakomodir.
- Kurangnya komitmen SKPD dalam menyajikan data yang *valid*.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Peningkatan kualitas pengumpulan data IKK LPPD dan evaluasi internal seluruh SKPD.
- Memprioritaskan perencanaan usulan kegiatan-kegiatan SKPD yang termasuk pada IKK LPPD untuk dianggarkan di SKPD terkait.
- Menerapkan *reward* dan *punishment* terhadap SKPD terkait penyusunan dan skor LPPD.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Menghadirkan narasumber dari Kemendagri untuk sosialisasi LPPD kedepannya
- Memprioritaskan perencanaan usulan kegiatan-kegiatan SKPD yang termasuk pada IKK LPPD untuk dianggarkan di SKPD terkait.
- Menerapkan *reward* dan *punishment* terhadap SKPD terkait penyusunan dan skor LPPD.
- Untuk format LPPD SKPD disesuaikan dengan format Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Laporan Kinerja SKPD disusun menjadi satu dengan LPPD SKPD

SASARAN 3.2 Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah

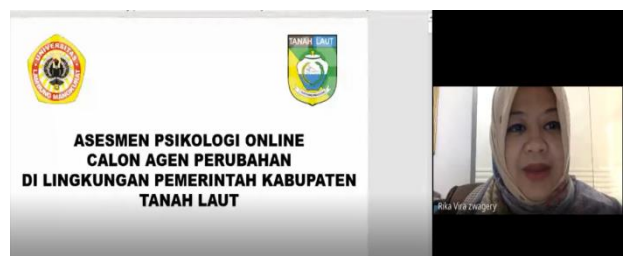
Indikator : Persentase SKPD dengan Nilai RB Minimal B

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
1	2	3	4	5	6
3.2	Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	80%	92,5%	97,37%

Persentase SKPD dengan nilai RB minimal Cukup Baik terealisasi sebesar 55% (22 SKPD dari 40 SKPD) dari target 70% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 78,57%. Realisasi tahun ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019 dikarenakan di tahun 2019 belum dilakukan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada seluruh SKPD atau hanya dilakukan penilaian terhadap 10 SKPD. Untuk realisasi tahun 2020, jika dibandingkan dengan Target akhir Renstra adalah sebesar 55% dengan target 100%. Jadi diharapkan di Tahun 2023 seluruh SKPD telah memiliki nilai RB minimal B (cukup baik) karena RPJMD menargetkan Indeks Reformasi Birokrasi Baik (75) untuk Tahun 2023.

Bahwa untuk mendukung tercapainya indikator Persentase SKPD dengan nilai RB minimal Cukup Baik telah dilaksanakan kegiatan :

1. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagai peta jalan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah laut.
2. Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemeirntah Kabupaten Tanah Laut
3. Penetapan Pimpinan SKPD sebagai teladan (Role Model) dan Pembentukan agen perubahan (*Agent Of Change*) sebanyak 49 Orang pada seluruh SKPD dengan proses sesuai dengan pemilihan sesuai dengan PermenpanRB Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah. Tahapan Assesment dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan Psikologi Universitas Lambung Mangkurat. Video lengkap pelaksanaan *Assesment* dapat diunduh pada *link* berikut. <https://bit.ly/videoagenperubahan> .
4. Sosialisasi dan internalisasi 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi kepada seluruh SKPD.



5. Penerapan budaya kerja yang berorientasi kepada kinerja.

6. Pelaksanaan PMPRB kepada 40 SKPD.

Berikut disajikan nilai hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terhadap 40 SKPD di Lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah.

**Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020**

NO	SKPD	NILAI	PERSENTASE	KATEGORI	INTERPRETASI
35	DPMPSTSP	14.55	99.66	AA	Istimewa
13	BKPSDM	13.60	93.15	AA	Istimewa
8	Inspektorat	13.56	92.88	AA	Istimewa
2	Sekretariat Daerah	13.33	91.30	AA	Istimewa
25	Dinas Pariwisata	13.09	89.66	A	sangat Baik
1	Disdukcapil	12.11	82.95	A	Sangat baik
33	BAPPEDA	12.00	82.19	A	Sangat baik
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.75	80.48	A	sangat Baik
16	KESBANGPOL	12.03	79.74	BB	Baik
37	DISKOPDAG	11.07	75.82	BB	Baik
11	Kecamatan Takisung	10.94	74.93	BB	Baik
28	Dinas Kesehatan	10.7	73.29	BB	Baik
5	BPBD	10.44	71.51	BB	Baik
20	Kecamatan Jorong	9.58	70.08	BB	Baik
30	Sekretariat DPRD	9.12	69.32	B	Baik
18	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	10.03	68.70	B	Cukup Baik
14	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	9.55	68.17	B	Cukup Baik
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	9.55	65.41	B	Baik
6	Dinsos	9.50	65.07	B	Cukup Baik
39	Kecamatan Bumi Makmur	9.47	64.86	B	Cukup Baik
9	Disnak	9.46	64.79	B	Cukup Baik
40	Kecamatan Pelaihari	9.14	62.60	B	Cukup Baik
27	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Anak	8.33	57.05	CC	Cukup
4	Bapenda	7.99	54.73	CC	Cukup
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.32	50.14	CC	Cukup
19	DISHUB	7.10	48.39	C	Buruk
34	DKPP	6.20	42.47	C	Buruk

41	Kecamatan Batu Ampar	6.15	42.12	C	Buruk
29	RSUD H. Boejasin	5.79	39.66	C	Buruk
38	DISDIKBUD	5.63	38.56	C	Buruk
36	SATPOL PP DAMKAR	5.56	38.08	C	Buruk
17	DISPUSIP	4.99	37.42	C	Buruk
3	Perkim LH	4.34	29.73	D	Sangat buruk
31	Kecamatan Panyipatan	2.26	15.48	D	Sangat Buruk
15	DPUPRP	2.40	14.74	D	Sangat buruk
22	Kecamatan Bajuin	1.63	11.16	D	Sangat buruk
32	Kecamatan Kintap	1.26	8.61	D	Sangat Buruk
7	Dinas Pertanian	1.20	8.22	D	Sangat buruk
12	Kec. Bati Bati	1.01	6.92	D	Sangat buruk
21	Kecamatan Kurau	0.40	2.50	D	Sangat buruk
10	Kecamatan Tambang Ulang	0.27	1.85	D	Sangat buruk

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk nilai Reformasi Birokrasi ada 22 SKPD dengan nilai di atas 60 (**Kategori Cukup Baik**)

Pada Tahun 2020 telah dilakukan PMPRB oleh Inspektorat dengan bantuan aplikasi PMPRB yang disediakan oleh Kemenpan dan RB sehingga memudahkan penilaian pelaksanaan RB seluruh SKPD

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Belum tertanamannya ke seluruh ASN budaya kerja organisasi yang berbudaya kinerja
- kurangnya memahami dan kurangnya komitmen dari seluruh ASN terhadap penerapan reformasi birokrasi.
- Kurangnya peran Agen Perubahan sehingga belum bisa menjadi *Role Model* atau panutan dalam penerapan reformasi birokrasi di lingkungan pekerjaan sehari-hari.
- belum dilakukan pelatihan ataupun bimbingan teknis terhadap agen perubahan dan *role model*.
- Kurangnya peran Tim pelaksana Reformasi Birokrasi dalam rangka internalisasi 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi.

Solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:

- Melibatkan seluruh aparatur Negara terutama Pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk lebih berkomitmen dalam pelaksanaan reformasi

birokrasi terutama pada perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya dalam bekerja agar lebih berbudaya kinerja dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat karena inti dari perubahan adalah manusia itu sendiri dalam hal ini adalah aparatur Negara.

- Optimalisasi internalisasi seluruh program reformasi birokrasi sampai dengan level organisasi terendah
- Dilaksanakan bimbingan teknis kepada seluruh *Role Model* dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi.
- Mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki untuk membangun Kabupaten Tanah Laut.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Pembentukan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang pedoman pengembangan budaya kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Optimalisasi internalisasi seluruh program reformasi birokrasi sampai dengan level organisasi terendah
- Dilaksanakan bimbingan teknis kepada seluruh *Role Model* dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi.

Tahun 2020, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan melalui Kegiatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan Anggaran sebesar Rp 56.090.560 dan terealisasi sebesar Rp 16.530.100 atau 29,47% dan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 2 Orang yaitu Kepala Bagian Organisasi dan Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Tabel Kegiatan Penunjang Kinerja Sub Kinerja dan Reformasi Birokrasi

KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja	107.445.800,00	32.368.800,00	30,13
Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	56.090.560,00	16.530.100,00	29,47

SASARAN 3.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten

Indikator : Persentase SKPD dengan Nilai SAKIP Minimal BB

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
1	2	3	4	5	6
3.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	90	92,5%	102,77%

Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB terealisasi sebesar 92,5% (37 SKPD dari 40 SKPD) dari target 90% sehingga capaian kerjanya adalah sebesar 102,78%. Mengalami peningkatan sebesar 52,5% dibandingkan tahun 2019 dengan realisasi sebesar 40% atau sebanyak 16 SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB. Untuk realisasi tahun 2020, jika dibandingkan dengan Target akhir Renstra adalah sebesar 92,5% dengan target 100%. Jadi diharapkan di Tahun 2023 seluruh SKPD telah memiliki nilai SAKIP minimal BB karena RPJMD menargetkan nilai A (81) untuk nilai SAKIP Tahun 2023.

Untuk mendukung tercapainya indikator Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di tahun 2020 melakukan upaya-upaya sebagai berikut telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Tim SAKIP yang terdiri dari Bappeda, Inspektorat, Sekretariat Daerah Melaksanakan asistensi terhadap SAKIP SKPD yang memiliki nilai SAKIP SKPD di bawah 70. Desk Penyelarasan dokumen SAKIP seluruh SKPD dengan melakukan penyelarasan pohon kinerja terhadap Renstra, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama karena laporan kinerja disusun berdasarkan seluruh dokumen-dokumen tersebut.
- 2) Tim SAKIP melaksanakan asistensi terhadap laporan kinerja 40 SKPD.
- 3) Melakukan perbaikan-perbaikan terhadap perencanaan kinerja dan indikator kinerja setiap jabatan mulai dari Eselon II, III dan IV agar Indikator Kinerja seluruh SKPD sehingga bersifat spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*achivable*), berorientansi hasil (*Result Oriented*), yang dapat dicapai dalam periode atau satuan waktu tertentu (*time-bond*) atau SMART.
- 4) Pengukuran kinerja secara triwulan terhadap capaian kinerja seluruh SKPD.

Berikut disajikan nilai hasil Evaluasi SAKIP seluruh SKPD di Lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2020.

Hasil Evaluasi SAKIP seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020

NO.	ENTITAS AKUNTABILITAS	NILAI KOMPONEN					TOTAL NILAI	KATEGORI	KET
		Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	Pen capaian Kinerja			
		30%	25%	15%	10%	20%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	BPKAD	28.18	21.88	14.1	6,77	17.5	86.43	A	Memuaskan
2	Inspektorat	28.79	22.19	12.31	6.92	16.39	86.6	A	Memuaskan
3	BAPPEDA	28.79	21.88	12.31	6.92	15.59	85.59	A	Memuaskan
4	Sekretariat Daerah	30	23.44	11.06	6.7	13.15	84.35	A	Memuaskan
5	DPM dan PTSP	27.58	20	12.09	6.92	14.93	81.52	A	Memuaskan
6	Kecamatan Bajuin	28.3	19.38	10.15	6.55	17	81.38	A	Memuaskan
7	Dinas Pariwisata	28.24	20.63	10.42	6.13	14.68	80.1	A	Memuaskan
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23.45	18.75	12.12	7.56	16.11	77.99	BB	Sangat baik
9	Dinas Pekerjaan Umum , Penataan Ruang dan Pertanahan	28.3	16.88	10.52	5.33	16.58	77.61	BB	Sangat baik
10	Badan Pendapatan Daerah	23.87	20.31	10.61	7.56	14.96	77.31	BB	Sangat baik
11	Kecamatan Tangkisung	25.06	16.25	12.85	6.27	16.5	76.93	BB	Sangat baik
12	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	27.2	17.81	10.61	6.27	14.63	76.52	BB	Sangat baik
13	Kecamatan Panyipatan	24.42	19.69	10.24	3.81	18.25	76.41	BB	Sangat baik
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	27.37	20	10.42	7.56	11	76.35	BB	Sangat baik
15	Sekretariat DPRD	26.81	19.38	10.07	5.26	14.56	76.08	BB	Sangat baik
16	Keccamatan Pelaihari	24.41	16.25	11.41	6.92	17.08	76.07	BB	Sangat baik
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27.58	18.75	9.8	6.55	13.06	75.74	BB	Sangat baik
18	Dinas Sosial	25.18	18.75	10.88	6.92	13.58	75.31	BB	Sangat baik
19	Dinas Perhubungan	24.1	18.75	12.58	8.21	11.61	75.25	BB	Sangat baik
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	24.82	19.69	12.31	8.08	10.05	74.95	BB	Sangat baik



21	SATPOL PP dan DAMKAR	26.14	16.25	11.86	6.92	13.53	74.7	BB	Sangat baik
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23.77	19.06	10.88	4.84	15.92	74.47	BB	Sangat baik
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25.13	19.69	10.42	5.9	12.63	73.77	BB	Sangat baik
24	Kecamatan Kurau	22.03	19.38	11.68	6.63	13.96	73.68	BB	Sangat baik
25	Kecamatan Kintap	24.88	19.69	10.61	6.2	12.13	73.51	BB	Sangat baik
26	Dinas Ket. Pangan dan Perikanan	27.16	18.13	10.42	6.92	10.84	73.47	BB	Sangat baik
27	Kecamatan Jorong	24.36	20.94	11.95	6.63	8.92	72.8	BB	Sangat baik
28	Dinas Kominfo	23.95	16.25	10.42	7.56	14.4	72.58	BB	Sangat baik
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	22.9	15.63	10.15	8.21	15.38	72.27	BB	Sangat baik
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	23.88	16.25	10.61	6.92	14.42	72.08	BB	Sangat baik
31	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	22.76	16.25	10.61	6.92	15.5	72.04	BB	Sangat baik
32	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	24.73	14.38	10.42	6.26	16.11	71.9	BB	Sangat baik
33	Dinas Kesehatan	28.24	18.44	9.62	5.43	9.94	71.67	BB	Sangat baik
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.97	19.38	10.61	6.13	14.52	71.61	BB	Sangat baik
35	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	22.8	15.94	10.61	7.56	14.5	71.41	BB	Sangat baik
36	Keccamatan Tambang Ulang	22.69	15.63	10.88	6.92	14.38	70.5	BB	Sangat baik
37	DP2KBP3A	23.95	15.63	10.42	6.55	13.93	70.48	BB	Sangat baik
38	Kecamatan Bumi Makmur	23.57	13.44	9.62	4.64	13.08	64.35	B	Baik
39	Kecamatan Bati-Bati	19.08	18.44	10.88	3.54	11	62.94	B	Baik
40	Kecamatan Batu Ampar	21.36	13.75	10.15	4.64	11.25	61.15	B	Baik
	RATA-RATA			10.992			75.044		

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 37 SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB sebanyak 37 SKPD atau sebesar 92,5% dari total seluruh SKPD.

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

- Kurangnya komitmen dan keterlibatan pimpinan dan seluruh pejabat struktural dalam kegiatan Akuntabilitas Kinerja.
- Kurang selarasnya dokumen AKIP Karena laporan kinerja disusun berdasarkan dokumen perencanaan.

- Kurangnya kualitas evaluasi kinerja internal;
- Belum dimanfaatkannya informasi kinerja pada laporan kinerja dalam pelaksanaan manajemen kinerja pada periode berikutnya.

Solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:

- Peningkatan kompetensi aparatur yaitu kemampuan analisis analisis para penanggungjawab program serta tim penyusun Laporan kinerja
- Tetap dilaksanakan asistensi terhadap laporan kinerja seluruh SKPD.
- Peningkatan kualitas pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja secara triwulan dan evaluasi internal seluruh SKPD.
- Pemanfaatan informasi kinerja pada laporan kinerja dalam pelaksanaan manajemen kinerja pada periode berikutnya.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Peningkatan kompetensi aparatur yaitu kemampuan analisis analisis para penanggungjawab program serta tim penyusun Laporan kinerja melalui sosialisasi penyusunan Lapotan kinerja.
- Tetap dilaksanakan asistensi terhadap laporan kinerja seluruh SKPD.

Tahun 2020, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan melalui Kegiatan *Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja* dengan Anggaran sebesar Rp 107.445.800 dan terealisasi sebesar Rp 32.368.800 atau 30,13% dan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 2 Orang yaitu Kepala Bagian Organisasi dan Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

SASARAN 3.4 Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik Lingkup Sekretariat Daerah

Indikator 1 : Nilai RB Sekretariat Daerah

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
1	2	3	4	5	6
3.4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	85	91.24	107.3%

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 239 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka Tim ini bertugas melaksanakan

Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional dan Reformasi Birokrasi Kabupaten yang diharapkan dapat memberikan dampak pada perbaikan Reformasi Birokrasi dan masyarakat. Kemudian dilakukan evaluasi oleh Tim Reformasi Birokrasi pada bulan Mei 2020 dan dilakukan penginputan pada Portal PMPRB secara *online*.

Setelah di evaluasi, dilakukan penilaian dan hasilnya dituangkan dalam surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor : 700/95 – LHE/Insp/2020, Perihal Laporan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dengan Nilai **91.24**, Kategori **“ISTIMEWA”**. Nilai ini merupakan akumulasi dari pemenuhan dokumen 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi.

Dari hasil Pelaksanaan PMPRB Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Tahun 2019 memperoleh nilai **52.02** sedangkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Tahun 2020 memperoleh nilai **91.24**, terjadi peningkatan **57.01%**. Adapun penilaian Reformasi Birokrasi pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel Penilaian Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2019 dan Tahun 2020

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	HASIL PENILAIAN TAHUN 2019		HASIL PENILAIAN TAHUN 2020	
		Nilai	%	Nilai	%
A	Komponen Pengungkit/Proses				
1	Manajemen Perubahan (2%)	3.33	66.65	2	100
2	Deregulasi Kebijakan (1%)	1.25	25	1	100
3	Penataan Organisasi (2%)	1.5	25	2	100
4	Penataa Tatalaksana (1%)	2.59	51.8	0.72	72
5	Penataan Manajemen SDM (1.4%)	3.5	23.33	1.35	96
6	Penguatan Akuntabilitas (2.5%)	2.84	47.25	2.24	98
7	Penguatan Pengawasan (2.2%)	4.63	38.54	2.03	92
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2.5%)	4.2	70	1.78	71
TOTAL		23.84	52.02	13.33	730
					91.24

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Penerapan tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan;
- Masih adanya dokumen-dokumen pada Area Perubahan Reformasi Birokrasi yang belum terpenuhi
- Masih rendahnya penerapan budaya kerja untuk kepemimpinan dan manajemen, Pola Pikir dan Cara Kerja serta Perilaku Bekerja

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Penerapan tata kelola pemerintahan secara efektif
- Dokumen-dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi dipenuhi sesuai dengan Area Perubahannya.
- Penerapan Budaya Kerja untuk kepemimpinan dan manajemen, Pola Pikir dan Cara Kerja serta Perilaku Bekerja sesuai dengan Kategori Bagus

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Komitmen pimpinan untuk menerapkan Slogan Nilai Budaya yang **SMART** dalam bekerja, **SIMPATIK** dalam melayani dan **TUNTAS** dalam tugas
- Pimpinan berperan sebagai *role model* bagi Jajarannya
- Peran Assesor dan Agen Perubahan yang aktif dan inovatif dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- Memerintahkan Tim Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi untuk Koordinasi dan konsultasi secara intens dengan Tim Pembina Reformasi Birokrasi Kabupaten.

Indikator 2 : Nilai ZI Sekretariat Daerah

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
1	2	3	4	5	6
3.4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai ZI Sekretariat Daerah	82	84.64	103.2%

Diterbitkannya Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188,45/699-KUM/2019 tentang Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Akan Dikembangkan Menjadi Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019, maka Sekretariat Daerah segera melaksanakan pengembangan Zona Integritas WBK. Kemudian dilakukan pencaanangan komitmen sebagai Zona Integritas menuju **Wilayah Bebas dari Korupsi** pada tanggal 26 Agustus 2019 yang dihadiri oleh Bupati Tanah

Laut, Wakil Bupati Tanah Laut dan seluruh ASN Sekretariat Daerah. Selanjutnya pada bulan Juli 2020 dilakukan evaluasi Pelaksanaan Zona Integritas pada Sekretariat Daerah dengan 6 (enam) komponen perubahan Zona Integritas.

Berdasarkan surat dari Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor: 700/091/Insp/LHE-ZI/2020, Perihal Laporan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dengan Nilai **84.64**. Nilai ini merupakan akumulasi dari pemenuhan dokumen 6 (enam) area perubahan.

Penilaian yang dilakukan oleh TPI berdasarkan Permendagri Nomor 10 Tahun 2019 dengan tetap memperhatikan perubahan persentase penilaian pada aplikasi PMPZI, laporan hasil penilaian Zona pada Sekretariat Daerah sebagai berikut :

Tabel Hasil Penilaian Zona Integritas pada Sekretariat Daerah Tahun 2020

NO	URAIAN	BOBOT (%)	HASIL PENILAIAN	(%)
A	KOMPONEN PENGUNGKIT	60	53.29	88.81
1	Manjemen Perubahan	8	8	100
2	Penataan Tata Laksana	7	5.36	76.57
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10	8.80	88
	Penguatan Akuntabilitas	10	10	100
	Peningkatan Pengawasan	15	12.13	80.86
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10	9	90
B	UNSUR INDIKATOR HASIL	40	31.35	78.375
1	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	20	14.20	71
1.1	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survey External)	15	13.20	88
1.2	Persentase Temuan hasil pemeriksaan (Internal dan Eksternal) yang di tindaklanjuti	5	1	20
2	Kualitas Pelayanan Publik	20	17.15	85.75
TOTAL PENILAIAN			84.64	

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Kompetensi Sumber Daya Manusia kurang memadai
- Lingkungan kerja belum sepenuhnya menunjang pelaksanaan Zona Integritas
- Kurangnya sosialisasi kepada seluruh PNS dan PTT Sekretariat Daerah bahwa Sekretariat Daerah termasuk menjadi SKPD yang dicanangkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam memahami komponen area perubahan Zona Integritas
- Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk menunjang pelaksanaan Zona Integritas
- Melaksanakan sosialisasi Pelaksanaan Zona Integritas kepada seluruh ASN Sekretariat Daerah secara berkelanjutan.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Monev dari Tim Pembangunan Zona Integritas dan Tim Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dan pimpinan harus berperan aktif dalam melaksanakan monev
- Manajemen media sebagai sarana informasi dan komunikasi bagi masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik (*website* setda.tanahlautkab.go.id, *Facebook* @Prokopim Kab. Tanah Laut dan *Instagram* @prokopimtala, ukpbj.tanahlautkab.go.id, lpse.tanahlautkab.go.id)
- Memerintahkan Tim Penyusunan Laporan Zona Integritas untuk melakukan konsultasi dan koordinasi ke Tim Zona Integritas Kabupaten
- Meningkatkan koordinasi dengan Tim Pelaksana Pengembangan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah

Indikator 3 : Nilai SAKIP Sekretariat Daerah

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
1	2	3	4	5	6
3.4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	82	84.35	102.8%

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 238/Kep-Sekda/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka tim ini melaksanakan tugasnya menyusun rencana dan menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, rakor antar anggota tim dalam merumuskan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan perbaikan atau perubahan sehubungan pematapan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Kemudian dilakukan reviu pada bulan Maret 2020 dan dilanjutkan penginputan pada *webiste* E-SAKIP REVIU.

Berdasarkan surat dari Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor: 700/170//LHE-Insp/2020, Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) Tahun 2019, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 memperoleh nilai sebesar **84.35** dengan kategori **A (Memuaskan)**, sedangkan hasil evaluasi nilai SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2018 memperoleh nilai sebesar **79.07** dengan kategori **BB (Sangat Baik)**. Hasil penilaian SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dan peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Hasil Penilaian SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2018 dan Tahun 2019

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
			Y/T	NILAI		Y/T	NILAI
A	PERENCANAAN KINERJA (30%)	30.00	100%	30.00	30.00	100%	30.00
I	Perencanaan Strategis (10%)	10.00	100%	10.00	10.00	100%	10.00
a	Pemenuhan Renstra (2%)	2.00	100%	2.00	2.00	100%	2.00
b	Kualitas Renstra (5%)	5.00	100%	5.00	5.00	100%	5.00
c	Implementasi Renstra (3%)	3.00	100%	3.00	3.00	100%	3.00
II	Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)	20.00	100%	20.00	20.00	100%	20.00
a	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%)	4.00	100%	4.00	4.00	100%	4.00
b	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%)	10.00	100%	10.00	10.00	100%	10.00
c	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)	6.00	100%	6.00	6.00	100%	6.00
B	PENGUKURAN KINERJA (25%)	25.00	93.75%	23.44	25.00	93.75%	23.44
I	Pemenuhan Pengukuran (12.5%)	5.00	100%	5.00	5.00	100%	5.00
II	Kualitas Pengukuran (12.5%)	12.50	100%	12.50	12.50	100%	12.50
III	Implementasi Pengukuran (7.5%)	7.50	79.17%	5.94	7.50	79.17%	5.94
C	PELAPORAN KINERJA (15%)	15.00	73.14	11.52	15.00	73.71	11.06
I	Pemenuhan Pelaporan (3%)	3.00	100%	3.00	3.00	100%	3.00
II	Penyajian Informasi Kinerja (7.5%)	7.50	64.29%	4.82	7.50	71.43%	5.36
III	Pemanfaatan Informasi Kinerja (4.5%)	4.50	60.00	2.70	4.50	60.00	2.70
D	EVALUASI INTERNAL (10%)	10.00	19.58%	1.96	10.00	67%	6.70
I	Pemenuhan Evaluasi (2%)	2.00	66.67%	1.33	2.00	100%	2.00
II	Kualitas Evaluasi (5%)	5.00	12.50%	0.63	5.00	64%	3.20
III	Pemanfaatan Evaluasi (3%)	3.00	0.00%	-	3.00	50%	1.50
E	PENCAPAIAN SASARAN/ KINERJA ORGANISASI (20%)	20.00	65.77%	13.15	20.00	65.77%	13.15
-	Kinerja yang Dilaporkan (<i>Output</i>) (7.5%)	7.50	66.67%	5.00	7.50	66.67%	5.00
-	Kinerja yang Dilaporkan (<i>Outcome</i>) (12.5%)	12.50	163.10%	8.15	12.50	163.10%	8.15
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100.00	79.07%	79.07	100.00	84.35	84.35

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Kurangnya komitmen dan keterlibatan pimpinan dan seluruh pejabat struktural dalam kegiatan Akuntabilitas Kinerja
- Kurangnya kualitas evaluasi kinerja internal
- Kurangnya kompetensi aparatur penyusun laporan terhadap kemampuan menganalisis

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melibatkan pimpinan dalam penyusunan laporan kinerja
- Melaksanakan monev terhadap laporan kinerja Bagian-Bagian
- Peningkatan kompetensi aparatur dalam menganalisis masalah dalam penyusunan laporan kinerja

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Capaian kerja agar lebih ditingkatkan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang bermanfaat
- Monev secara berkala terhadap dokumen Perjanjian Kinerja yang dapat dijadikan dasar untuk memberikan *reward* dan *punishment*
- Peningkatan kompetensi aparatur penyusun laporan kinerja melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis serta FGD

Indikator 4 : Nilai SPIP Sekretariat Daerah

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
1	2	3	4	5	6
3.4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3.5	3.77	107.7%

Sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, didalam Peraturan Pemerintah tersebut terdapat 5 unsur SPIP yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan organisasi agar menimbulkan perilaku positif untuk mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

2. Penilaian Risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan ini membantu memastikan arahan pimpinan sudah dilaksanakan atau belum, dan kegiatan ini harus efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan, informasi disajikan dalam bentuk dan saran tertentu serta tepat waktu sehingga pimpinan dapat melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan dapat segera ditindaklanjuti.

Pada Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut melakukan identifikasi risiko pada Bagian Lingkup Sekretariat Daerah dan telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2018 telah dilaksanakan penilaian SPIP dalam rangka peningkatan Level Maturitas SPIP, yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, dari hasil penilaian tersebut Sekretariat Daerah memperoleh nilai 3.77. Sampai dengan tahun 2020 belum ada penilaian Peningkatan Maturitas SPIP.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Kompetensi Sumber Daya Manusia belum memadai
- Kurangnya kepatuhan terhadap aturan
- Belum maksimalnya kegiatan evaluasi dan dokumentasi terhadap pelaksanaan unsur-unsur SPIP
- Adanya kegiatan yang belum didukung oleh SOP

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia tentang unsur-unsur SPIP
- Adanya sanksi terhadap pelanggaran kepatuhan
- Melakukan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan
- Adanya SOP untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Menerbitkan surat edaran tentang sanksi terhadap pelanggaran kepatuhan
- Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi

SASARAN 4 Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan

Indikator : Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Utama Eselon II yang melekat pada Bagian Perekonomian Pembangunan adalah Presentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang diterapkan. Pada tahun 2020 target kebijakan pimpinan daerah yang akan ditindaklanjuti ada 4 yaitu:

- 1) Kebijakan yang diterapkan adalah pengajuan pencairan dana tahap kedua ke PT. BPR Tala untuk menjalankan program unggulan Bupati Tanah Laut yaitu pemberian pinjaman Modal Kerja tanpa Agunan dan Bunga 0%;
- 2) Kebijakan terkait menjaga stabilitas kredit Program Gapura Karomah;
- 3) Kebijakan dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha BUMD;
- 4) Kebijakan dalam rangkaantisipasi kenaikan harga Gas LPG 3 Kg bersubsidi selama pandemi Covid 19; dan
- 5) Memperkuat permodalan kepada pelaku UMKM dengan memaksimalkan program Nasional yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi).

Untuk melaksanakan penerapan kebijakan tersebut, adapun tahapan-tahapan kegiatan yang telah dilakukan di Bagian Perekonomian yaitu :

- 1) Kebijakan yang diterapkan adalah pengajuan pencairan dana tahap kedua ke PT. BPR Tala untuk menjalankan program unggulan Bupati Tanah Laut yaitu pemberian pinjaman Modal Kerja tanpa Agunan dan Bunga 0%, maka langkah --langkah kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :
 - a) Melaksanakan tahapan-tahapan yang diperlukan dalam rangka pencairan dana ke PT. BPR Tala selaku pelaksana Program Gapura Karomah.

- b) Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/906-KUM/2019 tentang Pelaksanaan Realisasi Investasi Daerah berupa Penempatan Penyaluran Dana Investasi kepada Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut Tahun Anggaran 2020.
 - c) Melakukan sosialisasi program gapura karomah kepada para kelompok tani / ternak dan kelompok usaha lainnya.
- 2) Kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka menjaga stabilitas kredit program karomah antara lain :
- a) Mengeluarkan Perbup Nomor 44 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian dalam rangka menjaga stabilitas kredit Program Gapura Karomah selama masa Pandemi Covid 19;
 - b) Bekerjasama dengan LPPM STIE Indonesia Banjarmasin menyusun analisa mitigasi risiko program gapura karomah dan evaluasi penyaluran program gapura karomah;
- 3) Kebijakan yang dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka Pelaksanaan investasi daerah berupa Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pembinaan kepada BUMD antara lain :
- a) Melakukan kerjasama dengan pihak akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat untuk penyusunan kajian analisa kelayakan investasi pemerintah berupa penambahan penyertaan modal pemerintah kepada PT. BPR Tala dan analisa kelayakan oprasional BUMD PT. Baratala Tuntung Pandang.
 - b) Melakukan rapat-rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- 4) Kebijakan yang dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka Memperkuat permodalan dan continuitas para pelaku usaha mikro kecil selama masa Pandemi Covid 19 :
- a) Memaksimalkan program pembiayaan mikro dan kecil dari pemerintah pusat berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
 - b) Melakukan revisi terhadap Perbup Nomor 44 Tahun 2020 agar dapat menyalurkan kembali program **GAPURA KAROMAH** tahap II.

Secara keseluruhan, semua kebijakan dibidang Perekonomian yang dikeluarkan telah ditindaklanjuti dengan tujuan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Belum optimalnya monitoring dalam rangka menggali potensi perekonomian daerah
- Masih minimnya kemampuan manajemen BUMD dalam mengelola aset dan Penyertaan Modal Pemerintah
- Belum optimalnya pemanfaatan program permodalan dari daerah dan pusat.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Meningkatkan koordinasi antar SKPD teknis yang membidangi untuk menggali potensi perekonomian
- Kerjasama dengan tenaga ahli dan lembaga yang kompeten untuk meningkatkan manajemen BUMD
- Memaksimalkan sosialisasi program pembiayaan dari pusat dan daerah pada setiap kegiatan yang melibatkan pelaku usaha mikro

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Membentuk forum diskusi penggalian potensi perekonomian
- Penyusunan kerjasama dengan lembaga dan penunjukan tim penasehat investasi daerah
- Rapat koordinasi berkala tentang perkembangan pemanfaatan program pembiayaan bagi pelaku usaha mikro
- Monitoring dan evaluasi secara berkala

2.2 Eselon II (Asisten Sekretaris Daerah)

1) Asisten Pemerintahan

Asisten Bidang Pemerintahan bertugas membantu Sekretaris Daerah untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, mengoordinasikan, merumusan sasaran dan melaporkan penyelenggaraan pemerintahan melalui Perangkat Daerah dan Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi.

Dalam rangka mewujudkan capaian target kinerja jangka menengah, maka ditetapkanlah Perjanjian Kinerja sebagaimana tersebut di bawah ini :

Perjanjian Kinerja Asisten Bidang Tata Pemerintahan sesuai dengan Target dan Realisasi Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Capaian Administrasi Hukum, Pemerintahan dan Organisasi	Persentase Capaian Kinerja Bidang Administrasi Hukum	100%	100%
		Persentase Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan	100%	100%
		Persentase Capaian Kinerja Bidang Organisasi	100%	100%

SASARAN 1 Meningkatnya Capaian Administrasi Hukum, Pemerintahan dan Organisasi

Indikator 1 : Persentase Capaian Kinerja Bidang Administrasi Hukum

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Capaian Administrasi Hukum, Pemerintahan dan Organisasi	Persentase Capaian Kinerja Bidang Administrasi Hukum	100%	100%

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan mengevaluasi perumusan produk hukum dan Daerah serta mengkoordinasikan kebijakan di bidang hukum dengan instansi vertikal. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kebijakan di Bidang Hukum. Untuk tahun 2020 target indikator sasaran ini adalah 100% dan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerjanya 100%.

Pelaksanaan kebijakan di Bidang Administrasi Hukum yang di fasilitasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Pembentukan Produk Hukum Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Rumusan pra rancangan dan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati Rumusan pembentukan Produk Hukum Daerah, Kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan Fasilitasi dan mediasi pembahasan rancangan peraturan Daerah bersama dengan lembaga legislasi
2	Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia	<ol style="list-style-type: none"> Rumusan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan bantuan hukum dan HAM Hubungan kerjasama dengan unit kerja terkait untuk pemberian bantuan, perlindungan hokum dan kegiatan HAM Rumusan penyelesaian masalah hukum dan pelayanan bantuan hokum

		4. Rumusan naskah dinas MoU, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama
3	Dokumentasi dan Informasi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dokumentasi produk hukum Daerah 2. Rumusan Keputusan Bupati, Keputusan Sekretaris Daerah, NPHD, Perjanjian Kerjasama dan MoU 3. Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah 4. Rumusan layanan informasi hukum dengan melaksanakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum melalui website (JDIH)

Indikator 2 : Persentase Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Capaian Administrasi Hukum, Pemerintahan dan Organisasi	Persentase Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan	100%	100%

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan perumusan kebijakan bidang pemerintahan, melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan urusan umum pemerintahan dan urusan Pemerintahan Daerah serta mengkoordinasikan kebijakan di bidang pemerintahan dengan instansi vertikal. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Pemerintahan. Untuk tahun 2020 target indikator sasaran ini adalah 100 % dan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian kerjanya 100 %. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemerintahan yang di fasilitasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Pemerintahan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan data kegiatan pembinaan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan, dan kelurahan 2. Koordinasi dan failitasi kegiatan hari besar nasional, Provinsi dan Kabupaten 3. Rumusan bahan pembinaan dan evaluasi perangkat kecamatan
2	Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan bahan kerjasama pengembangan dan perluasan kawasan antar Pemerintahan Daerah 2. Rumusan kegiatan pengembangan dan perluasan kerjasama kawasan dan kemitraan 3. Koordinasi hubungan kerjasama antar Daerah dan instansi vertical
3	Otonomi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan Laporan LKPJ dan LPPD 2. Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 3. Rumusan naskah dinas pertimbangan, penetapan, perubahan dan penghapusan tata batas serta pengembangannya

Indikator 3 : Persentase Capaian Kinerja Bidang Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Capaian Administrasi Hukum, Pemerintahan dan Organisasi	Persentase Capaian Kinerja Bidang Organisasi	100%	100%

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi penataan organisasi perangkat daerah, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan aparatur dan akuntabilitas kinerja. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kebijakan di Bidang Organisasi. Untuk tahun 2020 target indikator sasaran ini adalah 100 % dan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerjanya 100 %.

Pelaksanaan kebijakan di Bidang Organisasi yang di fasilitasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Kelembagaan dan Analisis Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan evaluasi kelembagaan dan analisis jabatan 2. Rumusan rancangan Peraturan Bupati tentang tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas kelembagaan perangkat Daerah 3. Rumusan data jabatan menjadi informasi jabatan 4. Rumusan data beban kerja menjadi formasi jabatan 5. Rumusan bahan standar kompetensi jabatan 6. Rumusan bahan evaluasi jabatan untuk menentukan kelas dan nilai jabatan
2	Tata Laksana dan Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis data penataan ketatalaksanaan dan pelayanan publik 2. Rumusan data standarisasi pedoman kerja 3. Rumusan data pengaturan tata naskah dinas dan pakaian dinas 4. Pemantauan dan evaluasi penerapan pengaturan kerja 5. Rumusan bahan pengukuran indeks kepuasan masyarakat 6. Rumusan bahan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik
3	Pemberdayaan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemberdayaan aparatur dan akuntabilitas kinerja 2. Rumusan data pemberdayaan aparatur meliputi pengawasan melekat dan penerapan budaya kerja 3. Rumusan bahan kegiatan bimbingan teknis, fasilitasi pengukuran kinerja organisasi 4. Rumusan Bahan analisis indikator kinerja dalam rencana strategis dan RPJMD 5. Rumusan laporan pelaksanaan kegiatan pengukuran kinerja 6. Rumusan bahan pelaksanaan dan laporan penerapan reformasi birokrasi

2) Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat bertugas membantu Sekretaris Daerah untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, mengoordinasikan, merumuskan sasaran, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pemerintahan melalui Bagian Perekonomian Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Dalam rangka mewujudkan capaian target kinerja jangka menengah, maka ditetapkanlah Perjanjian Kinerja sebagaimana tersebut di bawah ini :

Perjanjian Kinerja Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra sesuai dengan Target dan Realisasi Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
2	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Ekonomi, Pelayanan Barang/Jasa dan Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Kinerja Bidang Ekonomi	100%	100%
		Persentase Capaian Kinerja Bidang Pelayanan Barang/Jasa	100%	100%
		Persentase Capaian Kinerja Bidang Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%

SASARAN 2 Meningkatnya Capaian di Bidang Ekonomi, Pelayanan Barang/Jasa dan Pelayanan Kesejahteraan Rakyat.

Indikator 1 : Persentase Capaian Kinerja Bidang Ekonomi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
2	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Ekonomi, Pelayanan Barang/Jasa dan Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Kinerja Bidang Ekonomi	100%	100%

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan monev perekonomian pembangunan, merumuskan kebijakan pengembangan potensi perekonomian, dan bina badan usaha milik perusahaan Daerah serta melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan Pembangunan. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kebijakan di Bidang Perekonomian Pembangunan. Untuk tahun 2020 target indikator sasaran ini adalah 100 % dan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian kerjanya 100 %.

Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ekonomi yang di fasilitasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Fasilitasi pengembangan potensi perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama Penyediaan LPG Non Subsidi 2. Menganalisa hasil program gas LPG 3 Kg 3. Rumusan pengembangan industri, tenaga kerja, pariwisata dan lingkungan hidup 4. Rumusan kegiatan fasilitasi koperasi dan usaha kecil, penanaman modal dan perdagangan daerah
2	Bina BUMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan program, rencana kegiatan terkait Bina BUMD 2. Rumusan analisa data Bina BUMD 3. Rumusan pengembangan dan pemberdayaan BUMD
3	Monitoring dan evaluasi perekonomian pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah 2. Rumusan pengendalian laju inflasi di Daerah 3. Rumusan pelaksanaan kerjasama dengan unit kerja atau instansi terkait dalam penyelenggaraan movev perekonomian pembangunan

Indikator 2 : Persetase Capaian Kinerja di Bidang Pelayanan Barang/Jasa

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
2	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Ekonomi, Pelayanan Barang/Jasa dan Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Kinerja Bidang Pelayanan Barang/Jasa	100%	100%

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan rumusan kebijakan pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa serta melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk tahun 2020 target indikator sasaran ini adalah 100 % dan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerjanya 100%.

Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pelayanan Barang/Jasa yang di fasilitasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan Pembelajaran aplikasi SIRUP dan SOSIALITA 2. Analisis data paket pengadaan barang/jasa 3. Pemantauan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan pengadaan barang/jasa 4. Rumusan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria kegiatan pengadaan barang/jasa

2	Pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa 2. Rumusan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ 3. Rumusan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi
3	Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan kegiatan pengendalian dan dukungan teknologi layanan pengadaan barang secara elektronik 2. Pelayanan Pengadaan barang/jasa secara elektronik 3. Manajemen barang/jasa hasil pengadaan

Indikator 3 : Persentase Capaian Kinerja di Bidang Pelayanan Kesejahteraan Rakyat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
2	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Ekonomi, Pelayanan Barang/Jasa dan Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Kinerja Bidang Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan pembinaan sosial kemasyarakatan dan kebudayaan, pembinaan bidang pendidikan dan agama, kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat serta melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat. Untuk tahun 2020 target indikator sasaran ini adalah 100 % dan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerjanya 100%.

Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang di fasilitasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Sosial dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hibah bantuan keagamaan 2. Rumusan pengembangan dan pelestarian kebudayaan Daerah
2	Pendidikan dan Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan sarana peribadatan 2. Pengembangan sarana peribadatan, pendidikan keagamaan serta kerukunan hidup beragama
3	Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan kegiatan pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. Rumusan penetapan pelaksanaan pemberian bantuan bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan sosial

3) Asisten Administrasi Umum

Asisten Bidang Administrasi Umum bertugas membantu Sekretaris Daerah untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, mengoordinasikan, merumuskan sasaran, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pemerintahan melalui Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan, Bagian Umum dan Bagian Tata Usaha dan Keuangan

Dalam rangka mewujudkan capaian target kinerja jangka menengah, maka ditetapkanlah Perjanjian Kinerja sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Perjanjian Kinerja Asisten Bidang Administrasi Umum sesuai Target dan Realisasi Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
3	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Humas Protokol, Umum dan Tata Usaha Keuangan	Persentase Capaian Kinerja Administrasi Bidang Humas Protokol	100%	100%
		Persentase Capaian Kinerja Administrasi Bidang Umum	100%	100%
		Persentase Capaian Kinerja Administrasi Bidang Tata Usaha Keuangan	100%	100%

SASARAN 2 Meningkatkan Capaian di Bidang Humas Protokol, Umum dan Tata Usaha Keuangan

Indikator 1 : Persentase Capaian Kinerja Administrasi di Bidang Humas Protokol

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
3	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Humas Protokol, Umum dan Tata Usaha Keuangan	Persentase Capaian Kinerja Administrasi Bidang Humas Protokol	100%	100%

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan pembinaan terkait penyelenggaraan di Bidang Hubungan Masyarakat, Pemberitaan dan Keprotokolan, melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal terkait kegiatan bidang kehumasan dan protokol. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kebijakan di Bidang Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan. Untuk tahun 2020 target indikator sasaran ini adalah 100 % dan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerjanya 100%.

Pelaksanaan kebijakan di Bidang Humas Keprotokolan yang di fasilitasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Hubungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendokumentasian kegiatan Pimpinan dalam bentuk cetak dan audio visual 2. Rumusan bahan klarifikasi terhadap opini publik yang negative atas kebijakan pimpinan
2	Pemberitaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi pengelolaan system informasi pelayanan publik nasional 2. Rumusan pidato Pimpinan 3. Publikasi kegiatan Pimpinan
3	Keprotokolan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi kegiatan KDH, WKDH dan Pejabat Pemerintah

Indikator 2 : Persentase Capaian Kinerja Administrasi di Bidang Umum

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
3	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Humas Protokol, Umum dan Tata Usaha Keuangan	Persentase Capaian Kinerja Administrasi Bidang Umum	100%	100%

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan pembinaan penyusunan perencanaan urusan umum, dan perlengkapan, urusan rumah tangga dan penataan asset melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal di Bidang Pelayanan Umum. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kebijakan di Bidang pelayanan Umum. Untuk tahun 2020 target indikator sasaran ini adalah 100 % dan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerjanya 100%.

Pelaksanaan kebijakan di Bidang Umum yang di fasilitasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Umum dan Perlengkapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran BBM 2. Pinjam Pakai Kendaraan Dinas 3. Belanja alat atau bahan untuk perlengkapan kantor 4. Belanja makan minum jamuan tamu 5. Pemeliharaan /rehabilitasi sarpras gedung kantor
2	Penyelenggaraan Rumah Tangga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja makan minum kediaman KDH dan WKDH 2. Belanja perlengkapan kediaman KDH dan WKDH 3. Pemeliharaan Kendaraan Dinas KDH dan WKDH
3	Penataan Asset	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tabulasi Asset BMD Sekretariat Daerah 2. Persetujuan mutasi dan penetapan status BMD dari Sekretariat Daerah ke Diskominfo

Indikator 3 : Persentase Capaian Kinerja Administrasi di Bidang Tata Usaha dan Keuangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
3	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Humas Protokol, Umum dan Tata Usaha Keuangan	Persentase Capaian Kinerja Administrasi Bidang Tata Usaha Keuangan	100%	100%

Indikator ini dicapai dengan melaksanakan pembinaan, penyusunan perencanaan di Bidang Ketatausahaan dan Keuangan, Ketatausahaan Staf Ahli dan Perencanaan, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh di Bidang Tata Usaha dan Keuangan. Memberikan masukan kepada Sekretaris Daerah terkait pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Usaha dan Keuangan. Untuk tahun 2020 target indikator sasaran ini adalah 100 % dan telah dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerjanya 100%.

Pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Usaha dan Keuangan yang di fasilitasi sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

NO	URUSAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN
1	Laporan Keuangan sesuai aturan/SPI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Rekonsiliasi Keuangan Triwulan 2. Realisasi dan Penatausahaan secara keseluruhan anggaran pendapatan dan belanja Daerah 3. Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan kas 4. Kewajiban Penyampaian SPT tahunan orang pribadi ASN Sekretariat Daerah
2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian tepat waktu dan tepat syarat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Sekretariat Daerah 2. Reviu keahlian PBJP dan Ujian sertifikasi keahlian PBJP 3. Penilaian Potensi dan kompetensi untuk penyusunan talent pool administrator 4. Pelayanan Surat Menyurat sesuai SOP 5. Evaluasi RB Sekretariat Daerah 6. Penyampaian LHKPN dan LHKASN
3	Dokumen Perencanaan sesuai Renstra	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan Renja Sekretariat Daerah 2. Rumusan RKA

3. Eselon III (Kepala Bagian) dan Eselon IV (Kasubbag)

Berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 untuk Sekretariat Daerah mengemban Misi Bupati sebagaimana termuat di dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut, sehubungan hal tersebut di atas maka analisa capaian sasaran strategi diuraikan berdasarkan Misi Bupati Tanah Laut dengan uraian sebagai berikut :

Analisis Capaian Sasaran Strategis Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan layanan Sekretariat Daerah	Persentase Bagian dengan nilai IKM Minimal Baik	100%	82.33%	82.33%	Bagian Tata Usaha dan Keuangan Mengampu Misi ke- 1 "Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, social dan budaya "
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Peningkatan komponen Area Perubahan RB Sekretariat Daerah	85	91.24	107.3	Bagian Tata Usaha dan Keuangan Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"
		Peningkatan komponen Area Perubahan ZI Sekretariat Daerah	82	84.65	103.2	
		Peningkatan komponen SAKIP Sekretariat Daerah	82	84.35	102.8	
		Peningkatan unsur SPIP Sekretariat Daerah	3.5	-	-	
3	Meningkatnya layanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	Persentase pelayanan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Pimpinan/ Bagian lingkup Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	
ESELON IV						
1	Memberikan Pelayanan Surat Menyurat Lingkup Setda Sesuai SOP.	Jumlah SKPD/Bagian Lingkup Setda yang terlayani adminitrasi Surat Menyurat.	54 SKPD/ Bagian	54 SKPD/ Bagian	100%	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian

2	Memberikan pelayanan Adminitrasi Kepegawaian Lingkup Setda.	Jumlah Adminitrasi Kepegawaian Lingkup Setda yang terselesaikan	250 Bekas	250 Berkas	100%	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
3	Memberikan Pelayanan Administrasi Pimpinan Lingkup Setda	Persentase Pelayanan Adminitrasi Pimpinan Daerah (KDH/WKDH/Sekda)	100 %	100 %	100%	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
4	Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip Lingkup Setda	Persentase Arsip yang dikelola sesuai SOP	100 %	100 %	100%	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
5	Penyusunan Laporan Pelaksanaan RB Sekretariat Daerah dan ZI Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan RB Sekretariat Daerah dan ZI Sekretariat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
6	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
5	Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun sesuai ketentuan, (Bulanan, Triwulan/ Rekon/Semester, CALK, LPPD Sekretariat Daerah, SAKIP Sekretariat Daerah dan SPIP Sekretariat Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
6	Penyusunan Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai aturan, (Renstra, Renja, RKA, DPA) Sekretariat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Bagian Tata Usaha dan Keuangan terhadap capaian tahun sebelumnya

Tabel Capaian Sasaran Strategis Bagian Tata Usaha dan Keuangan terhadap capaian tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2020		
			2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Bagian dengan nilai IKM Minimal Baik	%	-	81,84	100%	82.33%	82.33%
2	Peningkatan komponen Area Perubahan RB Sekretariat Daerah	Nilai	-	52,02	85	91.24	107.3
3	Peningkatan komponen Area Perubahan ZI Sekretariat Daerah	Nilai	-	-	82	84.65	103.2
4	Peningkatan komponen SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	75,54	84,35	82	Masih proses evaluasi	Masih proses evaluasi

5	Peningkatan unsur SPIP Sekretariat Daerah	%	3,77	-	3.5	-	-
6	Persentase pelayanan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Pimpinan/ Bagian lingkup Sekretariat Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%

❖ **Perbandingan Realisasi dengan Target**

Capaian kinerja bagian Tata Usaha dan Keuangan dari 6 indikator adalah 100%, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Persentase Bagian dengan nilai IKM Minimal Baik dengan nilai indeks kepuasan masyarakat lingkup Sekretariat Daerah, tahun 2020 realisasi nilai IKM Sekretariat Daerah 82,33 sedangkan target 80 sehingga peningkatan IKM Sekretariat Daerah adalah 102,9%.
- 2) Peningkatan komponen Area Perubahan RB Sekretariat Daerah dengan nilai komponen peningkatan kualitas pelaporan Lingkup Sekretariat Daerah dengan realisasi sebesar 91,24 dari target 85, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 107,3%.
- 3) Peningkatan komponen Area Perubahan ZI Sekretariat Daerah dengan nilai komponen peningkatan kualitas pelaporan Lingkup Sekretariat Daerah dengan realisasi sebesar 84,64 dari target 82, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 103,2%.
- 4) Peningkatan komponen SAKIP Sekretariat Daerah dengan nilai komponen peningkatan kualitas pelaporan Lingkup Sekretariat Daerah dengan realisasi sebesar 84,35 dari target 82, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 102,8%.
- 5) Peningkatan unsur SPIP Sekretariat Daerah, untuk tahun 2018 Sekretariat Daerah memperoleh nilai Maturitas SPIP 3,77 dan sampai dengan tahun 2020 belum dilakukan lagi penilaian terhadap Maturitas SPIP.
- 6) Persentase pelayanan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Pimpinan/ Bagian lingkup Sekretariat Daerah, capaian indikator ini pada tahun 2020 mencapai 100% sama dengan target kinerjanya 100%.

❖ **Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait**

- 1) Persentase layanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Pimpinan/Bagian lingkup Sekretariat Daerah. Pada tahun 2020 dan 2019 tidak mengalami perubahan yaitu realisasinya 100%.

- 2) Persentase peningkatan mutu penyusunan pelaporan/kinerja yang tepat waktu sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan nilai komponen peningkatan kualitas pelaporan pada Tahun 2020 Lingkup Sekretariat Daerah adalah sebesar 100% sama dengan Tahun 2019 yaitu 100%.
- 3) Persentase Bagian dengan nilai IKM Minimal baik, indikator ini pada tahun 2020 dengan realisasi 82,33% sedangkan tahun 2019 realisasi 81,84% dengan ini mengalami peningkatan 0,59%
- 4) Peningkatan komponen Area Perubahan RB Sekretariat Daerah, indikator ini pada tahun 2020 dengan realisasi 91,24 sedangkan tahun 2019 realisasi 52,02 dengan ini mengalami peningkatan 42,98%
- 5) Peningkatan komponen Area Perubahan ZI Sekretariat Daerah, indikator ini pada tahun 2020 dengan realisasi nilai 84,64 sedangkan tahun 2019 Sekretariat Daerah belum dicanangkan sebagai Zona Integritas
- 6) Peningkatan komponen SAKIP Sekretariat Daerah, indikator ini pada tahun 2020 dengan realisasi nilai 84,35 sedangkan tahun 2019 realisasi nilai 75,54 dengan ini mengalami peningkatan 10,45%
- 7) Peningkatan unsur SPIP Sekretariat Daerah, indikator ini pada tahun 2020 belum ada penilaian Maturitas SPIP
- 8) Persentase pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Pimpinan/ Bagian lingkup Sekrtariat Daerah, indikator ini pada tahun 2020 dengan realisasi 100% sedangkan tahun 2019 realisasinya juga 100%.

❖ **Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

SASARAN 1 Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Layanan Sekretariat Daerah

Indikator : Persentase Bagian dengan nilai IKM Minimal Baik

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan layanan Sekretariat Daerah	Persentase Bagian dengan nilai IKM Minimal Baik	100%	82.33%	82.33%	Bagian Tata Usaha dan Keuangan Mengampu Misi ke- 1 "Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, social dan budaya"

Indikator ini dilaksanakan melalui survey pada Bagian-Bagian lingkup Sekretariat Daerah, berdasarkan hasil survey Semester ke- I, nilai IKM Bagian Rata-rata Baik, namun pada hasil survey Semester ke-II ada 1 (satu) bagian yang nilainya **6,06 (kurang baik)**, hal ini dikarenakan target koresponden tidak memenuhi target.

Berikut ini disajikan nilai IKM Bagian-bagian Lingkup Sekretariat Daerah yaitu :

NO	BAGIAN	NILAI SKM SEMESTER I	NILAI SKM SEMESTER II
1	Tata Pemerintahan	8.95	7.13
2	Hukum	7.96	9.68
3	Organisasi	9.33	6.06
4	Hubungan Masyarakat dan Protokol	9.31	9.57
5	Kesejahteraan Rakyat	10.23	10.84
6	Pengadaan Barang dan Jasa	8.63	7.97
7	Umum	9.72	9.5
8	Perekonomian Pembangunan	8.48	10.42
9	Tata Usaha dan Keuangan	9.38	10.16
JUMLAH		81.99	82.33

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Kurangnya pemahaman masyarakat/responden untuk mengisi kuesioner melalui *online*
- Sumber Daya Manusia Pelayanan belum sepenuhnya menerapkan *Service Excellent*
- Ada Bagian yang tidak tercapai target respondennya.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Memberikan penjelasan kepada responden maksud dari kuesioner tersebut dan cara pengisiannya
- Pembekalan pengetahuan tentang pelayanan prima kepada Sumber Daya Manusia pelayanan
- Meningkatkan target responden pada Bagian-Bagian lingkup Sekretariat Daerah dapat dipenuhi sesuai target

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Meningkatkan jumlah responden untuk pengisian kuesioner sesuai target agar layanan Sekretariat Daerah terlihat jelas
- Bimbingan teknis *Service Excellent* untuk Sumber Daya Manusia pelayanan

SASARAN 2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Daerah

Indikator 1 : Peningkatan Komponen Area Perubahan RB Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan Pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Peningkatan komponen Area Perubahan RB Sekretariat Daerah	85	91.24	107.3	Bagian Tata Usaha dan Keuangan Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 239 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melaksanakan 8 (delapan) Komponen Area Perubahan Reformasi Birokrasi, melakukan monev secara berkala dan melaksanakan rencana yang tertuang dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi.

Peningkatan indikator ini dilakukan melalui rapat-rapat dengan Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka pengumpulan dokumen-dokumen Komponen 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi dari Bagian-Bagian lingkup Sekretariat Daerah dan selanjutnya dokumen tersebut disesuaikan dengan area perubahannya.

Adapun peningkatan komponen untuk 8 (delapan) Area Perubahan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI	PELAKSANAAN AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI	
		SEBELUM	SESUDAH
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	Belum dilakukan monitoring dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah di lakukan monitoring dan evaluasi dan tindaklanjut monev ▪ Adanya Agen Perubahan pada masing-masing Bagian lingkup Sekretariat Daerah ▪ Konsensus Assesor Reformasi Birokrasi
2	DEREGULASI KEBIJAKAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum dilakukan evaluasi atas peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah dibuat rekapitulasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang harmonis dengan aturan di atasnya ▪ Telah dilakukan evaluasi

3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	Belum dilakukan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah dilakukan penataan organisasi ▪ Adanya dokumen Analisis Beban Kerja ▪ Adanya dokumen Analisis Jabatan
4	PENATAAN TATALAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya penggunaan <i>website</i> informasi publik ▪ Pengadaan Barang/Jasa dengan versi 3.6 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah dilakukan publikasi perencanaan dan kinerja pada <i>website setda.tanahlautkab.go.id</i> ▪ Telah dilakukan <i>upgrade</i> ke versi 4.3
5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	Belum optimalnya penataan sistem manajemen sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi kehadiran pegawai secara elektronik ▪ Sasaran kinerja pegawai berbasis teknologi ▪ Kecerdasan emosional dan spritual ▪ Pengembangan kompetensi PNS
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	Belum optimalnya kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya dokumen Perjanjian Kinerja Eselon II, Eselon II, Eselon III dan Pelaksana ▪ Adanya dokumen Renja Murni dan Perubahan Renja ▪ Telah di Reviu Renstra Setda Tahun 2018-2023 ▪ Adanya dokumen LAKIP Setda ▪ Penyusunan IKU Setda
7	PENGUATAN PENGAWASAN	Belum optimalnya kegiatan penguatan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah dilaksanakan pembangunan zona integritas ▪ Penanganan dan tindak lanjut pengaduan
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Belum optimalnya kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inovasi publik berbasis teknologi <ol style="list-style-type: none"> 1. SosiaLiTa 2. <i>Smart Mirror</i> 3. SiSADIS 4. Aplikasi <i>E-Guest Book</i> ▪ Telah dilaksanakan kegiatan evaluasi layanan pengaduan ▪ Adanya dokumen SKM

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas terdapat beberapa kendala antara lain :

- Adanya beberapa komponen Area Perubahan Reformasi Birokrasi yang belum sepenuhnya terpenuhi
- Belum optimalnya pendokumentasian terkait data kegiatan Area Perubahan Reformasi Birokrasi
- Sumber Daya Manusia pengelolaan Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya paham terhadap sub komponen Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan rapat dengan Assesor Bagian-Bagian terkait pemenuhan dokumen-dokumen untuk Area Perubahan Reformasi Birokrasi

- Melakukan pendokumentasian terhadap data kegiatan pada area perubahan Reformasi Birokrasi
 - Pembekalan tentang dokumen komponen Area Perubahan Reformasi Birokrasi
- Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :
- Melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan
 - Bimtek terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - Melakukan koordinasi lebih intens ke Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten



Foto Kegiatan Rapat Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah



Foto Kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Kabupaten

Indikator 2 : Peningkatan Komponen Area Perubahan ZI Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan Pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Peningkatan komponen Area Perubahan ZI Sekretariat Daerah	82	84.65	103.2	Bagian Tata Usaha dan Keuangan Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 224/Kep-Sekda/2020 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas dan Tim Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka Tim Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas melaksanakan program kerja Pembangunan Zona Integritas berdasarkan rencana kerja, menyusun pembagian peran kepada anggota tim pelaksana, melaksanakan sosialisasi serta melakukan monev pelaksanaan Zona Integritas.

Peningkatan indikator ini dilakukan melalui rapat-rapat dengan Tim Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dalam pengumpulan dokumen-dokumen Komponen 6 (enam) Area Perubahan Zona Integritas dari Bagian-Bagian lingkup Sekretariat Daerah dan selanjutnya dokumen tersebut disesuaikan dengan area perubahannya.

Adapun peningkatan komponen untuk 6 (enam) Area Perubahan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	AREA PERUBAHAN ZONA INTEGRITAS	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	
		SEBELUM	SESUDAH
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	Belum dilakukan monitoring dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah dilakukan monitoring dan evaluasi dan tindak lanjut monev ▪ Adanya Agen Perubahan pada masing-masing Bagian lingkup Sekretariat Daerah ▪ Sekretaris Daerah sebagai <i>role model</i> dan agen perubahan
2	PENATAAN TATALAKSANA	Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian layanan kepada publik berupa instalasi SPSE Versi 4.3 dalam mendukung percepatan digitalisasi proses Pengadaan Barang/Jasa ▪ Evaluasi terhadap SOP kegiatan pada Bagian Umum

3	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	Belum optimalnya penataan sistem manajemen sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi kehadiran pegawai secara elektronik ▪ Aplikasi SIMFONI (Sistem Informasi Layanan Online) ▪ Sasaran kinerja pegawai berbasis teknologi ▪ Kecerdasan emosional dan spritual ▪ Pengembangan kompetensi PNS ▪ Penyesuaian sistem kerja selama pandemi Covid-19 (sistem kerja WFH dan WFO)
4	PENGUATAN AKUNTABILITAS	Belum optimalnya kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem Informasi Perjanjian Kinerja (SIPERJAKA) ▪ Dokumen Renstra Setda Tahun 2018-2023 ▪ Dokumen Renja APBD Murni dan APBD Perubahan ▪ Dokumen LAKIP Sekretariat Daerah ▪ Tersusunya IKU Sekretariat Daerah ▪ Dokumen LPPD Sekretariat Daerah
5	PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN	Belum optimalnya kegiatan penguatan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah melaksanakan dan rutin melakukan evaluasi terhadap: <ol style="list-style-type: none"> 1) Telah melaksanakan Pengendalian Gartifikasi 2) Menerapkan SPIP 3) Pengaduan Masyarakat 4) <i>Whistle Blowing System</i> 5) Penanganan Benturan Kepentingan
6	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Belum optimalnya kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inovasi pelayanan publik berbasis teknologi <ol style="list-style-type: none"> 1) SosialiTa (Sistem Order Semua Instansi Lingkup Tala) 2) <i>Smart Mirror</i> (Aplikasi <i>E-Faq</i>) 3) SiSADIS (Sistem Informasi <i>Smart Display Information & Schedule</i>) 4) Aplikasi <i>E-Guest Book</i> (Buku Tamu Elektornik) ▪ Telah dilaksanakan kegiatan evaluasi layanan pengaduan ▪ Dokumen Laporan SKM Sekretariat Daerah per Semester

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Adanya beberapa komponen Area Perubahan Zona Integritas yang belum sepenuhnya terpenuhi
- Belum optimalnya pendokumentasian terkait data kegiatan Area Perubahan Zona Integritas
- Sumber Daya Manusia pengelolaan Zona Integritas belum sepenuhnya paham terhadap sub komponen Area Perubahan Zona Integritas

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan rapat dengan Assesor Bagian-Bagian terkait pemenuhan dokumen-dokumen untuk Area Perubahan Zona Integritas
- Belum optimalnya pendokumentasian terkait data kegiatan Area Perubahan Zona Integritas
- Pembekalan tentang dokumen komponen Area Perubahan Zona Integritas

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah:

- Melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan
- Bimtek terkait Pelaksanaan Zona Integritas
- Koordinasi dengan Tim Pembina ZI Kabupaten secara intens



Foto Kegiatan Internalisasi Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Daerah



Foto Kegiatan Desk Zona Integritas oleh KemenpanRB

Indikator 3 : Peningkatan Komponen SAKIP Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan Pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Peningkatan komponen SAKIP Sekretariat Daerah	82	84.35	102.8	Bagian Tata Usaha dan Keuangan Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Peningkatan Komponen SAKIP Sekretariat Daerah dengan melaksanakan rapat koordinasi bersama Tim Penyusunan SAKIP Sekretariat Daerah, hal ini dilakukan untuk pengumpulan data dari Bagian-Bagian dalam rangka menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Daerah.

Peningkatan 5 (lima) Komponen SAKIP Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	KOMPONEN SAKIP	PROGRES KOMPONEN SAKIP	
		SEBELUM	SESUDAH
1	IMPLEMENTASI PENGUKURAN	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pemanfaatan IKU dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran Belum adanya revidi IKU secara berkala 	<ul style="list-style-type: none"> IKU telah di manfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran IKU telah di revidi/evaluasi secara berkala
2	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA	Belum optimalnya penyajian informasi tentang analisis laporan kinerja	Laporan kinerja telah menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya
3	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya penyajian informasi terkait penilaian dan pelaksanaan program / kegiatan Informasi yang disajikan belum sepenuhnya di gunakan untuk peningkatan kinerja Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk penilaian kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai pelaksanaan program / kegiatan Informasi yang disajikan telah menggambarkan penurunan capaian kinerja dan anggaran dari tahun sebelumnya (capaian kinerja tahun 2019 sebesar 88,02% dan di tahun 2020 sebesar 85,95%), hal ini dikarenakan adanya refocusing/rasionalisasi anggaran terkait pandemi COVID-19 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja (realisasi kinerja melalui SKP E-KITA dan E-SKP)
4	EVALUASI INTERNAL		
4.1	Kualitas Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> Belum Optimalnya pemantauan rencana aksi Belum optimalnya pemantauan rencana aksi dalam hal memberikan alternatif perbaikan Belum optimalnya evaluasi program dalam hal memberikan rekomendasi peningkatan kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan rencana aksi telah dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja Pemantauan rencana aksi telah memberikan alternatif perbaikan Evaluasi program telah memberikan rekomendasi peningkatan kinerja : <ol style="list-style-type: none"> Pada Bagian Organisasi pergeseran rincian kegiatan pada program pembinaan dan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan kegiatan penyusunan laporan kinerja pada rincian belanja makan dan minum dipindah ke rincian honor narasumber yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan <i>desk</i> penyempurnaan sasaran dan indikator kinerja seluruh SKPD Pada Bagian Umum melalui penganggaran pada program peningkatan sarana prasarana aparatur dengan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, untuk pengadaan server LPSE dalam rangka menunjang pelaksanaan proses tender barang/jasa
4.2	Pemanfaatan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> Hasil evaluasi program belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program Hasil evaluasi rencana aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil evaluasi program telah di tindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang Hasil evaluasi rencana aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata

5	PENCAPAIAN SASARAN KINERJA ORGANISASI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum maksimalnya capaian kinerja dari tahun sebelumnya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Capaian kinerja terjadi penurunan dari tahun sebelumnya (capaian kinerja tahun 2019 sebesar 88.02% dan di tahun 2020 sebesar 85,95%), hal ini dikarenakan adanya <i>refocusing</i>/rasionalisasi anggaran terkait pandemi COVID-19
---	--	---	---

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Petugas penyusun laporan kinerja kurang memahami maksud komponen SAKIP;
- Kurang cermatnya dalam hal penyajian data

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Meningkatkan kompetensi petugas penyusun Laporan Kinerja
- Rapat secara berkala dalam rangka membahas penyajian data dalam dokumen Laporan Kinerja

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Melaksanakan Bimtek terkait penyusunan Laporan Kinerja;
- Melaksanakan Monev terkait capaian kinerja
- Koordinasi lebih intens dengan Pembina SAKIP Kabupaten
- FGD



Foto Kegiatan Reviu SAKIP Sekretariat Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut



Foto Kegiatan Membahas Hasil Reviu SAKIP Sekretariat Daerah



Foto Kegiatan Membahas Hasil Reviu SAKIP Sekretariat Daerah

Indikator 4 : Peningkatan unsur SPIP Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan Pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Peningkatan unsur SPIP Sekretariat Daerah	3.5	-	-	Bagian Tata Usaha dan Keuangan Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Pengendalian intern Lingkup Sekretariat Daerah sudah terlaksana dengan tertib dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan terbukti dengan hasil penilaian Maturitas SPIP Sekretariat Daerah dari Itwil Kabupaten Tanah Laut dengan nilai 3,777, kemudian setelah dilakukan penilaian *Quality Assurance* dari Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Tanah Laut memperoleh nilai 3,16 dengan tingkat Maturitas level 3 dan untuk tahun ini masih dalam tahapan penyusunan Manajemen Risiko sehingga belum dilakukan lagi penilaian Maturitas SPIP.

Pengendalian Intern Lingkup Sekretariat Daerah telah melaksanakan 5 (lima) unsur SPIP, yaitu :

- 1) Lingkungan Pengendalian;
- 2) Penilaian Resiko;
- 3) Kegiatan Pengendalian;
- 4) Informasi dan Komunikasi;
- 5) Pemantauan Pengendalian Internal.

Dengan mekanisme pelaksanaannya melalui revidi dokumen-dokumen pada kelima unsur SPIP tersebut diatas.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Petugas penyusun laporan kinerja kurang memahami maksud unsur-unsur SPIP;
- Kurang cermatnya dalam hal penyajian data

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Meningkatkan kompetensi petugas penyusun laporan agar lebih memahami unsur-unsur SPIP
- Rapat secara berkala dalam rangka membahas penyajian data dalam dokumen SPIP

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Melaksanakan Bimtek terkait Manajemen Risiko
- Melaksanakan Monev terkait Rencana Tindak Lanjut Risiko
- Koordinasi lebih intens dengan Pembina SPIP Kabupaten
- FGD



Foto Kegiatan Bimbingan Teknis bersama BPKP Provinsi Kalimantan Selatan



Foto Kegiatan Bimbingan Teknis bersama BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Foto Kegiatan



Foto Kegiatan Desk Manajemen Risiko Sekretariat Daerah oleh BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut



Foto Kegiatan Desk Manajemen Risiko Sekretariat Daerah oleh BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

SASARAN 3 Meningkatnya Layanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan

Indikator : Persentase pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Pimpinan/ Bagian lingkup Sekrtariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
3	Meningkatnya layanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	Persentase pelayanan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Pimpinan/ Bagian lingkup Sekrtariat Daerah	100%	100%	100%	Bagian Tata Usaha dan Keuangan Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Untuk tahun 2020 telah melaksanakan pelayanan Administrasi Umum dan kepegawaian bagi PNS Lingkup Sekretariat Daerah dengan capaian indikator 100% melalui kegiatan :

1. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS Sekretariat Daerah
2. Pelayanan Administrasi Kepegawaian
 - Kenaikan Pangkat : 15 Dokumen
 - Kenaikan Gaji Berkala : 42 Dokumen
 - Izin Belajar : 7 Dokumen
 - Usul Ujian Dinas : 13 Dokumen
 - Permohonan Pensiun : 3 Dokumen
 - Dan Lain-lain
3. Pendidikan dan Pelatihan melalui *Webinar, Zoom Meeting*
4. Kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan disiplin Aparatur Sekretariat Daerah

Sedangkan untuk pelayanan keuangan pimpinan capaian kinerja 100% dengan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan operasional Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut.

❖ Analisis Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

- 1) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelaksanaan layanan Sekretariat Daerah dengan indikator Persentase Bagian dengan Nilai IKM Minimal Baik di tunjangan dengan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD dengan pagu Rp 61.521.100,00 terealisasi Rp 15.671.600,00 dengan realisasi keuangan sebesar 25,47% dan dilaksanakan oleh 7 (tujuh) orang SDM.

2) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan Pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah dengan indikator Peningkatan komponen Area Perubahan RB Sekretariat Daerah, Peningkatan komponen Area Perubahan ZI Sekretariat Daerah, Peningkatan komponen SAKIP Sekretariat Daerah dan Peningkatan unsur SPIP Sekretariat Daerah ditunjang dengan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD dengan pagu Rp 61.521.100,00 terealisasi Rp 15.671.600,00 dengan realisasi keuangan sebesar 25,47% dan dilaksanakan oleh 7 (tujuh) orang SDM.

*Catatan : Untuk kedua sasaran di atas di tunjang dengan program yang sama.

3) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya layanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan dengan indikator Persentase pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Pimpinan Bagian lingkup Sekretariat Daerah ditunjang dengan Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan pagu Rp 20.000.000,00 terealisasi Rp 0,00 dengan realisasi keuangan sebesar 0,00% karena adanya *Refocusing* /Rasionalisasi anggaran terkait Pandemi Covid-19 dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu Rp 5.190.124.423,00 terealisasi Rp 4.882.552.607,00 dengan realisasi keuangan sebesar 94,07% dan dilaksanakan oleh 5 (lima) orang SDM.

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	SDM	Ket
1	Persentase pelayanan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Pimpinan/ Bagian lingkup Sekrtariat Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.190.124.423	4.882.552.607	94,07	- Kabag TU dan Keuangan - Kasubbag TU dan Kepeg - Pelaksana Kepeg - Pramu Bhakti - Pengadm. - Kearsipan	Kegiatan ini ditiadakan karena adanya <i>Refocusing</i> /Rasionalisasi anggaran terkait Pandemi Covid-19
		Pemenuhan, Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	20.000.000,00	0	0		
2	Persentase Bagian dengan nilai IKM Minimal Baik	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	61.521.100	15.671.600	25,47	- Kabag TU dan Keuangan - Kasubbag TU dan Kepeg - Kasubbag Perenc. dan Keu - Pelaksana Kepeg - Pelaksana Perencanaan	Kegiatan ini tidak dilaksanakan sepenuhnya terkait dengan movev dan rapat-rapat karena adanya Pandemi Covid-19, kemudian kegiatan ini dilakukan melalui media elektronik (<i>WhatsApp Grup</i>)
2	Persentase Bagian dengan nilai IKM Minimal Baik						
3	Peningkatan komponen Area Perubahan RB Sekretariat Daerah						

4	Peningkatan komponen Area Perubahan ZI Sekretariat Daerah					
5	Peningkatan komponen SAKIP Sekretariat Daerah					
6	Peningkatan unsur SPIP Sekretariat Daerah					
JUMLAH			5.271.645.523	4.898.224.207	92,92	

❖ Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Untuk capaian Indikator sasaran pada Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian dilaksanakan melalui program :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu Rp 5.190.124.423,00 terealisasi Rp 4.882.552.607,00 dengan realisasi keuangan sebesar 94,07% dengan dukungan SDM sebanyak 5 (lima) orang, terdiri dari :
 - Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi dengan pagu Rp 1.802.745.223,00 terealisasi Rp 1.787.564.615,00 dengan realisasi keuangan sebesar 99,16%;
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD dengan pagu Rp 3.387.379.200,00 terealisasi Rp 3.094.987.992,00 dengan realisasi keuangan sebesar 91.37%;
 - Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Staf Ahli Bupati dengan pagu Rp 0,00 terealisasi 0,00 dengan realisasi keuangan sebesar 0,00%, kegiatan ini ditiadakan karena adanya *Refocusing /Rasionalisasi* anggaran terkait Pandemi *Covid-19*.
- 2) Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan pagu Rp 20.000.000,00 terealisasi Rp 0,00 dengan realisasi keuangan sebesar 0,00% dengan dukungan SDM sebanyak 5 (lima) orang, terdiri dari :
 - Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur dengan pagu Rp 20.000.00,00 terealisasi Rp 0,00 dengan realisasi keuangan sebesar 0,00%, kegiatan ini tidak dilaksanakan karena adanya *Refocusing /Rasionalisasi* anggaran terkait Pandemi *Covid-19*.
 - Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan pagu Rp 0,00 terealisasi Rp 0,00 dengan realisasi keuangan sebesar 0,00%, kegiatan ini tidak dilaksanakan karena adanya *Refocusing /Rasionalisasi* anggaran terkait Pandemi *Covid-19*.

Tabel Capaian Sasaran dan Indikator
Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memberikan Pelayanan Surat Menyurat Lingkup Setda Sesuai SOP	Jumlah SKPD/Bagian Lingkup Setda yang terlayani adminitrasi Surat Menyurat.	54 SKPD/Bagian	54 SKPD/Bagian	100%	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
2	Memberikan pelayanan Adminitrasi Kepegawaian Lingkup Setda.	Jumlah Adminitrasi Kepegawaian Lingkup Setda yang terselesaikan	250 Kali	250 Kali	100%	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
3	Memberikan Pelayanan Administrasi Pimpinan Lingkup Setda	Persentase Pelayanan Adminitrasi Pimpinan Daerah (KDH/WKDH/Sekda)	100 %	100 %	100%	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
4	Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip Lingkup Setda	Persentase Arsip yang terkelola sesuai SOP	100 %	100 %	100%	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
5	Penyusunan Laporan Pelaksanaan RB Sekretariat Daerah dan ZI Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan RB Sekretariat Daerah dan ZI Sekretariat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
6	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian

SASARAN 1 Memberikan Pelayanan Surat Menyurat Lingkup Sekretariat Daerah Sesuai SOP

Indikator : Jumlah SKPD/Bagian Lingkup Sekretariat Daerah yang Terlayani Adminitrasi Surat Menyurat

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memberikan Pelayanan Surat Menyurat Lingkup Setda Sesuai SOP	Jumlah SKPD/Bagian Lingkup Setda yang terlayani adminitrasi Surat Menyurat.	54 SKPD/Bagian	54 SKPD/Bagian	100%	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian

Layanan administrasi persuratan lingkup Sekretariat Daerah/SKPD dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 baik surat masuk maupun surat keluar terlaksana sesuai aturan dan teragenda dengan tertib dengan pencatatan surat masuk dari SKPD, Instansi Vertikal, Kecamatan, dan K/L dan lain-lain sebanyak **3.883** surat dan pencatatan surat keluar sebanyak **3.894** surat.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Pendistribusian surat-menyurat yang agak lambat
- Sumber Daya Manusia yang melakukan administrasi surat-menyurat kurang memahami sifat surat

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah:

- Mempercepat pengadministrasi surat menyurat
- Mempercepat pendistribusian surat menyurat sesuai disposisi
- Pembekalan aturan tentang surat menyurat

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah:

- Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang menangani surat-menyurat
- Penggunaan system Tata Naskah Dinas Elektronik

SASARAN 2 Memberikan Pelayanan Adminitrasi Kepegawaian Lingkup Sekretariat Daerah

Indikator : Jumlah Adminitrasi Kepegawaian Lingkup Sekretariat Daerah yang Terselesaikan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Memberikan pelayanan Adminitrasi Kepegawaian Lingkup Setda.	Jumlah Adminitrasi Kepegawaian Lingkup Setda yang terselesaikan	250 Kali	250 Kali	100%	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian

Untuk tahun 2020 Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian telah melaksanakan jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian untuk PNS lingkup Sekretariat Daerah sebagai berikut :

Tabel Jumlah Fasilitas Administrasi Kepegawaian
Lingkup Sekretariat Daerah

NO.	URAIAN	JUMLAH	KET
1.	Kenaikan Pangkat	15 Dokumen	
2.	Kenaikan Gaji Berkala	42 Dokumen	
3.	Izin Belajar	7 Dokumen	
4.	Usul Ujian Dinas	13 Dokumen	
5.	Permohonan Pensiun	3 Dokumen	
6.	Bimbingan Teknis	-	
7.	Diklat Penjenjangan	-	
8.	Permohonan Kartu Isteri PNS	4 Dokumen	
9.	Pencantuman Gelar	2 Dokumen	
10.	Penyesuaian Ijazah	1 Dokumen	
11.	Permohonan Mutasi Pegawai	-	
12.	Diklat PIM Tk. I	-	
13.	Diklat PIM Tk. IV	3 Dokumen	
14.	Izin Pegawai	37 Dokumen	

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Masih ada Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah yang belum lengkap file kepegawaian

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah supaya melengkapi file kepegawaian

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Perlu melengkapi data kepegawaian untuk dimasukkan ke Aplikasi SIDIKA

SASARAN 3 Memberikan Pelayanan Administrasi Pimpinan Lingkup Sekretariat Daerah

Indikator : Pelayanan Adminitrasi Pimpinan Daerah (KDH/WKDH/Sekda)

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Memberikan Pelayanan Administrasi Pimpinan Lingkup Setda	Persentase Pelayanan Administrasi Pimpinan Daerah (KDH/WKDH/Sekda)	100 %	100 %	100%	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian

Pelayanan administrasi Pimpinan Daerah (KDH/WKDH/Sekda) yang meliputi:

1. pelayanan administrasi surat menyurat pimpinan untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah;

2. pelayanan pembayaran gaji dan operasional Bupati dan Wakil Bupati

Indikator ini telah dilaksanakan dengan tuntas 100% karena kegiatan ini sifatnya fasilitasi Pimpinan Daerah.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Pencatatan surat menyurat pimpinan melalui E-TNDE (Tata Naskah Dinas Elektronik) agar terdokumentasi dengan akurat

SASARAN 4 Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip Lingkup Sekretariat Daerah

Indikator : Persentase Arsip yang Terkelola Sesuai SOP

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip Lingkup Setda	Persentase Arsip yang terkelola sesuai SOP	100 %	100 %	100%	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian

Pengelolaan arsip Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut telah sesuai SOP Kearsipan, dengan capaian kinerja 100%, hal ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Jumlah Persentase Arsip yang terkelola sesuai SOP

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH (m3)	KET
1.	Pimpinan Daerah (KDH/WKDH/Sekda)	7	100%
2.	Bagian Tata Pemerintahan	6	100%
3.	Bagian Hukum	7	100%
4.	Bagian Organisasi	5	100%
5.	Bagian Kesra	5	100%
6.	Bagian Perekobang	6	100%
7.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	11	100%
8.	Bagian Humas	5	100%
9.	Bagian Umum	15	100%
10.	Bagian TU dan Keuangan	13	100%

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya agar pengelolaan arsip lebih sistematis dengan klasifikasi dokumen adalah :

- Menambah dan meningkatkan kualitas ruangan untuk penyimpanan arsip
- Meningkatnya Sumber Daya Manusia pengelolaan kearsipan

SASARAN 5 Penyusunan Laporan Pelaksanaan RB Sekretariat Daerah dan ZI Sekretariat Daerah

Indikator : Penyusunan Laporan Pelaksanaan RB Sekretariat Daerah dan ZI Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Penyusunan Laporan Pelaksanaan RB Sekretariat Daerah dan ZI Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan RB Sekretariat Daerah dan ZI Sekretariat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian

❖ Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah

Untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah telah dilaksanakan dengan 8 (delapan) area perubahan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI	PELAKSANAAN AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	
	i Tim Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 239 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut - Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomot 206 Tahun 2019 ttg Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut - Laporan Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019
	ii Road Map Reformasi Birokrasi	Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah
	iii Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Sekretariat Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Asesor Pelaksanaan RB di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah - Laporan Tim Reformasi Birokrasi Setda tentang pelaksanaan Rencana Aksi
	iv Perubahan pola pikir dan budaya kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor: 208/Kep-Sekda/2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana, Tim Penyusun Road Map/Rencana Aksi dan Agen Perubahan RB Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Tahun 2019 - Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/594-/2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana, Tim Penyusun Road Map Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 2019
2	DEREGULASI KEBIJAKAN	
	- Harmonisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar/list Peraturan PerUU yang Harmonis/tidak Harmonis - Telaahan Staf Usul Perubahan Nomenklatur (Bagian Umum, Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)

3		PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	
	i	Evaluasi Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir Perhitungan Variabel Umum dan Variabel Teknis Indikator Pemetaan Sekretariat Daerah - Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
	ii	Tindak Lanjut Evaluasi	Nota Dinas mohon koreksi konsep Peraturan Bupati Tanah Laut terkait Perbup Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
4		PENATAAN TATALAKSANA	
	i	Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)	SOP masing-masing Bagian Lingkup Sekretariat Daerah
	ii	Keterbukaan Informasi Publik	<i>Screenshot Website</i> dan Apikasi di Lingkup Sekretariat Daerah
5		PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	
	i	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2019 tentang Informasi Jabatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 74 Tahun 2020 tentang Analisis Beban Kerja Sekretariat
	ii	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil identifikasi Diklat yang telah diikuti masing-masing Bagian Lingkup Sekretariat Daeah - Rencana Kebutuhan Diklat
	iii	Penetapan Kinerja Individu	<ul style="list-style-type: none"> - PK Es II, III, IV dan Pelaksana Sekretariat Daerah - SKP Online Sekretariat Daerah - Realisasi Kinerja bulanan pada e-kita lingkup Sekretariat Daerah
	iv	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut - Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Penerapan Budaya Kerja saat New Normal - Surat Edaran Nomor 800/2298/VII/2020 tentang Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
	v	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> - Draft Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor... Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut - Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/83-Kum/2020 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
	vi	Sistem Informasi Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> - Screenshot Aplikasi Simpeg - Screenshot Aplikasi Sidika
6		PENGUATAN AKUNTABILITAS	
	i	Keterlibatan pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> - Undangan Rapat penyusunan Renstra yang di ttd pimpinan sekaligus sebagai pemimpin Rapat - SK Bupati Tanah Laut No 693 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Renstra Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2018 – 2023 - PK Es II, III, IV dan Pelaksana Sekretariat Daerah
	ii	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan kinerja bulanan - LAKIP Setda Tahun 2019

7		PENGUATAN PENGAWASAN	
	i	Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut - Himbauan Bupati terkait gratifikasi - Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13/Kep-Sekda/2020 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020
	ii	Penerapan SPIP	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4/Kep-Sekda/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intrn Pemerintah (SPIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut - Dokumen Identifikasi dan penilaian Risiko 2019 - Laporan Penilaian Risiko Tahun 2019 - Tindak Lanjut RTP Penilaian Risiko
	iii	Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil penanganan pengaduan LPSE - Pengaduan melalui E-Lapor - Laporan TL hasil Monev UKPBJ - Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat melalui E-Lapor
	iv	Whistle Blowing System	<ul style="list-style-type: none"> - Screenshot aplikasi WBS - Pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan ZI daftar Hadir, foto kegiatan dan Laporan tentang Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
	v	Penanganan Benturan Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 21/Kep-Sekda/2019 tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut - Laporan Hasil Identifikasi benturan kepentingan - Rekapitulasi Identifikasi Benturan Kepentingan Bagian-Bagian Tahun 2020
	vi	Pembangunan Zona Integritas	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/669-KUM/2019 tentang Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Akan Dikembangkan Menjadi Zona Integritas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 - Pernyataan Komitmen pimpinan Sekretariat Daerah - Pakta Integritas Eselon II, III dan IV Sekretariat Daerah - Laporan Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Daerah
8		PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	
	i	Standar Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/692-Kum/2014 Tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut - Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/660-KUM/2019 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 47 Tahun 2014 tentang Standar Prosedur Operasional (SPO) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tanah Laut - Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14/Kep-Sekda/2020 tentang Standar dan Jenis Layanan Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut - Maklumat Pelayanan Sekretariat Daerah - Rapat yang melibatkan stakeholders
	ii	Budaya Pelayanan Prima	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Kode etik, penerpan budaya pelayanan prima - Inovasi Sekretariat Daerah - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Order E-Marketplace Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
	iii	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Website</i> Pengaduan - <i>Call Center</i>

			- SKM Sekretariat Daerah
	iv	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	- Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 661 Tahun 2019 Tentang Tim Pengelolaan Pengaduan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut - Laporan SKM Sekretariat Daerah Tahun 2020
	v	Pemanfaatan Teknologi Informasi	- Aplikasi dalam pemberian pelayanan - (Aplikasi Simpeg) - Aplikasi SIRUP - Kegiatan Bimbingan Teknis Pengadaan Langsung secara elektronik (e-PL) untuk penyedia

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Dalam menyusun bahan laporan Reformasi Birokrasi masih perlu waktu untuk menghimpun dokumen dan berkas yang belum tertib
- Dalam mengarsipkan dan mendokumentasikan kegiatan masih kurang maksimum
- Sebagian komponen area perubahan Reformasi Birokrasi belum terpenuhi

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indicator ini adalah :

- Meningkatkan pemahaman ASN lingkup Sekretariat Daerah mengenai 8 (delapan) Area Perubahan
- Semua kegiatan yang dilakukan oleh ASN lingkup Sekretariat Dearah agar didokumentasi dan kearsipkan
- Meningkatkan pemenuhan komponen area perubahan Reformasi Birokrasi

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Perlu adanya Bimtek untuk penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi

❖ Pelaksanaan Zona Integritas Sekretariat Daerah

Untuk pelaksanaan Zona Integritas Sekretariat Daerah telah dilaksanakan dengan 6 (enam) area perubahan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO		AREA PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS	PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS
I		MANAJEMEN PERUBAHAN	
	1	Tim Kerja	- Pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan ZI, daftar Hadir, foto kegiatan dan Laporan - Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 224/Kep-Sekda/2020 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas dan Tim Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkup Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
	2	Rencana Pembangunan Zona Integritas	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 232/Kep-Sekda/2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

	3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Daerah - Dokumen hasil monitoring dan evaluasi serta rekomendasi yang ditindaklanjuti
	4	Perubahan pola pikir dan budaya kerja	<ul style="list-style-type: none"> - LHKPN KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah - Dokumentasi Jurnal Kegiatan KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah - Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Penerapan Budaya Kerja saat <i>New Normal</i>
II		PENATAAN TATALAKSANA	
	1	Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama	<ul style="list-style-type: none"> - SOP Kegiatan Bagian-Bagian Lingkup Sekretariat Daerah - SOP yang direvisi/dievaluasi
	2	E-Office	<ul style="list-style-type: none"> - Capture <i>website</i>, aplikasi layanan serta media sosial di Sekretariat Daerah
	3	Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian Kinerja Eselon II, Eselon, III, Eselon IV dan Pelaksana 2020 - Capture <i>website</i>, aplikasi layanan serta media sosial di Sekretariat Daerah
III		PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	
	1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 74 Tahun 2019 tentang Analisis Beban Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut - Dokumen kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dan ABK - Bezetting Sekretariat Daerah Tahun 2017, 2018, 2019
	2	Pola Mutasi Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 824/174-SI/2019 tentang Mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut - Rencana Kebutuhan Pegawai
	3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Kebutuhan Diklat Sekretariat Daerah - SKM <i>Online</i> Sekretariat Daerah - Perbandingan Kompetensi Pegawai (SKJ) Eselon II Sekretariat Daerah - Rekapitulasi Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Tingkat III dan Tingkat II ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
	4	Penetapan kinerja individu	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian Kinerja Eselon II, Eselon III dan Eselon IV serta Pelaksana Sekretariat Daerah - SKP <i>Online</i> Sekretariat Daerah
	5	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pengadaan Barang dan Jasa Daerah - Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/223-Kum/2020 tentang Pembentukan Tim Komite Etik dan Tim Sekretariat Komite Etik Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020
	6	Sistem Informasi Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil pemutakhiran data pegawai secara bulanan (Rekap Absensi Bulanan) - SOTK Sekretariat Daerah Tahun 2020
IV		PENGUATAN AKUNTABILITAS	
	1	Keterlibatan pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 1884.45/693-Kum/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut - PK Eselon II, Eselon, III, Eselon IV dan Pelaksana 2020 Sekretariat Daerah - Capture pemantauan pencapaian kinerja secara bulanan oleh kepala satuan kerja pada aplikasi E-Kita
	2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6/Kep-Sekda/2020 tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 - Perencanaan Kerja Jangka Pendek (Renja) Tahun 2020 - Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023

			<ul style="list-style-type: none"> - PK Eselon II, Eselon, III, Eselon IV dan Pelaksana 2020 - Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah - Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP) Setda Tahun 2019
V		PENGUATAN PENGAWASAN	
	1	Pengendalian Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut - Himbauan Bupati terkait larangan gratifikasi dan penerapan Zona Integritas - Pernyataan Komitmen Sekretariat Daerah - Pakta Integritas Eselon II, Eselon III dan Eselon IV Sekretariat Daerah
	2	Penerapan SPIP	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Identifikasi dan penilaian Risiko 2019 - Pelaksanaan Desk dan Reviu Penilaian Risiko dan Pengendalian Sekretariat Daerah - Laporan Penilaian Risiko Tahun 2019 - Tindak Lanjut RTP Penilaian Risiko - Rekapitulasi Identifikasi Benturan Kepentingan Bagian-Bagian Tahun 2020 - Rekapitulasi Identifikasi Benturan Kepentingan Bagian-Bagian Tahun 2020
	3	Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat - SKM Sekretariat Daerah Tahun 2020 - Aplikasi UKPB
	4	Whistle-Blowing System	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Screenshot aplikasi WBS</i>
	5	Penanganan Benturan Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 210/Kep-Sekda/2019 tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut - Rekapitulasi Identifikasi Benturan Kepentingan Bagian-Bagian Tahun 2020 - Dokumen Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2020 - Laporan Hasil Identifikasi benturan kepentingan
VI		PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	
	1	Standar Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/692-Kum/2014 Tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut - SK Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/660-KUM/2019 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 47 Tahun 2014 tentang Standar Prosedur Operasional (SPO) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tanah Laut - Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14/Kep-Sekda/2020 tentang Standar dan Jenis Layanan Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah Tahun 2020
	2	Budaya Pelayanan Prima	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11/Kep-Sekda/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pengelola Informasi dan Website Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 - <i>Capture No Smoking Area, Smoking Room, Stiker informasi, Kursi Prioritas Pelayanan</i> - <i>Capture sarana informasi layanan pada Sekretariat Daerah</i>
	3	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah Tahun 2020 Kuesioner layanan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (UKBPJ) <i>online</i>

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Dalam menyusun bahan laporan Zona Integritas masih perlu waktu untuk menghimpun dokumen dan berkas yang belum tertib
- Dalam mengarsipkan dan mendokumentasi kegiatan masih kurang maksumum
- Sebagian komponen area perubahan Reformasi Birokrasi belum terpenuhi

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Meningkatkan pemahaman ASN lingkup Sekretariat Daerah mengenai 6 (enam) area perubahan
- Semua kegiatan yang dilakukan oleh ASN lingkup Sekretariat Daerah agar didokumentasikan dan diarsipkan dengan rapi dan tertib
- Meningkatkan pemenuhan komponen area perubahan Zona Integritas Birokrasi

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Perlu ada Bimtek untuk penyusunan Laporan Birokrasi Reformasi

SASARAN 6 Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah

Indikator : Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian

Laporan SKM ini disusun berdasarkan hasil survey pada Bagian-Bagian lingkup Sekretariat Daerah untuk Semester I dan Semester II, dengan cara Bagian-Bagian membagi kuesioner kepada responden yang menerima layanan Bagian tersebut. Berdasarkan hasil survey IKM Sekretariat Daerah Semester II mengalami peningkatan dari Semester I, namun ada 1 (satu) Bagian IKM nya mengalami penurunan pada Semester II.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Kuesioner yang dibagikan ke responden tidak semua kembali
- Kurangnya minat responden untuk mengisi kuesioner
- Sumber Daya Manusia yang melakukan pelayanan prima masih terbatas

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Konfirmasi ke responden terkait pengisian kuesioner survey
- Petugas yang memberikan pelayanan kepada responden menjelaskan cara, tujuan dan maksud pengisian kuesioner
- Meningkatkan pengetahuan petugas yang memberikan pelayanan kepada responden
- Memberikan penjelasan kepada responden pentingnya hasil survey untuk meningkatkan pelayanan

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Perlu ada Bimtek pelayanan prima bagi petugas pelayanan
- Untuk pengisian kuesioner survey menggunakan sistem *online*

❖ **Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Untuk capaian Indikator sasaran pada Kasubbag Perencanaan dan Keuangan dilaksanakan melalui Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD dengan pagu Rp 61.521.100,00 terealisasi Rp 15.671.600,00 dengan realisasi keuangan sebesar 25,47% dengan dukungan SDM sebanyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari :

- Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan kinerja SKPD dengan pagu Rp 40.550.00,00 terealisasi Rp 7.765.400,00 dengan realisasi keuangan sebesar 19,15%;
- Kegiatan Penyusunan laporan keuangan dengan pagu Rp 10.171.100,00 terealisasi Rp 4.613.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar 45,35%;
- Kegiatan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja dengan Pagu Rp 10.800.000,00 teralisasi Rp 3.293.200,00 dengan realisasi keuangan sebesar 30,49%.

Tabel Sasaran dan Indikator Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun sesuai ketentuan, (Bulanan, Triwulan/ Rekon/Semester, CALK, LPPD Sekretariat Daerah, SAKIP Sekretariat Daerah dan SPIP Sekretariat Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
2	Penyusunan Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai aturan, (Renstra, Renja, RKA, DPA) Sekretariat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

SASARAN 1 Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah

Indikator : Jumlah Laporan yang disusun sesuai ketentuan, (Bulanan, Triwulan/Rekon/Semester, CALK, LPPD Sekretariat Daerah, SAKIP Sekretariat Daerah dan SPIP Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun sesuai ketentuan, (Bulanan, Triwulan/ Rekon/Semester, CALK, LPPD Sekretariat Daerah, SAKIP Sekretariat Daerah dan SPIP Sekretariat Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

❖ Bulanan, Triwulan/Rekon/Semester, CALK Sekretariat Daerah

Catatan Atas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah dimaksudkan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi, dan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka lancarnya proses kegiatan pengelolaan keuangan tersebut perlu dilakukan penyusunan laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan sampai dengan

Rekonsiliasi Belanja dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV, dan pada akhir tahun disusun Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah

❖ **LPPD Sekretariat Daerah**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap kinerja Sekretariat Daerah sekaligus menjadi bahan informasi atas pelaksanaan penyelenggaraanya, laporan ini juga memuat prestasi dan keberhasilan yang telah diraih dan permasalahan yang harus diselesaikan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memuat tentang :

1. Visi dan Misi
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Program dan Kegiatan
4. Kerjasama dengan pihak ketiga
5. Permasalahan Tata Batas Antar Daerah yang Berhasil Ditindaklanjuti
6. Kerjasama Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Pihak Ketiga yang berhasil ditindaklanjuti

Untuk tahun 2020 LPPD Sekretriati Daerah telah disampaikan ke Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai bahan atau data untuk LPPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2020.

❖ **SAKIP Sekretariat Daerah**

Berdasarkan surat dari Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor: 700/170//LHE-Insp/2020, Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) Tahun 2019, merekomendasikan SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut agar dilakukan perbaikan terhadap Dokumen Perencanaan agar dilakukan reviu secara berkala.

Terkait hal tersebut diatas dengan ini telah dilakukan perbaikan pada komponen

SAKIP Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT
1	PENGUKURAN KINERJA	- Pengumpul data kinerja rencana aksi dilaksanakan secara berkala	Melakukan pengumpulan data kinerja Triwulan I sampai dengan Triwulan IV
		- Perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap dokumen perjanjian kinerja agar dapat dijadikan dasar pemberian <i>reward and punishment</i>	Melakukan Monev terhadap Dokumen Perjanjian Kinerja pada saat terjadi mutasi Pegawai
2	PELAPORAN KINERJA	- Didalam laporan kinerja agar disajikan informasi mengenai analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta perbandingan realisasi capaian kinerja	Melakukan analisis capaian kinerja dan perbandingan realisasi capaian dengan target jangka menengah

		tahun berjalan dengan target jangka menengah	
		- Informasi dan data kinerja yang andal agar dimanfaatkan untuk perbaikan Perencanaan, menilai, memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja	Melakukan evaluasi terhadap target kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan
3	EVALUASI INTERNAL	- Monitoring dan Evaluasi secara berkala atas pelaksanaan program dan rencana aksi agar dapat memberikan simpulan keberhasilan atau kegagalan program beserta rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan	Melakukan perbaikan terhadap dokumen Rencana Aksi
		- Perlu dilaksanakannya monitoring evaluasi terhadap rencana aksi dan program kegiatan serta dilakukan tindak lanjut perbaikan dalam bentuk langkah-langkah yang nyata	Melakukan Monev terhadap Rencana Aksi Program dan Kegiatan
4	PENCAPAIAN KINERJA	Pencapaian kinerja organisasi agar lebih di tingkatkan untuk menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat	Meningkatkan capaian kinerja terhadap pencapaian target kinerja dari tahun sebelumnya

❖ SPIP Sekretariat Daerah

Pada tahun 2018 Sekretariat Daerah telah dilakukan penilaian Maturitas SPIP oleh ITWIL Kabupaten Tanah Laut dengan membuat dokumen-dokumen sesuai dengan unsur-unsur SPIP tersebut.

Dalam hal ini pelaksanaan unsur-unsur SPIP tersebut dapat di lihat pada tabel berikut :

NO	UNSUR SPIP	SUB UNSUR	PELAKSANAAN SUB UNSUR
1	LINGKUNGAN PENGENDALIAN	- Penegakan Integritas dan etika	- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut - Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13/Kep-Sekda/2020 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 - Pakta Integritas Eselon II, Eselon III dan Eselon IV dan Pelaksana Lingkup Sekretariat Daerah
		- Komitmen terhadap kompetensi	- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 74 Tahun 2020 tentang Analisis Beban Kerja Sekretariat - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 168 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan Sekretariat Daerah - Rekapitulasi Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Tingkat III dan Tingkat II ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut - Daftar pegawai yang telah mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi lainnya.

		<ul style="list-style-type: none"> - Kepemimpinan yang kondusif 	<ul style="list-style-type: none"> - SOP Penyusunan LAKIP - SOP Penyusunan Renstra - Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 40/KEP-SEKDA/2020 tentang Pembentukan Tim Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut - Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah oleh Tim Kabupaten - Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4/Kep-Sekda/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut - Pedoman Penyusunan RKA
		<ul style="list-style-type: none"> - Struktur organisasi sesuai kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut - Laporan Hasil Tim Penyusun SOTK - Kegiatan Verifikasi SOTK Baru
		<ul style="list-style-type: none"> - Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab 	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penunjukan sebagai Plh/Plt - Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Kepada Camat - Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pengguna Anggaran PPTK - Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pengguna Anggaran PA/KPA
		<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan pembinaan SDM yang sehat 	<ul style="list-style-type: none"> - Buku Penjagaan Pensiun, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala dan Fasilitas Izin Belajar - Daftar Urut Kependidikan - Penyusunan Formasi PNS - Hasil identifikasi diklat yang telah diikuti masing-masing Bagian
		<ul style="list-style-type: none"> - Peran APIP yang efektif 	-
		<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan kerja yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti Rekonsiliasi Keuangan TW. I s/d TW. IV - Rekonsiliasi Pendapatan dan Piutang - Rekonsiliasi BMD Barang Daerah - Laporan Keuangan Akhir Tahun - Laporan Pemanfaatan BMD
2	PENGENDALIAN RISIKO	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi risiko 	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4/Kep-Sekda/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut - Dokumen Identifikasi Risiko Bagian Lingkup Sekretariat Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> - Analisis risiko 	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian Risiko yang berisi <i>Risk Register</i> - Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
3	KEGIATAN PENGENDALIAN	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Review</i> kinerja Instansi Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati Tanah Laut tentang TPP - Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah - Rakor Pejabat Pemerintah Daerah (<i>Coffee Morning</i>)
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan SDM 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 168 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan Sekretariat Daerah

			<ul style="list-style-type: none"> - Rekapitulasi Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Tingkat III dan Tingkat II ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 74 Tahun 2019 tentang Analisis Beban Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut - Rencana Kebutuhan Diklat Sekretariat Daerah
		- Pengendalian pengelolaan sistem informasi	<p>Screenshot <i>Website</i> dan Aplikasi Sekretariat Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sirup.ikpp.go.id (SIRUP) - lpse.tanahlautkab.go.id (LPSE) - ukpbj.tanahlautkab.go.id (UKPBJ) - reportinglpse.tanahlautkab.go.id - jdih.tanahlautkab.go.id (JDIH) - Facebook Humas Kab. Tala dan Instagram Humas Kab. Tala - Aplikasi Sosialita (Sistem Order Semua Instansi Lingkup Tala) - setda.tanahlautkab.go.id - SIMPEG - Simda Keuangan
		- Pengendalian fisik aset	<ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Pemakaian Kendaraan Dinas Sekretariat Daerah - Keputusan tentang Pengurus Barang - Berita Acara <i>Stock Opname</i> Barang Pakai Habis dan Cetakan
		- Penetapan dan <i>review</i> indikator dan ukuran kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Renstra Sekretariat Daerah - Perjanjian Kinerja Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Pelaksana Sekretariat Daerah - Dokumen IKU Sekretariat Daerah - Renja Sekretariat Daerah - LAKIP Sekretariat Daerah - SKP Tahunan <i>Online</i>
		- Pemisahan fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
		- Otorisasi transaksi dan kejadian penting	<ul style="list-style-type: none"> - SOP Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah - SOP Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah - Dokumen SPJ Sekretariat Daerah - Dokumen SPP Sekretariat Daerah - Dokumen SPM Sekretariat Daerah
		- Pencatatan akurat dan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> - BKU Sekretariat Daerah - Laporan BMD Sekretariat Daerah - KIB Sekretariat Daerah - LKPJ dan LPPD Sekretariat Daerah - Laporan Keuangan Akhir Tahun
		- Pembatasan akses sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pengguna Barang, Pejabat Penata Usahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang - Surat Keputusan tentang Penunjukan Bendahara - Keputusan tentang Penunjukan PA dan KPA
		- Akuntabilitas sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan tentang Penunjukan PA dan KPA - Surat Keputusan tentang Penunjukan Bendahara - Laporan BMD - Laporan Keuangan - Laporan Bendahara Penerimaan - Laporan Pengelolaan Kepegawaian
		- Dokumentasi sistem pengendalian intern	<ul style="list-style-type: none"> - SOP Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah - SOP Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah - Data Kepegawaian - Data Keuangan - Data Aset BMD

4	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	- Sarana komunikasi	Screenshot <i>Website</i> dan Aplikasi Sekretariat Daerah : - sirup.ikpp.go.id (SIRUP) - lpse.tanahlautkab.go.id (LPSE) - ukpbj.tanahlautkab.go.id (UKPBJ) - reportinglpse.tanahlautkab.go.id - jdih.tanahlautkab.go.id (JDIH) - Facebook Humas Kab. Tala dan Instagram Humas Kab. Tala - Aplikasi Sosialita (Sistem Order Semua Instansi Lingkup Tala) - setda.tanahlautkab.go.id
		- Manajemen sistem informasi	- E monev - E Planning - Simda Keuangan - Simda BMD
5	PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN	- Pemantauan berkelanjutan	- Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat melalui E-Lapor - Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait layanan SPSE beserta tindak lanjut
		- Evaluasi terpisah	- Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah - Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas
		- Tindak lanjut	-

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Petugas penyusun laporan kinerja kurang memahami pedoman penyusunan laporan kinerja dengan baik;
- Bendahara kurang memahami dalam menginput data;
- Bendahara kurang teliti/cermat dalam menentukan post kegiatan belanja yang harus ditransaksikan;
- Rendahnya Respon Bendahara secara positif terhadap pelaporan keuangan, penggaran maupun pelaksanaan program dan kegiatan;
- Rendahnya kepatuhan atas aturan batas akhir pelaporan keuangan;

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Rapat dengan petugas penyusun laporan kinerja membahas tentang pedoman penyusunan laporan kinerja
- Pembinaan kepada bendahara agar lebih cermat dalam melakukan pembayaran
- Melakukan pengendalian intern terhadap pelaksanaan anggaran
- Melakukan pemantauan terhadap serepan anggaran maupun penyampaian laporan keuangan
- Melakukan koreksi awal atas laporan tahunan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul setelah tutup buku per 31 Desember.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Melaksanakan Rapat/Monev per triwulan yang di pimpin atasan langsung terkait capaian kinerja Bagian-Bagian;
- Membuat aplikasi Laporan Kinerja dan Keuangan Bagian dengan tujuan aplikasi tersebut untuk mempermudah dalam hal perencanaan, penganggaran dan pelaporan berbasis *online*, cepat serta meminimalisir usulan perencanaan yang tumpang tindih, peningkatan alokasi fasilitasi usulan pola pikir dari pemangku kepentingan serta ketersediaan data yang *update* untuk perencanaan dan pelaporan.
- Melaksanakan Bimtek terkait penyusunan Laporan Kinerja;
- Melaksanakan Monev per bulan, monev per triwulan dan monev akhir tahun terkait capaian kinerja dan keuangan;
- Memberikan fasilitasi dalam pengelolaan anggaran melalui penetapan pedoman, bimbingan teknis, dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi;
- Melaksanakan Verifikasi secara intens;
- Membuat SOP Monev;
- FGD;

SASARAN 2 Penyusunan Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai aturan, (Renstra, Renja, RKA, DPA) Sekretariat Daerah

Penyusunan Dokumen perencanaan berupa Renstra, Renja, RKA, Laporan Benturan Kepentingan, Laporan Penilaian Risiko dan DPA SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Foto Kegiatan Rapat Pembahasan terkait perencanaan lingkup Sekretariat Daerah

Berikut disajikan Tabel capaian penyusunan laporan/kinerja dan pembuatan dokumen perencanaan yang disusun sesuai aturan yang dilaksanakan oleh bagian Tata Usaha dan Keuangan SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 berikut tabel pelaporan :

Tabel dokumen laporan yang disusun sesuai aturan tahun 2020
 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

NO.	JENIS LAPORAN	JUMLAH	KET
1.	Bulanan	12 Dokumen	100 %
2.	Triwulan	4 Dokumen	100 %
3.	Semester	2 Dokumen	100 %
4.	Rekon	4 Dokoumen	100 %
5.	CALK	1 Dokumen	100 %
6.	LPPD	1 Dokumen	100 %
7.	SAKIP	1 Dokumen	100 %
8.	Perjanjian Kinerja	1 Dokumen	100 %
9.	SKM	1 Dokumen	100 %
10.	LKE Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	100 %
11.	LKE Zona Integritas	1 Dokumen	100%
11.	Identifikasi Penilaian Risiko	1 Dokumen	100 %
12.	Identifikasi Benturan Kepentingan	1 Dokumen	100 %
13.	Laporan Penilaian Risiko	1 Dokumen	100 %
14	Laporan Benturan Kepentingan	1 Dokumen	100 %

Tabel dokumen perencanaan yang disusun sesuai aturan tahun 2020
 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

NO.	JENIS DOKUMEN PERENCANAAN	JUMLAH	KET
1.	Renstra	1 Dokumen	100 %
2.	Renja	3 Dokumen	100 %
3.	RKA Sekretariat Daerah	3 Dokumen	100 %
4.	DPA Sekretariat Daerah	3 Dokumen	

* 1 (satu) dokumen perencanaan terkait refocusing/rasionalisasi anggaran karena Pandemi Covid-19



Foto Kegiatan Rapat terkait pelaporan kinerja Sekretariat Daerah

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Pejabat yang menyusun RKA/DPA masing-masing Bagian kurang memahami pedoman penyusunan RKA/DPA dengan baik;
- Pejabat yang menyusun Renja pada masing-masing Bagian kurang memahami pedoman penyusunan Renja dengan baik;

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melaksanakan Monev secara berkala terkait *update* data perencanaan;
- Rapat dengan pejabat penyusun RKA/DPA masing-masing Bagian
- Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja secara terpadu dan terkoordinasi sehingga target kerja dapat dilaksanakan sesuai yang diinginkan

Rencana Aksi Perbaikan yang dilakukan ke depannya adalah :

- Melaksanakan Monev secara berkala terkait *update* data perencanaan dan laporan;
- Keterlibatan pimpinan dalam rangka perencanaan program dan anggaran;
- Membuat aplikasi Laporan Kinerja dan Keuangan Bagian dengan tujuan aplikasi tersebut untuk mempermudah dalam hal perencanaan, penganggaran dan pelaporan berbasis *online*, cepat serta meminimalisir usulan perencanaan yang tumpang tindih, peningkatan alokasi fasilitasi usulan pola pikir dari pemangku kepentingan serta ketersediaan data yang *update* untuk perencanaan dan pelaporan.

Analisis Capaian Sasaran Strategis Kepala Bagian Tata Pemerintahan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	100%	82%	82%	Bagian Tapem Mengampu Misi ke-3 : "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"
		Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan	100%	70%	70%	
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	100%	100%	100%	
		Persentase fasilitasi pelaksanaan pilkada (Presiden/Gubernur/Bupati)	100%	100%	100%	
3	Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD/ SKPD	100%	100%	100%	
4	Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga	Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	100%	175%	175%	
ESELON IV						
1	Memfasilitasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Jumlah penyusunan Dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Kasubbag Otonomi Daerah
2	Memfasilitasi pelaksanaan pilkada (Pilgub) melalui Tim Monitoring	fasilitasi pelaksanaan kegiatan pilkada (Pilgub) melalui Tim Monitoring	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100%	Kasubbag Otonomi Daerah
3	Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pada kegiatan tata batas antar daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelesaian permasalahan pada kegiatan tata batas antar daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Otonomi Daerah

4	Memfasilitasi Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri	Jumlah dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil difasilitasi dengan baik	4 Dokumen	7 Dokumen	175%	Kasubbag Kerjasama
5	Memfasilitasi kegiatan kegiatan Forkopimda	Jumlah kegiatan Forkopimda	9 Kali	9 Kali	100%	Kasubbag Kerjasama
6	Memfasilitasi permasalahan penyelenggaraan pemerintah umum	Jumlah permasalahan penyelenggaraan pemerintah umum yang berhasil difasilitasi dengan baik	50 Kali	41 Kali	82%	Kasubbag Administrasi Pemerintahan
7	Memfasilitasi kegiatan pembinaan Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan Kecamatan yang berhasil difasilitasi dengan baik	11 Kali	11 Kali	100%	Kasubbag Administrasi Pemerintahan
8	Memfasilitasi kegiatan perayaan Hari Besar Nasional dan Kabupaten	Jumlah kegiatan perayaan Hari Besar Nasional dan Kabupaten yang berhasil difasilitasi dengan baik	10 Kali	7 Kali	70%	Kasubbag Administrasi Pemerintahan

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Bagian Tata Pemerintahan terhadap capaian tahun sebelumnya.

Tabel Capaian Sasaran Strategis
Bagian Tata Pemerintahan Terhadap Capaian Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2020		
			2018	2019	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	%	100%	100%	100%	82%	82%
2	Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan	%	80%	80%	100%	70%	70%
3	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase fasilitasi pelaksanaan pilkada	%			100%	100%	100%

	(Presiden/Gubernur/Bupati)						
5	Persentase Pemenuhan IKK SKPD/ SKPD	%	100%	97.84%	100%	100%	100%
6	Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	175%	175%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							104,5%

❖ Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata-rata capaian kinerja bagian tata pemerintahan dari ke enam indikator adalah 109,5%, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti sebesar 82% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kerjanya adalah 82%.
- 2) Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan sebesar 70% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kerjanya adalah 70%.
- 3) Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti sebesar 100% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kerjanya adalah 100%.
- 4) Persentase fasilitasi pelaksanaan pilkada (Presiden/Gubernur/ Bupati) sebesar 100% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kerjanya adalah 100%.
- 5) Persentase Pemenuhan IKK SKPD/ SKPD sebesar 100% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kerjanya adalah 100%.
- 6) Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti sebesar 175% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kerjanya adalah 175%.

❖ **Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait**

- 1) 1) Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti tahun 2020 adalah 82% mengalami penurunan sebesar 18% dari tahun 2019 yaitu sebesar 100%.
- 2) 2) Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan tahun 2020 adalah 70% mengalami penurunan sebesar 10% dari tahun 2019 yaitu sebesar 80%.
- 3) 3) Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti tahun 2020 adalah 100% sama dengan tahun 2019 yang juga sebesar 100%.
- 4) 4) Persentase fasilitasi pelaksanaan pilkada (Presiden/Gubernur/ Bupati) tahun 2020 adalah 100%
- 5) 5) Persentase Pemenuhan IKK SKPD/ SKPD tahun 2020 adalah 100% mengalami kenaikan sebesar 2.16% dari tahun 2019 yaitu sebesar 97.84%
- 6) 6) Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti

❖ **Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

Sasaran 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Indikator : Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	100%	82%	82%	Bagian Tapem Mengampu Misi ke- 3 : "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"

Untuk mendukung tercapainya indikator Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti telah dilaksanakan melalui Program Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Pengamanan Batas

Daerah dengan anggaran sebesar Rp 154.787.600,00 dan terealisasi sebesar Rp 79.239.000,00 atau 51,19%.

Bahwa untuk mendukung tercapainya indikator Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti telah dilaksanakan kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi (*Coffee Morning*) yang terealisasi sebesar 82 %.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Terbenturnya jadwal kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (*Coffee Morning*) dengan jadwal undangan lain yang sudah dijadwalkan.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Mengkoordinasikan jadwal kegiatan yang sudah di agendakan agar tidak saling berbenturan, sehingga dapat dilaksanakan dengan tidak mengganggu agenda lainnya

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah

- Mensinkronkan jadwal kegiatan rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (*Coffee Morning*) agar tidak terbentur dengan jadwal agenda lainnya

Rapat Pejabat Pemerintah Daerah (Coffee Morning)



Indikator 2 : Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan	100%	70%	70%	Bagian Tapem Mengampu Misi ke- 3 : "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"

Untuk mendukung tercapainya indikator Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan melalui Program Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar Rp 212.152.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 157.140.000,00 atau 74,07%.

Bahwa untuk mendukung tercapainya indikator Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan telah dilaksanakan kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut dan membentuk Panitia Pelaksanaan hari besar tersebut. Persentase capaian pada tahun 2020 sebesar 70% atau mengalami penurunan dari tahun 2019 dengan persentase capaian sebesar 80%.

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah :

- Kurangnya koordinasi SKPD terkait agenda kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dalam rangka Hari Besar Nasional/Babupaten
- Terbenturnya jadwal agenda kegiatan Pejabat Provinsi Kalimantan Selatan Yang di undang khususnya pada Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut

Solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:

- Meningkatkan Koordinasi dengan seluruh SKPD
- Secepatnya/lebih awal mengkoordinasikan terkait jadwal agenda kegiatan Pejabat Provinsi Kalimantan Selatan yang di undang pada Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Lebih cepat mengkoordinasikan dalam menyinkronkan jadwal agenda kegiatan Pejabat Provinsi Kalimantan Selatan yang akan di undang pada Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut.



Pelaksanaan Rapat Koordinasi Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut dan Pelaksanaan Acara Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut

SASARAN 2 Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Indikator 1 : Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Bagian Tapem Mengampu Misi ke- 3 : "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"

Bahwa untuk mendukung tercapainya indikator Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti telah dilaksanakan kegiatan:

- Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Kabupaten Tanah Laut.
- Pengecekan dilapangan dengan berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Provinsi dan Tim PBD Kabupaten/Kota yang berbatasan.
- Melaksanakan rapat koordinasi Tim PBD Kabupaten dan mengikuti rapat koordinasi fasilitasi Tim PBD Provinsi Kalimantan Selatan.
- Melakukan inventarisasi data-data dukung terkait wilayah yang terdapat konflik, khususnya di Desa Bentok Darat yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar di Desa Kiram.

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

- Adanya penyampaian opsi-opsi maupun usulan titik segmen batas yang berbeda-beda oleh pihak Kabupaten Banjar pada setiap pelaksanaan rapat koordinasi yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Adanya pandemi Covid-19.

Solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:

- Mempertemukan Kepala Daerah antara Kabupaten yang berbatasan dengan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar segera mendapat putusan titik segmen batas yang di sepakati.
- Menerapkan protokol Kesehatan yang ketat pada setiap pelaksanaan rapat koordinasi baik di daerah maupun yang di fasilitasi Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Melaksanakan koordinasi dengan Tim PBD Provinsi Kalimantan Selatan untuk segera melakukan fasilitasi survey lapangan untuk persiapan pemancangan batas Penegasan Batas Daerah di titik-titik yang disepakati.
- Meningkatkan koordinasi dengan Tim PBD Kalimantan Selatan untuk penyelesaian dokumen-dokumen yang diperlukan untuk Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penegasan Batas Daerah.



Rapat koordinasi Tim PBD Kabupaten

Indikator 2 : Persentase Fasilitas Pelaksanaan Pilkada (Presiden/Gubernur/Bupati)

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase fasilitas pelaksanaan pilkada (Presiden/Gubernur/Bupati)	100%	100%	100%	Bagian Tapem Mengampu Misi ke- 3 : "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"

Bahwa untuk mendukung tercapainya indikator Persentase fasilitas pelaksanaan pilkada (Presiden/Gubernur/ Bupati) telah dilaksanakan kegiatan:

- Membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Pilkada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.
- Melaksanakan rapat koordinasi Tim Monitoring Pelaksanaan Pilkada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.
- Mengumpulkan data dukung penyusunan dokumen fasilitas pelaksanaan pilkada (Pilgub).

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

- Kurangnya koordinasi dengan SKPD terkait.
- Adanya pandemi Covid-19.

Solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:

- Meningkatkan koordinasi ke SKPD khususnya KPU terkait jadwal kegiatan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 sehingga penyajian agenda kegiatan fasilitasi pelaksanaan monitoring dapat lebih terarah .
- Menerapkan protokol Kesehatan yang ketat pada setiap kegiatan fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 khususnya pada saat monitoring ke setiap Kecamatan.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

Tahun depan tidak ada pelaksanaan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah, jadwal selanjutnya secara serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024 yaitu untuk Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut di Tahun 2024, sehingga akan dibentuk peraturan daerah terkait pembentukan dana cadangan untuk pelaksanaan Pilkada tersebut. Maka koordinasi dengan pihak-pihak terkait pembentukan dana cadangan akan lebih ditingkatkan lagi.



Tim Monitoring Pelaksanaan Pilkada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020

SASARAN 3 Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD

Indikator : Persentase Pemenuhan IKK SKPD

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	100%	100%	100%	Bagian Tapem Mengampu Misi ke- 3 : "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"

Untuk mendukung tercapainya indikator Persentase Pemenuhan IKK SKPD/ SKPD telah dilaksanakan melalui Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Pengamanan Batas Daerah telah dilaksanakan kegiatan:

- Tim Penyusun LPPD Kabupaten Tanah Laut melaksanakan sosialisasi penyusunan Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Laut sekaligus penyampaian format pengisian Data Dukung IKK LPPD Kabupaten Tanah Laut
- Melakukan pengumpulan Data Dukung IKK LPPD Kabupaten Tanah Laut yang berjumlah 231 IKK yang terdiri dari IKK 3.I berjumlah 21 IKK, IKK3.II berjumlah 43 dan IKK 3.III berjumlah 267 IKK.
- Melakukan verifikasi dan validasi Data Dukung IKK LPPD.
- Mengikuti Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) oleh Tim EKPPD Provinsi dan Tim EKPPD Pusat.

Berikut disajikan nilai hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) oleh Tim EKPPD Provinsi dan Tim EKPPD Pusat pada Tahun 2020.

LKE INDIVIDU

LAMPIRAN 2

CAPAIAN KINERJA ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN - ADMINISTRASI UMUM (2)

KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	URUSAN	NOMOR IKK																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Pendidikan	6	1	ada	100	ada	55,6580	70,59	100,00	3	100,00	100	100	25,95	27,86	25,13	74,87	3	ada	0,00	5	ada	0
2	Kesehatan	22	24	ada	100	ada	17,5328	46,84	100,00	3	100,00	100	100	16,92	15,05	66,46	33,54	3	ada	0,00	5	ada	0
3	Lingkungan Hidup	14	10	ada	95,45455	ada	1,3728	52,38	100,00	3	100,00	100	100	12,66	13,15	95,65	4,35	3	ada	0,00	3	ada	0
4	Pekerjaan Umum	3	10	ada	100	tidak	0,5884	66,67	100,00	3	100,00	100	100	0,99	0,93	50,86	49,14	3	ada	0,00	4	ada	0
5	Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang	4	12	ada	100	ada	0,8237	80,00	100,00	3	100,00	100	100	1,36	1,30	74,53	25,47	3	ada	0,00	5	ada	0
6	Kepemudaan dan Olahraga	17	8	ada	100	tidak	0,8041	88,24	100,00	3	100,00	100	100	0,68	0,61	53,15	46,85	3	ada	0,00	5	ada	0
7	Penanaman Modal	6	2	ada	100	ada	0,7845	78,57	100,00	3	100,00	100	100	0,59	0,53	32,78	67,22	3	ada	0,00	4	ada	0
8	Koperasi dan UKM	3	1	ada	100	ada	0,1177	75,00	100,00	3	100,00	100	100	0,09	0,08	100,00	0,00	3	ada	0,00	5	ada	0

9	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1	0	ada	100	tidak	0,2157	100,00	100,00	3	100,00	100	100	0,33	0,35	16,46	83,54	3	ada	0,00	4	ada	0
10	Ketenagakerjaan	3	0	ada	100	tidak	0,0588	0,00	100,00	3	100,00	100	100	0,00	0,00	100,00	0,00	3	ada	0,00	3	ada	0
11	Ketahanan Pangan	3	22	ada	100	tidak	0,7060	61,54	100,00	3	100,00	100	100	0,80	0,61	100,00	0,00	3	ada	0,00	4	ada	0
12	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	13	ada	87,5	ada	0,4707	78,57	85,71	3	100,00	100	100	0,49	0,49	56,09	43,91	3	ada	0,00	5	ada	0
13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6	3	ada	100	ada	0,5884	71,43	92,86	3	100,00	100	100	0,73	0,63	57,39	42,61	3	ada	0,00	4	ada	0
14	Perhubungan	4	1	ada	100	tidak	0,3726	83,33	100,00	3	100,00	100	100	0,63	0,54	53,94	46,06	3	ada	0,00	5	ada	0
15	Komunikasi dan Informatika	5	2	ada	88,88889	ada	0,8237	72,22	88,89	3	100,00	100	100	0,70	0,62	51,91	48,09	3	ada	0,00	4	ada	0
16	Pertanahan	3	12	ada	90	tidak	0,3922	77,78	100,00	3	100,00	100	100	0,63	0,63	68,91	31,09	3	ada	0,00	5	ada	0
17	Trantibum dan Linmas	3	6	ada	100	tidak	0,1373	85,71	100,00	3	100,00	100	100	0,73	0,71	67,28	32,72	3	ada	0,00	4	ada	0
18	Fungsi Penunjang	6	1	ada	100	ada	0,4511	93,75	100,00	3	100,00	100	100	0,37	0,36	44,56	55,44	3	ada	0,00	4	ada	0
19	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	1	ada	100	tidak	0,3726	66,67	100,00	3	100,00	100	100	0,81	0,76	76,64	23,36	3	ada	0,00	4	ada	0
20	Sosial	1	1	ada	100	tidak	0,0588	66,67	100,00	3	100,00	100	100	0,00	0,00	100,00	0,00	3	ada	0,00	5	ada	0
21	Budaya	0	5	ada	0	tidak	0,0196	0,00	-	3	-	0	0	-	-	0,00	0,00	3	ada	0,00	5	ada	0
22	Statistik	3	0	ada	100	tidak	0,0784	75,00	100,00	3	100,00	100	100	0,05	0,05	100,00	0,00	3	ada	0,00	5	ada	0
23	Kearsipan	1	0	ada	100	ada	0,3138	62,50	100,00	3	100,00	100	100	0,28	0,29	33,37	66,63	3	ada	0,00	5	ada	0
24	Perpustakaan	2	1	ada	100	ada	0,0981	50,00	100,00	3	100,00	100	100	0,01	0,01	100,00	0,00	3	ada	0,00	0	ada	0
25	Kelautan dan perikanan	4	1	ada	100	ada	0,4315	100,00	100,00	3	100,00	100	100	0,10	0,10	100,00	0,00	3	ada	0,00	4	ada	0



26	Pertanian	3	6	ada	92,85714	tidak	0,4903	100,00	100,00	3	100,00	100	100	0,73	0,74	73,86	26,14	3	ada	0,00	4	ada	0	
27	Pariwisata	12	9	ada	97,77778	ada	3,7654	40,91	93,18	3	100,00	100	100	2,98	2,97	44,40	55,60	3	ada	0,00	4	ada	0	
28	Industri	3	0	ada	71,42857	ada	0,4315	60,00	100,00	3	100,00	100	100	0,02	0,01	100,00	0,00	3	ada	3,20	4	ada	0	
29	Perdagangan	3	0	ada	100	tidak	0,0784	50,00	100,00	3	100,00	100	100	0,22	0,19	100,00	0,00	3	ada	0,00	4	ada	0	
30	Transmigrasi	1	0	ada	tidak	tidak	0,0588	100,00	100,00	3	100,00	100	100	-	-	0,00	0,00	3	ada	0,00	5	ada	0	
																						TDI	0	
																							%	0,00

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa Data Dukung IKK LPPD Kabupaten Tanah Laut terpenuhi 100% yang ditandai dengan hasil EKPPD yang tidak ada 'tdi' (tdi = 0). Tdi tersebut artinya 'tidak ada informasi' yaitu Data Dukung IKK LPPD yang lampirannya tidak ada/tidak terpenuhi. Sehingga dari total 231 IKK terpenuhi semua sehingga persentase pemenuhan IKK adalah sebesar 100% yang meningkat dari EKPPD tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar 97,84% karena terdapat 5 (lima) IKK yang 'tdi' / tidak terpenuhi. Sedangkan untuk skor LPPD hasil EKPPD Tahun 2020, nilai/skor masing-masing Kabupaten dari Tim EKPPD Pusat belum terbit.

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah :

- Bobot nilai per IKK terdapat banyak kekurangan karena realisasi capaian IKK dari SKPD yang kecil atau bahkan kegiatannya tidak / belum dilaksanakan
- Kurangnya komitmen SKPD dalam menyajikan data yang *valid*
- Belum dilakukan reviu oleh APIP terhadap dokumen LPPD SKPD

Solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:

- Peningkatan kompetensi aparatur yaitu kemampuan analisis analisis para Tim Penyusun LPPD
- Peningkatan kualitas pengumpulan data IKK LPPD dan evaluasi internal seluruh SKPD
- Pemanfaatan e-LPPD untuk memudahkan pengisian Data Dukung IKK LPPD
- Adanya *reward* dan *punishment* terhadap SKPD terkait penyusunan dan skor LPPD
- Membuat surat kepada APIP untuk melakukan reviu terhadap dokumen LPPD SKPD

Rencana Aksi :

- Mengadakan sosialisasi penyusunan LPPD dengan narasumber dari Tim Evaluasi Pusat
- Mengajukan kepada pimpinan usulan *reward* dan *punishment* terhadap SKPD terkait penyusunan dan skor LPPD
- Adanya penilaian terhadap LPPD SKPD layaknya seperti SPIP, Reformasi Birokrasi, Zona Integritas dan SAKIP



Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyampaian IKK LPPD secara Desk SKPD

SASARAN 4 Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga
Indikator : Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
4	Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga	Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	100%	175%	175%	Bagian Tapem Mengampu Misi ke- 3 : "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"

Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti pada tahun 2020 adalah 175%, meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 100%. Kegiatan ini dapat melampaui target dikarenakan di Tahun 2020 terdapat peningkatan yang signifikan terkait penyusunan Dokumen Kerjasama di SKPD karena realisasi kegiatan di Anggaran Perubahan maupun kebijakan-kebijakan yang ditetapkan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Kurangnya koordinasi SKPD terkait mengenai rencana awal penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah
- Penyusunan Dokumen Kerjasama yang tidak sesuai dengan SOP

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Memberikan penjelasan kepada SKPD yang akan melakukan penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah mengenai tata cara penyusunan Dokumen Kerjasama
- Memberikan penjelasan mengenai SOP terkait penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah

- Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait rencana kegiatan-kegiatan penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah yang akan direalisasikan di tahun anggaran berjalan maupun anggaran tahun berikutnya.
- Membuat SOP terkait penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah agar SKPD dapat lebih awal menyampaikan *draft* dokumen tersebut sehingga Bagian Tata Pemerintahan dapat memfasilitasi kegiatan secara maksimal.



Penandatanganan MoU

❖ **Analisis Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia**

- 1) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti di tunjang dengan Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Pengamanan Batas Daerah dengan pagu Rp 154.787.600,00 terealisasi Rp 79.239.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar 51,19 dan dilaksanakan oleh 4 (empat) orang SDM.
- 2) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan indikator Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan di tunjang dengan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan pagu Rp 212.152.000,00 terealisasi Rp 157.140.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar 74,07% karena adanya *Refocusing* /Rasionalisasi anggaran terkait Pandemi *Covid-19* dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu Rp 5.190.124.423,00 terealisasi Rp 4.882.552.607,00 dengan realisasi keuangan sebesar 94,07% dan dilaksanakan oleh 4 (empat) orang SDM.
- 3) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan indikator Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti di tunjang dengan Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Pengamanan Batas Daerah dengan pagu Rp 115.374.700,00 terealisasi Rp 96.227.600,00 dengan realisasi keuangan sebesar 83,40 dan dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang SDM.
- 4) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan indikator Persentase fasilitasi pelaksanaan pilkada (Presiden/Gubernur/ Bupati) di tunjang dengan Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Pengamanan Batas Daerah dengan pagu Rp 115.374.700,00 terealisasi Rp 115.374.700,00 dengan realisasi keuangan sebesar 83,40 dan dilaksanakan oleh 4 (empat) orang SDM.
- 5) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD dengan indikator Persentase Pemenuhan IKK SKPD/ SKPD di tunjang dengan Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Pengamanan Batas Daerah dengan pagu Rp 115.374.700,00 terealisasi Rp 96.227.600,00 dengan realisasi keuangan sebesar 83,40 dan dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang SDM.

*Catatan : Untuk ketiga sasaran di atas di tunjang dengan program yang sama

6) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga dengan indikator Persentase Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti di tunjang dengan Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Pengamanan Batas Daerah dengan pagu Rp 1.343.629.900,00 terealisasi Rp 685.567.544,00 dengan realisasi keuangan sebesar 51,02 dan dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang SDM.

Dalam mencapai sasaran, Bagian Tata Pemerintahan memiliki 2 (dua) Program dengan 6 (enam) Kegiatan dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	SDM	Ket
Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Pengamanan Batas Daerah dan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			1.613.792.000	861.034.144	53,35		
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Pengamanan Batas Daerah	154.787.600	79.239.000	51,19	Kabag Tata Pemerintahan, Kasubbag Administrasi Pemerintahan, Analis Pemerintahan Umum dan Otda, Pengadm. umum	
2	Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/ Kabupaten yang diselenggarakan	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	212.152.000,00	157.140.000,00	74,07	Kabag Tata Pemerintahan, Kasubbag Otda, Analis Pemerintahan Umum dan Otda	
3	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Pengamanan Batas Daerah	115.374.700,00	96.227.600,00	83,40		
4	Persentase fasilitasi pelaksanaan pilkada (Presiden/ Gubernur/ Bupati)	Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Pengamanan Batas Daerah	115.374.700,00	96.227.600,00	83,40	Kabag Tata Pemerintahan, Kasubbag Kerjasama Pemerintahan, Pengadm. Umum	
5	Persentase Pemenuhan IKK SKPD/ SKPD	Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Pengamanan Batas Daerah	115.374.700,00	96.227.600,00	83,40	Kabag Tata Pemerintahan, Kasubbag Administrasi Pemerintahan, Analis Pemerintahan	

						Umum dan Otda, Pengadm. umum	
6	Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Pengamanan Batas Daerah	1.343.629.900,00	685.567.544,00	51,02	Kabag Tata Pemerintahan, Kasubbag Administrasi Pemerintahan, Analis Pemerintahan Umum dan Otda, Pengadm. umum	
JUMLAH			1.825.944.200	1.018.174.144	55,76		

❖ Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah

Untuk capaian indikator sasaran pada Kasubbag Kerjasama dan Otonomi Daerah dilaksanakan melalui Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama antar Pemerintahan melalui Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Pengamanan Batas Daerah dengan pagu Rp 115.374.700,00 terealisasi Rp 96.227.600,00 dengan realisasi keuangan sebesar 83,40%; dengan kapasitas SDM sebanyak 2 (dua) orang.

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Memfasilitasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Jumlah penyusunan Dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Kasubbag Otonomi Daerah
2	Memfasilitasi pelaksanaan pilkada (Pilgub) melalui Tim Monitoring	fasilitasi pelaksanaan kegiatan pilkada (Pilgub) melalui Tim Monitoring	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100%	Kasubbag Otonomi Daerah
3	Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pada kegiatan tata batas antar daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelesaian permasalahan pada kegiatan tata batas antar daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Otonomi Daerah

SASARAN 1 Meningkatnya Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Indikator : Jumlah Penyusunan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Memfasilitasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Jumlah penyusunan Dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Kasubbag Otonomi Daerah

- 1) Pada indikator sasaran Jumlah penyusunan Dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk capaian Tahun 2020 adalah sebesar 100%.
- 2) Pada indikator sasaran Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan pilkada (Pilgub) melalui Tim Monitoring untuk capaian Tahun 2020 adalah sebesar 100%.
- 3) Pada indikator sasaran Jumlah dokumen penyelesaian permasalahan pada kegiatan tata batas antar daerah Kabupaten /Kota untuk capaian Tahun 2020 adalah sebesar 100%.

**Tabel Capaian Sasaran Strategis
Sub Bagian Otonomi Daerah Terhadap Capaian Tahun Sebelumnya**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2020		
			2018	2019	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Jumlah penyusunan Dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Dokumen	2	2	2	2	100%
2	Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan pilkada (Pilgub) melalui Tim Monitoring	Kegiatan			11	11	100%
3	Jumlah dokumen penyelesaian permasalahan pada kegiatan tata batas antar daerah Kabupaten /Kota	Dokumen	1	1	1	1	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							100%

❖ **Perbandingan Realisasi Dengan Target**

Rata-rata capaian kinerja Sub Bagian Otonomi Daerah dari ke tiga indikator adalah 100%, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Jumlah penyusunan Dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) terealisasi sebanyak 2 dokumen dari target 2 dokumen, sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.
- 2) Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan pilkada (Pilgub) melalui Tim Monitoring terealisasi sebanyak 11 kegiatan dari target 11 kegiatan, sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.
- 3) Jumlah dokumen penyelesaian permasalahan pada kegiatan tata batas antar daerah Kabupaten /Kota terealisasi sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen, sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.

❖ **Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

- 1) Jumlah penyusunan Dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang terealisasi tahun 2020 adalah 2 dokumen sedangkan realisasi tahun 2019 juga sebanyak 2 dokumen sehingga perbandingan realisasi capaian kinerja dari tahun sebelumnya adalah tetap.
- 2) Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan pilkada (Pilgub) melalui Tim Monitoring yang terealisasi tahun 2020 adalah 11 kegiatan sedangkan realisasi tahun 2019 tidak dilaksanakan sehingga perbandingan realisasi capaian kinerja dari tahun sebelumnya adalah nihil.
- 3) Jumlah dokumen penyelesaian permasalahan pada kegiatan tata batas antar daerah Kabupaten /Kota yang terealisasi tahun 2020 adalah 1 dokumen sedangkan realisasi tahun 2019 juga sebanyak 1 dokumen sehingga perbandingan realisasi capaian kinerja dari tahun sebelumnya adalah tetap.

❖ Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Untuk mendukung tercapainya indikator Jumlah penyusunan Dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Membentuk Tim Penyusun LKPJ dan LPPD Kabupaten Tanah Laut dengan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan sebagai anggota Tim Penyusun LPPD Kabupaten Tanah Laut di masing-masing SKPD.
- Melaksanakan sosialisasi penyusunan Dokumen LKPJ dan LPPD Kabupaten Tanah Laut.
- Melaksanakan rapat koordinasi sekaligus penyampaian format pengisian Data Dukung IKK LPPD Kabupaten Tanah Laut secara desk SKPD.
- Melakukan pengumpulan Data Dukung Dokumen LKPJ dan LPPD Kabupaten Tanah Laut.
- Melakukan verifikasi dan validasi Data Dukung Dokumen LKPJ dan LPPD Kabupaten Tanah Laut.
- Menyampaikan hasil verifikasi dan validasi Data Dukung Dokumen LPPD Kabupaten Tanah Laut ke Inspektorat Kabupaten Tanah Laut untuk di review.

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

- Data dukung yang disampaikan SKPD tidak tepat waktu
- Data dukung yang kurang memenuhi atau tidak sesuai dengan pedoman penyusunan dan data yang tidak valid.
- Kurangnya koordinasi dan pelaksanaan kegiatan yang terhambat karena adanya pandemi Covid-19.

Solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:

- Mengadakan sosialisasi dan penyampaian format pengisian data dukung lebih awal. Saat menjelang batas waktu penyampaian, mengingatkan kembali ke masing-masing SKPD secara intens.
- Peningkatan kualitas pengumpulan data dukung LPPD dan evaluasi internal seluruh SKPD serta meningkatkan koordinasi ke inspektorat Kabupaten Tanah Laut terkait *review* LPPD.

- Meningkatkan koordinasi ke SKPD melalui pelaksanaan rapat koordinasi secara desk SKPD dengan menerapkan protokol Kesehatan yang ketat di masa pandemi Covid - 19.
- Adanya *reward* dan *punishment* terhadap SKPD terkait penyusunan dokumen LKPJ dan LPPD.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Mengadakan sosialisasi penyusunan LPPD dengan narasumber dari Tim Evaluasi Pusat.
- Melaksanakan rapat koordinasi desk SKPD secara berkala.

SASARAN 2 Menyusun Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pilkada (Pilgub) melalui Tim Monitoring

Indikator : Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pilkada (Pilgub) melalui Tim Monitoring

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Memfasilitasi pelaksanaan pilkada (Pilgub) melalui Tim Monitoring	fasilitasi pelaksanaan kegiatan pilkada (Pilgub) melalui Tim Monitoring	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100%	Kasubbag Otonomi Daerah

Untuk mendukung tercapainya indikator Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pilkada (Pilgub) melalui Tim Monitoring telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Pilkada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.
- Melaksanakan rapat koordinasi Tim Monitoring Pelaksanaan Pilkada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.
- Mengumpulkan data dukung penyusunan dokumen fasilitasi pelaksanaan pilkada (Pilgub).

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

- Kurangnya koordinasi dengan SKPD terkait.
- Adanya pandemi Covid-19.

Solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:

- Meningkatkan koordinasi ke SKPD khususnya KPU terkait jadwal kegiatan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 sehingga penyajian agenda kegiatan fasilitasi pelaksanaan monitoring dapat lebih terarah .
- Menerapkan protokol Kesehatan yang ketat pada setiap kegiatan fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 khususnya pada saat monitoring ke setiap Kecamatan.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Tahun depan tidak ada pelaksanaan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah, jadwal selanjutnya secara serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024 yaitu untuk Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut di Tahun 2024, sehingga akan dibentuk peraturan daerah terkait pembentukan dana cadangan untuk pelaksanaan Pilkada tersebut. Maka koordinasi dengan pihak-pihak terkait pembentukan dana cadangan akan lebih ditingkatkan lagi.

SASARAN 3 Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pada kegiatan tata batas antar daerah Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah dokumen penyelesaian permasalahan pada kegiatan tata batas antar daerah Kabupaten/ Kota

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
3	Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pada kegiatan tata batas antar daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelesaian permasalahan pada kegiatan tata batas antar daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Otonomi Daerah

Bahwa untuk mendukung tercapainya indikator Jumlah dokumen penyelesaian permasalahan pada kegiatan tata batas antar daerah Kabupaten/ Kota telah dilaksanakan kegiatan :

- Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Kabupaten Tanah Laut.
- Melaksanakan rapat koordinasi Tim PBD Kabupaten
- Mengikuti rapat koordinasi fasilitasi Tim PBD Provinsi Kalimantan Selatan hingga di Kementerian Dalam Negeri.
- Melakukan inventarisasi data-data dukung terkait wilayah yang terdapat konflik, khususnya di Desa Bentok Darat yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar di Desa Kiram.
- Penandatanganan Berita Acara Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Tanah Laut dengan Kabupaten Banjar pada Tahun 2020 oleh masing-masing Kepala Daerah.

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

- Adanya penyampaian opsi-opsi maupun usulan titik segmen batas yang berbeda-beda oleh pihak Kabupaten Banjar pada setiap pelaksanaan rapat koordinasi yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Adanya pandemi Covid-19.

Solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:

- Mempertemukan Kepala Daerah antara Kabupaten yang berbatasan dengan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar segera mendapat putusan titik segmen batas yang di sepakati.
- Menerapkan protokol Kesehatan yang ketat pada setiap pelaksanaan rapat koordinasi baik di daerah maupun yang di fasilitasi Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Melaksanakan koordinasi dengan Tim PBD Provinsi Kalimantan Selatan untuk segera melakukan fasilitasi survey lapangan untuk persiapan pemancangan batas Penegasan Batas Daerah di titik-titik yang disepakati.
- Meningkatkan koordinasi dengan Tim PBD Kalimantan Selatan untuk penyelesaian dokumen-dokumen yang diperlukan untuk Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penegasan Batas Daerah.

❖ Kepala Sub Bagian Kerjasama Pemerintahan

Untuk capaian indikator sasaran pada Kasubbag Kerjasama Pemerintahan dilaksanakan melalui Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama antar Pemerintahan dengan pagu Rp 1.343.629.900,00 terealisasi Rp 685.567.544,00 dengan realisasi keuangan sebesar 51,02%.

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
4	Memfasilitasi Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri	Jumlah dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil difasilitasi dengan baik	4 Dokumen	7 Dokumen	175%	Kasubbag Kerjasama
5	Memfasilitasi kegiatan Forkopimda	Jumlah kegiatan Forkopimda	9 Kali	9 Kali	100%	Kasubbag Kerjasama

SASARAN 4 Memfasilitasi Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri

Indikator : Jumlah dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil difasilitasi dengan baik

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
4	Memfasilitasi Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri	Jumlah dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil difasilitasi dengan baik	4 Dokumen	7 Dokumen	175%	Kasubbag Kerjasama

Pada tahun 2020 Jumlah dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil difasilitasi dengan baik terlaksana melebihi Target dan tercapai 175%.

❖ Perbandingan Realisasi Dengan Target

Rata-rata capaian kinerja bagian tata pemerintahan indikator adalah 175% dengan rincian sebagai berikut:

- Persentase jumlah Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti terealisasi sebesar 7 Dokumen dari target 4 Dokumen, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kerjanya adalah 175%.

❖ Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

- Persentase Jumlah Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti tahun 2020 adalah 7 Dokumen mengalami peningkatan sebesar 4 Dokumen dari tahun 2019 sehingga mengalami peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya adalah sebesar 133%.

Tabel Capaian Sasaran Strategis

Sub Bagian Kerjasama Pemerintahan Terhadap Capaian Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2020		
			2018	2019	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Jumlah dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil difasilitasi dengan baik	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	7 Dokumen	175%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							175%

❖ Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Penyusunan dokumen kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri Dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil di tindaklanjuti telah dilaksanakan melalui Program Pembinaan Pemerintahan

Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama antar Pemerintahan melalui Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama Daerah dengan anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp 1.343.629.900,00 dan terealisasi sebesar Rp 685.567.544,00 atau 51,02%.

Bahwa untuk mendukung tercapainya indikator jumlah dokumen kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri Dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil di tindaklanjuti telah dilaksanakan kegiatan rapat-rapat dengan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang terealisasi sebesar 51,02%.

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah kurangnya koordinasi SKPD terkait mengenai rencana awal penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah dan Penyusunan Dokumen Kerjasama yang tidak sesuai dengan SOP.

Sedangkan solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah Memberikan penjelasan kepada SKPD yang akan melakukan penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah mengenai tata cara penyusunan Dokumen Kerjasama dan Memberikan penjelasan mengenai SOP terkait penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah.

Rencana aksi yang akan dilakukan adalah Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait rencana kegiatan-kegiatan penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah yang akan direalisasikan di tahun anggaran berjalan maupun anggaran tahun berikutnya dan membuat SOP terkait penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah agar SKPD dapat lebih awal menyampaikan *draft* dokumen tersebut sehingga Bagian Tata Pemerintahan dapat memfasilitasi kegiatan secara maksimal.

SASARAN 5 Memfasilitasi kegiatan Forkopimda

Indikator : Jumlah kegiatan Forkopimda

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
5	Memfasilitasi kegiatan kegiatan Forkopimda	Jumlah kegiatan Forkopimda	9 Kali	9 Kali	100%	Kasubbag Kerjasama

Pada tahun 2020 Realisasi Jumlah kegiatan Forkopimda sesuai dengan target yaitu 9 kali.

❖ **Perbandingan Realisasi Dengan Target**

- Persentase Jumlah Jumlah kegiatan Forkopimda yang berhasil difasilitasi terealisasi sebesar 9 kali dari target 9 kali, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.

❖ **Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

- Persentase Jumlah Jumlah kegiatan Forkopimda yang berhasil difasilitasi tahun 2020 sebanyak 9 kali mengalami peningkatan sebesar 3 kali dari tahun 2019 sehingga mengalami peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya adalah sebesar 50%.

Tabel Capaian Sasaran Strategis

Sub Bagian Kerjasama Pemerintahan Terhadap Capaian Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2020		
			2018	2019	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
6	Jumlah kegiatan Forkopimda	Kali	6 Kali	6 Kali	9 Kali	9 Kali	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							100%

❖ **Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

Jumlah kegiatan Forkopimda yang berhasil di tindaklanjuti telah dilaksanakan melalui Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama antar Pemerintahan melalui Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama Daerah dengan anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp 1.343.629.900,00 dan terealisasi sebesar Rp 685.567.544,00 atau 51,02%.

Bahwa untuk mendukung tercapainya jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah indikator yang berhasil di tindaklanjuti telah dilaksanakan kegiatan rapat-rapat Tim Koordinasi Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal yang terealisasi sebesar 51,02%.

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah waktu dan permasalahan yang tidak menentu karena bersifat urgensi

serta pandemi *Covid-19* yang mengharuskan untuk menjaga jarak dan menjauhi kerumunan.

Sedangkan solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah dengan menentukan waktu dan tempat yang tepat agar kegiatan dapat difasilitasi dan tetap dapat menerapkan protokol kesehatan.

Rencana aksi yang akan dilakukan adalah Meningkatkan koordinasi terkait rencana kegiatan rapat koordinasi dengan Tim Koordinasi Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal sehingga Bagian Tata Pemerintahan dapat memfasilitasi kegiatan secara maksimal.

❖ Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan

Untuk capaian indikator sasaran pada Kasubbag Administrasi Pemerintahan Pada Tahun 2020 dilaksanakan melalui Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama antar Pemerintahan dengan pagu dengan pagu Rp 154.787.600,00 terealisasi Rp 79.239.000,00 dengan realisasi sebesar 82% pada Sub Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan Umum, sedangkan Pada Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan Pagu sebesar Rp 212.152.000,00 terealisasi 70% dengan realisasi sebesar 70%.

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
6	Memfasilitasi permasalahan penyelenggaraan pemerintah umum	Jumlah permasalahan penyelenggaraan pemerintah umum yang berhasil difasilitasi dengan baik	50 Kali	41 Kali	82%	Kasubbag Administrasi Pemerintahan
7	Memfasilitasi kegiatan pembinaan Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan Kecamatan yang berhasil difasilitasi dengan baik.	11 Kali	11 Kali	100%	Kasubbag Administrasi Pemerintahan
8	Memfasilitasi kegiatan perayaan Hari Besar Nasional dan Kabupaten	Jumlah kegiatan perayaan Hari Besar Nasional dan Kabupaten yang berhasil difasilitasi dengan baik	10 Kali	7 Kali	70%	Kasubbag Administrasi Pemerintahan

SASARAN 6 Memfasilitasi permasalahan penyelenggaraan pemerintah umum
Indikator : Jumlah permasalahan penyelenggaraan pemerintah umum yang berhasil difasilitasi dengan baik

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
6	Memfasilitasi permasalahan penyelenggaraan pemerintah umum	Jumlah permasalahan penyelenggaraan pemerintahan umum yang berhasil difasilitasi dengan baik	50 Kali	41 Kali	82%	Kasubbag Administrasi Pemerintahan

Pada tahun 2020 Jumlah rapat penyelenggaraan pemerintahan umum yang berhasil difasilitasi terealisasi sebesar 82% yaitu sebanyak 41 Kali dari target sebesar 50 Kali.

❖ **Perbandingan Realisasi Dengan Target**

Rata-rata capaian kinerja sub bagian administrasi pemerintahan dari indikator adalah 82%, sebagai berikut :

- Persentase Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil difasilitasi terealisasi sebanyak 41 kali dari target 50 kali, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 82%.

❖ **Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

- Persentase Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil difasilitasi pada tahun 2020 sebanyak 41 kali, mengalami peningkatan sebanyak 3 kali dari tahun 2019, sehingga persentase realisasi tahun 2020 dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 7,89%.

Tabel Capaian Sasaran Strategis

Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Terhadap Capaian Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2020		
			2018	2019	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
6	Memfasilitasi Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kali	38 Kali	38 Kali	50 Kali	41 Kali	82%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							82%

❖ Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Untuk mendukung tercapainya indikator Persentase Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di fasilitasi, dimana telah dilaksanakan melalui Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama antar Pemerintahan melalui Kegiatan Pembinaan dan Tata Kelola Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar Rp 154.787.600,00 dan terealisasi sebesar Rp 79.239.000,00 atau 51,19%.

Bahwa untuk mendukung tercapainya indikator Persentase Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di fasilitasi telah dilaksanakan kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi (*Coffee Morning*) yang terealisasi sebesar 82%.

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini antara lain :

- Kurangnya koordinasi SKPD terkait agenda kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (*Coffee Morning*).
- Terbenturnya jadwal kegiatan SKPD yang sudah diagendakan dengan jadwal agenda Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (*Coffee Morning*).

Sedangkan solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan tersebut adalah :

- Meningkatkan Koordinasi dengan seluruh SKPD terkait agenda pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (*Coffee Morning*).
- Menyesuaikan jadwal kegiatan Pimpinan Daerah dengan jadwal kegiatan SKPD agar tidak saling berbenturan.

Rencana Aksi :

- Melaksanakan Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah dengan konsep berbeda.

SASARAN 7 Memfasilitasi Kegiatan Pembinaan Kecamatan

Indikator : Jumlah Kegiatan Pembinaan Kecamatan yang Berhasil Difasilitasi dengan Baik

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
7	Memfasilitasi kegiatan pembinaan Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan Kecamatan yang berhasil difasilitasi dengan baik	11 Kali	11 Kali	100%	Kasubbag Administrasi Pemerintahan

Kegiatan Pembinaan Kecamatan yang berhasil difasilitasi pada Tahun 2020 adalah 11 kali sesuai dengan target yang direncanakan.

❖ Perbandingan Realisasi Dengan Target

- Persentase Kegiatan Pembinaan Kecamatan yang berhasil di fasilitasi terealisasi sebanyak 11 kali dari target 11 kali, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.

❖ Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

- Persentase Kegiatan Pembinaan Kecamatan yang berhasil di fasilitasi pada tahun 2020 sebanyak 11 kali, dimana mempunyai persamaan dengan tahun sebelumnya sebanyak 11 kali pada tahun 2019, sehingga dapat dilihat bahwa persentase realisasinya adalah 100%

Tabel Capaian Sasaran Strategis

Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Terhadap Capaian Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2020		
			2018	2019	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
7	Memfasilitasi Kegiatan Pembinaan Kecamatan	Kali	11 Kali	11 Kali	11 Kali	11 Kali	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							100%

❖ Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Bahwa untuk mendukung tercapainya indikator Persentase Kegiatan Pembinaan Kecamatan yang berhasil difasilitasi telah dilaksanakan kegiatan :

- Rapat Koordinasi antar Camat dengan Pimpinan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi ke Kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut.

Dimana dua kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik sehingga tercipta roda Pemerintahan yang teratur yang berjalan dengan baik antara Kecamatan dengan Kabupaten, sehingga Persentase Kegiatan Pembinaan Kecamatan pada tahun 2020 terealisasi sebesar 100%.

Adapun hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kecamatan diantaranya :

- Terbenturnya jadwal kegiatan Pimpinan dengan agenda Rakor Camat yang sudah di jadwalkan.
- Kondisi dilapangan saat melakukan monitoring dan evaluasi, dimana jarak antar Kecamatan memiliki jarak tempuh yang lumayan jauh, sehingga dapat mengganggu agenda kegiatan Sub Bagian Administrasi Pemerintahan yang sudah terjadwalkan.

Solusi/upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah :

- Mengkoordinasikan jadwal pimpinan agar dapat disesuaikan dengan agenda rakor camat yang akan dilaksanakan, sehingga tidak saling terbentur.
- Mengatur jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke kecamatan agar tidak mengganggu agenda kegiatan Sub Bagian Administrasi Pemerintahan.

Rencana Aksi yang akan dilakukan antara lain :

- Melaksanakan Rapat Koordinasi Camat sekaligus melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kecamatan dalam waktu bersamaan.

SASARAN 8 Memfasilitasi Kegiatan Perayaan Hari Besar Nasional dan Kabupaten

Indikator : Jumlah Kegiatan Perayaan Hari Besar Nasional dan Kabupaten yang Berhasil Difasilitasi dengan Baik

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
8	Memfasilitasi kegiatan perayaan Hari Besar Nasional dan Kabupaten	Jumlah kegiatan perayaan Hari Besar Nasional dan Kabupaten yang berhasil difasilitasi dengan baik	10 Kali	7 Kali	70%	Kasubbag Administrasi Pemerintahan

Pada Tahun 2020 Realisasi Rapat kegiatan perayaan Hari Nasional dan kabupaten terealisasi sebanyak 7 kali dari target sebesar 10 kali dengan realisasi 70%.

❖ Perbandingan Realisasi Dengan Target

- Persentase Kegiatan Perayaan Hari Besar Nasional/Kabupaten yang berhasil di fasilitasi terealisasi sebanyak 7 kali dari target 10 kali, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 70%.

❖ Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

- Persentase pelaksanaan Kegiatan Perayaan Hari Besar Nasional/Kabupaten yang berhasil di fasilitasi pada tahun 2020 terealisasi sebanyak 7 kali, mengalami penurunan sebanyak 1 kali dari tahun 2019, sehingga persentase realisasi tahun 2020 dengan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 12,5%.

Tabel Capaian Sasaran Strategis

Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Terhadap Capaian Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2020		
			2018	2019	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
7	Memfasilitasi Kegiatan Perayaan Hari Besar Nasional dan Kabupaten	Kali	8 Kali	8 Kali	10 Kali	7 Kali	70%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							70%

❖ Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Untuk mendukung tercapainya indikator Persentase Pelaksanaan Hari Besar Nasional/Kabupaten telah dilaksanakan melalui Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan melalui Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa dengan anggaran sebesar Rp 212.152.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 157.140.000,00 atau 74,07%.

Bahwa untuk mendukung tercapainya indikator Persentase Pelaksanaan Hari Besar Nasional/Kabupaten telah dilaksanakan kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut dan membentuk Panitia Pelaksanaan hari besar tersebut. Persentase capaian pada tahun 2020 sebesar 70% atau mengalami penurunan dari tahun 2019 dengan persentase capaian sebesar 80%.

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah :

- Kurangnya koordinasi SKPD terkait agenda kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dalam rangka Hari Besar nasional/kabupaten.
- Terbenturnya jadwal agenda kegiatan Pejabat Provinsi Kalimantan Selatan yang di undang khususnya pada Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut.

Solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:

- Meningkatkan Koordinasi dengan seluruh SKPD.
- Secepatnya/lebih awal mengkoordinasikan terkait jadwal agenda kegiatan Pejabat Provinsi Kalimantan Selatan yang di undang pada Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut.

Rencana Aksi :

- Melaksanakan kegiatan hari besar nasional/kabupaten dengan perencanaan yang lebih matang.

Analisis Capaian Sasaran Strategis Kepala Bagian Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	70%	92,5%	132,5%	Bagian Organisasi Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"
2	Meningkatnya Nilai Area Perubahan RB SKPD	Nilai Komponen Area Perubahan RB SKPD	70	55	78.57%	
		Persentase SKPD dengan budaya kerja baik	15%	17,5%	116,67%	
3	Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80	100%	100%	100%	
		Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	95%	95%	
4	Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	100%	100%	100%	
		Persentase Analisa dan evaluasi jabatan sesuai proporsinya	100%	100%	100%	
ESELON IV						
1	Pelaksanaan penataan kelembagaan yang efektif	Jumlah SKPD yang telah memiliki uraian tugas rinci dan jelas	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kelembagaan Dan Analisis Jabatan
		Jumlah SKPD yang memiliki SOTK yang jelas	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kelembagaan Dan Analisis Jabatan
2	Pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan	Jumlah perangkat daerah yang memiliki informasi jabatan	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kelembagaan Dan Analisis Jabatan

		Jumlah perangkat daerah yang memiliki evaluasi jabatan	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kelembagaan Dan Analisis Jabatan
		Jumlah perangkat daerah yang disusun standar kompetensi jabatan	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kelembagaan Dan Analisis Jabatan
		Jumlah perangkat daerah yang dianalisis beban kerja	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kelembagaan Dan Analisis Jabatan
3	Penguatan ketatalaksanaan	Jumlah dokumen SOP yang sudah ditetapkan	5 SOP	5 SOP	100%	Kasubbag Tata Laksana Dan Pelayanan Publik
		Jumlah regulasi standarisasi pedoman kerja	5 perbup/SK	5 perbup/SK	100%	Kasubbag Tata Laksana Dan Pelayanan Publik
4	Penguatan Layanan Publik	Jumlah unit pelayanan publik yang melaksanakan standar pelayanan publik	3 SKPD	3 SKPD	100%	Kasubbag Tata Laksana Dan Pelayanan Publik
		Jumlah SKPD yang berpartisipasi pada Inovasi pelayanan publik	5 SKPD	5 SKPD	100%	Kasubbag Tata Laksana Dan Pelayanan Publik
5	Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja Bupati Tanah Laut sesuai Permenpan 53 Tahun 2014	Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun sesuai Pemenpan 53 Tahun 2014	1 Dok	1 Dok	100%	Kasubbag Pemberdayaan Aparatur Dan Akuntabilitas Kinerja
6	Pelaksanaan Pembinaan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah SKPD yang di diasistensi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Pemberdayaan Aparatur Dan Akuntabilitas Kinerja
7	Penguatan Sistem Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan fasilitasi reformasi birokrasi	1 Dok	1 Dok	100%	Kasubbag Pemberdayaan Aparatur Dan Akuntabilitas Kinerja
8	Pelaksanaan Penerapan Budaya Kerja	Jumlah SKPD yang dibina budaya kerja	40 SKPD	10 SKPD	100%	Kasubbag Pemberdayaan Aparatur Dan Akuntabilitas Kinerja

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Bagian Organisasi terhadap capaian tahun sebelumnya

Tabel Capaian Sasaran Strategis
Bagian Organisasi terhadap capaian tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2020		
			2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	%	-	62,5	70	92,5	132,5
2	Nilai Komponen Area Perubahan RB SKPD	%	-	12,5%	70	55	78.57%
3	Persentase SKPD dengan budaya kerja baik	%	-	5	15	17,5	116,67%
4	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80	%	100	100	100	100	100
5	Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	%	100	100	100	100	100
6	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	%	100	100	100	100	100
7	Persentase Analisa dan evaluasi jabatan sesuai proporsinya	%	100	100	100	100	100
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							97,55%

* : data sementara BPS Kabupaten Tanah Laut

❖ Perbandingan Realisasi dengan Target

Rata-rata capaian kinerja Bagian Organisasi dari ke tujuh indikator adalah 139,93, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10 terealisasi sebesar 92,5% dari target 70%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kerjanya adalah 132,1%.
- 2) Nilai Komponen Area Perubahan RB SKPD terealisasi sebesar 17,5% dari target 15%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kerjanya adalah 116,67%.
- 3) Persentase SKPD dengan budaya kerja baik terealisasi sebesar 17,5% dari target 15%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kerjanya adalah 116,67%.
- 4) Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80 terealisasi sebesar 100% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kerjanya adalah 100%.

- 5) Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) terealisasi sebesar 100% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.
- 6) Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif terealisasi sebesar 100% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.
- 7) Persentase Analisa dan evaluasi jabatan sesuai proporsinya terealisasi sebesar 100% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.

❖ **Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait**

- 1) Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10 tahun 2020 adalah 92,5% mengalami peningkatan sebesar 30% dari tahun 2019 yaitu sebesar 62,5%.
- 2) Nilai Komponen Area Perubahan RB SKPD tahun 2020 adalah terealisasi sebesar 55% (22 SKPD dari 40 SKPD) dari target 70%, indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2019 dikarenakan pada Tahun 2019 belum dilakukan PMPRB di seluruh SKPD dan hanya dilakukan perhitungan kepada 10 SKPD.
- 3) Persentase SKPD dengan budaya kerja baik terealisasi sebesar 17,5% mengalami peningkatan sebesar 12,5% dari tahun 2019 yaitu sebesar 5%.
- 4) Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80 tahun 2020 adalah 100% sama dengan tahun 2019 yang juga sebesar 100%.
- 5) Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tahun 2020 adalah 100% sama dengan tahun 2019 yang juga sebesar 100%.
- 6) Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif tahun 2020 adalah 100% sama dengan tahun 2019 yang juga sebesar 100%.
- 7) Persentase Analisa dan evaluasi jabatan sesuai proporsinya tahun 2020 adalah 100% sama dengan tahun 2019 yang juga sebesar 100%.

❖ Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

SASARAN 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Minimal 10

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	70%	92,5%	132,5%	Bagian Organisasi Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Untuk mendukung tercapainya indikator Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10 telah dilaksanakan kegiatan :

- 1) Tim SAKIP Melaksanakan asistensi terhadap SAKIP SKPD yang memiliki nilai SAKIP SKPD di bawah 70. Desk Penyelarasan dokumen SAKIP seluruh SKPD dengan melakukan penyelarasan pohon kinerja terhadap Renstra, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama karena laporan kinerja disusun berdasarkan seluruh dokumen-dokumen tersebut. Kegiatan pada bulan Agustus bertempat di Aula Inspektorat Kabupaten Tanah Laut
- 2) Tim SAKIP melaksanakan asistensi terhadap laporan kinerja 40 SKPD yang dilaksanakan pada pada bulan Februari 2020 di Ruang Rapat Barakat Lantai II Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Melakukan perbaikan-perbaikan terhadap perencanaan kinerja dan indikator kinerja setiap jabatan mulai dari Esselon II, III dan IV agar indikator kinerja seluruh SKPD sehingga bersifat spesifik (*spesific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*achivable*), berorientansi hasil (*Result Oriented*), yang dapat dicapai dalam periode atau satuan waktu tertentu (*time-bond*) atau SMART.

Berikut disajikan nilai hasil Evaluasi SAKIP seluruh SKDP pada komponen Pelaporan Kinerja di Lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2020.

Hasil Evaluasi SAKIP seluruh SKDP di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020

NO.	ENTITAS AKUNTABILITAS	NILAI KOMPONEN
		PEN CAPAIAN KINERJA
		20%
(1)	(2)	(7)
1	BPKAD	17.5
2	Inspektorat	16.39
3	BAPPEDA	15.59
4	Sekretariat Daerah	13.15
5	DPM dan PTSP	14.93
6	Kecamatan Bajuin	17
7	Dinas Pariwisata	14.68
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.11
9	Dinas Pekerjaan Umum , Penataan Ruang dan Pertanahan	16.58
10	Badan Pendapatan Daerah	14.96
11	Kecamatan Tangkising	16.5
12	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	14.63
13	Kecamatan Panyipatan	18.25
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	11
15	Sekretariat DPRD	14.56
16	Keccamatan Pelaihari	17.08
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.06
18	Dinas Sosial	13.58
19	Dinas Perhubungan	11.61
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10.05
21	SATPOL PP dan DAMKAR	13.53
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.92
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.63
24	Kecamatan Kurau	13.96
25	Kecamatan Kintap	12.13
26	Dinas Ket. Pangan dan Perikanan	10.84
27	Kecamatan Jorong	8.92
28	Dinas Kominfo	14.4
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.38
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14.42
31	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	15.5

32	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	16.11
33	Dinas Kesehatan	9.94
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.52
35	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	14.5
36	Keccamatan Tambang Ulang	14.38
37	DP2KBP3A	13.93
38	Kecamatan Bumi Makmur	13.08
39	Kecamatan Bati-Bati	11
40	Kecamatan Batu Ampar	11.25

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk komponen pelaporan kinerja, ada 37 SKPD dengan nilai di atas 10 dan 3 SKPD dengan nilai di bawah 10 atau sebesar 92,05%.

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

- Kurangnya komitmen dan keterlibatan pimpinan dan seluruh pejabat struktural dalam kegiatan Akuntabilitas Kinerja.
- Kurang selarasnya dokumen AKIP Karena laporan kinerja disusun berdasarkan dokumen perencanaan.
- Kurangnya kualitas evaluasi kinerja internal;
- Belum dimanfaatkannya informasi kinerja pada laporan kinerja dalam pelaksanaan manajemen kinerja pada periode berikutnya.

Solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:

- Peningkatan kompetensi aparatur yaitu kemampuan analisis analisis para penanggungjawab program serta tim penyusun Laporan kinerja
- Tetap dilaksanakan asistensi terhadap laporan kinerja seluruh SKPD.
- Peningkatan kualitas pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja secara triwulan dan evaluasi internal seluruh SKPD.
- Pemanfaatan informasi kinerja pada laporan kinerja dalam pelaksanaan manajemen kinerja pada periode berikutnya.
- Adanya reward dan punishment terhadap kinerja organisasi.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- memberikan *reward* dan *punishment* kepada SKPD sesuai dengan nilai beberapa indikator salah satunya adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperoleh.
- Mengintegrasikan seluruh sistem pengukuran kinerja individu dan organisasi.
- Dilaksanakan *workshop* dalam rangka peningkatan aparatur pengawas dan auditor.

Tahun 2020, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan melalui Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp 107.445.800 dan terealisasi sebesar Rp 32.368.800 atau 30,13% dan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 2 Orang yaitu Kepala Bagian Organisasi dan Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi.



SASARAN 2 Meningkatnya Nilai Area Perubahan RB SKPD

Indikator 1 : Nilai Komponen Area Perubahan RB SKPD

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya Nilai Area Perubahan RB SKPD	Nilai Komponen Area Perubahan RB SKPD	70	55	78.57%	Bagian Organisasi Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Nilai Komponen Area Perubahan RB terealisasi sebesar 55% (22 SKPD dari 40 SKPD) dari target 70% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 78,57%.

Realisasi tahun ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019 dikarenakan di tahun 2019 belum dilakukan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada seluruh SKPD atau hanya dilakukan penilaian terhadap 10 SKPD. Untuk realisasi tahun 2020,

jika dibandingkan dengan Target akhir Renstra adalah sebesar 55% dengan target 100%. Jadi diharapkan di Tahun 2023 seluruh SKPD telah memiliki nilai RB minimal B (cukup baik) karena RPJMD menargetkan Indeks Reformasi Birokrasi Baik (75) untuk Tahun 2023.

Berikut disajikan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Kabupaten terhadap 8 (delapan) area perubahan tahun 2020.

Tabel Rekapitulasi Nilai Reformasi Birokrasi SKPD Tahun 2020

NO	SKPD	Nilai	Persentase	Kategori	Interpretasi	Manajemen Perubahan		Deregulasi Kebijakan		Penataan Organisasi		Penataan Tatalaksana		Penataan Manajemen SDM		Penguatan Akuntabilitas		Penguatan Pengawasan		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Rata 2	
1	DPMPSTP	14.55	99.66	AA	Istimewa	2.00	100.00	1.00	100.00	2.00	100.00	1.00	100.00	1.40	100.00	2.50	100.00	2.15	97.73	2.50	100.00	797.73	99.72
2	BKPSDM	13.60	93.15	AA	Istimewa	2.00	100.00	1.00	100.00	1.50	75.00	1.00	100.00	1.24	88.57	2.50	100.00	2.10	95.45	2.26	90.40	749.43	0.00
3	Inspektorat	13.56	92.88	AA	Istimewa	2.00	100.00	1.00	100.00	1.50	75.00	1.00	100.00	1.40	100.00	2.50	100.00	2.20	100.00	1.96	78.40	753.40	94.18
4	Sekretariat Daerah	13.33	91.30	AA	Istimewa	2.00	100.00	1.00	100.00	2.00	100.00	0.72	72.00	1.35	96.43	2.45	98.00	2.03	92.27	1.78	71.20	729.90	91.24
5	Dinas Pariwisata	13.09	89.66	A	sangat Baik	2	100.00	1	100.00	2	100.00	0.63	63.00	1.40	100.00	2.5	100.00	1.48	67.27	2.08	83.20	13.07	89.52
6	Disdukcapil	12.11	82.95	A	Sangat baik	1.80	90.00	1.00	100.00	1.20	60.00	0.78	78.00	1.40	100.00	2.39	95.60	1.69	76.82	1.85	74.00	674.42	84.30
7	BAPPEDA	12.00	82.19	A	Sangat baik	1.51	75.50	1.00	100.00	2.00	100.00	1.00	100.00	1.22	87.14	2.50	100.00	1.24	56.36	1.53	61.20	680.21	85.03
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.75	80.48	A	sangat Baik	2	100.00	1	100.00	1	50.00	0.74	74.00	1.4	100.00	2	80.00	1.45	65.91	2.16	86.40	11.75	80.48
9	Kesbangpol	12.03	79.74	BB	Baik	1.64	82.00	0.50	50.00	1.54	77.00	0.81	81.00	1.13	80.71	2.25	90.00	1.91	86.82	2.26	90.40	637.93	

10	Diskopdag	11.07	75.82	BB	Baik	2.00	100.00	0.50	50.00	0.65	32.50	0.63	63.00	1.20	85.71	2.39	95.60	1.58	71.82	2.12	84.80	583.43	72.93
11	Kec. Takisung	10.94	74.93	BB	Baik	1.13	56.50	1.00	100.00	1.57	78.50	0.78	78.00	1.27	90.71	2.50	100.00	0.59	26.82	2.10	84.00	614.53	76.82
12	Dinas Kesehatan	10.7	73.29	BB	Baik	2	100.00	0.5	50.00	1.65	82.50	0.08	8.00	1.08	77.14	1.75	70.00	1.69	76.82	1.95	78.00	10.68	73.15
13	BPBD	10.44	71.51	BB	Baik	1.33	66.50	0.75	75.00	0.10	5.00	0.65	65.00	1.38	98.57	2.34	93.60	1.52	69.09	2.37	94.80	567.56	70.95
14	Kec. Jorong	9.58	70.08	BB	Baik	1.62	81.00	1.00	100.00	0.90	45.00	0.75	75.00	1.30	92.86	1.70	68.00	1.11	50.45	1.21	48.40	560.71	
15	Sekretariat DPRD	9.12	69.32	B	Cukup Baik	1.65	82.5	0	0	1	100	0.5	50	1.25	89.29	2.5	100	0.79	35.91	1.43	57.2	9.67	66.23
16	Disnaker	10.03	68.70	B	Cukup Baik	1.53	76.50	1	100.00	1.05	52.50	0.63	63.00	1.4	100.00	1.75	70.00	1.59	72.27	1.08	43.20	577.47	
17	Dispora	9.55	68.17	B	Cukup Baik	1.89	94.50	0.50	50.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.30	92.86	2.31	92.40	0.58	26.36	0.98	39.20	545.32	
18	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	9.55	65.41	B	Cukup Baik	1.8	90	1	100	0.1	10	0.36	36	1.40	100.00	1.58	63.2	0.68	30.91	0.73	29.2	9.44	64.66
19	Dinsos	9.50	65.07	B	Cukup Baik	1.58	79.00	0.63	63.00	0.38	19.00	0.46	46.00	1.12	80.00	1.56	62.40	1.62	73.64	2.15	86.00	509.04	63.63
20	KEC. Bumi Makmur	9.47	64.86	B	Cukup Baik	2.00	100.00	1.00	100.00	0.30	15.00	0.72	72.00	1.18	84.29	1.75	70.00	0.95	43.18	1.57	62.80	547.27	68.41
21	Disnak	9.46	64.79	B	Cukup Baik	1.40	70.00	0.75	75.00	0.70	35.00	0.70	70.00	1.27	90.71	2.50	100.00	1.40	63.64	0.74	29.60	533.95	66.74
22	Kec. Pelaihari	9.14	62.60	B	Cukup Baik	1.49	74.50	0.25	25.00	0.50	25.00	0.19	19.00	1.40	100.00	1.56	62.40	1.34	60.91	2.41	96.40	463.21	57.90
23	Dinas P2KBP3A	8.33	57.05	CC	Cukup	1.86	93.00	0.5	50.00	0.72	36.00	0.27	27.00	1.08	77.14	2.17	86.80	0.52	23.64	1.21	48.40	8.33	57.05
24	Bapenda	7.99	54.73	CC	Cukup	1.60	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	38.00	1.17	83.57	2.34	93.60	1.03	46.82	1.47	58.80	400.79	50.10
25	Dinas PMD	7.32	50.14	CC	Cukup	1.47	73.50	1	100.00	0.10	5.00	0.36	36.00	1.4	100.00	1.58	63.20	0.68	30.91	0.73	29.20	7.22	49.45
26	DISHUB	7.10	48.39	C	Buruk	1.01	50.50	0.50	50.00	0.00	0.00	0.46	46.00	1.00	71.43	1.75	70.00	0.73	33.18	1.65	66.00	387.11	
27	DKPP	6.20	42.47	C	Buruk	2.00	100.00	1.00	100.00	0.20	10.00	0.00	0.00	0.82	58.57	1.75	70.00	0.30	13.64	0.13	5.20	357.41	44.68
28	Kec. Batu Ampar	6.15	42.12	C	Buruk	1.14	57.00	0.25	25.00	0.15	7.50	0.00	0.00	0.40	28.57	2.50	100.00	0.08	3.64	1.63	65.20	286.91	35.86
29	RSUD H. Boejasin	5.79	39.66	C	Buruk	1.16	58.00	0.25	25.00	0	0.00	0.06	6.00	1.13	80.71	0.41	16.40	1.19	54.00	1.59	63.60	5.79	39.66
30	DISDIKBUD	5.63	38.56	C	Buruk	1.27	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	92.86	1.58	63.20	0.93	42.27	0.55	22.00	283.83	35.48
31	SATPOL PP DAMKAR	5.56	38.08	C	Buruk	1.40	70.00	0.00	0.00	0.20	10.00	0.53	53.00	1.23	87.86	1.58	63.20	0.62	28.18	0.00	0.00	312.24	39.03
32	DISPUSIP	4.99	37.42	C	Buruk	0.57	28.50	0.50	50.00	0.45	22.50	0.44	44.00	0.93	66.43	0.39	15.60	0.65	29.55	1.07	42.80	299.37	
33	Perkim LH	4.34	29.73	D	Sangat buruk	0.69	34.50	0.00	0.00	0.10	5.00	0.40	40.00	0.95	67.86	1.44	57.60	0.36	16.36	0.40	16.00	237.32	29.67

34	Kec. Panyipatan	2.26	15.48	D	Sangat Buruk	0.31	15.50	0.5	50.00	0	0.00	0	0.00	0.97	69.29	0.33	13.20	0	0.00	0.15	6.00	2.26	15.48
35	DPUPRP	2.40	14.74	D	Sangat buruk	0.07	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	42.86	1.01	40.40	0.36	16.36	0.37	14.80	117.92	
36	KEC. BAJUIN	1.63	11.16	D	Sangat buruk	0.07	3.50	0.75	75.00	0.40	20.00	0.39	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.91	0.00	0.00	138.41	17.30
37	Kecamatan Kintap	1.26	8.61	D	Sangat Buruk	0.67	33.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.63	45.26	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1.30	8.90
38	Dinas Pertanian	1.20	8.22	D	Sangat buruk	1.20	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	7.50
39	Kec. Bati Bati	1.01	6.92	D	Sangat buruk	0.40	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	7.73	0.44	17.60	45.33	5.67
40	Kec. Kurau	0.40	2.50	D	Sangat buruk	0.40	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
41	Kec. Tambang Ulang	0.27	1.85	D	Sangat buruk	0.27	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	1.69
						Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%		

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Belum terlaksananya optimalisasi internalisasi roadmap RB sampai dengan level organisasi terendah
- Belum berperan optimalnya agen perubahan dan role model dalam menjalankan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi.
- Belum optimalnya Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.

Bagian Organisasi merupakan sekretariat pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Untuk mencapai indikator nilai komponen area perubahan SKPD dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menyusun roadmap Reformasi Birokrasi sesuai dengan Permenpan 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2019-2024.
- Menginternalisasikan rencana aksi Reformasi Birokrasi dan kalimat-kalimat positif dalam budaya kerja.

Rencana Aksi:

- Optimalisasi internalisasi roadmap RB sampai dengan level organisasi terendah
- optimalisasi agen perubahan dan role model dalam menjalankan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi.
- Melaksanakan rapat Tim secara berkala agar reformasi birokrasi bisa menjalankan tugas secara optimal.

Tahun 2020, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan melalui Kegiatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp 56.090.560 dan realisasi sebesar Rp 16.530.100 atau 29,47% dan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 2 orang yaitu Kepala Bagian Organisasi dan Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi.



Indikator 2 : Persentase SKPD dengan budaya kerja baik

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya Nilai Area Perubahan RB SKPD	Persentase SKPD dengan budaya kerja baik	15%	17,5%	116,67%	Bagian Organisasi Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Tahun 2020, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Program Pembinaan, Pengembangan, Penataan Kelembagaan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan melalui kegiatan Penerapan Reformasi Birokrasi pemerintah Daerah dengan Anggaran sebesar Rp 56.090.560,00, dan terealisasi sebesar Rp 16.530.100,00 atau 29,47% dan didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 2 (dua) orang yaitu Kepala Bagian Organisasi dan Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Bahwa dalam Bahwa untuk mendukung tercapainya indikator Persentase SKPD dengan nilai budaya kerja baik telah dilaksanakan kegiatan :

- 1) Perumusan nilai-nilai yang baik yang akan ditanamkan kepada seluruh ASN.
- 2) Pembentukan Agen Perubahan dan *role* model di seluruh SKPD
- 3) Evaluasi pelaksanaan pengembangan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Berikut disajikan nilai hasil Evaluasi Budaya Kerja seluruh SKPD di Lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh bagian Organisasi Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor: PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah.

**Hasil Evaluasi pelaksanaan pengembangan budaya kerja seluruh SKDP
di Lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020**

No	Nama SKPD	Kepemimpinan Dan Manajemen		Pola Pikir Dan Cara Kerja		Perilaku Bekerja	
		Total	Kategori	Total	Kategori	Total	Kategori
1	Sekretariat Daerah	12,62	BB	6,20	B	26,02	BB
2	Sekretariat DPRD	13,57	BB	6,48	B	27,95	BB
3	Inspektorat Kabupaten	15,55	BB	8,14	BB	29,00	BB
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12,18	BB	7,21	BB	25,61	BB
5	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12,18	BB	6,41	B	22,88	BB
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	11,17	B	5,80	B	23,73	BB
7	Badan Pendapatan Daerah	14,00	BB	7,11	BB	29,39	BB
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	12,67	BB	7,70	BB	27,17	BB
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11,36	B	5,79	B	25,64	BB
10	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	12,77	BB	6,82	B	25,27	BB
11	Dinas Kesehatan	14,82	BB	7,74	BB	31,94	KB
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	13,82	BB	7,04	BB	29,37	BB
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	15,04	BB	8,14	BB	30,71	BB
14	Dinas Sosial	16,00	BB	8,29	BB	32,32	KB
15	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	13,00	BB	6,94	B	31,00	KB
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10,89	B	5,32	B	23,75	BB
17	Dinas Komunikasi Dan Informatika	14,23	BB	7,46	BB	23,69	BB
18	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	13,88	BB	7,04	BB	26,08	BB
19	Dinas Pariwisata	10,96	B	5,67	B	22,11	BB
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	15,97	BB	7,84	BB	30,57	BB
21	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11,41	B	6,00	B	21,76	BB

22	Dinas Pengendalian Penduduk, Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	18,39	KB	9,17	BB	40,11	KB
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perdagangan	18,39	KB	8,50	BB	34,06	KB
24	Dinas Perhubungan	13,83	BB	6,92	B	29,22	BB
25	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	15,21	BB	8,05	BB	34,58	KB
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	13,06	BB	7,06	BB	27,22	BB
27	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	15,70	BB	8,34	BB	33,30	KB
28	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	14,86	BB	7,37	BB	28,00	BB
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	16,39	BB	8,27	BB	33,34	KB
30	Kecamatan Pelaihari	15,12	BB	8,06	BB	27,76	BB
31	Kecamatan Bati-Bati	17,54	BB	9,92	BB	29,86	BB
32	Kecamatan Takisung	15,42	BB	8,42	BB	32,00	KB
33	Kecamatan Batu Ampar	12,91	BB	6,27	B	25,64	BB
34	Kecamatan Jorong	11,46	B	5,69	B	20,54	B
35	Kecamatan Bajuin	14,00	BB	7,13	BB	28,63	BB
36	Kecamatan Kintap	21,17	KB	10,75	KB	38,75	BB
37	Kecamatan Bumi Makmur	11,68	B	6,21	B	28,37	BB
38	Kecamatan Kurau	12,37	BB	6,26	B	27,00	BB
39	Kecamatan Tambang Ulang	12,29	BB	5,71	B	29,43	BB
40	Kecamatan Panyipatan	12,33	BB	7,00	BB	27,50	BB
	JUMLAH	560,21	-	290,25	-	1141,28	-
	NILAI ASPEK	14,01	BB	7,26	BB	28,53	BB

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 7 SKPD yang telah memiliki budaya kinerja baik dari 40 SKPD atau sebanyak 17,5%.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dilakukan pengembangan budaya kerja organisasi. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan budaya kerja perlu dilakukan evaluasi pengembangan budaya kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Hambatan-hambatan dalam melaksanakan indikator tersebut adalah:

- Masih belum ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pedoman pengembangan budaya kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Belum adanya nilai-nilai yang baik yang harus ditanamkan pada diri ASN.
- Masih kurangnya kesadaran ASN akan pentingnya budaya kerja yang baik.
- Kurangnya komitmen bersama antar pimpinan dan seluruh Kepala SKPD dalam

menciptakan budaya kerja yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Solusi:

- Membentuk Peraturan Bupati tentang pedoman pengembangan budaya kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Menetapkan nilai-nilai yang baik yang harus ditanamkan pada diri ASN.
- Menumbuhkan kesadaran dalam mengembangkan budaya kerja yang baik melalui kegiatan sosialisasi.

Rencana Aksi/Langkah kedepan yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk meningkatkan pengembangan budaya kerja adalah sebagai berikut:

- Menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang pedoman pengembangan budaya kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Melaksanakan sosialisasi terhadap nilai-nilai yang sudah ditetapkan.
- Membentuk Kelompok Budaya Kerja (KBK) pada seluruh SKPD.
- meningkatkan komitmen bersama antar pimpinan dan seluruh Kepala SKPD dalam menciptakan budaya kerja yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Meningkatkan peran Agen Perubahan yaitu agen perubahan yang benar-benar dapat menjadi contoh dan teladan (*role model*) dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.



SASARAN 3 Meningkatkan Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik

Indikator 1 : Persentase Unit Pelayanan dengan Nilai SKM Minimal 80

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
3	Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80	100%	100%	100%	Bagian Organisasi Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Tahun 2020 adalah 100% sama dengan tahun 2019 yang juga sebesar 100%. Pada tahun 2020 nilai SKM Kabupaten Tanah Laut sebesar 84,59 dengan kategori "**BAIK**". Rata-rata persentase nilai SKM masing-masing SKPD bisa dikatakan Baik karena lebih dari 76,61.

Untuk tahun 2020 ada 9 SKPD yang kategori nilai SKM nya kategori "**SANGAT BAIK**" yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (89,32), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (90,59), Badan Pendapatan Daerah (88,76), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (94,22), Dinas Sosial (89,88), Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (95,26), Dinas P2KBP3A (97,08), Satpol PP (89,52) dan Kecamatan Bumi Makmur (96,40).

Persentase Unit Pelayanan dengan Nilai SKM Minimal 80 secara umum kualitas pelayanan pada SKPD/unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2020 dipersepsikan "**BAIK**" oleh masyarakat penggunanya. Hal ini dapat dilihat dari hasil survey kepuasan masyarakat yang diperoleh yaitu 84,59 (Kategori B = Baik). Hal ini dapat terlaksana karena semua SKPD/unit pelayanan telah melaksanakan standar pelayanan publik sesuai dengan aturan sehingga nilai yang dicapai dalam indeks kepuasan masyarakat dapat mencapai 80 ke atas.

Selain itu bagi beberapa SKPD yang telah melakukan inovasi dalam hal pelayanan publik dengan masa uji coba 1 tahun lebih juga dapat membuat proposal untuk dapat diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) untuk dilombakan agar mendapatkan Top 99 atau Top 40 dari seluruh Kabupaten/Provinsi se Indonesia.

Ada beberapa SKPD/Unit Pelayanan yang unsur pelayanannya dianggap paling memuaskan oleh responden dan mencapai angka 4,00, yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kesbangpol, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Bumi Makmur. Sedangkan unsur pelayanan yang kurang memuaskan dengan angka dibawah 3,00 terdapat pada Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan dan UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor.

Rekomendasi :

- Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan kejelasan dan kepastian petugas pelayanan serta kenyamanan lingkungan.
- Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan yang masih kurang baik, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kesesuaian biaya pelayanan pada SKPD/Unit pelayanan dapat lebih baik lagi dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.
- Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas dan menetapkan standardisasi internal mengenai sikap layanan serta disiplin kerja.
- Diperlukan upaya untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan satuan kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh pelanggan seperti saluran telepon bebas pulsa, sms, email, dan atau kotak saran.
- Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap petugas dalam memberikan pelayanan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah: (1) memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas, (2) memberikan informasi secara komunikatif kepada pelanggan.
- Perlu pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan terus memotivasi untuk mendapatkan prestasi di masa yang akan datang serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan dalam bentuk insentif khusus.
- Kegiatan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dapat terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan

membandingkan Survei Kepuasan Masyarakat terdahulu secara berkala, survei bisa dilakukan secara periodik (3 sampai dengan 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan perubahan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Masih ada beberapa SKPD yang kualitas pelayanannya kurang baik
- Keterlambatan SKPD dalam menyampaikan laporan penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada SKPDnya sehingga menghambat dalam penyusunan Laporan SKM Kabupaten.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan kejelasan dan kepastian petugas pelayanan serta kenyamanan lingkungan.
- Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan yang masih kurang baik, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kesesuaian biaya pelayanan pada SKPD/Unit pelayanan dapat lebih baik lagi dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.
- Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas dan menetapkan standarisasi internal mengenai sikap layanan serta disiplin kerja.
- Diperlukan upaya untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam mengajukan keluhan melalui pembentukan satuan kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media yang mudah diakses oleh pelanggan seperti saluran telepon bebas pulsa, sms, email, dan atau kotak saran.
- Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap petugas dalam memberikan pelayanan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah: (1) memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas, (2) memberikan informasi secara komunikatif kepada pelanggan.
- Perlu pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan terus memotivasi untuk mendapatkan prestasi di masa yang akan datang serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan dalam bentuk insentif khusus.

- Kegiatan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dapat terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan membandingkan Survei Kepuasan Masyarakat terdahulu secara berkala, survei bisa dilakukan secara periodik (3 sampai dengan 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan perubahan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Memberikan reward dan punishment bagi SKPD yang terlambat menyampaikan Laporan Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat di SKPD

Indikator 2 : Persentase Unit Pelayanan dengan Nilai SKM Minimal 80

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
4	Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	95%	95%	Bagian Organisasi Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Tahun 2020 adalah 100% sama dengan tahun 2019 yang juga sebesar 100%.

Untuk Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur pada SKPD rata-rata semua sudah memilikinya sebagai acuan bagi SKPD dalam melaksanakan pekerjaan.

Untuk Tahun 2020 ada 5 SOP tentang gapura karomah yaitu pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tanaman, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan serta Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

Kedepannya diharapkan bagi SKPD yang ada perubahan atau penambahan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP dapat melakukan pembaharuan SOP sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk regulasi standarisasi pedoman kerja karena sifatnya mengikuti aturan di atasnya, dalam hal ini Pemerintah Pusat maka kendala/hambatan yang ditemukan jarang terjadi. Sedangkan untuk regulasi standarisasi pedoman kerja pada tahun 2020 telah dibuat :

- 1) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- 2) SK Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/197-KUM/2020 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut.
- 3) SK Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/216-KUM/2020 tentang Besaran Honorarium Tim Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut.
- 4) SK Bupati Tanah Laut Nomor Nomor 188.45/647-KUM/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- 5) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Adapun program/kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan/Kegiatan Pengembangan dan Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp 39.194.660,- (setelah refocusing) dengan realisasi sebesar Rp 10.165.100,- (25,97%).

Untuk serapan anggaran bisa dikatakan kurang maksimal, hal ini disebabkan oleh adanya pandemi covid-19, dimana beberapa kegiatan yang rencananya akan diadakan bimtek dibatalkan. Karena ada himbauan dari Kepala Daerah untuk mengumpulkan orang banyak.

Untuk serapan anggaran bisa dikatakan kurang maksimal, hal ini disebabkan oleh adanya pandemi covid-19, dimana beberapa kegiatan yang rencananya akan diadakan bimtek dibatalkan. Karena ada himbauan dari Kepala Daerah untuk mengumpulkan orang banyak.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Masih ada SKPD yang belum memperbaharui SOP SKPDnya walaupun nomenklturnya sudah berubah.
- Kurangnya perhatian pejabat terkait terhadap SOP SKPDnya, sehingga pada saat diperlukan mereka baru membuat SOP yang diperlukan oleh SKPDnya.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SKPD yang masih belum merubah SOPnya sesuai dengan nomenklatur yang baru.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Mengadakan bimtek tentang SOP untuk lebih mengetahui tata cara penyusunan SOP SKPD.

SASARAN 4 Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Analisa dan Evaluasi Jabatan

Indikator 1 : Persentase Perangkat Daerah dengan Kelembagaan yang Efektif

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
4	Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	100%	100%	100%	Bagian Organisasi Mengampu Misi ke- 3 <i>"Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"</i>

Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif tahun 2020 adalah 100% sama dengan tahun 2019 yang juga sebesar 100%

Perangkat Daerah yang berjumlah 40 SKPD seluruhnya telah memiliki SOTK dan uraian tugas rinci dan jelas sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Pada tahun 2020 terdapat 5 SKPD yang mengalami perubahan nomenklatur sehingga harus diadakan pula perubahan SOTK dan uraian tugas. SKPD yang mengalami perubahan uraian tugas yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pariwisata, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Kegiatan Pengembangan dan penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 48.339.020,- dan realisasinya sebesar Rp.34.127.400,- atau 70,60 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk menunjang kegiatan Tim Evaluasi dan Monitoring Kelembagaan Laut Tahun anggaran 2020 dan Belanja Barang Jasa, seperti ATK, narasumber, cetak dan penggandaan dokumen serta makanan dan minuman kegiatan. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2020 berupa :

1. Rapat Tim Kelembagaan :
 - a. Ekpose tentang pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, dan UPTD Puskesmas;
 - b. Rapat tim membahas tindak lanjut dari hasil pemetaan urusan pemerintahan.

2. Melaksanakan pembentukan Peraturan Bupati tentang Perubahan SOTK, Uraian Tugas, dan Pembentukan UPTD baru.
3. Melaksanakan penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.
4. Melaksanakan pemetaan Urusan Pemerintahan.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Kegiatan Pengembangan dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

INDIKATOR	TOLOK UKUR	KINERJA	
		TARGET	REALISASI
Masukan	Tersedianya Dana, SDM, dan Bahan	Rp 48.339.020,-	Rp 34.127.400,-
Keluaran	Jumlah revisi Raperda Kelembagaan Perangkat Daerah/ Revisi Perbup UPTD/Perbup Tupoksi/ Perbup Uraian Tugas	9 Dokumen	14 Dokumen

Tabel Realisasi Kegiatan Pengembangan dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

NO	PERBUP	TENTANG	TANGGAL
1	53 Tahun 2020	SOTK Sekretariat Daerah	08 Mei 2020
2	61 Tahun 2020	SOTK Sekretariat DPRD	20 Mei 2020
3	28 Tahun 2020	SOTK Dinas Pariwisata	28 Maret 2020
4	157 Tahun 2020	SOTK DPMTSP	16 November 2020
5	106 tahun 2020	SOTK Dispusip	12 Agustus 2020
6	64 Tahun 2020	Uraian Tugas Sekretariat Daerah	26 Mei 2020
7	65 Tahun 2020	Uraian Tugas Sekretariat DPRD	26 Mei 2020
8	52 Tahun 2020	Uraian Tugas Dinas Pariwisata	08 Mei 2020
9	113 Tahun 2020	Uraian Tugas Dispusip	28 Agustus 2020
10	17 Tahun 2020	Perubahan Atas SOTK RSUD KH. MANSUR	26 Februari 2020
11	21 Tahun 2020	Perubahan Atas SOTK UPT Disdik	09 Maret 2020
12	22 Tahun 2020	Pembentukan UPT Disnak Keswan	09 Maret 2020
13	23 Tahun 2020	Pembentukan UPT PPA	09 Maret 2020
14	169 Tahun 2020	Pembentukan Puskesmas	02 Desember 2020

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas terdapat beberapa kendala antara lain :

- Dalam penyusunan uraian tugas, SKPD belum dapat membedakan antara uraian tugas jabatan dengan rincian kegiatan jabatan

- Masih kurangnya pengetahuan dari pemangku jabatan di SKPD tentang uraian tugas tiap jabatan di SKPD-nya.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan sosialisasi tentang penyusunan uraian tugas.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan



Foto Kegiatan Rapat Tim Kelembagaan

Indikator 2 : Persentase Analisa dan Evaluasi Jabatan sesuai Proporsinya

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
4	Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase Analisa dan evauasi jabatan sesuai proporsinya	100%	100%	100%	Bagian Organisasi Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Perangkat Daerah yang berjumlah 40 SKPD seluruhnya telah memiliki informasi jabatan, Analisa Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Pada tahun 2020 terdapat 6 SKPD yang mengalami perubahan informasi jabatan dan Analisa Beban Kerja, dan 11 SKPD yang mengalami perubahan evaluasi jabatan sehingga harus diadakan pula perubahan Peraturan Bupati tentang informasi jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan SKPD tersebut. Kemudian pada tahun 2020 dilakukan penyusunan standar kompetensi jabatan untuk seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Pimpinan Tinggi sejumlah 34 jabatan seluruhnya telah memiliki standar kompetensi jabatan sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.

Kegiatan Pengembangan dan Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 121.086.000,- dan terealisasi sebesar Rp.62.263.900,- atau 51,42 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk menunjang kegiatan Tim Penyusunan Analisis dan Evaluasi Jabatan, Tim Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS, Tim Penyusunan ABK, dan Tim Pelaksanaan TPP di lingkungan pemerintah kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 dan Belanja Barang Jasa, seperti ATK, narasumber, cetak dan penggandaan dokumen serta makanan dan minuman kegiatan.

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2020 berupa :

1. Melaksanakan pembentukan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati tentang Informasi Jabatan dan Analisa Beban Kerja;
2. Melaksanakan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Melaksanakan penyusunan instrumen perhitungan TPP;
4. Melaksanakan penyusunan evaluasi jabatan;
5. Melaksanakan rapat-rapat Tim Anjab, Tim ABK dan Tim Pelaksanaan TPP.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Kegiatan Pengembangan dan Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan

INDIKATOR	TOLOK UKUR	KINERJA	
		TARGET	REALISASI
Masukan	Tersedianya Dana, SDM, dan Bahan	Rp 121.086.000,-	Rp 62.263.900,-
Keluaran	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan, Analisis Beban Kerja	31 Dokumen	31 Dokumen

Tabel Realisasi Kegiatan Pengembangan dan Penataan Aparatur dan Analisa
Formasi Jabatan

NO	PERATURAN BUPATI	TENTANG	TANGGAL
1	Perbup 67 Tahun 2020	Inforjab Sekretariat Daerah	03 Juni 2020
2	Perbup 68 Tahun 2020	Inforjab Sekretariat DPRD	03 Juni 2020
3	Perbup 69 Tahun 2020	Inforjab DP2KBP3A	03 Juni 2020
4	Perbup 70 Tahun 2020	Inforjab Dinas Pariwisata	03 Juni 2020
5	Perbup 71 Tahun 2020	Inforjab Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	03 Juni 2020
6	Perbup 136 Tahun 2020	Inforjab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 Oktober 2020
7	Perbup 74 Tahun 2020	ABK Sekretariat Daerah	10 Juni 2020
8	Perbup 75 Tahun 2020	ABK Sekretariat DPRD	10 Juni 2020
9	Perbup 76 Tahun 2020	ABK Dinas Pariwisata	10 Juni 2020
10	Perbup 77 Tahun 2020	ABK DP2KBP3A	10 Juni 2020
11	Perbup 78 Tahun 2020	ABK Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	10 Juni 2020
12	Perbup xx Tahun 2020	ABK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Desember 2020
13	Perbup 79 Tahun 2020	Perubahan Peta Jabatan	18 Juni 2020
14	Perbup xx Tahun 2020	Perubahan Kedua Peta Jabatan	1 Desember 2020
15	Perbup 54 Tahun 2020	SKJ	08 Mei 2020
16	Perbup 7 Tahun 2020	TPP ASN	31 Januari 2020
17	Perbup 33 Tahun 2020	Perubahan Atas TPP ASN	01 April 2020
18	Perbup 55 Tahun 2020	Perubahan Kedua TPP ASN	08 Mei 2020
19	Perbup 8 Tahun 2020	TPP Tenaga Pendidik dan Nakes	31 Januari 2020
20	Perbup 58 Tahun 2020	Perubahan Atas TPP Tenaga Pendidik dan Nakes	08 Mei 2020
21		Evjab Tahun 2019	13 Maret 2020
22		Evjab Perubahan Struktural Setda	18 Desember 2020
23		Evjab Perubahan Struktural Set. DPRD	18 Desember 2020
24		Evjab Perubahan Struktural Inspektorat	18 Desember 2020
NO	PERBUP	TENTANG	TANGGAL
25		Evjab Perubahan Struktural DP2KBP3A	18 Desember 2020
26		Evjab Perubahan Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18 Desember 2020
27		Evjab Perubahan Struktural Dinas Pariwisata	18 Desember 2020
28		Evjab Perubahan Struktural Dinas Peternakan dan Keswan	18 Desember 2020
29		Evjab JFT DPRKPLH	18 Desember 2020
30		Evjab JFT DPMPSTP	18 Desember 2020
31		Evjab JFT Disdukcapil	18 Desember 2020

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas terdapat beberapa kendala antara lain :

- Masih kurangnya pengetahuan dari pemangku jabatan di SKPD tentang informasi tiap jabatan di SKPD-nya.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan sosialisasi tentang penyusunan informasi jabatan.
- Masih kurangnya pengetahuan pemangku jabatan tentang penyusunan standar kompetensi jabatan ASN.
- Dengan adanya pandemi Covid-19 proses evaluasi dan penetapan dokumen evjab oleh KemenpanRB menjadi terhambat.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan



Foto Kegiatan Rapat Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

❖ Analisis Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

Dalam mencapai sasaran bagian organisasi memiliki Program Pembinaan, Pengembangan, Penataan Kelembagaan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan dengan pagu Rp 409.816.840,00 terealisasi Rp 166.373.300,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar 40,60%.

Realisasi keuangan Bagian Organisasi relatif rendah yaitu sebesar 40,60%. Jumlah SDM di Bagian Organisasi terdiri dari, Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi berjumlah 2 orang, Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan berjumlah 3 orang,

Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana berjumlah 2 orang. Hal ini dikarenakan terjadinya wabah Covid 19 sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Bagian Organisasi yaitu:

1. Pelaksanaan bimbingan teknis bagi role model dan agen perubahan yang telah dijadwalkan dengan narasumber dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) Bandung.
2. Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang hanya dilaksanakan secara Desk oleh Tim Panel dan untuk beberapa Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dilakukan secara daring via *zoom meeting*.
3. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang hanya dilaksanakan melalui Desk oleh Tim Panel dan untuk beberapa Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dilakukan secara daring via *zoom meeting*.
4. Evaluasi Pembangunan Zona Integritas yang hanya dilaksanakan melalui *zoom meeting*.
5. Bimbingan Teknis penyusunan Laporan Kinerja dengan narasumber dari Biro Organisasi Provinsi dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan yang ditunda pelaksanaannya dikarenakan wabah Covid.
6. Pelaksanaan Bimbingan Teknis penyusunan Peta Proses Bisnis juga tidak dapat dilaksanakan.

Harapannya, kegiatan-kegiatan tersebut di Tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan tetap mempertimbangan situasi terakhir pandemi Covid 19.

Tabel 10

Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	SDM	KET
1	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja	107.445.800	32.368.800	30,13	2 Orang terdiri dari Kepala Bagian Organisasi dan Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
2	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	56.090.560	16.530.100	29,47	2 Orang terdiri dari Kepala Bagian Organisasi dan Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
3	Persentase SKPD dengan budaya kerja baik						

4	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	Pengembangan dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	48.339.020	23.663.400	48,95	3 Orang terdiri dari Kepala Bagian Organisasi, Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analis Jabatan, dan Pelaksana Analis Jabatan
5	Persentase Analisa dan evaluasi jabatan sesuai proporsinya	Pengembangan dan Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan	121.086.000,	46.055.900	38,04	3 Orang terdiri dari Kepala Bagian Organisasi, Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analis Jabatan, dan Pelaksana Analis Jabatan
6	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80	Pengembangan dan Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	39.134.660	10.165.100	25,97	2 Orang terdiri dari Kepala Bagian Organisasi dan Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana
7	Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	Pembuatan ID Card Pegawai	37.720.800	37.590.000	99,65	2 Orang terdiri dari Kepala Bagian Organisasi dan Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana
JUMLAH			409.816.840	166.373.300	40,50	

❖ Analisis Capaian Kinerja Kepala Sub Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Untuk capaian Indikator sasaran pada Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan dilaksanakan melalui Program Pembinaan, Pengembangan, Penataan Kelembagaan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan dengan anggaran sebesar Rp 169.425.020,- dan terealisasi sebesar Rp 96.391.300,- atau 56,89% dengan dukungan SDM sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri dari :

- Kegiatan Pengembangan dan Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan dengan anggaran sebesar Rp 121.086.000,- dan terealisasi sebesar Rp 62.263.900,- atau 51,42%;
- Kegiatan Pengembangan dan penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 48.339.020,- dan realisasinya sebesar Rp 34.127.400,- atau 70,60%;

Tabel Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2019	REALISASI	CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Pelaksanaan penataan kelembagaan yang efektif	Jumlah SKPD yang telah memiliki uraian tugas rinci dan jelas	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan
		Jumlah SKPD yang memiliki SOTK yang jelas	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan
2	Pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan	Jumlah perangkat daerah yang memiliki informasi jabatan	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan
		Jumlah perangkat daerah yang memiliki evaluasi jabatan	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan
		Jumlah perangkat daerah yang disusun standar kompetensi jabatan	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan
		Jumlah perangkat daerah yang dianalisis beban kerja	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan

SASARAN 1 Pelaksanaan Penataan Kelembagaan yang Efektif

Indikator 1 : Jumlah SKPD yang Telah Memiliki Uraian Tugas Rinci dan Jelas

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2019	REALISASI	CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Pelaksanaan penataan kelembagaan yang efektif	Jumlah SKPD yang telah memiliki uraian tugas rinci dan jelas	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Perangkat Daerah yang berjumlah 40 SKPD seluruhnya telah memiliki uraian tugas rinci dan jelas sehingga capaian kerjanya adalah 100%. Pada tahun 2020 terdapat 5

SKPD yang mengalami perubahan nomenklatur sehingga harus diadakan pula perubahan uraian tugas. SKPD yang mengalami perubahan uraian tugas yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pariwisata, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sedangkan untuk Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu akan disusun pada Tahun 2021.

Penyusunan Uraian Tugas terdapat dalam Kegiatan Pengembangan dan Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan dengan anggaran sebesar Rp 121.086.000,- dan terealisasi sebesar Rp 62.263.900,- atau 51,42%.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas terdapat beberapa kendala antara lain :

- Dalam penyusunan uraian tugas, SKPD belum dapat membedakan antara uraian tugas jabatan dengan rincian kegiatan jabatan
- Masih kurangnya pengetahuan dari pemangku jabatan di SKPD tentang uraian tugas tiap jabatan di SKPD-nya.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan sosialisasi tentang penyusunan uraian tugas.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan

Indikator 2 : Jumlah SKPD yang Memiliki SOTK yang Jelas

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2019	REALISASI	CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Pelaksanaan penataan kelembagaan yang efektif	Jumlah SKPD yang memiliki SOTK yang jelas	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Perangkat Daerah yang berjumlah 40 SKPD seluruhnya telah memiliki SOTK yang jelas sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Pada tahun 2020 terdapat perubahan nomenklatur pada 5 SKPD serta pembentukan/perubahan UPTD pada 5 Dinas sehingga harus diadakan pula perubahan Peraturan Bupati tentang SOTK SKPD tersebut.

SKPD yang mengalami perubahan SOTK yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu. Sedangkan UPT Dinas yang dibentuk/diubah yaitu UPTD RSUD KH. MANSUR dan UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan, UPTD pada

Dinas Pendidikan, UPTD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Penyusunan SOTK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Penyusunan SOTK terdapat dalam Kegiatan Pengembangan dan penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 48.339.020,- dan realisasinya sebesar Rp 34.127.400,- atau 70,60%.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas terdapat beberapa kendala antara lain :

- Dalam penyusunan uraian tugas, SKPD belum dapat membedakan antara uraian tugas jabatan dengan rincian kegiatan jabatan
- Masih kurangnya pengetahuan dari pemangku jabatan di SKPD tentang uraian tugas tiap jabatan di SKPD-nya.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan sosialisasi tentang penyusunan uraian tugas.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan

SASARAN 2 Pelaksanaan Analisa dan Evaluasi Jabatan

Indikator 1 : Jumlah Perangkat Daerah yang Memiliki Informasi Jabatan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2019	REALISASI	CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan	Jumlah perangkat daerah yang memiliki informasi jabatan	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Perangkat Daerah yang berjumlah 40 SKPD seluruhnya telah memiliki informasi jabatan sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Pada tahun 2020 terdapat 6 SKPD yang mengalami perubahan informasi jabatan sehingga harus diadakan pula perubahan Peraturan Bupati tentang informasi jabatan SKPD tersebut.

SKPD yang mengalami perubahan informasi jabatan yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Penyusunan informasi jabatan termasuk dalam Kegiatan Pengembangan dan Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 121.086.000,- dan terealisasi sebesar Rp.62.263.900,- atau 51,42 %.

Penyusunan informasi jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas terdapat beberapa kendala antara lain :

- Masih kurangnya pengetahuan dari pemangku jabatan di SKPD tentang informasi tiap jabatan di SKPD-nya.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan sosialisasi tentang penyusunan informasi jabatan.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan

Indikator 2 : Jumlah Perangkat Daerah yang Memiliki Informasi Jabatan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2019	REALISASI	CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan	Jumlah perangkat daerah yang memiliki evaluasi jabatan	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Perangkat Daerah yang berjumlah 40 SKPD seluruhnya telah memiliki evaluasi jabatan sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Pada tahun 2020 terdapat 11 SKPD yang mengalami perubahan evaluasi jabatan sehingga harus diadakan pula perubahan Peraturan Bupati tentang evaluasi jabatan SKPD tersebut.

SKPD yang mengalami perubahan informasi jabatan yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Penyusunan evaluasi jabatan termasuk kedalam Kegiatan Pengembangan dan Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan dengan anggaran sebesar Rp 121.086.000,- dan terealisasi sebesar Rp 62.263.900,- atau 51,42%.

Penyusunan evaluasi jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas terdapat beberapa kendala antara lain :

- Dengan adanya pandemi Covid-19 proses evaluasi dan penetapan dokumen evjab oleh KemenpanRB menjadi terhambat.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan KemenpanRB secara daring dan lebih intens.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan

Indikator 3 : Jumlah Perangkat Daerah yang Disusun Standar Kompetensi Jabatan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2019	REALISASI	CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan	Jumlah perangkat daerah yang disusun standar kompetensi jabatan	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Pada tahun 2020 dilakukan penyusunan standar kompetensi jabatan untuk seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Pimpinan Tinggi sejumlah 34 jabatan seluruhnya telah memiliki standar kompetensi jabatan sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.

Standar Kompetensi Jabatan ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.

Penyusunan standar kompetensi jabatan untuk seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi terdapat dalam Kegiatan Pengembangan dan Penataan Aparatur dan Analisa Formasi

Jabatan dengan anggaran sebesar Rp 121.086.000,- dan terealisasi sebesar Rp 62.263.900,- atau 51,42%.

Penyusunan standar kompetensi jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas terdapat beberapa kendala antara lain :

- Masih kurangnya pengetahuan pemangku jabatan tentang penyusunan standar kompetensi jabatan ASN.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Instansi terkait.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan

Indikator 4 : Jumlah Perangkat Daerah yang Dianalisis Beban Kerja

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2019	REALISASI	CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan	Jumlah perangkat daerah yang dianalisis beban kerja	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Perangkat Daerah yang berjumlah 40 SKPD seluruhnya telah memiliki analisa beban kerja sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Pada tahun 2020 terdapat 6 SKPD yang mengalami perubahan analisa beban kerja sehingga harus diadakan pula perubahan Peraturan Bupati tentang analisa beban kerja SKPD tersebut.

SKPD yang mengalami perubahan analisa beban kerja yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Penyusunan analisa beban kerja terdapat dalam Kegiatan Pengembangan dan Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan dengan anggaran sebesar Rp 121.086.000,- dan terealisasi sebesar Rp 62.263.900,- atau 51,42%.

Penyusunan analisa beban kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas terdapat beberapa kendala antara lain :

- Data isian daftar pertanyaan Analisis Beban Kerja dari SKPD tidak sesuai kondisi dan kebutuhan sebenarnya.
- Masih kurangnya pengetahuan dari pemangku jabatan di SKPD tentang penyusunan Analisis Beban Kerja.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan sosialisasi tentang penyusunan Analisis Beban Kerja.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Melakukan monev secara berkala dan berkelanjutan

❖ Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik

Untuk capaian indikator pada Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan dengan dukungan SDM sebanyak 2 (dua) orang, terdiri dari :

- Kegiatan Pengembangan dan Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp 39.194.660,- (setelah *refocusing*) dengan realisasi sebesar Rp 10.165.100,- (25,97%).

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Penguatan ketatalaksanaan	Jumlah dokumen SOP yang sudah ditetapkan	5 SOP	5 SOP	100%	Kasubbag Tata Laksana dan Pelayanan Publik
		Jumlah regulasi standarisasi pedoman kerja	5 Perbup/SK	5 Perbup/ SK	100%	Kasubbag Tata Laksana dan Pelayanan Publik
4	Penguatan Layanan Publik	Jumlah unit pelayanan publik yang melaksanakan standar pelayanan publik	3 SKPD	3 SKPD	100%	Kasubbag Tata Laksana dan Pelayanan Publik
		Jumlah SKPD yang berpartisipasi pada Inovasi pelayanan publik	5 SKPD	5 SKPD	100%	Kasubbag Tata Laksana dan Pelayanan Publik

SASARAN 3 Penguatan Ketatalaksanaan

Indikator 1 : Jumlah Dokumen SOP yang Sudah Ditetapkan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Penguatan ketatalaksanaan	Jumlah dokumen SOP yang sudah ditetapkan	5 SOP	5 SOP	100%	Kasubbag Tata Laksana dan Pelayanan Publik

Untuk Tahun 2020 ada 5 SOP yang ditetapkan tentang gapura karomah yaitu SOP pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tanaman, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan serta Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Masih ada SKPD yang belum memperbaharui SOP SKPDnya walaupun nomenklturnya sudah berubah.
- Kurangnya perhatian pejabat terkait terhadap SOP SKPDnya, sehingga pada saat diperlukan mereka baru membuat SOP yang diperlukan oleh SKPDnya.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SKPD yang masih belum merubah SOPnya sesuai dengan nomenklatur yang baru.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Mengadakan bimtek tentang SOP untuk lebih mengetahui tata cara penyusunan SOP SKPD.

Indikator 2 : Jumlah Regulasi Standarisasi Pedoman Kerja

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Penguatan ketatalaksanaan	Jumlah regulasi standarisasi pedoman kerja	5 perbup/SK	5 perbup/ SK	100%	Kasubbag Tata Laksana dan Pelayanan Publik

Untuk regulasi standarisasi pedoman kerja pada tahun 2020 yang telah dibuat :

- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- SK Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/197-KUM/2020 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut.
- SK Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/216-KUM/2020 tentang Besaran Honorarium Tim Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut.
- SK Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/647-KUM/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Tidak ada kendala dan solusi karena sifatnya mengikuti aturan dari pusat jadi Cuma menindaklanjuti aturan tsb :

SASARAN 4 Penguatan Ketatalaksanaan

Indikator 1 : Jumlah Unit Pelayanan Publik yang Melaksanakan Standar Pelayanan Publik

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Penguatan Layanan Publik	Jumlah unit pelayanan publik yang melaksanakan standar pelayanan publik	3 SKPD	3 SKPD	100%	Kasubbag Tata Laksana dan Pelayanan Publik

Jumlah unit pelayanan publik yang melaksanakan standar pelayanan publik ada 3 SKPD yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan RSUD Hadji Boejasin. Pada bulan Agustus-November telah dilakukan evaluasi pelayanan publik oleh Kemenpan RB dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk saat ini Kabupaten/Kota masih menunggu hasil evaluasi tersebut.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Sarana dan prasarana kurang memadai
- Standar Pelayanan pada SKPD terkait masih ada yang belum diperbaharui

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Lebih meningkatkan sarana dan prasarana yang ada sehingga pada saat penilaian oleh Tim akan dapat lebih meningkatkan nilai Pelayanan Publik
- Standar Pelayanan yang sudah ditetapkan agar dilakukan reviu secara berkala

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Diadakan bimtek untuk lebih mengetahui lebih dalam tentang tata cara penyusunan Standar Pelayanan

Indikator 2 : Jumlah SKPD yang Berpartisipasi pada Inovasi Pelayanan Publik

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Penguatan Layanan Publik	Jumlah SKPD yang berpartisipasi pada Inovasi pelayanan publik	5 SKPD	5 SKPD	100%	Kasubag Tata Laksana dan Pelayanan Publik

Jumlah SKPD yang berpartisipasi pada Inovasi pelayanan publik untuk tahun 2020 ada 5 SKPD yaitu PKM Tambang Ulang, BKPSDM, Kominfo, Disdukcapil dan Sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Keterbatasan waktu yang diberikan oleh Kemenpanrb dalam pengisian inovasi di aplikasi Sinovik
- Kurangnya atensi dari SKPD dalam mengolah inovasi pelayanan publik di SKPD masing-masing

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Memberikan *reward* bagi SKPD yang mempunyai inovasi pelayanan publik
- Melakukan koordinasi lebih intens dengan pihak Kemenpanrb melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal pelaksanaan Lomba Inovasi Pelayanan Publik.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Mengadakan lomba inovasi tingkat daerah Kabupaten Tanah Laut

❖ Kepala Sub Bagian Perberdayaan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja

Untuk capaian Indikator sasaran pada Kasubbag Pemberdayaan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan dengan pagu Rp 163.536.360,00 terealisasi Rp.48.898.900,00 dengan realisasi keuangan sebesar 59.6% dengan dukungan SDM sebanyak 2 (dua) orang, terdiri dari :

- Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja dengan pagu Rp 107.445.800,00 terealisasi Rp 32.368.800,00 dengan realisasi keuangan sebesar 30,13%;
- Kegiatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan pagu Rp 56.090.560,00 terealisasi Rp 16.530.100,00 dengan realisasi keuangan sebesar 29,47%;

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2019	REALISASI	CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja Bupati Tanah Laut sesuai Permenpan 53 Tahun 2014	Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun sesuai Pemenpan 53 Tahun 2014	1 Dok	1 Dok	100%	Kasubbag Pemberdayaan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja
2	Pelaksanaan Pembinaan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah SKPD yang di diasistensi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Pemberdayaan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja
3	Penguatan Sistem Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan fasilitasi reformasi birokrasi	1 Dok	1 Dok	100%	Kasubbag Pemberdayaan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja

4	Pelaksanaan Penerapan Budaya Kerja	Jumlah SKPD yang dibina budaya kerja	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Pemberdayaan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja					100%	

SASARAN 1 Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Bupati Tanah Laut Sesuai Permenpan 53 Tahun 2014

Indikator : Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang Disusun Sesuai Pemenpan 53 Tahun 2014

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2019	REALISASI	CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja Bupati Tanah Laut sesuai Permenpan 53 Tahun 2014	Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun sesuai Pemenpan 53 Tahun 2014	1 Dok	1 Dok	100%	Kasubbag Pemberdayaan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja

Indikator jumlah laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun sesuai Pemenpan 53 Tahun 2014 Tahun 2020 dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan melalui Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja dengan Anggaran sebesar Rp 107.445.800 dan terealisasi sebesar Rp 32.368.800 atau 30,13% dan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 2 Orang yaitu Kepala Bagian Organisasi dan Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Realisasi Indikator jumlah laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun sesuai Pemenpan 53 Tahun 2014 terealisasi 1 dokumen dari target 1 dokumen sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Laporan kinerja merupakan pertanggungjawaban Bupati atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut atas penggunaan anggaran pada Tahun berjalan. Penyusunan Laporan Kinerja telah disusun sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014, dengan melibatkan seluruh SKPD pengampu IKU Kabupaten. Laporan Kinerja memuat pencapaian atas 21 Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan 31 indikator Kinerja dengan rata rata capaian kinerja sebesar %. Kedepannya, kualitas laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tanah laut akan terus ditigkatkan agar bisa meningkatkan nilai SAKIP Kabupaten Tanah Laut.

Hambatan:

- Kurangnya SDM penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Kurangnya data dan analisa yang diberikan oleh SKPD pengampu IKU Kabupaten.

Solusi

- Mengusulkan penambahan SDM penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ke BKPSDM.
- Memperbaiki sistematika penyusunan LKj SKPD dengan memuat capaian IKU Kabupaten pada LKj SKPD.

Rencana Aksi:

- Memastikan data dan analisa yang diberikan oleh SKPD pengampu IKU Kabupaten dimuat di LKj SKPD dengan data yang akurat dan dapat diandalkan.

SASARAN 2 Pelaksanaan Pembinaan Laporan Kinerja SKPD

Indikator : Jumlah SKPD yang Didiasistensi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2019	REALISASI	CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Pelaksanaan Pembinaan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah SKPD yang di diasistensi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Pemberdayaan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja

Indikator Jumlah SKPD yang di diasistensi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2020 dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan melalui Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja dengan Anggaran sebesar Rp 107.445.800 dan terealisasi sebesar Rp 32.368.800 atau 30,13% dan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 2 Orang yaitu Kepala Bagian Organisasi dan Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Terealisasi 40 SKPD dari target 40 SKPD sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Asistensi laporan kinerja bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan kinerja SKPD. Masih ada 3 SKPD dengan nilai laporan kinerja di bawah 10 yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas kesehatan dan Kecamatan Bumi Makmur. Kedepan, untuk ketiga SKPD ini akan lebih di intensifkan pembinaan dalam laporan kinerjanya agar bisa

meningkat. Kebanyakan dari SKPD kurang dalam penyajian analisa terhadap capaian indikator Kinerja dan data pembanding tidak tersedia.

Hambatan dalam melaksanakan indikator ini yaitu terlambatnya SKPD dalam menyampaikan LKj SKPD atau tidak tepat waktu sesuai dengan batas akhir yang telah ditentukan. Solusinya yaitu adanya ketegasan dari pimpinan terkait punishment terhadap keterlambatan penyampaian LKj SKPD sesuai dengan Perbup TPP. Rencana Aksi kedepannya adalah memastikan SKPD yang terlambat menyampaikan LKj akan diberikan sanksi atau punishment sesuai aturan.

Sasaran 3 Penguatan Sistem Reformasi Birokrasi

Indikator : Jumlah Laporan Fasilitasi Reformasi Birokrasi

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2019	REALISASI	CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
3	Penguatan Sistem Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Reformasi Birokrasi	1 Dok	1 Dok	100%	Kasubbag PEMBERDAYAAN Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja

Tahun 2020, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan melalui Kegiatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp 56.090.560 dan realisasi sebesar Rp 16.530.100 atau 29,47% dan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 2 orang yaitu Kepala Bagian Organisasi dan Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Terealisasi 1 Dokumen dari target 1 Dokumen sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Laporan pelaksanaan reformasi Birokrasi merupakan laporan penyelenggaraan terhadap roadmap Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan selama 1 Tahun. Banyak hal-hal baik yang telah dicapai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi namun masih banyak pula perlu perbaikan. Kerjasama Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi yang lebih sangat diharapkan dalam rangka menginternalisasikan program-program reformasi birokrasi. Namun inti dari peggerak reformasi birokrasi adalah aparatur sipil negara. Jadi sangat diharapkan keterlibatan dan kemauan seluruh ASN dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

Hambatan dalam melaksanakan indikator ini yaitu masih kurangnya penerapan Reformasi birokrasi di SKPD sehingga masih belum maksimalnya capaian terhadap indicator-indikator pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Solusi dan rencana aksi kedepannya adalah terus melaksanakan internalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Rencana Aksi kedepannya adalah.

Sasaran 4 Pelaksanaan Penerapan Budaya Kerja

Indikator : Jumlah SKPD yang Dibina Budaya Kerja

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2019	REALISASI	CAPAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
4	Pelaksanaan Penerapan Budaya Kerja	Jumlah SKPD yang dibina budaya kerja	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Pembedayaan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja					100%	

Tahun 2020, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan melalui Kegiatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp 56.090.560 dan realisasi sebesar Rp 16.530.100 atau 29,47% dan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 2 orang yaitu Kepala Bagian Organisasi dan Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Terealisasi 40 SKPD dari target 40 SKPD sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Pembinaan budaya kerja telah dilaksanakan kepada 40 SKPD namun belum maksimal. Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja masih dalam tahap penyusunan, sehingga nilai-nilai yang ingin ditanamkan di dalam organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Kedepannya akan dilaksanakan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai baik yang akan ditanamkan kepada seluruh aparatur sipil negara dan diharapkan budaya kerja akan menjadi budaya yang berkinerja.

Hambatan dalam pelaksanaan indikator ini adalah kurangnya SDM dalam kegiatan pembinaan budaya kerja. Solusi dan rencana aksi kedepannya adalah dengan mengusulkan penambahan SDM penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ke BKPSDM.

Analisis Capaian Sasaran Strategis
Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	100%	Bagian PBJ Mengampu Misi ke-3 “ <i>Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)</i> ”
2	Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	100%	55%	55%	
ESELON IV						
1	Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya	Jumlah terlaksanakannya pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya	360 Hari	100%	100%	Kasubbag Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Lpse)
2	Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	Jumlah paket pengadaan yang masuk dalam LPSE sesuai prosedur	90 Paket	100%	100%	Kasubbag Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
3	Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah terlaksanakannya kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	90 Paket	100%	100%	Kasubbag Pengadaan Barang Dan Jasa
4	Memfasilitasi pendampingan SKPD dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	Jumlah fasilitasi SKPD yang didampingi dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	40 SKPD	100%	100%	Kasubbag Pengadaan Barang Dan Jasa
5	Memfasilitasi pembinaan SKPD dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	Jumlah fasilitasi pembinaan SKPD dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	40 SKPD	100%	100%	Kasubbag Pembinaan Kompetensi Dan Evaluasi Pelaporan
6	Memfasilitasi pengelolaan personil Bagian pengadaan barang/jasa	Jumlah fasilitasi pengelolaan personil Bagian Pengadaan Barang/Jasa	25 Orang	100%	100%	Kasubbag Pembinaan Kompetensi Dan Evaluasi Pelaporan

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Bagian Pengadaan Barang/Jasa terhadap capaian tahun sebelumnya.

Tabel Capaian Sasaran Strategis Bagian Pengadaan Barang/Jasa
 Terhadap capaian tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2020		
			2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian
	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	%	-	100%	100%	100%	100%
	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	%	-	-	100%	55%	55%

Pemaparan analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yaitu :

❖ **Perbandingan Realisasi dengan Target**

- 1) Capaian Kinerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa terhadap Indikator yaitu “Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu telah terealisasi 100% dari target 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kerjanya adalah 100%;
- 2) Capaian kinerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa terhadap indicator yaitu “Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE telah terealisasi 55% dari target 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kerjanya adalah 55%;
- 3) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut telah mencapai Maturitas Level 3 Proaktif Kematangan UKPBJ. Dari 395 Kabupaten, hanya 16 Kabupaten yang telah mencapai maturitas level 3 proaktif.

❖ **Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait**

Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu di Tahun 2020 mencapai 100%, sama dengan tahun 2019 yaitu 100%.

Tahun 2020 ada penambahan indikator kinerja untuk Esselon III yaitu Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE.

Adapun Persentase realisasi pencapaian indikator SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE di tahun 2020 sebesar 55% dari target 100%.

❖ **Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

Sasaran 1 Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik

Indikator : Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	100%	Bagian PBJ Mengampu Misi ke-3 “ <i>Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</i> ” (<i>Good Governance</i>)”

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi yaitu melaksanakan pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Dalam pengelolaan dan pembinaan PBJ tersebut kunci kesuksesannya yaitu jika paket pengadaan yang dilayani dapat diproses sesuai standar dan tepat waktu.

Agar paket pengadaan yang dilayani dapat selesai tepat waktu diperlukan peran serta yang sangat besar oleh pelaku pengadaan yang memahami terkait proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam pencapaian persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu menghadapi kendala yaitu :

1. Kurangnya pemahaman para PA/KPA dan PPK dalam menyusun Perencanaan Pengadaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;

2. Sulitnya kerjasama SKPD untuk dievaluasi dalam proses pengadaan barang/jasa;
3. Sulitnya membina hubungan dengan para pemangku kepentingan guna menciptakan proses pengadaan barang/jasa yang selaras.

Solusi yang dilaksanakan dalam menghadapi kendala yang disebutkan di atas adalah :

1. Meningkatkan pemahaman para pelaku pengadaan dalam setiap proses pengadaan barang/jasa pemerintah;
2. Memahamkan SKPD terkait pentingnya evaluasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di SKPD sehingga akan menghasilkan proses pengadaan yang lebih baik;
3. Memahamkan pelaku pengadaan terkait pentingnya pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa secara elektronik;
4. Membuka komunikasi secara intens dengan para pemangku kepentingan guna menciptakan proses pengadaan barang/jasa yang selaras.

❖ Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Sasaran 2 Meningkatnya SKPD melakukan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem LPSE

Indikator : Persentase SKPD yang melakukan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem LPSE

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2020		
			2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian
	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	%	-	-	100%	55%	55%

Selain peningkatan kualitas layanan pengadaan barang/jasa, Bagian Pengadaan Barang/Jasa harus mengarahkan SKPD agar dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan sistem LPSE.

Tujuan dari dilaksanakannya Pengadaan barang/jasa secara elektronik (melalui LPSE) adalah :

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
4. Mendukung proses monitoring dan audit; dan
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Untuk itu maka Bagian Pengadaan Barang/Jasa selalu mengusahakan agar SKPD di Pemerintah Kab. Tanah Laut melaksanakan proses pengadaan barang/jasa melalui sistem LPSE.

Proses pengadaan barang/jasa melalui sistem LPSE diantaranya :

- Pengadaan langsung secara elektronik (e-PL)
- E-Tendering;
- E-Seleksi;
- E-Purchasing;
- Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (Pencatatan Non Tender); dan
- E-Kontrak

Di tahun 2020, persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE sebesar 55% dari target 100% (22 SKPD dari target 40 SKPD). Sehingga capaian kinerja pada indikator ini 55%.

SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE yaitu :

1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
5. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
7. Satpol PP dan Damkar
8. Dinas Komunikasi dan Informatika
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
11. Sekretariat Daerah
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
14. Dinas Peternakan
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16. Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah
17. Dinas Pariwisata
18. Dinas Perhubungan
19. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

20. Badan Perencanaan Pembangunan

21. Sekretariat Dewan

22. Kecamatan Bupati

Pada tahun 2020, proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan SKPD melalui sistem LPSE meliputi e-tendering, e-seleksi, e-purchasing, e-pengadaan langsung dan pencatatan non tender.

Terdapat beberapa kendala agar SKPD melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui sistem LPSE tersebut, yaitu :

1. Masih kurangnya pemahaman pelaku pengadaan di SKPD terkait pentingnya melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui sistem LPSE (terutama untuk e-PL, Pencatatan non Tender dan E-Kontrak);
2. Masih kurangnya kecakapan pelaku pengadaan dalam menggunakan aplikasi SPSE;
3. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya secara elektronik (Pengadaan Langsung secara elektronik (e-PL) masih ada yang dilaksanakan secara manual, hal tersebut terjadi karena pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standard an Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, masih membolehkan pelaksanaan secara manual).

Solusi yang dilaksanakan dalam menghadapi kendala yang disebutkan di atas adalah :

1. Peningkatan pemahaman dan kecakapan pelaku pengadaan di SKPD dalam menggunakan aplikasi SPSE;
2. Koordinasi dengan pimpinan daerah dan stake holder di Pemerintah Daerah Kab. Tanah Laut terkait adanya keharusan dalam pemanfaatan aplikasi SPSE dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah terutama untuk e-PL, Pencatatan non Tender dan E-Kontrak.
3. Untuk pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya di atas 200 Juta dan pengadaan jasa konsultasi di atas 100 juta telah dilaksanakan E-Tendering dan E-Seleksi oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Rencana aksi perbaikan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik dan untuk peningkatan SKPD melakukan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem LPSE yang akan dilakukan adalah :

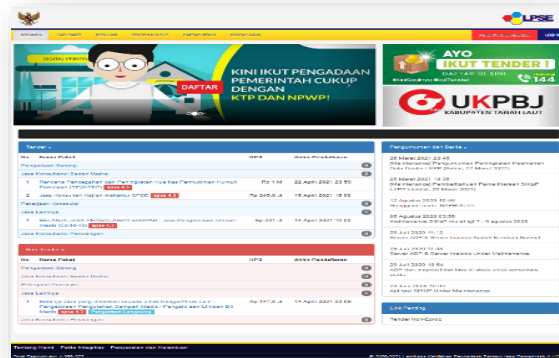
1. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis untuk para pelaku pengadaan yang terencana dan terkoordinir;
2. Melaksanakan pelatihan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
3. Mengagendakan rapat dengan para pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi tentang pengadaan barang/jasa.

❖ **Analisis Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia**

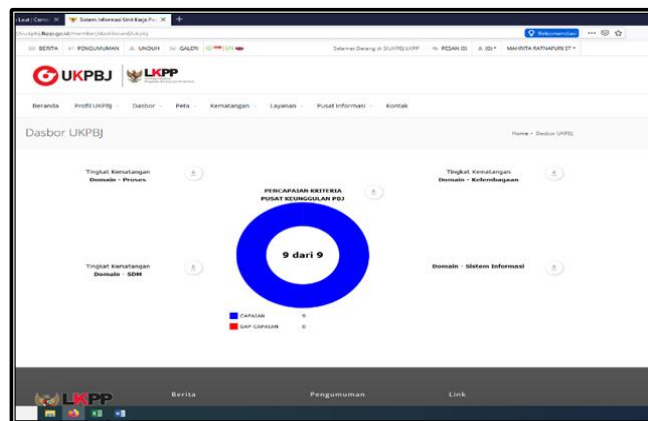
Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik dan Meningkatnya SKPD melakukan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem LPSE maka ditunjang dengan Program Pembinaan, Pengelolaan, Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu Rp 736.109.060,- dengan besaran realisasi Rp 564.037.766,- Dengan realisasi keuangan sebesar 76,62% dan dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang SDM yaitu Kasubbag Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Kasubbag Pengadaan Barang dan Jasa, Kasubbag Pembinaan Kompetensi dan Evaluasi Pelaporan dan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ).

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	SDM	Ket
	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	Pembinaan, Pengelolaan, Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	736.109.060,-	564.037.766,-	76,62	1. Kasubbag Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), 2. Kasubbag Pengadaan Barang dan Jasa, 3. Kasubbag Pembinaan Kompetensi dan Evaluasi Pelaporan 4. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ)	
	Persentase SKPD yang melakukan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Sistem LPSE						
JUMLAH			736.109.060,-	564.037.766,-	76,62		



Gambar 1
Kegiatan Kaji Ulang Proses Pemilihan Penyedia dan Penayangan Paket Tender di SPSE



Gambar 2
Pencapaian Maturitas Level 3 Proaktif Kematangan UKPBJ Kabupaten Tanah Laut

❖ **Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)**

Untuk capaian indikator sasaran pada Kasubbag Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dilaksanakan melalui Program Pembinaan, Pengelolaan, Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembinaan, Pengelolaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan pagu Rp 311.531.840,- terealisasi Rp 292.270.500,- dengan realisasi keuangan sebesar 93,82%.

Tabel Capaian Sasaran dan Indikator
 Kasubbag Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya	Jumlah terlaksanakannya pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya	360 Hari	360 Hari	100%	Kasubbag Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
2	Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	Jumlah paket pengadaan yang masuk dalam LPSE sesuai prosedur	90 Paket	90 Paket	100%	Kasubbag Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

SASARAN 1 Memfasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Seluruh Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Infrastrukturnya

Indikator : Jumlah Terlaksanakannya Pengelolaan Seluruh Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa dan Infrastrukturnya

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya	Jumlah terlaksanakannya pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya	360 Hari	360 Hari	100%	Kasubbag Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Jumlah terlaksanakannya pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastruktur dikerjakan selama 360 hari.

Dalam melaksanakan indikator tersebut menghadapi kendala yaitu :

- Kendalanya adanya gangguan sistem jaringan internet dan suplay listrik

Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala adalah :

- Meningkatkan infrastruktur sistem Jaringan dan kelistrikan agar sistem informasi yang berjalan menjadi lancer

Rencana aksi perbaikan yang dilakukan kedepannya adalah :

- Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan (*maintenance*) secara rutin sistem jaringan dan kelistrikan.
- Pergantian perangkat (*hardware/software*) secara berkala.

SASARAN 2 Memfasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik

Indikator : Jumlah Paket Pengadaan yang Masuk Dalam LPSE Sesuai Prosedur

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	Jumlah paket pengadaan yang masuk dalam LPSE sesuai prosedur	90 Paket	90 Paket	100%	Kasubbag Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Jumlah paket pengadaan yang masuk dalam LPSE sesuai prosedur sebanyak 90 paket.

Dalam melaksanakan indikator tersebut menghadapi kendala yaitu :

- *Summary* tender pada aplikasi SPSE terkadang tidak dapat di unduh

Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala adalah :

- Melaksanakan Pembuatan Tiket ke helpdesk LKPP

Rencana aksi perbaikan yang dilakukan kedepannya adalah :

- Mengikuti update perkembangan SPSE

❖ **Analisa Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia**

Pada Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 3 (tiga) orang yaitu :

- Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) -1 (satu) orang;
- Pengelola Penyelenggara Media Elektronik -1 (satu) orang;
- Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1 (satu) orang.

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SDM	Ket
1	Jumlah terlaksanakannya pengelolaan seluruh system informasi pengadaan barang/jasa dan infrastruktur	Pembinaan, Pengelolaan, Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Pembinaan, Pengelolaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	311.531.840	292.270.500	93,82	- Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) - Pengelola Penyelenggara Media Elektronik - Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
2	Jumlah paket pengadaan yang masuk dalam LPSE sesuai prosedur							
JUMLAH				311.531.840	292.270.500	93,82		

❖ Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Untuk capaian indikator sasaran pada Kasubbag Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan melalui Program Pembinaan, Pengelolaan, Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembinaan dan Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan pagu Rp. 180.954.020,- terealisasi Rp. 81.986.285,- dengan realisasi keuangan sebesar 45.31%.

Adapun penyebab rendahnya realisasi keuangan dikarenakan Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka klarifikasi/verifikasi penyedia (Vendor) **TIDAK DILAKSANAKAN** secara berkunjung langsung/tatap muka. Hal tersebut disebabkan adanya pandemi Covid 19 yang mengharuskan pelaksanaan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi pada pemilihan penyedia dilaksanakan secara **DARING**. (Sesuai Edaran LKPP Nomor 4 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi dan Negosiasi pada Pemilihan Penyedia dalam Masa Wabah Virus Corona (Covid 19)).

Tabel Capaian Sasaran dan Indikator Kasubbag Pengadaan Barang dan Jasa

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah terlaksanakannya kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai	90 Paket	90 Paket	100%	Kasubbag Pengadaan Barang Dan Jasa

		standar dan tepat waktu				
2	Memfasilitasi pendampingan SKPD dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	Jumlah fasilitasi SKPD yang didampingi dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Pengadaan Barang Dan Jasa

SASARAN 1 Memfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Sesuai Standar dan Tepat Waktu

Indikator : Jumlah Terlaksanakannya Kegiatan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Sesuai Standar dan Tepat Waktu

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah terlaksanakannya kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	90 Paket	90 Paket	100%	Kasubbag Pengadaan Barang Dan Jasa

Jumlah terlaksanakannya kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu sebanyak 90 paket.

Dalam melaksanakan indikator tersebut menghadapi kendala yaitu :

- Masih banyak PPK dari SKPD yang kurang menguasai dalam penyusunan dokumen persiapan pengadaan, hal tersebut mengakibatkan tender/seleksi tidak bisa segera dilaksanakan di awal tahun;
- SKPD tidak segera menyampaikan Dokumen Persiapan Pengadaan untuk pelaksanaan Tender/Seleksi yang menyebabkan proses tender/seleksi numpuh di triwulan II (bulan April, Mei dan Juni), hal tersebut mengakibatkan beban kerja Pokja Pemilihan semakin berat.
- SKPD terlambat dalam pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan melalui aplikasi SiRUP.

Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala adalah :

- UKPBJ melaksanakan pendampingan dengan menugaskan Pengelola PBJ untuk mendampingi PPK dalam pelaksanaan penyusunan Dokumen Persiapan Pengadaan;

- UKPB selalu menyampaikan himbauan kepada SKPD agar segera menyampaikan permohonan tender/seleksi ke UKPBJ melalui rapat koordinasi (*Coffee Morning*) yang biasanya dilakukan di awal pekan;
- UKPBJ melaksanakan monitoring pelaksanaan input RUP dan melaksanakan pelatihan (*coaching clinic*) tata cara input RUP kepada SKPD serta memberikan pendampingan dalam pelaksanaan input RUP kepada SKPD.

Rencana aksi perbaikan yang dilakukan kedepannya adalah :

- Melaksanakan sosialisasi dan peningkatan kompetensi kepada pelaku PBJ yang ada di SKPD dengan lebih intensif dengan cara berkunjung ke SKPD.
- Menyampaikan himbauan kepada SKPD melalui Sekretaris Daerah tentang pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan melalui aplikasi SiRUP dengan dikenakannya sanksi bagi SKPD yang terlambat dalam pelaksanaan.

SASARAN 2 Memfasilitasi Pendampingan SKPD dalam Perencanaan Pengadaan dan Pengelolaan Kontrak

Indikator : Jumlah Fasiliasi SKPD yang Didampingi dalam Perencanaan dan Pengelolaan Kontrak

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Memfasilitasi pendampingan SKPD dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	Jumlah fasilitasi SKPD yang didampingi dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Pengadaan Barang Dan Jasa

Jumlah fasilitasi SKPD yang didampingi dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak sebanyak 40 SKPD.

Dalam melaksanakan indikator tersebut menghadapi kendala yaitu :

- Susah mendapat informasi tentang inventarisasi paket PBJ yang ada di SKPD.
- Susahnya koordinasi dengan SKPD khususnya PPK dalam hal pendampingan pengelolaan kontrak.

Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala adalah :

- Menyampaikan himbauan kepada SKPD melalui Sekretaris Daerah pada kegiatan rapat koordinasi agar SKPD segera melaksanakan pengumuman Rencana Umum

Pengadaan, agar UKPBJ bisa segera menginventarisasi, memetakan dan merencanakan strategi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

- Menyampaikan kepada SKPD agar melibatkan Pengelola PPBJ yang ada di UKPBJ untuk berperan serta untuk mendampingi dalam pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan kontrak PBJ.

Rencana aksi perbaikan yang dilakukan kedepannya adalah :

- Lebih intens melakukan himbauan kepada SKPD terkait pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan agar bisa dilaksanakan di awal tahun, sehingga UKPB dapat lebih mudah untuk memetakan dan merencanakan strategi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Lebih intens melaksanakan sosialisasi kepada SKPD tentang peran serta Pengelola PPBJ dalam pendampingan perencanaan dan pengelolaan kontrak PBJ dengan tujuan agar Pengelola PPBJ lebih dilibatkan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan kontrak PBJ.

❖ Analisa Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

Pada Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 3 (tiga) orang yaitu :

- Pengelola Unit Layanan Pengadaan - 2 (Dua) orang
- Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa - 3 (tiga) orang

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SDM	Ket
1	Jumlah terlaksanakannya kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	Pembinaan, Pengelolaan, Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Pembinaan dan fasilitasi pengadaan barang/jasa pemerintah	180.954.020	81.986.285	45.31	-Pengelola Unit Layanan Pengadaan -Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	
2	Jumlah fasilitasi SKPD yang didampingi dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak							
JUMLAH				180.954.020	81.986.285	45.31		

❖ Kepala Sub Bagian Pembinaan Kompetensi dan Evaluasi Pelaporan

Untuk capaian indikator sasaran pada Kasubbag Pembinaan Kompetensi dan Evaluasi Pelaporan dilaksanakan melalui Program Pembinaan, Pengelolaan, Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembinaan Kompetensi dan Evaluasi Pelaporan dengan pagu Rp 243.623.200,- terealisasi Rp 189.780.981,- dengan realisasi keuangan sebesar 77.90%.

Adapun kendala serapan keuangan terletak pada belanja bahan pakai habis, yang mana harga pada DPA Program/kegiatan lebih tinggi dibanding harga di toko ATK. Sedangkan untuk belanja cetak dan penggandaan tidak dapat dimaksimalkan sebab belanja cetak spanduk yang tidak dapat dilaksanakan seluruhnya karena kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis lebih banyak dilaksanakan secara daring melalui media zoom.

Tabel Capaian Sasaran dan Indikator
Kasubbag Pengadaan Barang dan Jasa

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memfasilitasi pembinaan SKPD dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	Jumlah fasilitasi pembinaan SKPD dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Pembinaan Kompetensi Dan Evaluasi Pelaporan
2	Memfasilitasi pengelolaan personil Bagian pengadaan barang/jasa	Jumlah fasilitasi pengelolaan personil Bagian Pengadaan Barang/Jasa	25 Orang	25 Orang	100%	Kasubbag Pembinaan Kompetensi Dan Evaluasi Pelaporan

SASARAN 1 Memfasilitasi Pembinaan SKPD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Indikator : Jumlah Fasilitasi Pembinaan SKPD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memfasilitasi pembinaan SKPD dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	Jumlah fasilitasi pembinaan SKPD dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	40 SKPD	40 SKPD	100%	Kasubbag Pembinaan Kompetensi Dan Evaluasi Pelaporan

Jumlah fasilitasi pembinaan SKPD dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan sebanyak 40 fasilitasi SKPD.

Dalam melaksanakan indikator tersebut menghadapi kendala yaitu :

- Masih rendahnya tingkat kesadaran para pelaku pengadaan di SKPD untuk menambah wawasan terkait Pengadaan Barang/Jasa.
- Kurang mengetahuinya fungsi dan peranan pelaku pengadaan di SKPD dalam pelaksanaan proses PBJ.
- Pemahaman terkait PBJ tidak sampai kepada pimpinan tertinggi SKPD, hanya kepada staf, sehingga banyak terkendala dalam pelaksanaan.
- Masih terbatasnya kemampuan penyedia dalam pelaksanaan pengadaan langsung secara elektronik.

Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala adalah :

- Mensosialisasikan peranan dan fungsi para pelaku pengadaan di SKPD
- Meningkatkan wawasan para pelaku pengadaan
- Melaksanakan pelatihan dan peningkatan wawasan bagi penyedia

Rencana aksi perbaikan yang dilakukan kedepannya adalah :

- Melaksanakan kunjungan ke SKPD untuk mengadakan kegiatan sharing terkait pengadaan barang/jasa guna menambah wawasan para pelaku pengadaan di SKPD
- Lebih intens dalam mensosialisasikan kegiatan Pembinaan pelaku pengadaan yang mencakup Pa/KPA, PPK, Pokja/PP sampai dengan Penyedia.
- Membuat rencana kerja yang disusun sesuai dengan kebutuhan para pelaku pengadaan

SASARAN 1 Memfasilitasi Pengelolaan Personil Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Indikator : Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Personil Pengadaan Barang/Jasa

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Memfasilitasi pengelolaan personil Bagian pengadaan barang/jasa	Jumlah fasilitasi pengelolaan personil Bagian Pengadaan Barang/Jasa	25 Orang	25 Orang	100%	Kasubbag Pembinaan Kompetensi Dan Evaluasi Pelaporan

Jumlah fasilitasi pengelolaan personil Bagian Pengadaan Barang/Jasa di tahun 2020 terlaksana untuk 25 orang.

Dalam melaksanakan indikator tersebut menghadapi kendala yaitu :

- Terbatasnya kegiatan pembinaan bagi personil PBJ di SKPD karena pandemik covid-19.
- Terbatasnya kegiatan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan JF PPBJ yang dapat mendukung kinerja dan angka kredit JF PPBJ tersebut.

Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kendala adalah :

- Mengkonsep acara pembinaan personil PBJ di SKPD sesuai kebutuhan.
- Mencari informasi lebih intens terkait kegiatan pembinaan JF PPBJ.

Rencana aksi perbaikan yang dilakukan kedepannya adalah :

- Melaksanakan kunjungan ke SKPD untuk pembinaan personil PBJ di SKPD.
- Mengkoordinasikan dengan LKPP terkait kebutuhan pembinaan JF PPBJ yang dapat mendukung kinerja dan angka kredit JF PPBJ tersebut.

❖ **Analisa Program Penunjang dan sumber daya manusia :**

Pada Sub Bagian Pembinaan Kompetensi dan Evaluasi Pelaporan didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 1 (Satu) orang yaitu :

- Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan -1 (Satu) orang

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SDM	Ket
1	Jumlah fasilitasi pembinaan SKPD dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	Pembinaan, Pengelolaan, Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Pembinaan kompetensi dan evaluasi pelaporan	243.623.200,-	189.780.981,-	77.90	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan	
2	Jumlah fasilitasi pengelolaan personil Bagian Pengadaan Barang/Jasa kontrak							
JUMLAH				243.623.200,-	189.780.981,-	77.90		

Analisis Capaian Sasaran Strategis Kepala Bagian Hukum

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Pelayanan terhadap stakeholder dalam hal produk hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah/lainnya yang harmonis	100%	100%	100%	Bagian Hukum Mengampu Misi ke-3 <i>"Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"</i>
2	Tingkat Penanganan masalah hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Persentase masalah hukum yang diselesaikan	100%	100%	100%	
3	Peningkatan kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Hasil Penilaian Atas Pemenuhan HAM	Nilai 75	Nilai 79,64	100%	
4	Produk Hukum Daerah yang terdokumentasi dan dipublikasikan	Persentase produk hukum daerah yang terdokumentasi dan dipublikasikan	100%	100%	100%	
ESELON IV						
1	Mengoreksi, sinkronisasi dan Fasilitasi Penyusunan Perda, Perbup, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati	Jumlah produk hukum yang dikoreksi atau yang diharmonisasi	975	1175	120,51%	Kasubbag Pembentukan Produk Hukum Daerah
2	Melakukan fasilitasi dan harmonisasi Peraturan Daerah sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik	Jumlah produk hukum daerah yang telah difasilitasi dan diharmonisasi sesuai ketentuan perundang-undangan	19	7	36,84%	Kasubbag Pembentukan Produk Hukum Daerah
3	Fasilitasi Naskah kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama atau naskah keperdataan lainnya	Jumlah kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama dan NPHD lainnya yang ditelaah, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	400	497	124,25%	Kasubbag Bantuan Hukum dan Ham
4	Fasilitasi penanganan masalah hukum di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Jumlah masalah hukum yang di tangani	4	6	150%	Kasubbag Bantuan Hukum dan Ham
5	Fasilitasi Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (KPP HAM)	Jumlah kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KPP HAM)	4	4	100%	Kasubbag Bantuan Hukum dan Ham

6	Dokumentasi dan Produk Hukum Daerah	Jumlah Registrasi dan dokumentasi produk hukum daerah	1.215 Register/ Dokumentasi	1.215 Register/ Dokumentasi	100%	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum
		Jumlah Cetak Produk Hukum Daerah	320 Eksemplar	320 Eksemplar	100%	
7	Informasi Hukum	Jumlah Sosialisasi/Penyuluhan Hukum dan Seminar Hukum yang dilaksanakan	1 Kali	6 Kali	600%	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum
8	Publikasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan <i>website</i> jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Tanah Laut	1 Tahun	1 Tahun	100%	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Bagian Hukum terhadap capaian tahun sebelumnya

Tabel Capaian Sasaran Strategis Bagian Hukum terhadap capaian tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2020		
			2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Produk Hukum Daerah/lainnya yang harmonis	%	137%	238%	100%	100%	100%
2	Persentase masalah hukum yang diselesaikan	%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Hasil Penilaian Atas Pemenuhan HAM	Nilai	-	Nilai 71,82	Nilai 75	Nilai 79,64	100%
4	Persentase produk hukum daerah yang terdokumentasi dan dipublikasikan	%	58%	100%	100%	100%	100%

❖ Perbandingan Realisasi dengan Target

Capaian kinerja Bagian Hukum dari 4 (empat) indikator sebagai berikut:

- 1) Persentase Produk Hukum Daerah/Lainnya yang harmonis pada tahun 2020 dengan target 100% telah dapat terealisasi sebesar 100% juga
- 2) Persentase masalah hukum yang diselesaikan pada tahun 2020 dengan target 100% telah dapat terealisasi sebesar 100% juga
- 3) Hasil penilaian atas pemenuhan HAM yang didapat pada tahun 2020 dengan target nilai 75 telah dapat terealisasi lebih tinggi dari target karena menadapat nilai 79,64
- 4) Persentase produk hukum daerah yang terdokumentasi dan dipublikasikan pada tahun 2020 dengan target 100% telah dapat terealisasi sebesar 100% juga

❖ **Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait**

- 1) Persentase Produk Hukum Daerah/Lainnya yang harmonis pada tahun 2020 terealisasi sesuai dengan target yaitu 100%
- 2) Persentase masalah hukum yang diselesaikan pada tahun 2020 dan 2019 sama-sama terealisasi 100%
- 3) Hasil penilaian atas pemenuhan HAM yang didapat pada tahun 2020 dengan nilai 79,64 meningkat dari tahun sebelumnya yang mendapat nilai 71,82
- 4) Persentase produk hukum daerah yang terdokumentasi dan dipublikasikan pada tahun 2020 dan 2019 sama-sama terealisasi 100%

❖ **Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

SASARAN 1 Meningkatkan Pelayanan Terhadap Stakeholder dalam Hal Produk Hukum yang Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Indikator : Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonisasi

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya Pelayanan terhadap stakeholder dalam hal produk hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah/lainnya yang harmonis	100%	100%	100%	Bagian Hukum Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Dalam hal ini bagian hukum menerima dan melakukan koreksi terhadap *draft* rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati yang diusulkan oleh SKPD terkait ke bagian hukum. Selanjutnya juga dilakukan autentifikasi terhadap draf rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati.

Melakukan rapat-rapat serta fasilitasi dan evaluasi terhadap draf rancangan peraturan daerah dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta jika diperlukan konsultasi dan koordinasi dengan kementerian terkait. Hal tersebut juga bisa dilakukan terhadap rancangan peraturan bupati jika diperlukan. Dan khusus

untuk Harmonisasi terhadap Peraturan Daerah wajib dilakukan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan. Sehingga target yang 100% yang telah dibuat sebelumnya dapat direalisasikan 100% Sehingga capaiannya adalah sebesar 100%.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Terlalu banyaknya draf produk hukum daerah yang masuk terutama draf keputusan bupati dan draf rancangan peraturan bupati atau belum adanya simplikasi baik produk hukum pengaturan maupun penetapan
- Prosedur penetapan pembuatan produk hukum yang panjang sehingga perjalanan dari mulai draf s/d penetapan terkesan lama
- Adakalanya juga SKPD pengusul lambat dalam melakukan pengembalian draf setelah dikoreksi untuk dicetak sehingga terkesan prosesnya menjadi lama.
- adanya pembatasan untuk melakukan perjalanan dinas keluar daerah baik bagi anggota DPRD maupun ASN di daerah.
- belum siapnya SKPD pengusul terhadap draft dan kajian rancangan peraturan daerah (naskah akademik)

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Petugas perlu menghubungi SKPD pengusul untuk mengingatkan agar draf yang telah diperbaiki agar segera diserahkan kembali ke bagian hukum
- Perlunya penganggaran pembuatan (naskah akademik) untuk kajian Rancangan Peraturan Daerah
- Perlunya penganggaran perjalanan dinas luar daerah untuk melakukan rapat-rapat koordinasi tingkat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Petugas perlu menambahkan kolom baru yaitu kolom “tanggal berkas kembali/diterima” setelah perbaikan oleh SKPD pada buku tanda terima, sehingga bisa dilihat SKPD mana yang telah mengembalikan dan yang belum mengembalikan berkas.
- Penambahan anggaran pembuatan (naskah akademik) untuk kajian Rancangan Peraturan Daerah

- Penganggaran perjalanan dinas luar daerah untuk melakukan rapat-rapat koordinasi tingkat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan



SASARAN 2 Tingkat Penanganan masalah hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Indikator : Persentase masalah hukum yang diselesaikan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Tingkat Penanganan masalah hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Persentase masalah hukum yang diselesaikan	100%	100%	100%	Bagian Hukum Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Pelayanan bantuan hukum, bagi pemerintah desa dan SKPD ditahun dengan jumlah permasalahan hukum sebanyak 6 (enam) fasilitasi penanganan permasalahan hukum yang ditangani dengan target 4 fasilitasi kasus pada Eselon IV. Pada dasarnya Indikator ini bersifat insidental serta proses penyelesaian permasalahan bisa saja lebih dari satu tahun dari **6 (enam) Fasilitasi Penanganan Kasus** yaitu 4 (empat) Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pelaihari dengan nomor: 31/PDT.G/2019/PN.Pli, 4/PDT.G/2020/PN.Pli, 16/PDT.G/2020/PN.Pli dan 19/PDT.G/2020/PN.Pli, dan 2 (dua) Perkara Tata Usaha

Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan nomor: 14/2020/PTUN.BJM dan 22/G/TF/2020/PTUN.BJM.

Adapun kendala dalam pemberian fasilitasi bantuan hukum tersebut diatas adalah kurang tanggapnya SKPD atau Pemberi Kuasa dalam memenuhi berkas atau dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan membuat jawaban dan bukti-bukti didalam persidangan, padahal berkas atau dokumen tersebut ada pada Pemberi Kuasa, berkas diserahkan beberapa hari sebelum sidang selanjutnya, seharusnya semua berkas sudah siap untuk memudahkan Penerima Kuasa untuk melakukan penelitian terhadap berkas tersebut.

Dalam fasilitasi penanganan kasus tidak serta merta dapat diprediksi kapan kasus tersebut dapat dianggap selesai, karena bisa saja salah satu pihak melakukan upaya hukum sehingga waktu atau proses akan tetap berlanjut sampai denga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dari ke 6 (enam) perkara diatas 2 selesai, 2 melakukan upaya hukum dan 2 perkara masih berjalan karena masuk diakhir tahun.

Sehingga target yang 100% yang telah dibuat sebelumnya dapat dianggap terrealisasikan semua atau 100% Sehingga capaiannya adalah sebesar 100%.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- kurang tanggapnya SKPD atau Pemberi Kuasa dalam memenuhi berkas atau dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan membuat jawaban dan bukti-bukti didalam persidangan, atau
- berkas diserahkan beberapa hari sebelum sidang selanjutnya sehingga Penerima Kuasa kesulitan untuk melakukan penelitian terhadap berkas tersebut.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- koordinasi dan komunikasi dengan pemberi kuasa

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Tetap terus melakukan koordinasi dan komunikasi dalam persiapan dalam penanganan perkara.

SASARAN 3 Peningkatan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut dengan Hasil Penilaian Atas Pemenuhan HAM

Indikator : Hasil Penilaian Atas Pemenuhan HAM

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
3	Peningkatan kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Hasil Penilaian Atas Pemenuhan HAM	Nilai 75	Nilai 79,64	100%	Bagian Hukum Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Untuk dapat memperoleh Predikat sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM pemerintah daerah harus menyampaikan data-data terkait HAM yang ada di daerah, oleh karenanya Bagian Hukum telah melakukan pengumpulan data beserta data dukungannya untuk kegiatan RANHAM dan KPP HAM sejak awal tahun sampai dengan akhir tahun 2020 yang ditujukan kepada SKPD terkait di Daerah sampai dengan Kecamatan, serta Instansi Vertikal seperti Kepolisian dan Kementerian Agama yang dalam hal ini ditujukan kepada Polres Tanah Laut dan Kanwil Kemenag Tanah Laut. Data-data terkait dengan KKP HAM diolah dan dimasukkan dalam formulir pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dan diserahkan kepada Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Selatan dan untuk data RANHAM dilakukan pengupload dokumen di [website https://serambi.ksp.go.id/](https://serambi.ksp.go.id/) Web Portal Kantor Staf Presiden Republik Indonesia dan *Hardcopy* ke Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan. Serta beberapa kali Rapat Koordinasi se Kalimantan Selatan yang diadakan di Biro Hukum Provinsi dan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan. Kabupaten Tanah Laut telah berhasil mendapatkan predikat sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM untuk tahun 2020 yang saat itu langsung diterima oleh Kepala Bagian Hukum dalam Acara Peringatan Hari HAM Sedunia ke-72 di Gedung KH. Idham Chalid Kantor Setda Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk mendapat kategori Kabupaten/Kota Peduli HAM maka harus diraih nilai 75 atau sesuai target yang telah dibuat dan Realiasi yang didapat dengan nilai 79,64 sehingga capaian terpenuhi 100%.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- lambatnya data SKPD yang masuk
- data dukung yang tidak dilampirkan oleh SKPD terkait sehingga harus berulang kali diminta lagi untuk kelengkapan data dukung

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- perlu mempertegas dan memasukan nama SKPD kedalam TIM yang di SK kan
- memberikan sanksi administratif yaitu Pemotongan TPP sebesar 2% kepada SKPD yang bersangkutan apabila tidak menyampaikan data atau terlambat dalam menyampaikan data tersebut sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- memasukan nama SKPD kedalam TIM yang di SK kan
- memberikan sanksi administratif yaitu Pemotongan TPP sebesar 2% kepada SKPD yang bersangkutan



SASARAN 3 Produk Hukum Daerah yang terdokumentasi dan di Publikasikan

Indikator : Produk Hukum Daerah yang terdokumentasi dan di Publikasikan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
4	Produk Hukum Daerah yang terdokumentasi dan dipublikasikan	Persentase produk hukum daerah yang terdokumentasi dan dipublikasikan	100%	100%	100%	Bagian Hukum Mengampu Misi ke- 3 <i>"Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"</i>

Pendokumentasian terhadap Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati telah dilakukan dengan baik, register, penomoran dan pengarsipan setiap produk hukum daerah yang telah dilakukan. Selain melakukan pendokumentasian terhadap produk hukum daerah, sub bagian dokumentasi dan informasi hukum juga memberikan pelayanan kepada SKPD atau masyarakat yang datang untuk memintah informasi mengenai produk hukum daerah atau informasi hukum lainnya secara langsung.

Untuk kegiatan publikasi dilakukan pembukuan terhadap produk hukum daerah sebanyak **320 eksemplar pada tahun 2020** yang terdiri dari 250 Lembaran Daerah, dan 70 Himpunan Produk Hukum Daerah (35 Eks Peraturan Daerah dan 35 Eks Peraturan Bupati). Setelah dilakukan cetak Produk hukum daerah tersebut dipublikasikan dengan cara membagikan produk hukum daerah yang telah dibukukan tersebut kepada SKPD sampai dengan Kecamatan. Selain itu publikasi terhadap produk hukum daerah juga dilakukan melalui website jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Kabupaten Tanah Laut dengan melakukan digitalisasi terhadap produk hukum daerah ditahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya guna melengkapi data produk hukum daerah yang telah ada.

Sehingga target 100% yang telah dibuat sebelumnya dapat dianggap terrealisasikan semua atau 100% Sehingga capaiannya adalah sebesar 100%.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Proses penginputan atau pengunggahan data serta file produk hukum daerah dilakukan setelah proses pembaharuan terhadap website JDIH selesai sekitar bulan Juli 2021

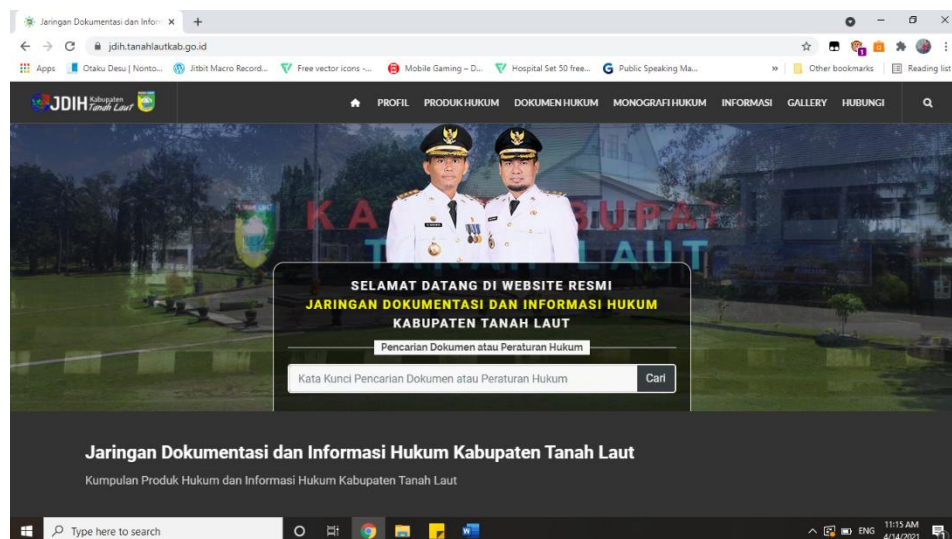
- File atau dokumen Peraturan Daerah Tahun 2005 kebawah yang belum ditemukan arsipnya karena proses pengarsipan waktu itu masih belum sebegus saat ini. kebawah dan Peraturan Bupati Tahun 2013 kebawah tidak tersedia karena terkendala tidak adanya file atau dokumen karena ditahun-tahun tersebut Perbup langsung dicetak oleh SKPD masing-masing.
- Terbatasnya anggaran cetak produk hukum

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Perlu melakukan pengumpulan dan pencarian terhadap dokumen-dokumen yang belum lengkap baik diruang arsip atau ke SKPD-SKPD terkait secara bertahap
- perlu penambahan anggaran pada cetak produk hukum agar dapat mencetak lebih banyak produk hukum

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- melakukan pengumpulan dan pencarian terhadap dokumen-dokumen yang belum lengkap baik diruang arsip atau pada SKPD-SKPD terkait secara bertahap
- Penganggaran pembuatan cetak produk hukum



❖ Analisis Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai sasaran strategis / kinerja utama dalam meningkatkan pelayanan terhadap stakeholder dalam hal produk hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tingkat penanganan masalah hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, peningkatan kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut dan produk hukum daerah yang terdokumentasi dan dipublikasi yang di tunjangan dalam program Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan HAM, Dokumentasi Hukum dengan jumlah Pagu sebesar 869.806.500,00 dengan reasiasi sebesar

785.472.800,00 atau 90,30%. Yang dilaksanakan oleh 12 (dua belas) orang SDM yang terdiri dari 5 (lima) orang PNS yaitu Kepala Bagian Hukum, Kasubbag Pembentukan Produk Hukum Daerah, Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM, Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Staf Penyusun Bahan Bantuan Hukum serta 7 (tujuh) orang Pegawai Tidak Tetap.

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	SDM	Ket
1	Persentase Produk Hukum Daerah/lainnya yang harmonis	Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan HAM	869.806.500	785.472.800	90,30	- Kabag Hukum - Kasubbag Pembentukan Produk Hukum Daerah - Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM - Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum - Staf Penyusun Bahan Bantuan Hukum - PTT	
2	Persentase masalah hukum yang diselesaikan						
3	Hasil Penilaian Atas Pemenuhan HAM						
4	Persentase produk hukum daerah yang terdokumentasi dan dipublikasikan						

❖ **Analisis Capaian Kinerja Kepala Sub Pembentukan Produk Hukum Daerah :**
SASARAN 1 Mengoreksi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Penyusunan Perda, Perbup, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati

Indikator : Jumlah Produk Hukum yang Dikoreksi atau yang Diharmonisasi

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Mengoreksi, sinkronisasi dan Fasilitasi Penyusunan Perda, Perbup, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati	Jumlah produk hukum yang dikoreksi atau yang diharmonisasi	975	1175	120,51%	Kasubbag Pembentukan Produk Hukum Daerah

Dalam hal ini bagian hukum menerima dan melakukan koreksi terhadap draft rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati yang diusulkan oleh SKPD terkait ke bagian hukum. Selanjutnya juga dilakukan autentifikasi terhadap draf rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati.

Melakukan rapat-rapat serta fasilitasi dan evaluasi terhadap draf rancangan peraturan daerah dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta jika diperlukan konsultasi dan koordinasi dengan kementerian terkait. Hal tersebut juga bisa dilakukan terhadap rancangan peraturan bupati jika diperlukan.

Target yang sebelumnya adalah 562 Dokumen dan realisasinya sebanyak 1175 yang terdiri dari 7 Peraturan Daerah, 229 Peraturan Bupati, 933 Keputusan Bupati dan 6 Instruksi Bupati pada tahun 2020. Sehingga capaiannya adalah sebesar 120,5%. Peningkatan terjadi dikarenakan adanya tambahan keputusan bupati dan Peraturan Bupati mengenai dengan penanganan dan penanggulangan virus covid 19 yang dihadapi ditahun 2020.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Terlalu banyaknya draf produk hukum daerah yang masuk terutama draf keputusan bupati dan draf rancangan peraturan bupati atau belum adanya simplikasi baik produk hukum pengaturan maupun penetapan
- Prosedur penetapan pembuatan produk hukum yang panjang sehingga perjalanan dari mulai draf s/d penetapan terkesan lama
- Adakalanya juga SKPD pengusul lambat dalam melakukan pengembalian draf setelah dikoreksi untuk dicetak sehingga terkesan prosesnya menjadi lama.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Petugas perlu menghubungi SKPD pengusul untuk mengingatkan agar draf yang telah diperbaiki agar segera diserahkan kembali ke Bagian Hukum

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Petugas perlu menambahkan kolom baru yaitu kolom “tanggal berkas kembali/diterima” setelah perbaikan oleh SKPD pada buku tanda terima, sehingga bisa dilihat SKPD mana yang telah mengembalikan dan yang belum mengembalikan berkas.

SASARAN 2 Melakukan Fasilitasi dan Harmonisasi Peraturan Daerah Sesuai dengan Kaidah Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik

Indikator : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Telah Difasilitasi dan Diharmonisasi Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Melakukan fasilitasi dan harmonisasi Peraturan Daerah sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik	Jumlah produk hukum daerah yang telah difasilitasi dan diharmonisasi sesuai ketentuan perundang-undangan	19	7	36,84%	Kasubbag Pembentukan Produk Hukum Daerah

Kegiatan yang dilakukan agar Peraturan Daerah yang dibuat harus sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik artinya selain legal drafting muatan didalam Peraturan Daerah juga sangat perlu diperhatikan agar peraturan daerah yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Untuk itu dilakukanlah rapat-rapat dengan SKPD teknis terkait serta fasilitasi dan evaluasi terhadap draf rancangan peraturan daerah dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta jika diperlukan akan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan kementerian terkait apabila terdapat hal-hal yang dianggap dapat menimbulkan permasalahan atau perlu diperjelas langsung oleh kementerian terkait karena adanya perbedaan dalam penafsiran suatu peraturan perundang-undangan.

Dan untuk tahun 2020 Harmonisasi terhadap Peraturan Daerah wajib dilakukan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan sehingga dengan semua itu Peraturan Daerah yang dibentuk telah harmonis karena disusun berdasarkan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik.

Target Jumlah produk hukum daerah yang telah difasilitasi dan diharmonisasi sesuai ketentuan perundang-undangan sebelumnya hanya sebanyak 19 Peraturan Daerah sesuai dengan Propemperda tahun 2020 namun hanya dapat direalisasinya sebanyak 7 Peraturan Daerah. Sehingga capaiannya adalah 36,840%.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Adanya *refocusing* anggaran besar-besaran untuk menanggulangi pandemi virus Covid-19

- adanya pembatasan untuk melakukan perjalanan dinas keluar daerah baik bagi anggota DPRD maupun ASN di daerah.
- belum siapnya SKPD pengusul terhadap *draft* dan kajian rancangan peraturan daerah (naskah akademik)

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Perlunya penganggaran pembuatan (naskah akademik) untuk kajian Rancangan Peraturan Daerah
- Perlunya penganggaran perjalanan dinas luar daerah untuk melakukan rapat-rapat koordinasi tingkat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Penganggaran pembuatan (naskah akademik) untuk kajian Rancangan Peraturan Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah

❖ **Analisis Capaian Kinerja Kepala Sub Bantuan Hukum dan HAM :**

SASARAN 3 Fasilitasi Naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama Atau Naskah Keperdataan Lainnya

Indikator : Jumlah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan NPHD Lainnya yang Ditelaah, dan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
3	Fasilitasi Naskah kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama atau naskah keperdataan lainnya	Jumlah kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama dan NPHD lainnya yang ditelaah, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	400	497	124.25%	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM

Dalam hal ini bagian hukum menerima koreksi terhadap draf naskah kesepakatan bersama, draf perjanjian kerjasama atau draf naskah keperdataan lainnya yang diusulkan oleh setiap SKPD melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Tanah Laut serta melakukan register atau penomoran terhadap naskas keperdataan tersebut. Setiap tahun berjalan jumlah hibah daerah kepada masyarakat atau pihak ketiga yang ditindak lanjuti dengan NPHD sebelumnya atas dasar Surat Keputusan Bupati. Sedangkan perjanjian kerjasama pada setiap tahunnya dibuat karena kebutuhan untuk melaksanakan suatu

kegiatan tertentu pada masing-masing SKPD atau ada perjanjian yang bersifat insidentil untuk ditindak lanjuti dan diselesaikan.

Untuk registrasi realisasi naskah kesepakatan bersama, perjanjian kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama atau naskah keperdataan lainnya ditargetkan 400 dokumen namun dalam realisasinya tercapai melebihi target yaitu sebanyak 497 Dokumen dengan Capaian sebesar 124,25 % yang terdiri dari 421 NPHD dan 52 MoU, Perjanjian Kerjasama dan naskah keperdataan lainnya.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- banyaknya SKPD yang tidak memberikan *fotocopy* naskah yang telah ditandatangani oleh para pihak ke bagian hukum untuk di arsipkan.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Mengcopy *draf* yang belum bertanda-tangan sebagai arsip sementara

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Mengcopy *draf* yang belum bertanda-tangan sebagai arsip sementara, dan menghubungi SKPD agar menyerahkan *fotocopy* naskah yang telah ditandatangani oleh para pihak ke bagian hukum.

SASARAN 4 Fasilitasi Penanganan Masalah Hukum Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Indikator : Jumlah masalah hukum yang ditangani

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
4	Fasilitasi penanganan masalah hukum di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Jumlah masalah hukum yang di tangani	4	6	150%	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran indikator tersebut adalah melakukan pelayanan bantuan hukum, bagi pemerintah desa dan SKPD dengan jumlah permasalahan hukum sebanyak 6 (enam) fasilitasi penanganan permasalahan hukum yang ditangani. Pada dasarnya Indikator ini bersifat insidentil namun pelayanan bantuan hukum tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sebelumnya target yang telah dibuat dalam fasilitasi penanganan permasalahan hukum di lingkup pemerintahan kabupaten tanah laut adalah 4 (empat) fasilitasi penanganan kasus dan

telah terealisasi sebanyak 6 (enam) Fasilitas Penanganan Kasus yaitu 4 (empat) Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pelaihari dengan nomor: 31/PDT.G/2019/PN.Pli, 4/PDT.G/2020/PN.Pli, 16/PDT.G/2020/PN.Pli dan 19/PDT.G/2020/PN.Pli, dan 2 (dua) Perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan nomor: 14/2020/PTUN.BJM dan 22/G/TF/2020/PTUN. BJM, sehingga capaiannya adalah 150%.

Adapun kendala dalam pemberian fasilitas bantuan hukum tersebut diatas adalah, padahal berkas atau dokumen tersebut ada pada Pemberi Kuasa, seharusnya semua berkas sudah siap untuk memudahkan

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain :

- kurang tanggapnya SKPD atau Pemberi Kuasa dalam memenuhi berkas atau dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan membuat jawaban dan bukti-bukti didalam persidangan, atau
- berkas diserahkan beberapa hari sebelum sidang selanjutnya sehingga Penerima Kuasa kesulitan untuk melakukan penelitian terhadap berkas tersebut.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- koordinasi dan komunikasi dengan pemberi kuasa

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Tetap terus melakukan koordinasi dan komunikasi dalam persiapan dalam penanganan perkara.

SASARAN 5 Fasilitas Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (KPP HAM)

Indikator : Jumlah kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KPP HAM)

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
5	Fasilitas Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (KPP HAM)	Jumlah kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KPP HAM)	4	4	100%	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM

Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan data beserta data dukungnya untuk kegiatan RANHAM dan KPP HAM sejak awal tahun sampai dengan akhir tahun 2020 sebagai berikut. Untuk Kegiatan RANHAM dilakukan sebanyak 3 Kegiatan dengan mengumpulkan data untuk tahun berjalan yang dilaporkan per triwulan menggunakan form B-04, B-08, dan B-12 dan 1 Kegiatan untuk KPP HAM dengan pengumpulan data dari tahun sebelumnya yang ditujukan kepada SKPD terkait di Daerah sampai dengan Kecamatan, serta Instansi Vertikal seperti Kepolisian dan Kementerian Agama yang dalam hal ini ditujukan kepada Polres Tanah Laut dan Kanwil Kemenag Tanah Laut. Serta beberapa kali Rapat Koordinasi se Kalimantan Selatan yang diadakan di Biro Hukum Provinsi dan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan. Kabupaten Tanah Laut telah berhasil mendapatkan predikat sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM untuk tahun 2020 yang saat itu langsung diterima oleh Kepala Bagian Hukum dalam Acara Peringatan Hari HAM Sedunia ke-72 di Gedung KH. Idham Chalid Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Realisasi yang dilakukan adalah 4 Kegiatan sehingga capaian terpenuhi 100%.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- lambatnya data SKPD yang masuk
- data dukung yang tidak dilampirkan oleh SKPD terkait sehingga harus berulang kali diminta lagi untuk kelengkapan data dukung

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- perlu mempertegas dan memasukan nama SKPD kedalam TIM yang di SK kan
- memberikan sanksi administratif yaitu Pemotongan TPP sebesar 2% kepada SKPD yang bersangkutan apabila tidak menyampaikan data atau terlambat dalam menyampaikan data tersebut sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- memasukan nama SKPD kedalam TIM yang di SK kan
- memberikan sanksi administratif yaitu Pemotongan TPP sebesar 2% kepada SKPD yang bersangkutan

❖ **Analisis Capaian Kinerja Kepala Sub Dokumentasi dan Informasi Hukum**
SASARAN 6 Dokumentasi Prodeuk Hukum Daerah

Indikator 1 : Jumlah Registrasi dan Dokumentasi Produk Hukum Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Dokumentasi dan Produk Hukum Daerah	Jumlah Registrasi dan dokumentasi produk hukum daerah	1.215 Register/ Dokumentasi	1.215 Register/ Dokumentasi	100%	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kegiatan yang dilakukan berupa register terhadap produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati dengan memberikan penomoran dan pengarsipan setiap produk hukum daerah yang telah dikeluarkan. Selain melakukan pendokumentasian terhadap produk hukum daerah, sub bagian dokumentasi dan informasi hukum juga memberikan pelayanan kepada SKPD atau masyarakat yang datang untuk memintah informasi mengenai produk hukum daerah atau informasi hukum lainnya secara langsung. Semua produk hukum daerah yang di registrasi dan terdokumentasi sebanyak 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan, sehingga capaian dapat terpenuhi 100%.

SASARAN 6 Dokumentasi dan Prodeuk Hukum Daerah

Indikator 2 : Jumlah Registrasi dan Dokumentasi Produk Hukum Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Dokumentasi dan Produk Hukum Daerah	Jumlah Cetak Produk Hukum Daerah	320 Eksemplar	320 Eksemplar	100%	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kegiatan yang dilakukan adalah mencetak produk hukum daerah sebanyak 320 eksemplar pada tahun 2020 yang terdiri dari 250 Lembaran Daerah, dan 70 Himpunan Produk Hukum Daerah (35 Eks Peraturan Daerah dan 35 Eks Peraturan Bupati). Setelah dilakukan cetak Produk hukum daerah tersebut dipublikasikan dengan cara membagikan produk hukum daerah yang telah dicetak tersebut kepada SKPD sampai dengan Kecamatan. Maka capaiannya adalah 100%.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Terbatasnya anggaran cetak produk hukum

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- perlu penambahan anggaran pada cetak produk hukum agar dapat mencetak lebih banyak produk hukum

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Penganggaran pembuatan cetak produk hukum

SASARAN 7 Informasi Hukum

Indikator : Jumlah Sosialisasi/Penyuluhan Hukum dan Seminar Hukum yang Dilaksanakan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Informasi Hukum	Jumlah Sosialisasi/Penyuluhan Hukum dan Seminar Hukum yang dilaksanakan	1 Kali	6 Kali	600%	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kegiatan yang dilakukan berupa sosialisasi/penyuluhan hukum sebelumnya direncanakan dilakukan di Sekolah-Sekolah namun dikarenakan pandemi covid 19 hal tersebut dibatalkan serta dilakukan *refocusing* anggaran yang menyisakan target 1 kegiatan sosialisasi/penyuluhan hukum saja. Sosialisasi/penyuluhan Hukum telah dilakukan terhadap Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 62 Tahun 2020 tentang Program Jaminan Sosial di Kabupaten Tanah Laut dan ada lima kali sosialisasi/penyuluhan hukum yang tidak terencana atau insidental yaitu Sosialisasi/penyuluhan Hukum terkait Penjatuhan Sanksi Administratif (satu kali), Perlindungan Terhadap Anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Dua Kali), Sosialisasi/penyuluhan Hukum sekaligus *hiring* atau dengar pendapat terhadap draf raperda perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No.7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dengan menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Akademisi Hukum dari Universitas Lambung Mangkurat, Aktivistis dan Lembaga Pemerhati Anak, Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut, dan juga Bagian Hukum Kabupaten Tanah Laut. Target sebelumnya yang hanya 1 kali kegiatan berhasil terealisasi sebanyak 6 kali sehingga nilai capaian adalah sebesar 600%.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Adanya *refocusing* anggaran besar-besaran untuk menanggulangi pandemi virus covid 19 terutama untuk anggaran kegiatan sosialisasi
- adanya pembatasan kegiatan pengumpulan masa / kerumunan diawal-awal terjadinya pandemi.
- Kegiatan sosialisasi dilakukan setelah anggaran perubahan dengan keterbatasannya dana karena sebelumnya telah terkena *refocusing* anggaran

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Penambahan anggaran kegiatan sosialisasi ditahun berikutnya
- Pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir dengan tetap mematuhi protokol kesehatan

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Penganggaran kegiatan sosialisasi dengan dana yang lebih banyak ditahun depan
- Pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir dengan tetap mematuhi protokol kesehatan

SASARAN 8 Publikasi Produk Hukum Daerah

Indikator : Terlaksananya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Tanah Laut (*Website* Bagian Hukum)

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Publikasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan <i>website</i> jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Tanah Laut	1 Tahun	1 Tahun	100%	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum

Telah dilakukan pembaharuan terhadap *website* jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Kabupaten Tanah Laut yang pada tahun sebelumnya dikeluhkan karena tampilan yang kurang menarik dan rapi, saat ini telah dapat dinikmati dengan tampilan baru yang jauh lebih bagus dan rapi. Kegiatan publikasi produk hukum daerah dilakukan melalui *website* JDIH Kabupaten Tanah Laut dengan melakukan digitalisasi terhadap produk hukum daerah ditahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya guna melengkapi data produk hukum daerah yang telah ada. Selain itu juga dimuat berbagai artikel-artikel hukum terbaru yang perlu diketahui oleh masyarakat. Dengan terlaksananya pengelolaan

website JDIH dalam 365 Hari atau satu tahun berjalan dengan realisasi yang sama yaitu 365 Hari maka capaiannya adalah 100%.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Proses penginputan atau pengunggahan data serta file produk hukum daerah dilakukan setelah proses pembaharuan terhadap website JDIH selesai sekitar bulan Juli 2021
- File atau dokumen Peraturan Daerah Tahun 2005 kebawah yang belum ditemukan arsipnya karena proses pengarsipan waktu itu masih belum sebegitu saat ini. kebawah dan Peraturan Bupati Tahun 2013 kebawah tidak tersedia karena terkendala tidak adanya file atau dokumen karena ditahun-tahun tersebut Perbup langsung dicetak oleh SKPD masing-masing.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Perlu melakukan pengumpulan dan pencarian terhadap dokumen-dokumen yang belum lengkap baik diruang arsip atau ke SKPD-SKPD terkait secara bertahap

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- melakukan pengumpulan dan pencarian terhadap dokumen-dokumen yang belum lengkap baik diruang arsip atau pada SKPD-SKPD terkait secara bertahap

Analisis Capaian Sasaran Strategis Kepala Bagian Humas dan Keprotokolan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah, kehumasan dan keprotokolan	Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	100%	100%	100%	Bagian Humas dan Keprotokolan Mengampu Misi ke- 3 <i>"Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"</i>
		Persentase kegiatan kehumasan KDH/WKDH/SKPD/ Masyarakat yang terlayani	100%	100%	100%	
		Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu daerah yang terlayani keprokolannya	100%	100%	100%	
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%	
ESELON IV						
1	Memberikan pelayanan kehumasan kepada KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat	Jumlah pelayanan kehumasan KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat	200 kali	200 kali	100%	Kasubbag Hubungan Masyarakat
2	Kegiatan KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat terliput pendokumentasiannya	Jumlah liputan pendokumentasian KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat	300 kali	300 kali	100%	Kasubbag Hubungan Masyarakat
3	Pembangunan pemerintahan daerah yang terpublikasikan dan diberikan	Jumlah Publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah melalui media cetak, elektronik, online dan media sosial	1000 berita	1000 berita	100%	Kasubbag Pemberitaan
4	Kegiatan KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat terlayani peliputan, pemberitaannya	Jumlah liputan pemberitaan kegiatan KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat	280 kali	280 kali	100%	Kasubbag Pemberitaan
5	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah dokumen pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	1 kali	0 kali	0%	Kasubbag Pemberitaan

6	Kegiatan keprotokolan KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat yang terlayani	Jumlah kegiatan KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat yang terlayani keprotokolannya	430 kali	430 kali	100%	Kasubbag Keprotokolan
7	Pelayanan tamu KDH/WKDH yang terlayani	Jumlah tamu KDH/WKDH yang terlayani dengan baik	28 kali	28 kali	100%	Kasubbag Keprotokolan

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan terhadap capaian tahun sebelumnya

Tabel Capaian Sasaran Strategis Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan terhadap capaian tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2020		
			2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	%	75%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase kegiatan kehumasan KDH/WKDH/SKPD/ Masyarakat yang terlayani	%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu daerah yang terlayani keprotokolannya	%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	80%	100%	100%	0%	0%

❖ Perbandingan realisasi dengan target

Rata-rata capaian kinerja bagian humas dan keprotokolan adalah 100%, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media terealisasi sebesar 100% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.
- 2) Persentase kegiatan kehumasan KDH/WKDH/SKPD/ Masyarakat yang terlayani terealisasi sebesar 100% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.
- 3) Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu daerah yang terlayani keprotokolannya terealisasi sebesar 100% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya adalah 100%.

4) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terealisasi sebesar 100% dari target 100%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kerjanya adalah 100%

❖ **Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait :**

- 1) Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah pada tahun 2020 dan 2019 tidak mengalami perubahan yaitu 100%
- 2) Persentase kegiatan kehumasan KDH/WKDH/SKPD/ Masyarakat yang terlayani pada tahun 2020 dan 2019 tidak mengalami perubahan yaitu 100%
- 3) Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu daerah yang terlayani keprokolannya pada tahun 2020 dan 2019 tidak mengalami perubahan yaitu 100%
- 4) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2020 dan 2019 tidak mengalami perubahan yaitu 100%

❖ **Analisis program penunjang**

SASARAN 1 Meningkatnya Layanan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah, Kehumasan dan Keprotokolan

Indikator 1 : Persentase Penyebarluasan Informasi/Pemberitaan Pembangunan Pemerintahan Daerah yang Bisa Diakses Masyarakat Melalui Media

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah, kehumasan dan keprotokolan	Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	100%	100%	100%	Bagian Humas dan Keprotokolan Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Indikator ini dilaksanakan dengan menilai presentase dari jumlah kegiatan pemerintah secara keseluruhan dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang terpublikasikan baik melalui media cetak, media elektronik, media online maupun media sosial dengan target sebesar 100%. Indikator ini dilaksanakan melalui Program kerjasama informasi dan mass media dengan pagu Rp 2.392.390.200,00 terealisasi Rp 2.329.033.102.00 dengan realisasi keuangan sebesar 97,35%

Rencana Aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Meningkatkan kualitas pemberitaan dan publikasi kegiatan pemerintah daerah melalui media sosial yang di kelola pada bagian humas dan keprotokolan.
- Meningkatkan kerja sama dengan seluruh instansi dalam pelaksanaan kegiatan KDH/WKDH agar tidak terjadi tumpang tindih jadwal kegiatan sehingga seluruh kegiatan dapat terfasilitasi dan terpublikasikan.

Indikator 2 : Persentase Kegiatan Kehumasan KDH/WKDH/SKPD/ Masyarakat yang Terlayani

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah, kehumasan dan keprotokolan	Persentase kegiatan kehumasan KDH/WKDH/SKPD/ Masyarakat yang terlayani	100%	100%	100%	Bagian Humas dan Keprotokolan Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)"

Indikator ini dilaksanakan dengan menilai presentase dari jumlah kegiatan pemerintah secara keseluruhan dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang terdokumentasikan dengan target sebesar 100%. Indikator ini dilaksanakan melalui program pembinaan, pengembangan, fasilitasi hubungan masyarakat dan keprotokolan kegiatan pengembangan hubungan masyarakat dengan pagu Rp 586.311.700,00 terealisasi sebesar Rp 466.708.900.00 atau sebesar 79,60 %.

Rencana Aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Meningkatkan kualitas sarana penyimpanan dokumentasi kegiatan pimpinan.
- Meningkatkan kerja sama dengan seluruh instansi dalam pelaksanaan kegiatan KDH/WKDH agar tidak terjadi tumpang tindih jadwal kegiatan sehingga seluruh kegiatan dapat terfasilitasi dan terdokumentasikan.

Indikator 3 : Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu daerah yang terlayani keprokolannya

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah, kehumasan dan keprotokolan	Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu daerah yang terlayani keprokolannya	100%	100%	100%	Bagian Humas dan Keprotokolan Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Indikator ini dilaksanakan dengan menilai presentase dari jumlah tamu daerah secara keseluruhan dibandingkan dengan jumlah tamu daerah yang terlayani keprotokolannya dengan target sebesar 100%. Indikator ini dilaksanakan melalui program pembinaan, pengembangan, fasilitasi hubungan masyarakat dan keprotokolan kegiatan fasilitasi dan pelayanan protokoler pemerintah daerah dengan pagu Rp 380.072.400,00 terealisasi sebesar Rp 356.863.600.00 atau sebesar 93.89%.

Rencana Aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Meningkatkan kualitas pelayanan keprotokolan kegiatan pimpinan.
- Meningkatkan kerja sama dengan seluruh instansi dalam pelaksanaan kegiatan KDH/WKDH agar tidak terjadi tumpang tindih jadwal kegiatan sehingga seluruh kegiatan dapat terlayani keprotokolannya dengan baik.

Indikator 4 : Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah, kehumasan dan keprotokolan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%	Bagian Humas dan Keprotokolan Mengampu Misi ke- 3 "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Indikator ini dilaksanakan dengan menilai presentase dari jumlah pengaduan yang masuk secara keseluruhan dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk yang di tindakInjuti dengan target sebesar 100%. Indikator ini dilaksanakan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan seluruh SKPD di lingkup pemerintah kabupaten Tanah Laut melalui aplikasi E-Lapor dengan program kegiatan Lapor KTA.

Rencana Aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka tindak lanjut jika ditemukan laporan yang masuk.



Foto : 1. salah satu media publikasi kegiatan pemerintah daerah kabupaten Tanah Laut melalui website setda.tanahlautkab.go.id
 2. Beberapa dokumentasi kegiatan KDH/WKDH

❖ Analisis Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

- 1) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelaksanaan layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah, kehumasan dan keprotokolan dengan indikator Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media ditunjang dengan program kerjasama informasi dan mass media dengan pagu Rp 2.392.390.200,00 terealisasi Rp 2.329.033.102.00 dengan realisasi keuangan sebesar 97,35% dan dilaksanakan oleh 5 (lima) orang Sumber Daya Manusia yaitu Kepala Bagian Humas dan Keprotokolan, Kasubbag Pemberitaan, Pranata Komputer, Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media dan Pengadministrasi Data Penyajian dan Dokumentasi.

- 2) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelaksanaan layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah, kehumasan dan keprotokolan dengan indikator Persentase kegiatan kehumasan KDH/WKDH/SKPD/ Masyarakat yang terlayani ditunjang dengan program pembinaan, pengembangan, fasilitasi hubungan masyarakat dan keprotokolan kegiatan pengembangan hubungan masyarakat dengan pagu Rp 586.311.700,00 terealisasi sebesar Rp 466.708.900.00 atau sebesar 79,60%.dan dilaksanakan oleh 2 (dua) orang Sumber Daya Manusia yaitu Kepala Bagian Humas dan Keprotokolan dan Kasubbag Humas.
- 3) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelaksanaan layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah, kehumasan dan keprotokolan dengan indikator Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu daerah yang terlayani keprokolannya ditunjang dengan program pembinaan, pengembangan, fasilitasi hubungan masyarakat dan keprotokolan kegiatan fasilitasi dan pelayanan protokoler pemerintah daerah dengan pagu Rp 380.072.400,00 terealisasi sebesar Rp 356.863.600.00 atau sebesar 93.89% dan dilaksanakan oleh 7 (tujuh) orang SDM yaitu Kepala Bagian Humas dan Keprotokolan dan Kasubbag protokol dan 5 (lima) orang petugas protokol.
- 4) Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelaksanaan layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah, kehumasan dan keprotokolan dengan indikator Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti melalui aplikasi yang terintegrasi dengan seluruh SKPD di lingkup pemerintah kabupaten Tanah Laut melalui aplikasi E-Lapor dengan program kegiatan Lapor KTA dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang SDM yaitu Kepala Bagian Humas dan Keprotokolan, Kasubbag Pemberitaan dan operator.

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang
dan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	SDM	Ket
1	Persentase penyebarluasan informasi/ pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	Program kerjasama informasi dan mass media	2.392.390.200	2.329.033.102	97,35%	<ul style="list-style-type: none"> - Kabag Humas dan protokol - Kasubbag Pemberitaan - Pranata Komputer - Pengadministrasi analisis dan kemitraan media - Pengadministrasi data penyajian dan dokumentasi 	

2.	Persentase kegiatan kehumasan KDH/WKDH/SKPD/ Masyarakat yang terlayani	Pembinaan, pengembangan, fasilitasi hubungan masyarakat dan keprotokolan kegiatan pengembangan hubungan masyarakat	586.311.700	466.708.900	76.60%	- Kabag Humas dan protokol - Kasubbag Humas	
3	Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu daerah yang terlayani keprokolannya	Pembinaan, pengembangan, fasilitasi hubungan masyarakat dan keprotokolan kegiatan fasilitasi dan pelayanan protokoler pemerintah daerah	380.072.400	.356.863.600	93.89%	- Kabag Humas dan protokol - Kasubbag protokol - Petugas Protokol	
4.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Program kerjasama informasi dan mass media	0	0	0	- Kabag Humas dan protokol - Kasubbag pemberitaan - Operator.	
JUMLAH			3.429.958.100	3.152.605.602	91.91%		

❖ Kepala Sub Bagian Pemberitaan

Untuk capaian indikator sasaran pada Kasubbag Pemberitaan dilaksanakan melalui program kerjasama informasi dan mass media dengan pagu Rp 2.392.390.200,00 terealisasi Rp 2.329.033.102.00 dengan realisasi keuangan sebesar 97,35%; dan dilaksanakan oleh 5 (lima) orang SDM yaitu Kepala Bagian Humas dan Keprotokolan, Kasubbag Pemberitaan, Pranata Komputer, Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media dan Pengadministrasi Data Penyajian dan Dokumentasi.

NO	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Pembangunan pemerintah daerah yang terpublikasi dan diberitakan	Jumlah publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah melalui media cetak, elektronik, <i>online</i> dan media sosial	680 berita	680 berita	100%	Kasubbag Pemberitaan
2	Kegiatan KDH / WKDH / SKPD dan masyarakat yang terlayani peliputan pemberitaannya	Jumlah liputan pemberitaan kegiatan KDH / WKDH / SKPD dan masyarakat	280 kali	280 kali	100%	Kasubbag Pemberitaan

3	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah dokumen pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	1 kali	0	0	Kasubbag Pemberitaan
---	---	--	--------	---	---	----------------------

SASARAN 1 Pembangunan Pemerintah Daerah yang Terpublikasi dan diberitakan
Indikator : Jumlah Publikasi Dan Pemberitaan Pembangunan Pemerintahan Daerah Melalui Media Cetak, Elektronik, *Online* Dan Media Sosial

NO	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Pembangunan pemerintah daerah yang terpublikasi dan diberitakan	Jumlah publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah melalui media cetak, elektronik, <i>online</i> dan media sosial	680 berita	680 berita	100%	Kasubbag Pemberitaan

Jumlah publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah melalui media cetak, elektronik, *online* dan media sosial dari bulan Januari sampai dengan bulan desember tahun 2020 terlaksana sesuai target yaitu 680 berita dengan jumlah kerjasama media cetak sebanyak 5 buah dan media online sebanyak 5 buah. Sedangkan media sosial yang dikelola sub bagian pemberitaan sebanyak 3 buah yaitu *facebook* dengan nama halaman Humas Kabupaten Tanah Laut dan *instagram* dengan nama akun [@humastala](#) serta 1 buah *website* dengan alamat setdata.tanahlautkab.go.id

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah:

- Meningkatkan pengelolaan konten media publikasi agar lebih informatif dan beragam.
- Meningkatkan sarana publikasi berupa perangkat elektronik agar kegiatan pimpinan dapat terpublikasikan secara *update*.

SASARAN 2 Kegiatan KDH / WKDH /SKPD dan Masyarakat yang Terlayani Peliputan Pemberitaannya

Indikator : Jumlah Liputan Pemberitaan Kegiatan KDH/WKDH/ SKPD dan Masyarakat

NO	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Kegiatan KDH / WKDH / SKPD dan masyarakat yang terlayani peliputan pemberitaannya	Jumlah liputan pemberitaan kegiatan KDH / WKDH / SKPD dan masyarakat	280 kali	280 kali	100%	Kasubbag Pemberitaan

Jumlah liputan pemberitaan kegiatan KDH / WKDH / SKPD dan masyarakat pada tahun 2020 terlaksana sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah tersusun.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah:

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait mengenai jadwal kegiatan KDH/WKDH agar tidak terjadi tumpang tindih sehingga dapat terlaksana peliputan pemberitaannya dan kegiatan KDH/WKDH dapat terpublikasi secara maksimal.
- Meningkatkan kapasitas petugas pemberitaan dan pengelolaan publikasi agar dapat meningkatkan kualitas informasi dan lebih maksimal dalam penyebarluasan informasi kegiatan KDH/WKDH.

SASARAN 3 Pembangunan Pemerintah Daerah yang Terpublikasi dan Diberitakan

Indikator : Jumlah Publikasi Dan Pemberitaan Pembangunan Pemerintahan Daerah Melalui Media Cetak, Elektronik, *Online* dan Media Sosial

NO	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
3	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah dokumen pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	1 kali	0	0	Kasubbag Pemberitaan

Jumlah dokumen pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2020 tidak mencapai target dikarenakan tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah:

- Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka tindak lanjut jika ditemukan laporan yang masuk.

❖ Kepala Sub Bagian Protokol

Untuk capaian indikator sasaran pada Kasubbag Protokol dilaksanakan melalui program pembinaan, pengembangan, fasilitasi Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan dengan pagu Rp 380.072.400,00 terealisasi Rp 356.863.600,00 dengan realisasi keuangan sebesar 93,87%. dan dilaksanakan oleh 7 (tujuh) orang SDM yaitu Kepala Bagian Humas dan Keprotokolan dan Kasubbag protokol dan 5 (lima) orang petugas protokol.

NO	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Kegiatan keprotokolan KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat yang terlayani	Jumlah kegiatan KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat yang terlayani keprotokolannya	430 kali	430 kali	100%	Kasubbag Keprotokolan
2	Pelayanan tamu KDH/WKDH yang terlayani	Jumlah tamu KDH/WKDH yang terlayani dengan baik	28 kali	28 kali	100%	Kasubbag Keprotokolan

SASARAN 1 Kegiatan Keprotokolan KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat yang Terlayani

Indikator : Jumlah Kegiatan KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat yang Terlayani Keprotokolannya

NO	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Kegiatan keprotokolan KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat yang terlayani	Jumlah kegiatan KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat yang terlayani keprotokolannya	430 kali	430 kali	100%	Kasubbag Keprotokolan

Pada tahun 2020 pelayanan keprotokolan kegiatan KDH/WKDH/SKPD terlaksana sesuai dengan target dan tercapai 100%.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah:

- Peningkatan Koordinasi dengan Penyelenggara Acara dan ADC/Ajudan Pimpinan dan mengingatkan kembali kepada pelaksana acara agar menyampaikan surat permohonan fasilitasi kegiatan ke Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- Menyediakan armada/alat transportasi yang lebih memadai untuk pelaksanaan fasilitasi keprotokolan KDH/WKDH di lapangan.

SASARAN 2 Pelayanan Tamu KDH/WKDH yang Terlayani

Indikator : Jumlah Tamu KDH/WKDH yang Terlayani dengan Baik

NO	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Pelayanan tamu KDH/WKDH yang terlayani	Jumlah tamu KDH/WKDH yang terlayani dengan baik	28 kali	28 kali	100%	Kasubbag Keprotokolan

Pada tahun 2020 seluruh tamu KDH/WKDH terlayani dengan baik sesuai dengan prosedur pelayanan.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah:

- Mengadakan bimbingan teknis fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan kepada SKPD dan organisasi masyarakat.

❖ Kepala Sub Bagian Humas

Untuk capaian indikator sasaran pada Kasubbag Humas dilaksanakan melalui program pembinaan, pengembangan, fasilitasi Hubungan masyarakat dan keprotokolan dengan pagu Rp 657.495.500,00 terealisasi Rp 466.708.900,00 dengan realisasi keuangan sebesar 70,98%. dan dilaksanakan oleh 2 (dua) orang SDM yaitu Kepala Bagian Humas dan Keprotokolan dan Kasubbag Humas.

Terkait program pembinaan, pengembangan, fasilitasi Hubungan masyarakat dan keprotokolan mencakup kegiatan pada 2 (dua) sub bagian. Pada Sub Bagian Hubungan Masyarakat terdapat kegiatan yang tidak dapat direalisasikan yaitu pelaksanaan kegiatan pameran pembangunan dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 sehingga kegiatan tersebut ditiadakan.

NO	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Memberikan pelayanan kehumasan kepada KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat	Jumlah pelayanan kehumasan KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat	200 kali	200 kali	100%	Kasubbag Hubungan Masyarakat
2	Kegiatan KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat terliput pendokumentasiannya	Jumlah liputan pendokumentasian KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat	300 kali	300 kali	100%	Kasubbag Hubungan Masyarakat

SASARAN 1 Memberikan Pelayanan Kehumasan Kepada KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat

Indikator : Jumlah Pelayanan Kehumasan KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat

NO	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Memberikan pelayanan kehumasan kepada KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat	Jumlah pelayanan kehumasan KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat	200 kali	200 kali	100%	Kasubbag Hubungan Masyarakat

Pada tahun 2020 pelayanan kehumasan KDH/WKDH/SKPD dan masyarakat terlaksana sesuai dengan target, semua kegiatan KDH/WKDH/SKPD dan masyarakat yang telah terjadwal dilayani kehumasannya sesuai dengan prosedur pelayanan.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah:

- Meningkatkan kualitas peralatan untuk keperluan dokumentasi pimpinan agar hasil pendokumentasian lebih bagus.
- Menyediakan armada/alat transportasi yang lebih memadai untuk pelaksanaan kegiatan pendokumentasian KDH/WKDH di lapangan.

SASARAN 2 Kegiatan KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat Terliput Pendokumentasiannya

Indikator : Jumlah Liputan Pendokumentasian KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat

NO	SASARAN STRATEGIS / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Kegiatan KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat terliput pendokumentasiannya	Jumlah liputan pendokumentasian KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat	300 kali	300 kali	100%	Kasubbag Hubungan Masyarakat

Seluruh kegiatan KDH/WKDH/SKPD dan masyarakat yang telah terjadwalkan pada tahun 2020 terdokumentasikan dengan baik dalam bentuk foto dan video dan tersimpan pada media penyimpanan pada Sub Bagian Humas.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah:

- Meningkatkan kualitas perangkat penyimpanan agar hasil dokumentasi kegiatan KDH/WKDH dapat tersimpan dengan baik.

Analisis Capaian Sasaran Strategis

Kepala Bagian Umum

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/SKPD/ Masyarakat dengan baik	100%	86,83%	86,83%	Bagian Umum Mengampu misi ke-3 "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda terkait sarana prasarana/ aset milik Setda terkelola dengan baik	100%	92,57%	92,57%	
ESELON IV						
1	Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana/aset Sekretariat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana/aset milik Setda yang terpelihara dan terkelola dengan baik	60,09%	100%	100%	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga
2	Melaksanakan Pelayanan Urusan pimpinan/Bagian/SKPD dan Masyarakat	Jumlah layanan pimpinan/Bagian/SKPD dan Masyarakat terlayani dengan baik	92%	100%	100%	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga
3	Melaksanakan Pelayanan bidang transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah layanan transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah terlayani dengan baik	100%	100%	100%	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga
4	Melaksanakan pengadaan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset yang didistribusikan di Lingkup Sekretariat Daerah	72,56%	100%	100%	Kasubbag Perlengkapan
5	Melaksanakan Pengelolaan, Pencatatan Aset dan Penghapusan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset Sekretariat Daerah yang terkelola dan tercatat dengan baik	85,61%	100%	100%	Kasubbag Perlengkapan
6	Melaksanakan Rumusan Analisa Kebutuhan Barang di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen analisa kebutuhan barang berupa rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) sesuai standar dan kebutuhan di lingkup Sekretariat Daerah	68,56%	77,77%	77,77%	Kasubbag Perlengkapan

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Bagian Umum terhadap capaian tahun sebelumnya

Tabel Capaian Sasaran Strategis Bagian Umum
 terhadap capaian tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2020		
			2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/ SKPD/ Masyarakat dengan baik	%	86,65%	86,83%	100%	86,83%	86,83%
2	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda terkait sarana prasarana/ aset milik Setda dikelola dengan baik	%	100%	61,3%	100%	92,57%	92,57%

❖ **Perbandingan Realisasi dengan Target :**

Capaian kinerja bagian umum dari dua indikator adalah 89,7% dengan rincian sebagai berikut :

1. Persentase layanan Pimpinan/Bagian/ SKPD/ Masyarakat dengan baik dengan nilai komponen layanan pimpinan dan Bagian-Bagian dengan realisasi sebesar 86,83% dari target 100%.
2. Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Sekretariat Daerah terkait sarana prasarana/ aset milik Sekretariat Daerah dikelola dengan baik dengan nilai komponen layanan pencatatan aset dan pendistribusian dengan realisasi sebesar 92,57% dari target 100%.

❖ **Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait :**

1. Persentase layanan Pimpinan/Bagian/SKPD/Masyarakat dengan baik dengan nilai pada tahun 2020 dan tahun 2019 tidak mengalami perubahan yaitu realisasinya 86,83%.
2. Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Sekretariat Daerah terkait sarana prasarana/aset milik Sekretariat Daerah dikelola dengan baik pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu sebesar 31.27% dengan rincian tahun 2019 sebesar 61,3% dan tahun 2020 sebesar 92,57%.

❖ **Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

SASARAN 1 Meningkatnya Kualitas Layanan Umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan Baik

Indikator : Persentase Layanan Pimpinan/Bagian/SKPD/Masyarakat dengan Baik

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/SKPD/ Masyarakat dengan baik	100%	86,83%	86,83%	Bagian Umum Mengampu misi ke-3 "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"

Indikator ini dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan jasa bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.359.913.560,- pada tahun 2020 dengan serapan anggaran sebesar Rp 2.150.889.963,- atau 64,02%, kegiatan penyediaan makanan dan minuman dengan pagu anggaran Rp 1.240.064.000 pada tahun 2020 dengan serapan anggaran sebesar Rp 1.045.914.100 atau 84,34%. Kemudian, kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.796.123.591 pada tahun 2020 dengan serapan anggaran sebesar Rp 2.730.823.540 atau 73,24%. Pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan/dinas dengan pagu anggaran sebesar Rp 493.665.000 dengan serapan anggaran sebesar Rp Rp 279.571.000 atau 56,63% dan Program fasilitasi kegiatan dan kebijakan KDH dan WKDH dengan pagu program sebesar Rp 2.221.000.000 dengan serapan anggaran sebesar Rp 1.758.811.324 atau 79,19%.

Dalam melaksanakan indikator tersebut diatas, menghadapi beberapa kendala antara lain :

- Kurang tertibnya usulan RKBU dari Bagian-Bagian sehingga mengakibatkan kurang terakomodir kebutuhan di setiap Bagian.
- Kurangnya kesadaran dalam memelihara asset daerah.

Solusi yang dilakukan dalam mencapai indikator ini adalah :

- Memberikan batasan atau tengang waktu dalam membuat RKBU dari bagian-bagian yang diusulkan ke Bagian Umum.
- Perlu adanya sanksi terhadap kelalaian penggunaan asset daerah.

Rencana aksi perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Membuat surat edaran mengenai batasan usulan RKBU.
- Membuat surat edaran tentang penggunaan asset daerah.



Foto Kegiatan Acara Ramah Tamah Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut dan 17 Agustus

SASARAN 2 Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib

Indikator : Persentase Layanan Pada Bagian-Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Terkait Sarana Prasarana/ Aset Milik Sekretariat Daerah Terkelola Dengan Baik

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda terkait sarana prasarana/ aset milik Setda terkelola dengan baik	100%	92,57%	92,57%	Bagian Umum Mengampu misi ke-3 "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"

Peningkatan indikator ini ditunjang dengan kegiatan penyusunan tabulasi asset daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 119.500.000 dengan serapan anggaran sebesar Rp 110.623.100 atau 92,57%. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.625.542.724 dengan serapan anggaran sebesar Rp 2.289.883.300 atau 87,22%.

Indikator tersebut diatas, terdapat beberapa kendala antara lain :

- Banyaknya jumlah asset yang tidak ditemukan dan dalam keadaan rusak berat (RB)
- Pencatatan asset yang belum tertib

Solusi yang dilakukan dalam mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan penelusuran terhadap asset yang tidak ditemukan
- Menertibkan pencatatan asset

Rencana aksi perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Membuat berita acara penelusuran asset yang tidak ditemukan dan diusulkan untuk dihapus atau hibah.
- Membuat berita acara serah terima barang.

❖ **Analisis Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia :**

- 1) Untuk mencapai sasaran layanan Pimpinan/Bagian/SKPD/Masyarakat dengan baik ditunjang dengan program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan pagu program sebesar Rp 9.830.296.625 terealisasi sebesar Rp 7.907.424.840 atau sebesar 80,44% dan Program Fasilitasi Kegiatan dan Kebijakan KDH dan WKDH dengan pagu program sebesar Rp 2.221.000.000 terealisasi sebesar Rp 1.758.811.324 atau sebesar 79,19% dan dilaksanakan oleh 3 orang Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu Kepala Bagian Umum, Kasubbag Umum dan Rumah Tangga dan pelaksana Bagian Umum.
- 2) Untuk mencapai sasaran persentase layanan pada Bagian-Bagian Lingkup Sekretariat Daerah terkait sarana prasarana/aset milik Sekretariat Daerah dikelola dengan baik ditunjang dengan program pelayanan administrasi perkantoran dengan pagu program sebesar Rp 3.479.413.560 terealisasi sebesar Rp 2.261.513.063 atau sebesar 65% dan dilaksanakan oleh 3 orang Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu Kepala Bagian Umum, Kasubbag Perlengkapan dan pelaksana Bagian Umum.

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	SDM	Ket
1	Persentase layanan Pimpinan/ Bagian/ SKPD/ Masyarakat dengan baik	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Rp 9.830.296.625	Rp 7.907.424.840	80.44	- Kabag Umum - Kasubbag Umum dan Rumah Tangga - Pelaksana Bagian Umum	
		Program Fasilitasi Kegiatan dan Kebijakan KDH dan WKDH	Rp 2.221.000.000	Rp 1.758.811.324	79.19	- Kabag Umum - Kasubbag Umum dan Rumah Tangga - Pelaksana Bagian Umum	
2	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda terkait sarana prasarana/ aset milik Setda terkelola dengan baik	Program pelayanan administrasi perkantoran	Rp 3.479.413.560	Rp 2.261.513.063	65.00	- Kabag Umum - Kasubbag Perlengkapan - Pelaksana Bagian Umum	
JUMLAH			Rp 15.530.710.185	Rp 11.927.749.227	76,80		

❖ **Analisis Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga :**

SASARAN 1 Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana/Aset Sekretariat Daerah

Indikator : Jumlah Sarana Dan Prasarana/Aset Milik Sekretariat Daerah yang Terpelihara dan Terkelola dengan Baik

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana/aset Sekretariat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana/aset milik Setda yang terpelihara dan terkelola dengan baik	60,09%	100%	100%	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga

Indikator ini dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.796.123.591 dengan serapan anggaran sebesar Rp 2.780.323.540 atau 73,24%. Kegiatan pemeliharaan rutin berkala

rumah jabatan/dinas dengan pagu anggaran sebesar Rp 493.665.000 dengan serapan anggaran sebesar Rp 279.571.000 atau 56,63%.

Indikator tersebut diatas, terdapat beberapa kendala antara lain :

- Banyak asset yang tidak terpelihara dengan baik
- Kurangnya laporan dari pengguna asset terkait kerusakan asset yang digunakannya

Solusi yang dilakukan dalam mencapai indikator ini adalah :

- Mendata asset yang rusak
- Meminta laporan dari pengguna asset

Rencana aksi perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Membuat blanko atau kartu pemeliharaan
- Membuat blanko laporan dari pengguna asset

SASARAN 2 Melaksanakan Pelayanan Urusan Pimpinan/Bagian/SKPD/ dan Masyarakat

Indikator : Jumlah Layanan Pimpinan/Bagian/ SKPD dan Masyarakat Terlayani dengan Baik

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Melaksanakan Pelayanan Urusan pimpinan/Bagian/ SKPD/ dan Masyarakat	Jumlah layanan pimpinan/Bagian/ SKPD dan Masyarakat terlayani dengan baik	92%	100%	100%	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga

Indikator ini dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan makanan dan minuman dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.240.064.000 dengan serapan anggaran sebesar Rp 1.045.914.100 atau 84,34% dan kegiatan penyediaan makanan dan minuman rumah jabatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.056.000.000 dengan serapan anggaran sebesar Rp 1.020.379.500 atau 96,63%.

Indikator tersebut diatas, terdapat beberapa kendala antara lain :

- Permintaan yang mendadak dari pimpinan
- Kurangnya persiapan dari penyedia

Solusi yang dilakukan dalam mencapai indikator ini adalah :

- Lebih intens dalam berkomunikasi dengan pimpinan
- Mencari relasi yang lebih banyak

Rencana aksi perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Menetapkan petugas khusus

SASARAN 3 Melaksanakan Pelayanan Bidang Transportasi, Konsumsi dan Gedung Pertemuan Di Lingkup Sekretariat Daerah

Indikator : Jumlah Transportasi, Konsumsi dan Gedung Pertemuan Di Lingkup Sekretariat Daerah Terlayani dengan Baik

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Melaksanakan Pelayanan bidang transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah layanan transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah terlayani dengan baik	100%	100%	100%	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga

Peningkatan indikator ini dilakukan dengan menyediakan jasa sewa gedung dan layanan penyewaan bus untuk masyarakat umum dan pimpinan. Dalam hal ini dapat kami jelaskan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut memiliki beberapa gedung atau aula yang dapat dimanfaatkan atau disewa oleh Masyarakat/SKPD ataupun dari Lembaga Organisasi lainnya berupa :

- 1) Gedung Balairung Tuntung Pandang
- 2) Gedung Sarantang Saruntung
- 3) Aula Rapat Ruang Barakat Lantai dua Sekretariat Daerah
- 4) Aula Rapat Lantai tiga Sekretariat Daerah

Yang mana gedung dan aula tersebut sering digunakan untuk acara cara resmi seperti pelantikan para pejabat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Selain gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut juga memiliki 4 buah armada bus yang dapat di sewa oleh Masyarakat ataupun SKPD dengan tarif yang terjangkau karena tarif di atur dengan Peraturan Daerah yang mana dana akan masuk ke Kas Daerah.

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

- Dalam hal sewa gedung kurangnya kesadaran masyarakat umum dalam memelihara kebersihan dalam ruangan

Solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:

- Perlunya himbuan bahkan surat edaran dari pimpinan dalam hal perawatan dan pemeliharaan BMD khususnya yang di sewakan kepada masyarakat umum.

Rencana aksi perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Membuat surat edaran

Melaksanakan pelayanan urusan Pimpinan/Bagian/SKPD/Masyarakat, Pelayanan bidang transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah dan jumlah layanan pimpinan/bagian/SKPD/masyarakat serta layanan transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan yang terlayani dengan baik, maka untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Pemenuhan, Peningkatan Saranan dan Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang terdiri dari 7 kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp 9.830.296.625 dan terealisasi sebesar Rp 7.907.424.840 atau 80.44% dengan telah dilaksanakannya kegiatan :

- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
- 2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
- 3) Rahabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor
- 4) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 5) Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
- 6) Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Jabatan/Dinas
- 7) Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Jabatan/Dinas

❖ **Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja Kepala Sub Bagian Perlengkapan**

Melaksanakan pengelolaan, pencatatan aset dan penghapusan aset di Lingkup Sekretariat Daerah dan jumlah aset yang terkelola dan tercatat dengan baik, maka untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Kegiatan Penyusunan Tabulasi Aset Daerah dengan Anggaran sebesar Rp 119.500.000 dan terealisasi sebesar Rp 110.632.100 atau 92.57%.

SASARAN 1 Melaksanakan Pengelolaan, Pencatatan Aset dan Penghapusan Aset di Lingkup Sekretariat Daerah

Indikator : Jumlah Aset Sekretariat Daerah yang terkelola dan Tercatat dengan Baik

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Melaksanakan Pengelolaan, Pencatatan Aset dan Penghapusan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset Sekretariat Daerah yang terkelola dan tercatat dengan baik	85,61%	100%	100%	Kasubbag Perlengkapan

Indikator ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Saranan dan Prasarana Perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.625.542.724 dengan serapan anggaran sebesar Rp 2.289.883.300 atau 87,22%.

Indikator tersebut diatas, terdapat beberapa kendala antara lain :

- Banyak asset yang tidak merata dalam hal pendistribusiannya

Solusi yang dilakukan dalam mencapai indikator ini adalah :

- Meningkatkan pencatatan pendistribusian asset pada bagian-bagian.

Rencana aksi perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Barang (KIR) setiap 6 bulan sekali.

Indikator ini dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Tabulasi Aset Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 119.500.000 dengan serapan anggaran sebesar Rp 110.623.100 atau 92,57%.

Indikator tersebut diatas, terdapat beberapa kendala antara lain :

- Banyaknya jumlah asset yang tidak ditemukan dan dalam keadaan rusak berat (RB)
- Pencatatan asset yang belum tertib

Solusi yang dilakukan dalam mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan penelusuran barang yang tidak ditemukan dan barang rusak berat untuk diusulkan dalam pemusnahan dan penghapusan BMD.
- Menertibkan pencatatan asset

Rencana aksi perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Membuat berita acara penelusuran asset yang tidak ditemukan dan diusulkan untuk dihapus atau hibah.
- Membuat berita acara serah terima barang.

Berikut disajikan daftar barang yang dimusnahkan dan dihapus pencatatannya dari aset Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

Daftar BMD yang Dilakukan Pemusnahan
 (Lampiran Tabel KIB)
 Peralatan dan Mesin

No	Kode Barang	Jenis Barang>Nama Barang	Register	Merk/Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Rangka	Nomor Mesin	Polisi	BPKB	Asal Usul	Harga Perolehan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	02.06.01.03.18	Mesin Cetak ID Card	1	-	-	camp	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	43,000,000	
2	02.06.01.04.14	Lemari kayu	5	lokal/lemari pakaian	-	Kayu Jati	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	9,432,500	
3	02.06.01.04.14	Lemari kayu	7	lokal/lemari pakaian	3 pintu	Kayu Jati	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	9,432,500	
4	02.06.01.04.14	Lemari kayu	8	lokal/lemari pakaian	2 pintu	Kayu	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	8,192,800	
5	02.06.02.01.01	Lemari Kayu	12	Indojati / -	230X55 X230 cm	Kayu	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	22,293,750	
6	02.06.02.01.55	Lemari Rias	3	Melodi /1 pintu	-	camp	2015	-	-	-	-	-	Pembelian	1,650,000	
7	02.06.02.03.04	Mesin Cuci	12	Nilfisk / Nilfisk	standar	Camp	2016	-	-	-	-	-	Pembelian	5,610,000	
8	02.06.02.04.04	AC Split	1	LG	standar		2004	-	-	-	-	-	Pembelian	6,781,250	
9	02.06.02.04.04	AC Split	16	Panasonic	standar	camp	2006	-	-	-	-	-	Pembelian	5,445,000	
10	02.06.02.04.04	AC Split	27	Panasonic	standar	camp	2007	-	-	-	-	-	Pembelian	5,000,000	
11	02.06.02.04.04	AC Split	30	Panasonic	standar	camp	2007	-	-	-	-	-	Pembelian	2,400,000	
12	02.06.02.04.04	AC Split	40	Panasonic	standar	camp	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	4,500,000	
13	02.06.02.04.04	AC Split	41	Panasonic	standar	camp	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	9,000,000	
14	02.06.02.04.04	AC Split	42	Panasonic	standar	camp	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	9,000,000	
15	02.06.02.04.04	AC Split	6	- / -	standar	camp	2005	-	-	-	-	-	Pembelian	18,600,000	
16	02.06.02.04.04	AC Split	7	- / -	standar	camp	2005	-	-	-	-	-	Pembelian	18,600,000	



17	02.06.03.02.01	P.CUnit/ Komputer PC	18	Acer / PC	standar	camp	2007	-	-	-	-	-	Pembelian	8,900,000	
18	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	19	Acer / PC	standar	camp	2007	-	-	-	-	-	Pembelian	8,900,000	
19	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	46	Acer / AspirePC M3920	standar	camp	2011	-	-	-	-	-	Pembelian	6,788,375	
20	02.06.03.02.02	Laptop	1	Toshiba	standar	camp	2004	-	-	-	-	-	Pembelian	19,900,000	
21	02.06.03.02.03	Note Book	39	Toshiba/ -	standar	camp	2009	-	-	-	-	-	Pembelian	19,600,000	
22	02.06.03.02.03	Note Book	48	Toshiba	standar	camp	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	11,950,000	
23	02.06.03.05.02	Monitor	9	Samsung/ LCD/LED	standar	camp	2012	-	-	-	-	-	Pembelian	7,426,100	
24	02.06.03.05.11	UPS	118	ICA/CV 1400	standar	camp	2016	-	-	-	-	-	Pembelian	1,485,000	
25	02.06.03.06.11	Wireless Access Point	13	Linksys/ EA 2700	standar	camp	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	1,430,000	
26	02.06.03.06.11	Wireless Access Point	14	Linksys/ EA 2700	standar	camp	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	1,430,000	
27	02.06.04.01.06	Meja kerja Pejabat Eselon IV	5	Jati	standar	kayu	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	5,950,000	
28	02.09.04.05.17	System/Power Supplay Lain- lain	2	Panel Power Supply/ Combinations	standar	camp	2016	-	-	-	-	-	Pembelian	4,500,000	
Jumlah														277,197,275	

SASARAN 2 Melaksanakan Rumusan Analisa Kebutuhan Barang di Lingkup Sekretariat Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen Analisa Kebutuhan Barang Berupa Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Sesuai Standar dan Kebutuhan di Lingkup Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Melaksanakan Rumusan Analisa Kebutuhan Barang di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen analisa kebutuhan barang berupa rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) sesuai standar dan kebutuhan di lingkup Sekretariat Daerah	68,56%	77,77%	77,77%	Kasubbag Perlengkapan

Untuk melaksanakan indikator ini dilakukan kegiatan belanja alat tulis kantor, belanja perangko, belanja cetak, belanja makan minum kegiatan dan belanja makan minum kegiatan.

Indikator tersebut diatas, terdapat beberapa kendala antara lain :

- Kurang tertibnya dari Bagian-Bagian mengumpulkan data RKBMD

Solusi yang dilakukan dalam mencapai indikator ini adalah :

- Lebih intens dalam berkomunikasi dengan bagian-bagian terkait RKBMD

Rencana aksi perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Melaksanakan rapat dengan Bagian-Bagian terkait RKBMD

Analisis Capaian Sasaran Strategis
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	SASARAN STRATEGIS /KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Persentase peningkatan pelayanan lembaga keagamaan	100%	84,93%	84,93%	Bagian Kesejahteraan Rakyat Mengampu misi ke-3 "Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)"
2	Meningkatnya peran Organisasi/lembaga pendidikan keagamaan dan kesejahteraan sosial	Persentase layanan kesejahteraan sosial bagi lembaga pendidikan keagamaan	100%	99,83%	99,94%	
3	Meningkatnya peran Organisasi/Lembaga Keagamaan/SKPD Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	100%	11,77%	11,77%	
ESELON IV						
1	Memberikan fasilitasi kepada masyarakat berupa hibah, koordinasi dan kegiatan bidang sosial dan kebudayaan	Jumlah dokumen hibah yang masuk secara tepat syarat	73 Dokumen	62 Dokumen	84,93%	Kasubag Sosial Dan Kebudayaan
		Jumlah kegiatan bidang sosial yang difasilitasi	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%	Kasubag Sosial Dan Kebudayaan
		Jumlah organisasi/lembaga sosial keagamaan yang diberikan bantuan hibah	73 Organisasi/ lembaga	62 Organisasi/ lembaga	84,93%	Kasubag Sosial Dan Kebudayaan
2	Melakukan pengawasan terhadap pendidikan keagamaan	Jumlah pendidikan keagamaan yang dibina	2 Pendidikan	2 Pendidikan	100%	Kasubag Pendidikan Dan Agama
3	Melakukan kegiatan keagamaan	Jumlah organisasi/lembaga keagamaan yang dibantu untuk kegiatan keagamaan	4 Organisasi/ lembaga	4 Organisasi/ lembaga	100%	Kasubag Pendidikan Dan Agama
4	Memberikan bantuan dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Guru TK/TPA, Madin/MIS, Ponpes, dan Penyuluh Agama yang diberi Intensif	3.090 Orang	3085 Orang	99,83%	Kasubag Kemasyarakatan Dan Kesejahteraan Rakyat
		Jumlah guru TK/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan penyuluh Agama yang di monitoring	3.090 Orang	3085 Orang	99,83%	Kasubag Kemasyarakatan Dan Kesejahteraan Rakyat

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Bagian Kesejahteraan Rakyat terhadap capaian tahun sebelumnya :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2020		
			2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase peningkatan pelayanan lembaga keagamaan	%	100%	86%	100%	84,93%	84,93%
2	Persentase layanan kesejahteraan sosial bagi lembaga pendidikan keagamaan	%	100%	99,51%	99,83%	99,94%	100%
3	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	%	100%	61,74%	100%	11,77%	11,77%

❖ Perbandingan Realisasi dengan Target

Capaian kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Menurunnya kualitas layanan untuk kesejahteraan rakyat dalam hal pemberian hibah disebabkan oleh ketidakmampuan pemohon hibah dalam hal pembuatan perencanaan kegiatan dan adanya wabah Covid 19 di Kabupaten Tanah laut. Berdasarkan proposal hibah lembaga/organisasi keagamaan yang masuk memenuhi syarat pada bulan April tahun 2019 sampai dengan bulan maret 2020 berjumlah 73 buah yang terdiri dari hibah fisik dan hibah kegiatan adalah :
 - Proposal hibah lembaga / organisasi keagamaan disetujui oleh pemerintah daerah sebanyak 73 buah dengan dana sebesar Rp 5.295.570.000,-
 - Lembaga/organisasi keagamaan yang mencairkan dana hibahnya sebanyak 62 buah dengan presentasi proposal 84,93% dan jumlah dana yang dicairkan sebesar Rp 4.723.250.000,- dan presentasi keuangannya 89,2%.
 - Lembaga/organisasi keagamaan yang tidak mencairkan dana hibahnya sebanyak 11 buah proposal dengan presentase 10,2% dengan dana sebesar Rp 572.320.000,- disebabkan pemohon hibah ada yang sudah melaksanakan kegiatan fisiknya sebelum ada pencairan dana, ada juga pemohon hibah yang ingin melaksanakan kegiatan fisik itu berbeda dengan RAB Permohonan awal sehingga dana untuk organisasi tersebut tidak bisa di cairkan dan juga ada pemohon hibah kegiatan tidak berani melaksanakan kegiatannya berhubung ada wabah Covid 19.

- 2) Jumlah Pegawai Tidak Tetap pada Bagian Kesejahteraan Rakyat berjumlah 3.090 orang yang terdiri dari guru-guru pada lembaga pendidikan keagamaan TKA/TPA, Madin/MI, Ponpes dan Penyuluh Agama dengan rincian yaitu guru-guru pada lembaga pendidikan keagamaan TKA/TPA berjumlah 1.883 orang, Madin/MI berjumlah 466 orang, Pondok Pesantren berjumlah 501 orang dan Tenaga Penyuluh Agama berjumlah 240 orang.

Pada bulan Juni tahun 2020 ada 1 orang berhenti menjadi guru TPA disebabkan yang bersangkutan menjadi kepala desa. Pada bulan Juli tahun 2020 ada 2 orang guru TPA meninggal dunia, Pada bulan Oktober tahun 2020 ada 1 orang berhenti lantaran ikut suami keluar daerah dan ada 1 orang guru TPA yang meninggal dunia sehingga guru agama berkurang 5 orang dari 3090.

Jumlah insentif yang di berikan pada semua Pegawai Tidak Tetap bagian kesejahteraan rakyat berjumlah Rp 18.108.000.000,- selama 1 tahun dan uang yang tidak di cairkan selama 1 tahun berjumlah Rp 11.000.000,- dengan realiasi berjumlah 99,83% dan capaiannya berjumlah 99,94%.

- 3) Menurunnya pelaksanaan kegiatan keagamaan, pemuda dan olah raga pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 adalah karena adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak dilaksanakannya beberapa kegiatan atau even-even yang dapat menimbulkan kerumunan massa, seperti :
- Peringatan hari-hari besar/penting keagamaan
 - Penyelenggaraan kegiatan MTQ tingkat Kabupaten dan tingkat provinsi
 - Penyelenggaraan Ibadah Haji
 - Penyelenggaraan kegiatan MQK tingkat Kabupaten dan tingkat Provinsi

Sehingga dari total anggaran yang tersedia yakni Rp 1.156.975.600,- hanya dapat direalisasikan sebesar Rp 136.185.400,- dengan capaian 11,77%.

❖ **Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait :**

- 1) Persentase realisasi peningkatan pelayanan lembaga sosial dan keagamaan yang ditindaklanjuti Bagian Kesejahteraan Rakyat lingkup Sekretariat Daerah pada tahun 2019 dan 2020 ada perubahan penurunan adalah sebesar 86% dengan 84,93% = 1,07%
- 2) Persentase realiasi layanan kesejahteraan sosial bagi lembaga pendidikan keagamaan yakni berupa pemberian insentif terhadap pegawai tidak tetap pada guru-guru TK/TP Al Qur'an, Madin/MIS, Pondok Pesantren dan Penyuluh Agama lingkup

Sekretariat Daerah berupa insentif yang di berikan pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,43%, yakni dari 99,51% menjadi 99,94%.

- 3) Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga yang dilaksanakan pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 88,33% yakni dari 100% menjadi 11,77%, hal ini disebabkan banyaknya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena pandemi covid-19.

❖ Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

SASARAN 1 Meningkatnya Kurukunan Umat Beragama

Indikator : Persentase Peningkatan Pelayanan Lembaga Sosial dan Keagamaan

NO	SASARAN STRATEGIS /KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Persentase peningkatan pelayanan lembaga keagamaan	100%	84,93%	84,93%	Bagian Kesejahteraan Rakyat Mengampu misi ke-3 "Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Layanan Bagian Kesejahteraan Rakyat semakin banyak tahun demi tahun, ini dilihat dari banyak organisasi/kelembagaan sosial dan keagamaan memohon proposal baik itu bidang fisik maupun bidang kegiatan keagamaan. Jumlah proposal pada tahun 2020 sebanyak 73 buah. Untuk proposal fisik berjumlah 48 buah dan proposal non fisik/kegiatan berjumlah 25 buah.

NO	MEMBERIKAN FASILITASI KEPADA MASYARAKAT BERUPA HIBAH	PROPOSAL HIBAH YANG MASUK TAHUN 2020	JUMLAH PROPOSAL YANG MASUK	JUMLAH PROPOSAL YANG DITINDAK LANJUTI	JUMLAH PROPOSAL YANG TIDAK DITINDAK LANJUTI	CAPAIAN 2020
1		Proposal Hibah Fisik	73 Buah Proposal	Proposal Hibah Fisik 47 Buah	Proposal Hibah Fisik 1 Buah	64,39 %
2		Proposal Hibah Non Fisik		Proposal Hibah Non Fisik 15 Buah	Proposal Hibah Non Fisik 10 Buah	20,54 %
	Jumlah		73 Buah	62 Buah	11 Buah	84, 93%

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Bagi pengurus organisasi /kelembagaan keagamaan yang memohon bantuan hibah fisik maupun kegiatan kebanyakan tidak memahami bagaimana membuat proposal.
- Lambatnya dalam hal pencairan dana hibah dikarenakan administrasi dari pemohon proposal hibah yang tidak lengkap.
- Permintaan RAB proposal pencairan dengan permintaan RAB proposal awal berbeda yang akan dikerjakan.
- Kurangnya ketaatan dalam mengspjkan dana hibah.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melaksanakan sosialisasi kepada pemohon hibah secara langsung dan meminta kepada aparat desa dan kecamatan untuk menyampaikan syarat-syarat proposal mengajukan permohonan fisik maupun kegiatan kepada bagian kesejahteraan rakyat.
- Sebelum membuat permohonan proposal terlebih dahulu melakukan musyawarah pengurus dengan warga berkaitan dengan permintaan apa yang diinginkan.
- Meningkatkan koordinasi yang intensif kepada pejabat atau instansi terkait.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Melaksanakan sosialisasi kepada penerima pencairan hibah secara langsung dan sosialisasi bagaimana membuat laporan keuangan bantuan hibah
- Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas realisasi kemajuan pelaksanaan hibah kepada pemohon proposal secara berkelanjutan serta pengawasan terus menerus.



Foto Kegiatan Sosialisasi Hibah

Daftar Penerima Hibah
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut
Tahun Anggaran 2020 Hibah Uang yang Direkomendasikan Oleh
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

NO	NAMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	Langgar Darul Muttaqin	Jl. Dahlia RT. 13 Dusun IV Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung	42,000,000
2	Yayasan Nurul Adzula m	Desa Benua Tengah RT. 01/01 Dusun 01 Kecamatan Takisung	105,000,000
3	Masjid Nurul Iman	Jl. Sungai Kembang RT. 09 Desa Gunung Makmur	17,500,000
4	Langgar Al Akhdari	Jl. Basuki Rahmat RT. 26 RW. 07 Kel. Angsau Kec. Pelaihari	10,000,000
5	Kelompok Rukun Kematian Cendana Putih	Jl. Jend Sudirman RT. 03 RW. 01 Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung	7,000,000
6	Yayasan Pondok Pesantren Darussalim Bati-Bati	Jl. Pahlawan RT. 08 RW. III No. 43 Kec. Bati-Bati	210,000,000
7	Langgar Arrahman	Desa Sumber Makmur RT. 09 RW. 05 Kec. Takisung	25,000,000
8	Perkumpulan Rukun Kematian Lingkungan Langgar Darul Muttaqien	Jl. Perintis Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari	35,000,000
9	Majelis Jemaat Sion Katunun	Jl. Katunun RT. 09 RW. 03 Desa Telaga Kec. Pelaihari	35,000,000
10	Yayasan An Nur Fattah	Jl. Niaga Gang Baru RT. 13 RW. 04 Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari	52,500,000
11	Yayasan Ponpes Darul Muslim	Jl. Raya Takisung RT. 02 Desa Ranggung Kec. Takisung	280,000,000
12	Majelis Maulid Habsyi Al Iklas	Jl. Ambawang RT. 04 Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari	7,000,000
13	Pengurus Group Al-Habsyi Al Ikhlas	Desa Gunung Makmur Kec. Takisung	5,250,000
14	Langgar Attaubah	Desa Bumi Jaya RT. 01 A/Dusun 01 Kec. Pelaihari	15,000,000
15	Langgar Hubbul Mustofa	Komp. Karunia Kembar 1 RT. 07 C RW. 03 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari	14,000,000
16	Majelis Ta'lim Al Kautsar	Jl. A Yani Km. 4 Kel. Pabahanan Kec. Pelaihari	35,000,000
17	Masjid Hidayatussalikim	Desa Telaga RT. 06 RW. 01 Kec. Pelaihari	70,000,000
18	Masjid Darul Istiqomah	Desa Bumi Jaya RT. 03 A / Dusun 01 Kec. Pelaihari	140,000,000
19	Baznaz Tanah Laut	Jl. Sapt Marga No. 06 RT. 07 Pelaihari	175,000,000
20	Pimpinan Daerah Aisyiyah Tanah Laut	Jl. Matah 1 RT. 06 No. 43 Kel. Karang Taruna	70,000,000
21	Masjid At Taqwa	Dusun 2 Jayau RT. 09 / 02 Desa Ambungan Kec. Pelaihari	105,000,000

NO	NAMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
22	Gerakan Pemuda Ansor Kab. Tanah Laut	Jl. Samudera RT. 10 / IV Pelaihari	105,000,000
23	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tanah Laut	Komplek Perguruan Muhammadiyah Jl. A Yani Km. 59 Panggung Pelaihari	280,000,000
24	Yayasan Pesantren Assyuhada	Jl. Abadi RT. 03 RW. 01 Kec. Pelaihari	280,000,000
25	PWRI Kabupaten Tanah Laut	Jl. A Syairani Komp Perkantoran Gagas (Gedung Juang) Pelaihari	70,000,000
26	Yayasan Raudhatul Mustarsyidin	Desa Kintap Kecil Kec. Kintap	250,000,000
27	Masjid Attaqwa	Jl. Dewata Desa Jilatan RT. 06 Dusun 02 Kec. Batu Ampar	52,500,000
28	Yayasan Darul Amanah Pandahan	Jl. A. Yani Km. 29 RT. 07 Desa Pandahan Kec. Bati-Bati	105,000,000
29	Masjid Jami Al Falah	Desa Banyu Irang Kec. Bati-Bati	140,000,000
30	Majelis Ta'lim Ar Raudoh	Jl. Pesantren Komplek Al Karomah RT. 08 RW. 03 Desa Bati-Bati Kec. Bati-Bati	35,000,000
31	Masjid Al Muchlis	Tanjung 4 A RT. 20 Dusun IV Desa Tanjung Kec. Bajuin	17,500,000
32	Masjid Al Hijriyah	Dusun Plasma Desa Pulau Sari RT. 01 RW. 03 Kec. Tambang Ulang	150,000,000
33	Lembaga Adat Mekar Sari	Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar	140,000,000
34	Masjid Jami Al Falah	Jl. A Yani RT. 01/01 Desa Gunung Raja Kec. Tambang Ulang	70,000,000
35	Masjid Al Faizin	Desa Handil Birayang Atas RT. 03 RW. 02 Kec. Bumi Makmur	70,000,000
36	Yayasan Maarif Nahdlatul Ulama Kal-Sel Cabang Batu Ampar	Jl. Imam Bonjol RT. 05 Desa Durian Bungkok Kec. Batu Ampar	140,000,000
37	Pengurus Masjid Jami At Taqwa Panyipatan	Desa Panyipatan Kec. Panyipatan	105,000,000
38	Pengurus Kelompok Habsyi Ahaburrasul	Jl. Merdeka RT. 04 RW. 01 Desa Tirta Jaya Kec. Bajuin	7,000,000
39	Masjid Nurul Hidayah	Desa Handil Birayang Bawah RT. 05 RW. 02 Kec. Bumi Makmur	52,500,000
40	Masjid Darul Muslimin	Desa Handil Suruk RT. 03 RW. 01 Kec. Bumi Makmur	52,500,000
41	Masjid Nurul Huda	Jl. Hang Tuah RT. 01 RW. 01 Desa Swarangan Kec. Jorong	105,000,000
42	Masjid Raudhatul Ridhwan	Jl. Swadaya Desa Padang Luas RT. 02 RW. 01 Kec. Kurau	45,500,000
43	Langgar Taufiqurrahman	Jl. Subarang / Bawah Sawo RT. 10 / 3 Desa Jorong Kec. Jorong	70,000,000
44	Masjid Al Muhajirin	Dusun Sidomukti RT. 16 Desa Sebuhr Kec. Jorong	157,500,000
45	Majelis Ta'lim Ihyamul Ulum	Jl. H. M. Sarbini Desa Durian Bungkok Kec. Batu Ampar	80,000,000
46	Masjid At Taqwa	Desa Bawah Layung RT. 13 RW. 04 Kec. Kurau	35,000,000
47	Kelompok Maulid Habsyi Nurul Mu'Min	Desa Sumber Mulia Kecamatan Pelaihari	105,000,000

NO	NAMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
48	BKPRMI Kec. Kintap	Desa Kintapura Kec. Kintap	35,000,000
49	Yayasan Al Hasyimiyyah Kintap	Desa Pasir Putih Kec. Kintap	24,500,000
50	Pengurus Majelis Ta'lim As Sanusiyyah	Desa Bati-Bati Kec. Bati-Bati	35,000,000
51	Kelompok Maulid Habsyi Al Muna	Desa Handil Birayang Atas Kec. Bumi Makmur	21,000,000
52	Yayasan Pesantren Ubudiyah	Desa Padang Kec. Bati-Bati	52,500,000
53	Group Maulid Habsyi An Noor	Desa Handil Birayang Bawah Kec. Bumi Makmur	24,500,000
54	Majelis Ta'lim Al Dzikra	Desa Handil Babirik Kec. Bumi Makmur	42,000,000
55	Pengelola Masjid Darussaa'dah	Desa Handil Gayam Kec. Bumi Makmur	14,000,000
56	Karang Taruna "Bina Remaja"	Desa Kandungan Lama Kec. Panyipatan	35,000,000
57	Karang Taruna "Harapan Bersama"	Desa Kuringkit Kec. Panyipatan	28,000,000
58	Majelis Ta'lim Asy-Syekh H. M. Thaher	Desa Tanjung Dewa Kec. Panyipatan	24,500,000
59	Majelis Ta'lim At Taqwa	Jl. Datu Timang RT 006 / 02 Desa Jorong Kec. Jorong	30,000,000
60	Yayasan Al Muhajirin	Desa Martabah Kec. Tambang Ulang	35,000,000
61	DPC IKMADA Kalsel Cabang Tanah Laut	Desa Batakan Kec. Panyipatan	21,000,000
62	Badan Pengelola Masjid Al Ikhlas	Komplek Kijang Mas Permai Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari	126,000,000
JUMLAH			4,723,250,000

SASARAN 2 Meningkatnya Peran Organisasi/Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial

Indikator : Persentase Layanan Kesejahteraan Sosial Bagi Lembaga Pendidikan Keagamaan

NO	SASARAN STRATEGIS /KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
2	Meningkatnya peran Organisasi/lembaga pendidikan keagamaan dan kesejahteraan sosial	Persentase layanan kesejahteraan sosial bagi lembaga pendidikan keagamaan	100%	99,83%	99,94%	Bagian Kesejahteraan Rakyat Mengampu misi ke-3 "Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Layanan Bagian Kesejahteraan Rakyat semakin banyak tahun demi tahun, ini dilihat dari banyaknya bangunan sekolah-sekolah keagamaan dan juga guru-guru TK/TPA,

Madin/MIS, dan Pondok Pesantren. Jumlah guru-guru agama se Kabupaten yang dapat insentif berjumlah 3.090 orang dari Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Kurangnya komunikasi antara guru dengan Kepala sekolah atau Dewan Pengurus Kecamatan BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH.
- Dewan Pengurus Kabupaten BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH harus menginformasikan kepada kepala sekolah, Koordinator Kecamatan untuk mendata ulang TKA/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan PAH yang benar benar bersedia menjadi Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah

- Meminta kepada DPK BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH mengaktifkan kembali rapat rutin bulan pada setiap kecamatan.
- DPK BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH harus aktif menanyakan kepada Kepala sekolah tentang aktivitas guru-guru pengajar

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Menambah kegiatan monitoring tempat TPA, Madin, Ponpes dan PAH



Foto kegiatan monitoring ke sekolah TPA, Madin dan Pondok Pesantren



Foto kegiatan lembaga pendidikan keagamaan

Daftar Guru Honorer TPA, Madin, Ponpes, Penyuluh Islam, Penyuluh Hindu dan Penyuluh Kristen Lingkup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020

NO	DATA PTT TAHUN 2020	JUMLAH GURU TPA	JUMLAH GURU MADIN	JUMLAH GURU PONPES	JUMLAH PENYULUH ISLAM	JUMLAH PENYULUH HINDU	JUMLAH PENYULUH KRISTEN
1	Pelaihari	439/437	31	125	48	4	7
2	Bajuin	122	-	-	16	-	3
3	Panyipatan	111/110	65	25	20	-	3
4	Takisung	160	48	17	18	-	-
5	Batu Ampar	206	7/6	28	19	4	5
6	Jorong	151	56	57	12	-	-
7	Kintap	209	60	60	20	4	-
8	Tambang Ulang	110/109	24	15	15	-	-
9	Kurau	99	19	12	10	-	-
10	Bumi Makmur	113	57	-	10	-	-
11	Bati Bati	163	99	162	22	-	-
JUMLAH		1879	465	501	210	12	18

SASARAN 3 Meningkatnya Peran Organisasi/Lembaga Keagamaan/SKPD Bidang Pemuda dan Olahraga

Indikator : Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga

NO	SASARAN STRATEGIS /KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
3	Meningkatnya peran Organisasi/ Lembaga Keagamaan/SKPD Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	100%	11,77%	11,77%	Bagian Kesejahteraan Rakyat Mengampu misi ke-3 "Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)"

Layanan Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan organisasi/lembaga keagamaan dan SKPD terkait, seperti :

- Peringatan hari-hari besar/penting keagamaan
- Penyelenggaraan MTQ tingkat Kabupaten dan mengikuti MTQ tingkat Provinsi
- Fasilitasi penyelenggaraan Ibadah Haji bagi Jamaah Haji Kab. Tanah Laut
- Penyelenggaraan MQK tingkat Kabupaten dan mengikuti MQK tingkat Provinsi
- Penyelenggaraan Peringatan Hari Santri Nasional di Kabupaten
- Penyelenggaraan even-even dalam rangkaian perayaan hari jadi Kabupaten

Dalam melaksanakan indikator tersebut di atas menghadapi beberapa kendala antara lain:

- Kurang terjalannya koordinasi yang baik dengan organisasi/lembaga keagamaan maupun dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
- Adanya wabah/pandemi covid-19 yang melanda seluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Tanah Laut yang menyebabkan banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah

- Menjalin koordinasi yang baik dengan organisasi/lembaga keagamaan maupun dengan instansi terkait.
- Berharap pandemi covid-19 dapat berakhir atau berkurang sehingga seluruh kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

Meningkatkan dan menjalin koordinasi dengan semua pihak terkait serta menyusun rencana kegiatan dengan baik.

❖ **Analisis Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia**

- 1) Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelaksanaan layanan keagamaan yang ditindaklanjuti Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan indikator presentase pelayanan keagamaan pada program pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kesejahteraan rakyat, dengan pagu Rp 131.869.000,- terealisasi Rp 81.439.800,- dengan realisasi keuangan 61,75% dan dilaksanakan oleh 3 (Tiga) orang SDM yaitu Kepala Bagian, Kasubbag Sosial dan Kebudayaan serta administrasian umum.
- 2) Untuk mencapai sasaran meningkatkan kualitas pelaksanaan layanan bantuan sosial keagamaan yang ditindaklanjuti Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan indikator presentase pelayanan bantuan sosial keagamaan pada program pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kesejahteraan rakyat, dengan pagu Rp 19.642.390.800,- terealisasi Rp 18.500.675.600,- dengan realisasi keuangan 94,18% dan dilaksanakan oleh 7 (Tujuh) orang SDM yaitu Kepala Bagian, Kasubbag Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat dan Kasubbag Pendidikan dan Agama, Penyusun data pendidikan agama dan keagamaan, Pengelola kegiatan survey dan perencanaan, Pengelola bantuan keagamaan, Penyusunan data pendidikan agama dan keagamaan dan pengelola bimbingan kemasyarakatan

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	SDM	Ket
1	Persentase kerukunan umat beragama	program pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kesejahteraan rakyat	131.869.000	81.439.800	61,75%	- Kabag Kesra - Kasubbag Sosial dan Kebudayaan - Pengadministrasian	
2	Persentase layanan kesejahteraan sosial bagi lembaga pendidikan keagamaan	program pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kesejahteraan rakyat	19.642.390.800	18.500.675.600	94,1%	- Kabag Kesra - Kasubbag kemasyarakatan dan Kesra - Pengelola kegiatan survey dan perencanaan - Pengelola bantuan keagamaan	

						- pengelola bimbingan kemasyarakatan	
3	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	program pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kesejahteraan rakyat	1.156.975.600	136.185.400	11,77%	- Kabag Kesra - Kasubbag Pendidikan dan agama - Penyusun data pendidikan agama dan keagamaan - Pengadministrasi umum pendidikan agama dan keagamaan	

❖ Kepala Sub Bagian Sosial dan Kebudayaan

Untuk capaian indikator sasaran pada kasubbag Sosial dan Kebudayaan dilaksanakan melalui program :

Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Rakyat pada kegiatan Pembinaan, pengembangan, Pemberdayaan Sosial dan Kebudayaan dengan pagu Rp 131.869.000,- terealisasi Rp 81.439.800,- dengan realisasi keuangan 61,75%, sebagian kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya covid 19, kegiatan fasilitasi ini di dilaksanakan oleh 3 (Tiga) orang SDM yaitu Kepala Bagian, Kasubbag Sosial dan Kebudayaan serta administrasian umum.

Tabel Sasaran dan Indikator Kasubbag Sosial dan Kebudayaan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Memberikan fasilitasi kepada masyarakat berupa hibah, koordinasi dan kegiatan bidang sosial dan kebudayaan	Jumlah dokumen hibah yang masuk secara tepat syarat	73 Dokumen	62 Dokumen	84,93%	Kasubag Sosial dan Kebudayaan
		Jumlah kegiatan bidang sosial yang difasilitasi	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%	Kasubag Sosial dan Kebudayaan
		Jumlah organisasi/ lembaga sosial keagamaan yang diberikan bantuan hibah	73 Organisasi/ lembaga	62 Organisasi/ lembaga	84,93%	Kasubag Sosial dan Kebudayaan

SASARAN 1 Memberikan Fasilitas Kepada Masyarakat Berupa Hibah, Koordinasi dan Kegiatan Bidang Sosial dan Kebudayaan

Indikator 1 : Jumlah Dokumen Hibah yang Masuk Secara Tepat Syarat

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Memberikan fasilitas kepada masyarakat berupa hibah, koordinasi dan kegiatan bidang sosial dan kebudayaan	Jumlah dokumen hibah yang masuk secara tepat syarat	73 Dokumen	62 Dokumen	84,93%	Kasubag Sosial dan Kebudayaan

Tahun 2020, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui 1 (satu) Program yaitu Pembinaan, Pengembangan, dan Pemberdayaan Kesejahteraan Rakyat yaitu Kegiatan Pembinaan, Pengembangan, Pemberdayaan sosial dan kebudayaan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp 131.869.000,- dan terealisasi sebesar Rp 81.439.800,- dengan persentasi 61,8% dengan dokumen hibah berjumlah 73 dokumen, kegiatan sosial yang difasilitasi berjumlah 1 Kegiatan, jumlah organisasi/lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi berdasarkan permohonan bantuan hibah melalui proposal sebanyak 73 lembaga/organisasi keagamaan dan diberikan bantuan hibah berjumlah 62 organisasi/lembaga dan 11 organisasi/lembaga yang tidak mencairkan. Realisasi capaian indikator adalah 84,93%.

Daftar Penerima Hibah

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut
Tahun Anggaran 2020 Hibah Uang yang Direkomendasikan Oleh
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

NO	NAMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	Langgar Darul Muttaqin	Jl. Dahlia RT. 13 Dusun IV Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung	42,000,000
2	Yayasan Nurul Adzula m	Desa Benua Tengah RT. 01/01 Dusun 01 Kecamatan Takisung	105,000,000
3	Masjid Nurul Iman	Jl. Sungai Kembang RT. 09 Desa Gunung Makmur	17,500,000
4	Langgar Al Akhdari	Jl. Basuki Rahmat RT. 26 RW. 07 Kel. Angsau Kec. Pelabuhan	10,000,000
5	Kelompok Rukun Kematian Cendana Putih	Jl. Jend Sudirman RT. 03 RW. 01 Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung	7,000,000



6	Yayasan Pondok Pesantren Darussalim Bati-Bati	Jl. Pahlawan RT. 08 RW. III No. 43 Kec. Bati-Bati	210,000,000
7	Langgar Arrahman	Desa Sumber Makmur RT. 09 RW. 05 Kec. Takisung	25,000,000
8	Perkumpulan Rukun Kematian Lingkungan Langgar Darul Muttaqien	Jl. Perintis Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari	35,000,000
9	Majelis Jemaat Sion Katunun	Jl. Katunun RT. 09 RW. 03 Desa Telaga Kec. Pelaihari	35,000,000
10	Yayasan An Nur Fattah	Jl. Niaga Gang Baru RT. 13 RW. 04 Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari	52,500,000
11	Yayasan Ponpes Darul Muslim	Jl. Raya Takisung RT. 02 Desa Ranggung Kec. Takisung	280,000,000
12	Majelis Maulid Habsyi Al Iklas	Jl. Ambawang RT. 04 Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari	7,000,000
13	Pengurus Group Al-Habsyi Al Ikhlas	Desa Gunung Makmur Kec. Takisung	5,250,000
14	Langgar Attaubah	Desa Bumi Jaya RT. 01 A/Dusun 01 Kec. Pelaihari	15,000,000
15	Langgar Hubbul Mustofa	Komp. Karunia Kembar 1 RT. 07 C RW. 03 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari	14,000,000
16	Majelis Ta'lim Al Kautsar	Jl. A Yani Km. 4 Kel. Pabahanan Kec. Pelaihari	35,000,000
17	Masjid Hidayatussalikim	Desa Telaga RT. 06 RW. 01 Kec. Pelaihari	70,000,000
18	Masjid Darul Istiqomah	Desa Bumi Jaya RT. 03 A / Dusun 01 Kec. Pelaihari	140,000,000
19	Baznaz Tanah Laut	Jl. Sapta Marga No. 06 RT. 07 Pelaihari	175,000,000
20	Pimpinan Daerah Aisyiyah Tanah Laut	Jl. Matah 1 RT. 06 No. 43 Kel. Karang Taruna	70,000,000
21	Masjid At Taqwa	Dusun 2 Jayau RT. 09 / 02 Desa Ambungan Kec. Pelaihari	105,000,000
22	Gerakan Pemuda Ansor Kab. Tanah Laut	Jl. Samudera RT. 10 / IV Pelaihari	105,000,000
23	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tanah Laut	Komplek Perguruan Muhammadiyah Jl. A Yani Km. 59 Panggung Pelaihari	280,000,000
24	Yayasan Pesantren Assyuhada	Jl. Abadi RT. 03 RW. 01 Kec. Pelaihari	280,000,000
25	PWRI Kabupaten Tanah Laut	Jl. A Syairani Komp Perkantoran Gagah (Gedung Juang) Pelaihari	70,000,000
26	Yayasan Raudhatul Mustarsyidin	Desa Kintap Kecil Kec. Kintap	250,000,000
27	Masjid Attaqwa	Jl. Dewata Desa Jilatan RT. 06 Dusun 02 Kec. Batu Ampar	52,500,000
28	Yayasan Darul Amanah Pandahan	Jl. A Yani Km. 29 RT. 07 Desa Pandahan Kec. Bati-Bati	105,000,000
29	Masjid Jami Al Falah	Desa Banyu Irang Kec. Bati-Bati	140,000,000
30	Majelis Ta'lim Ar Raudoh	JL. Pesantren Komplek Al Karomah RT. 08 RW. 03 Desa Bati-Bati Kec. Bati-Bati	35,000,000
31	Masjid Al Muchlis	Tanjung 4 A RT. 20 Dusun IV Desa Tanjung Kec. Bajuin	17,500,000
32	Masjid Al Hijriyah	Dusun Plasma Desa Pulau Sari RT. 01 RW. 03 Kec. Tambang Ulang	150,000,000
33	Lembaga Adat Mekar Sari	Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar	140,000,000
34	Masjid Jami Al Falah	Jl. A Yani RT. 01/01 Desa Gunung Raja Kec. Tambang Ulang	70,000,000
35	Masjid Al Faizin	Desa Handil Birayang Atas RT. 03 RW. 02 Kec. Bumi Makmur	70,000,000
36	Yayasan Maarif Nahdlatul Ulama Kal-Sel Cabang Batu Ampar	Jl. Imam Bonjol RT. 05 Desa Durian Bungkok Kec. Batu Ampar	140,000,000



37	Pengurus Masjid Jami At Taqwa Panyipatan	Desa Panyipatan Kec. Panyipatan	105,000,000
38	Pengurus Kelompok Habsyi Ahaburrasul	Jl. Merdeka RT. 04 RW. 01 Desa Tirta Jaya Kec. Bajuin	7,000,000
39	Masjid Nurul Hidayah	Desa Handil Birayang Bawah RT. 05 RW. 02 Kec. Bumi Makmur	52,500,000
40	Masjid Darul Muslimin	Desa Handil Suruk RT. 03 RW. 01 Kec. Bumi Makmur	52,500,000
41	Masjid Nurul Huda	Jl. Hang Tuah RT. 01 RW. 01 Desa Swarangan Kec. Jorong	105,000,000
42	Masjid Raudhatul Ridhwan	Jl. Swadaya Desa Padang Luas RT. 02 RW. 01 Kec. Kurau	45,500,000
43	Langgar Taufiqurrahman	Jl. Subarang / Bawah Sawo RT. 10 / 3 Desa Jorong Kec. Jorong	70,000,000
44	Masjid Al Muhajirin	Dusun Sidomukti RT. 16 Desa Sebuher Kec. Jorong	157,500,000
45	Majelis Ta'lim Ihyamul Ulum	Jl. H. M. Sarbini Desa Durian Bungkok Kec. Batu Ampar	80,000,000
46	Masjid At Taqwa	Desa Bawah Layung RT. 13 RW. 04 Kec. Kurau	35,000,000
47	Kelompok Maulid Habsyi Nurul Mu'Min	Desa Sumber Mulia Kecamatan Pelaihari	105,000,000
48	BKPRMI Kec. Kintap	Desa Kintapura Kec. Kintap	35,000,000
49	Yayasan Al Hasyimiyyah Kintap	Desa Pasir Putih Kec. Kintap	24,500,000
50	Pengurus Majelis Ta'lim As Sanusiyyah	Desa Bati-Bati Kec. Bati-Bati	35,000,000
51	Kelompok Maulid Habsyi Al Muna	Desa Handil Birayang Atas Kec. Bumi Makmur	21,000,000
52	Yayasan Pesantren Ubudiyah	Desa Padang Kec. Bati-Bati	52,500,000
53	Group Maulid Habsyi An Noor	Desa Handil Birayang Bawah Kec. Bumi Makmur	24,500,000
54	Majelis Ta'lim Al Dzakra	Desa Handil Babirik Kec. Bumi Makmur	42,000,000
55	Pengelola Masjid Darussaa'dah	Desa Handil Gayam Kec. Bumi Makmur	14,000,000
56	Karang Taruna "Bina Remaja"	Desa Kandangan Lama Kec. Panyipatan	35,000,000
57	Karang Taruna "Harapan Bersama"	Desa Kuringkit Kec. Panyipatan	28,000,000
58	Majelis Ta'lim Asy-Syekh H. M. Thaher	Desa Tanjung Dewa Kec. Panyipatan	24,500,000
59	Majelis Ta'lim At Taqwa	Jl. Datu Timang RT 006 / 02 Desa Jorong Kec. Jorong	30,000,000
60	Yayasan Al Muhajirin	Desa Martabah Kec. Tambang Ulang	35,000,000
61	DPC IKMADA Kalsel Cabang Tanah Laut	Desa Batakan Kec. Panyipatan	21,000,000
62	Badan Pengelola Masjid Al Ikhlas	Komplek Kijang Mas Permai Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari	126,000,000
63	Perkumpulan Maulid Habsyi Haqqul Yaqin	Jl. Datu Daim Gg. Jambu RT. 28 RW. 02 Kec. Pelaihari	10.500.000
64	Langgar Darunnajah	Jl. Al Fatah RT. 27 RW. 08 Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari	14.000.000
65	Kumpulan Maulid Habsyi Al Insyirah	Jl. Datu Daim Gg. Jambu RT. 28 RW. 02 Kec. Pelaihari	14.000.000
66	Majelis Ta'lim dan Dzikir Hidayatul Ikhlas Wal Istiqomah	Jl. Kaca Piring RT. 2 Desa Panyipatan Kec. Panyipatan	280.000.000
67	Karang Taruna Tunas Remaja	Desa Durian Bungkok Kec. Batu Ampar	35.000.000
68	Pengurus Kelompok Maulid Habsyi Al Kautsar	Desa Ketapang Kec. Bajuin	21.000.000
69	Yayasan Bukit Sanghiang	Desa Benua Tengah RT. 10 Dusun 04 Kec. Takisung	103.320.000
70	Majelis Ta'lim Haqqul Yaqin	Jalan Datu Daim Pelaihari	21.000.000

71	Kelompok Maulid Habsyi Al Jannah	Desa Handil Birayang Bawah Kec. Bumi Makmur	17.500.000
72	Majelis Ta'lim Qur'an Wadda'wah	Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur	21.000.000
73	Lembaga Adat Kayuh Baimbay	Desa Tambang Ulang Kec. Tambang Ulang	35.000000
JUMLAH			5.296.570.000

Daftar Penerima Hibah Yang Tidak Mencairkan
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut
Tahun Anggaran 2020 Hibah Uang

NO	NAMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	Perkumpulan Maulid Habsyi Haqqul Yaqin	Jl. Datu Daim Gg. Jambu RT. 28 RW. 02 Kec. Pelaihari	10.500.000
2	Langgar Darunnajah	Jl. Al Fatah RT. 27 RW. 08 Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari	14.000.000
3	Kumpulan Maulid Habsyi Al Insyirah	Jl. Datu Daim Gg. Jambu RT. 28 RW. 02 Kec. Pelaihari	14.000.000
4	Majelis Ta'lim dan Dzikir Hidayatul ikhlas Wal Istiqomah	Jl. Kaca Piring RT. 2 Desa Panyipatan Kec. Panyipatan	280.000.000
5	Karang Taruna Tunas Remaja	Desa Durian Bungkok Kec. Batu Ampar	35.000.000
6	Pengurus Kelompok Maulid Habsyi Al Kautsar	Desa Ketapang Kec. Bajuin	21.000.000
7	Yayasan Bukit Sanghiang	Desa Benua Tengah RT. 10 Dusun 04 Kec. Takisung	103.320.000
8	Majelis Ta'lim Haqqul Yaqin	Jalan Datu Daim Pelaihari	21.000.000
9	Kelompok Maulid Habsyi Al Jannah	Desa Handil Birayang Bawah Kec. Bumi Makmur	17.500.000
10	Majelis Ta'lim Qur'an Wadda'wah	Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur	21.000.000
11	Lembaga Adat Kayuh Baimbay	Desa Tambang Ulang Kec. Tambang Ulang	35.000000
JUMLAH			572.320.000

Untuk tercapainya indikator target sasaran perlu dilakukan laporan kinerja para Pengurus Masjid, Pengurus Langgar/Musholla, Pengurus Pondok Pesantren, Pengurus Majelis Ta'lim, Pengurus TK Alqur'an sebagai peneriman bantuan hibah pemerintah daerah minimal 10 komponen sebagai berikut :

- 1) Menerima proposal dari pengurus Masjid, Pengurus Langgar/Musholla, Pengurus Pondok Pesantren, Pengurus Madrasah Diniyah, Pengurus TK Alquran dan meneliti kelengkapan administrasi proposal bantuan hibah sesuai peraturan pemberian hibah daerah sesuai usulan 73 dokumen yang terdiri dari fisik dan kegiatan
- 2) Memonitoring usulan proposal yang telah masuk ke Bagian Kesra Setda Tanah Laut dengan mengecek langsung datang ke tempat Pemohon proposal dimana tempat lokasi tanah yang akan dibangun tempat pendidikan agama, ruang induk mesjid/langgar/musholla sesuai dengan Proposal/RAB yang telah disampaikan.

- 3) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim Evaluasi Bantuan Hibah untuk menyeleksi dan memverifikasi proposal yang telah masuk sesuai aturan sebanyak 73 lembaga/organisasi sosial keagamaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan pemberian hibah daerah .
- 4) Memberitahukan kepada semua penerima bantuan hibah untuk memperbaiki proposalnya dan segera memberitahukan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk ditindak lanjuti kepada Tim Evaluasi Bantuan Hibah agar dipertimbangkan diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- 5) Berdasarkan hasil laporan Tim Evaluasi Bantuan Hibah setelah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap proposal ditetapkan sebanyak 62 lembaga/organisasi yang bisa dicairkan dana hibahnya.
- 6) Sedangkan Ada 11 proposal lembaga / organisasi keagamaan yang tidak bisa mencairkan dana hibahnya disebabkan wabah virus covid 19 dan juga permintaan pengurus untuk tidak mencairkan.

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran diatas sebagai berikut :

- Kurangnya pemahaman dari pemohon dari Lembaga Pendidikan/Organisasi Sosial Keagamaan untuk kelengkapan dalam pengajuan proposal hibah.
- Lambatnya dalam pencairan dana hibah, karena administrasi dari pemohon proposal hibah yang tidak lengkap.
- Permintaan RAB Proposal yang diinginkan beda dengan yang mau dilaksanakan dilapangan.
- Sebelum dana hibah dari pemerintah daerah cair ternyata Lembaga/organisasi sudah selesai melaksanakan RAB proposal permohonan hibahnya.
- Kegiatan proposal tidak dapat dilaksanakan karena masa pandemi Covid 19.
- Kurangnya ketaatan dalam mengspjkan dana hibah.

Solusi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan tersebut yakni :

- Sosialisasi kepada calon penerima hibah, dan meminta kepada pejabat desa dan kecamatan untuk menyampaikan syarat-syarat proposal yang sudah di tentukan.
- Sebelum menyerahkan proposal hibah ke pemerintah daerah terlebih dahullu musyawarah pengurus dan warga setempat berkaitan dengan fisik hibah

- Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas realisasi kemajuan pelaksanaan hibah kepada pemohon proposal secara berkelanjutan serta pengawasan terus menerus.
 - Meningkatkan koordinasi yang intensif kepada pejabat atau instansi terkait
- Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :
- Perlunya bimbingan kepada pengurus organisasi/lembaga memohon dan didampingi orang yang membuat proposal hibah.

Indikator 2 : Jumlah Kegiatan Bidang Sosial yang Difasilitasi

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Memberikan fasilitasi kepada masyarakat berupa hibah, koordinasi dan kegiatan bidang sosial dan kebudayaan	Jumlah kegiatan bidang sosial yang difasilitasi	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%	Kasubag Sosial dan Kebudayaan

- 1) Untuk capaian indikator target sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan berkaitan dengan usaha kesehatan sekolah (UKS) tidak bisa dilaksanakan karena adanya wabah virus covid 19 dan juga dana untuk kegiatan usaha kesehatan sekolah dialihkan kegiatan covid 19.
- 2) - Untuk tercapainya indikator target sasaran jumlah kegiatan yang difasilitasi, perlu dilakukan pertemuan semua pengurus penerima hibah tahun 2020 untuk melakukan sosialisasi membuat hibah yang sesuai dengan persetujuan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon hibah dan
 - kemudian rapat pembuatan laporan kinerja dan Pelaporan keuangan yang sesuai dengan dana yang diberikan kepada pemohon Pengurus Masjid, Pengurus Langgar/Musholla, Pengurus Pondok Pesantren, Pengurus Majelis Ta'lim, Pengurus TK Alqur'an sebagai penerima bantuan hibah pemerintah daerah perlu diberikan sosialisasi berkaitan pertanggungjawaban dana yang diberikan pemerintah

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran diatas sebagai berikut :

- Kurangnya pemahaman dari pemohon dari Lembaga Pendidikan/Organisasi Sosial Keagamaan untuk kelengkapan dalam pengajuan proposal hibah.

- Lambatnya dalam pencairan dana hibah, karena administrasi dari pemohon proposal hibah yang tidak lengkap.
- Permintaan RAB Proposal yang diinginkan beda dengan yang mau dilaksanakan dilapangan.
- Sebelum dana hibah dari pemerintah daerah cair ternyata Lembaga/organisasi sudah selesai melaksanakan RAB proposal permohonan hibahnya.
- Kegiatan proposal tidak dapat dilaksanakan karena masa pendemi Covid 19.
- Kurangnya ketaatan dalam mengspjkan dana hibah.

Solusi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan tersebut yakni :

- Sosialisasi kepada calon penerima hibah, dan meminta kepada pejabat desa dan kecamatan untuk menyampaikan syarat-syarat proposal yang sudah di tentukan.
- Sebelum menyerahkan proposal hibah ke pemerintah daerah terlebih dahullu musyawarah pengurus dan warga setempat berkaitan dengan fisik hibah
- Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas realisasi kemajuan pelaksanaan hibah kepada pemohon proposal secara berkelanjutan serta pengawasan terus menerus.
- Meningkatkan koordinasi yang intensif kepada pejabat atau instansi terkait

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Perlunya bimbingan kepada pengurus organisasi/lembaga memohon dan didampingi orang yang membuatkan proposal hibah.

Kegiatan Sosialisasi masalah hibah fisik maupun hibah kegiatan tahun 2020



Indikator 3 : Jumlah Organisasi/Lembaga Sosial Keagamaan yang Diberikan Bantuan Hibah

Jumlah Proposal yang memenuhi syarat untuk menerima hibah daerah pada tahun

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Memberikan fasilitasi kepada masyarakat berupa hibah, koordinasi dan kegiatan bidang sosial dan kebudayaan	Jumlah organisasi/ lembaga sosial keagamaan yang diberikan bantuan hibah	73 Organisasi/ lembaga	62 Organisasi/ lembaga	84,93%	Kasubag Sosial dan Kebudayaan

2020 berjumlah 73 buah proposal dan sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah jumlah dana setiap proposal menerima hibah, Setiap dana yang diusulkan pemohon dalam proposal terhadap pemerintah daerah yang disetujui tidak semua usulan mereka dikabulkan jumlahnya.

Pada tahun 2020 hibah yang mencairkan berjumlah sebanyak 62 proposal dengan jumlah dana sebesar Rp. **4.723.250.000** (Empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sebesar **Rp. 5.296.570.000** (Lima Miliar dua ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedang kan jumlah proposal yang tidak mencairkan dana hibahnya sebanyak 11 buah dengan jumlah dana sebesar Rp. **572.320.000** (Lima Ratus tujuh Puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), di sebabkan bangunan yang di minta sudah ada dibangunannya yang dibangun oleh swadaya masyarakat dan 10 kegiatan yang diminta tidak bisa dilaksanakan dikarenakan pandemi virus covid 19.

NO	NAMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	Langgar Darul Muttaqin	Jl. Dahlia RT. 13 Dusun IV Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung	42,000,000
2	Yayasan Nurul Adzula m	Desa Benua Tengah RT. 01/01 Dusun 01 Kecamatan Takisung	105,000,000
3	Masjid Nurul Iman	Jl. Sungai Kembang RT. 09 Desa Gunung Makmur	17,500,000
4	Langgar Al Akhdari	Jl. Basuki Rahmat RT. 26 RW. 07 Kel. Angsau Kec. Pelaihari	10,000,000
5	Kelompok Rukun Kematian Cendana Putih	Jl. Jend Sudirman RT. 03 RW. 01 Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung	7,000,000
6	Yayasan Pondok Pesantren Darussalim Bati-Bati	Jl. Pahlawan RT. 08 RW. III No. 43 Kec. Bati-Bati	210,000,000
7	Langgar Arrahman	Desa Sumber Makmur RT. 09 RW. 05 Kec. Takisung	25,000,000
8	Perkumpulan Rukun Kematian Lingkungan Langgar Darul Muttaqien	Jl. Perintis Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari	35,000,000
9	Majelis Jemaat Sion Katunun	Jl. Katunun RT. 09 RW. 03 Desa Telaga Kec. Pelaihari	35,000,000



10	Yayasan An Nur Fattah	Jl. Niaga Gang Baru RT. 13 RW. 04 Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari	52,500,000
11	Yayasan Ponpes Darul Muslim	Jl. Raya Takisung RT. 02 Desa Ranggung Kec. Takisung	280,000,000
12	Majelis Maulid Habsyi Al Iklas	Jl. Ambawang RT. 04 Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari	7,000,000
13	Pengurus Group Al-Habsyi Al Ikhlas	Desa Gunung Makmur Kec. Takisung	5,250,000
14	Langgar Attaubah	Desa Bumi Jaya RT. 01 A/Dusun 01 Kec. Pelaihari	15,000,000
15	Langgar Hubbul Mustofa	Komp. Karunia Kembar 1 RT. 07 C RW. 03 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari	14,000,000
16	Majelis Ta'lim Al Kautsar	Jl. A Yani Km. 4 Kel. Pabahanan Kec. Pelaihari	35,000,000
17	Masjid Hidayatussalikim	Desa Telaga RT. 06 RW. 01 Kec. Pelaihari	70,000,000
18	Masjid Darul Istiqomah	Desa Bumi Jaya RT. 03 A / Dusun 01 Kec. Pelaihari	140,000,000
19	Baznaz Tanah Laut	Jl. Sapta Marga No. 06 RT. 07 Pelaihari	175,000,000
20	Pimpinan Daerah Aisyiyah Tanah Laut	Jl. Matah 1 RT. 06 No. 43 Kel. Karang Taruna	70,000,000
21	Masjid At Taqwa	Dusun 2 Jayau RT. 09 / 02 Desa Ambungan Kec. Pelaihari	105,000,000
22	Gerakan Pemuda Anzor Kab. Tanah Laut	Jl. Samudera RT. 10 / IV Pelaihari	105,000,000
23	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tanah Laut	Komplek Perguruan Muhammadiyah Jl. A Yani Km. 59 Panggung Pelaihari	280,000,000
24	Yayasan Pesantren Assyuhada	Jl. Abadi RT. 03 RW. 01 Kec. Pelaihari	280,000,000
25	PWRI Kabupaten Tanah Laut	Jl. A Syairani Komp Perkantoran Gagah (Gedung Juang) Pelaihari	70,000,000
26	Yayasan Raudhatul Mustarsyidin	Desa Kintap Kecil Kec. Kintap	250,000,000
27	Masjid Attaqwa	Jl. Dewata Desa Jilatan RT. 06 Dusun 02 Kec. Batu Ampar	52,500,000
28	Yayasan Darul Amanah Pandahan	Jl. A. Yani Km. 29 RT. 07 Desa Pandahan Kec. Bati- Bati	105,000,000
29	Masjid Jami Al Falah	Desa Banyu Irang Kec. Bati-Bati	140,000,000
30	Majelis Ta'lim Ar Raudoh	Jl. Pesantren Komplek Al Karomah RT. 08 RW. 03 Desa Bati-Bati Kec. Bati-Bati	35,000,000
31	Masjid Al Muchlis	Tanjung 4 A RT. 20 Dusun IV Desa Tanjung Kec. Bajuin	17,500,000
32	Masjid Al Hijriyah	Dusun Plasma Desa Pulau Sari RT. 01 RW. 03 Kec. Tambang Ulang	150,000,000
33	Lembaga Adat Mekar Sari	Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar	140,000,000
34	Masjid Jami Al Falah	Jl. A Yani RT. 01/01 Desa Gunung Raja Kec. Tambang Ulang	70,000,000
35	Masjid Al Faizin	Desa Handil Birayang Atas RT. 03 RW. 02 Kec. Bumi Makmur	70,000,000
36	Yayasan Maarif Nahdatul Ulama Kal-Sel Cabang Batu Ampar	Jl. Imam Bonjol RT. 05 Desa Durian Bungkok Kec. Batu Ampar	140,000,000
37	Pengurus Masjid Jami At Taqwa Panyipatan	Desa Panyipatan Kec. Panyipatan	105,000,000
38	Pengurus Kelompok Habsyi Ahaburrasul	Jl. Merdeka RT. 04 RW. 01 Desa Tirta Jaya Kec. Bajuin	7,000,000
39	Masjid Nurul Hidayah	Desa Handil Birayang Bawah RT. 05 RW. 02 Kec. Bumi Makmur	52,500,000
40	Masjid Darul Muslimin	Desa Handil Suruk RT. 03 RW. 01 Kec. Bumi Makmur	52,500,000

41	Masjid Nurul Huda	Jl. Hang Tuah RT. 01 RW. 01 Desa Swarangan Kec. Jorong	105,000,000
42	Masjid Raudhatul Ridhwan	Jl. Swadaya Desa Padang Luas RT. 02 RW. 01 Kec. Kurau	45,500,000
43	Langgar Taufiqurrahman	Jl. Subarang / Bawah Sawo RT. 10 / 3 Desa Jorong Kec. Jorong	70,000,000
44	Masjid Al Muhajirin	Dusun Sidomukti RT. 16 Desa Sebuher Kec. Jorong	157,500,000
45	Majelis Ta'lim Ihyamul Ulum	Jl. H. M. Sarbini Desa Durian Bungkok Kec. Batu Ampar	80,000,000
46	Masjid At Taqwa	Desa Bawah Layung RT. 13 RW. 04 Kec. Kurau	35,000,000
47	Kelompok Maulid Habsyi Nurul Mu'Min	Desa Sumber Mulia Kecamatan Pelaihari	105,000,000
48	BKPRMI Kec. Kintap	Desa Kintapura Kec. Kintap	35,000,000
49	Yayasan Al Hasyimiyyah Kintap	Desa Pasir Putih Kec. Kintap	24,500,000
50	Pengurus Majelis Ta'lim As Sanusiyyah	Desa Bati-Bati Kec. Bati-Bati	35,000,000
51	Kelompok Maulid Habsyi Al Muna	Desa Handil Birayang Atas Kec. Bumi Makmur	21,000,000
52	Yayasan Pesantren Ubudiyah	Desa Padang Kec. Bati-Bati	52,500,000
53	Group Maulid Habsyi An Noor	Desa Handil Birayang Bawah Kec. Bumi Makmur	24,500,000
54	Majelis Ta'lim Al Dzikra	Desa Handil Babirik Kec. Bumi Makmur	42,000,000
55	Pengelola Masjid Darussaa'dah	Desa Handil Gayam Kec. Bumi Makmur	14,000,000
56	Karang Taruna "Bina Remaja"	Desa Kandangan Lama Kec. Panyipatan	35,000,000
57	Karang Taruna "Harapan Bersama"	Desa Kuringkit Kec. Panyipatan	28,000,000
58	Majelis Ta'lim Asy-Syekh H. M. Thaher	Desa Tanjung Dewa Kec. Panyipatan	24,500,000
59	Majelis Ta'lim At Taqwa	Jl. Datu Timang RT 006 / 02 Desa Jorong Kec. Jorong	30,000,000
60	Yayasan Al Muhajirin	Desa Martabah Kec. Tambang Ulang	35,000,000
61	DPC IKMADA Kalsel Cabang Tanah Laut	Desa Batakan Kec. Panyipatan	21,000,000
62	Badan Pengelola Masjid Al Ikhlas	Komplek Kijang Mas Permai Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari	126,000,000
JUMLAH			4,723,250,000

❖ Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Agama

Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Rakyat pada kegiatan Pembinaan, pengembangan, Pemberdayaan Pendidikan dan Agama dengan pagu Rp 1.156.975.600,- terealisasi Rp 136.185.400,- dengan realisasi keuangan 11,77%, sebagian kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya covid 19, kegiatan fasilitasi ini di dilaksanakan oleh 5 (Lima) orang SDM yaitu Kepala Bagian, Kasubbag Pendidikan dan Agama, Penyusun data pendidikan agama dan keagamaan, Pengelola kegiatan survey dan perencanaan Pengelola bantuan keagamaan, dan keagamaan pengelola bimbingan kemasyarakatan

Tabel Sasaran dan Indikator Kasubbag Pendidikan dan Agama

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Melakukan pengawasan terhadap pendidikan keagamaan	Jumlah pendidikan keagamaan yang dibina	2 Pendidikan	2 Pendidikan	100%	Kasubag Pendidikan dan Agama
2	Melakukan kegiatan keagamaan	Jumlah organisasi/lembaga keagamaan yang dibantu untuk kegiatan keagamaan	4 Organisasi/ lembaga	4 Organisasi/ lembaga	100%	Kasubag Pendidikan dan Agama

SASARAN 1 Melakukan Pengawasan Terhadap Pendidikan Keagamaan

Indikator : Jumlah Pendidikan Keagamaan yang Dibina

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Melakukan pengawasan terhadap pendidikan keagamaan	Jumlah pendidikan keagamaan yang dibina	2 Pendidikan	2 Pendidikan	100%	Kasubag Pendidikan Dan Agama

Tahun 2020, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui 1 (satu) Program yaitu Pembinaan, Pengembangan, dan Pemberdayaan Kesejahteraan Rakyat melalui kegiatan : Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan pemberdayaan pendidikan dan agama dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp 1.156.975.600,- dan terealisasi sebesar Rp 136.185.400,- dengan persentasi 11,77%.

Selanjutnya indikator sasaran yaitu jumlah pendidikan dan keagamaan yang dibina yaitu 2 (dua) Lembaga Pendidikan yakni Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) dengan jumlah 69 unit dan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) dengan jumlah 26 pondok pesantren yang terdaftar di Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Bahwa untuk mendukung tercapainya indikator target sasaran perlu dilakukan oleh lembaga pendidikan keagamaan dengan komponen :

- 1) Melaksanakan kunjungan langsung ke beberapa sekolah Madrasah Diniyah Takmiliyah yang ada di kabupaten tanahh laut dan melaporkan langsung kepada Pengurus FKDT kabupaten, Pengurus Forum Komunikasi Pondok Pesantren

(FKPP) Kabupaten Tanah Laut dengan unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

- 2) Jumlah sekolahan Madrasah Diniyah/Madrasah Ibtidayah swasta berjumlah 69 unit dengan jumlah ustadz dan ustadzah berjumlah 466 orang yang dapat insentif dari Pemerintah Daerah.
- 3) Jumlah sekolah pondok Pesantren yang terdaftar di Bagian kesejahteraan rakyat berjumlah 26 unit dengan jumlah ustadz dan ustadzah nya yang dapat insentif dari pemerintah daerah sebanyak 501 orang

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai mencapai sasaran diatas sebagai berikut :

- Pengurus madrasah diniyah/ madrasah Ibtidyah swasta kurang memahami bagaimana pengelolaan manajemen pendidikan sekolah.
- Pengurus Pondok Pesantren kurang memahami bagaimana pengelolaan manajemen Pondok pesantren
- Kurangnya sarana prasarana pada pendidikan madrasah diniyah/ madrasah Ibtidyah swasta dan Pondok Pesantren, baik itu fisik maupun sarana pendukung.

Solusi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan tersebut, yaitu :

- Membentuk tim monitoring dan verifikasi terhadap guru-guru agama yang di dalam dimasukkan kasi potren dan madin sebagai selaku pembina terhadap Madrasah diniyah dan pondok pesantren didalam melakukan pengelolaan maupun kurikulum pendidikan madrasah maupun pondok pesantren.
- Bagi Pengurus Madrasah diniyah/madrasah Ibtidayah swasta dan pondok pesantren kami minta untuk mendaftarkan sekolahnya ke kementarian Hukum dan Hak azasi manusia (Menkumham) dan notaris, agar sekolah yang tersebut dapat memasukkan permohonan bantuan kepada pemerintah daerah melalui bagian kesejahteraan rakyat.

Reaksi aksi perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Melaksanakan pelatihan bagi pengelola madrasah diniya dan juga pondok pesantren dalam bidang manajemen.
- Melakukan bimbingan langsung kepada madrasah atau pondok pesantren yang sudah terdaftar pada menkumham dalam membuat proposal hibah.



SASARAN 2 Melakukan kegiatan keagamaan

Indikator : Jumlah Organisasi/Lembaga Keagamaan yang Dibantu untuk Kegiatan Keagamaan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Melakukan kegiatan keagamaan	Jumlah organisasi /lembaga keagamaan yang dibantu untuk kegiatan keagamaan	4 Organisasi/ lembaga	4 Organisasi/ lembaga	100%	Kasubag Pendidikan Dan Agama

Organisasi / lembaga keagamaan yang dibantu difasilitasi untuk kegiatan keagamaan pada Program yaitu Pembinaan, Pengembangan, dan Pemberdayaan Kesejahteraan Rakyat melalui kegiatan : Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan pemberdayaan pendidikan dan agama berjumlah 4 organisasi / kelembagaan keagamaan seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tanah Laut dengan memfasilitasi sosialisasi SK 4 Menteri yang berkaitan membina beberapa desa kerukunan antar umat beragama dikecamatan, perizinan pendirian rumah ibadah dilingkup Pemerintah Daerah Tanah Laut , Organisasi Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawati Qur'an (LPTQ), dan organisasi Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP).

Pada Organisasi Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) melaksanakan kegiatan Isra' dan mi'rat di pondok pesantren al mubarak kel. Pelaihari kecamatan Pelaihari, Organisasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dilaksanakan di beberapa kecamatan yang berlokasi di kantor kecamatan, Organisasi Lembaga Pengembangan

Tilawati Qur'an (LPTQ) dilaksanakan di ruang berakat kantor sekretariat daerah lantai II dan organisasi Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) melaksanakan dilapangan tenis di depan kantor keluarahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari.

Bahwa untuk mendukung tercapainya indikator target sasaran perlu dilakukan oleh lembaga pendidikan keagamaan, organisasi/lembaga keagamaan yang melakukan kegiatan keagamaan dengan komponen :

1. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LTPQ) Kabupaten Tanah Laut, Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tanah Laut, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tanah Laut Cq. Kasi Urusan Haji bersama dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Tanah Laut, serta Pengurus FKDT Kabupaten Tanah Laut dengan unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. Menyiapkan jadwal pelaksanaan Hari Santri Nasional dengan membuat acara Oleh Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Tanah Laut dan menyiapkan jadwal pelaksanaan pembinaan terhadap sekolah madrasah diniyah takmilyah Kabupaten dan juga berkoordinasi dan fasilitasi Bagian Kesejahteraan Rakyat.
3. Membuat jadwal rapat persiapan melaksanakan MTQ tingkat kabupaten dan menetapkan waktu dilaksanakan MTQ Kabupaten dan tempat pelaksanaannya
4. Melakukan penyusunan program jadwal kerja dan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tanah Laut untuk penyerapan aspirasi mengenai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.
5. Melaksanakan tes menjadi petugas haji kabupaten Tanah Laut dan berkordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Cq. Kasi Urusan Haji tanah laut dalam hal penyetoran biaya bagi petugas ibada haji .
6. Melaksanakan rapat koordinasi dengan pengurus PHBI dalam rangka melaksanakan kegiatan tabliq akbar dan pengurus pondok pesantren al mubarak
Menyusun rencana

Hambatan yang terjadi dalam organisasi /lembaga keagamaan yang dibantu / fasilitasi untuk kegiatan keagamaan untuk sasaran diatas sebagai berikut :

- Belum tersedianya anggaran yang memadai melaksanakan organisasi FKPP Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 baik yang berkaitan dengan pertandingan antar Ponpes dalam rangka memeriahkan kegiatan hari santri tersebut.
- Keterbatasannya kegiatan hari santri pada tahun 2020 akibat pandemi Covid 19
- Kurangnya koordinasi organisasi FKUB dengan instansi vertikal berkaitan dengan kegiatan yang ia miliki.
- LPTQ Propinsi Kalimantan Selatan mengumumkan pelaksanaan MTQ TK. Propinsi yang diundur waktunya mengakibatkan peserta kafilah kurang semangat dan lupa sebagian dengan materi yang di berikan pada saat TC.
- Kurangnya waktu pembinaan dan perhatian kepada pengembangan kemampuan dan kompetensi pengetahuan perkembangan lagu/jenis qiraat sesuai kriteria MTQ bagi qori/qoriah, hafiz/hafizah asal Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut.
- Masih belum ada pendanaan yang memadai bagi unsur LPTQ Kecamatan bagi pencarian bakat qori/qoriah, hafiz/halifah ditempat pendidikan seperti TK Alqur'an, Madin, Ponpes.
- Organisasi PHBI tidak dapat menetapkan pelaksanaan Hari-Hari Besar Islam dilaksanakan

Solusi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan / ahambatan tersebut yaitu :

- Pada tahun depan organisasi FKPP meminta bantuan hibah atau dianggarkan pada instansi terkait berkaitan dengan hari santri yang rutin dilaksanakan setiap tahun.
- Memohon kepada instansi terkait dalam penggaran kegiatan, untuk membuat kegiatan FKUB kedalam kegiatan skpd yang berkaitan terhadap kerukunan umat beragama.
- Kurangnya waktu pembinaan dan perhatian kepada pengembangan kemampuan dan kompetensi pengetahuan perkembangan lagu/jenis qiraat sesuai kriteria MTQ bagi qori/qoriah, hafiz/hafizah asal Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut.
- Organisasi LPTQ yang dibawah naungan pemerintah daerah membuat perencanaan baru kembali , meminta tambahan dana untuk peserta kafilah untuk melaksanakan pelatihan kembali.
- Melakukan pembinaan terus menerus bagi pembibitan qori dan qoriah kelompok umur baik anak-anak, remaja agar cadangan qori dan qoriah, hafizh dan hafizhah khusus untuk hafizh dan hafizah 1 juz s.d 30 juz dengan kemampuan qiraat quran

- yang 7 macam untuk bekerjasama dengan pengurus LPTQ Kecamatan, Pimpinan Ponpes dan Madrasah Diniyah agar potensi santri dalam hal baca qiraat alquran.
- Melakukan perubahan dan inovasi dengan membentuk LPTQ Desa bekerja sama dengan TK Alquran/TP Alquran agar kontribusi masyarakat untuk mencintai baca qiraat alquran dan hafal alquran sehingga setiap kecamatan yang ada di Kabupten Tanah Laut serta mencari sumber pendanaan yang mampu mem *back up* setiap kegiatan/event baca tulis alquran.
 - Organisasi PHBI harus melakukan koordinasi kepada gugus depan covid 19 sebelum melaksanakan kegiatan peringatan hari besar Islam.

Rencana aksi perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- Meminta kepada kementrian agama kabupaten tanah laut, khususnya kasi Madin dan Prontren untuk membantu manajemen organisasi FKPP dalam pengelolaan keuangannya pada kegiatan Hari Santri Nasional tahun selanjutnya.
- Melakukan pengumpulan dana mandiri dari para anggota FKPP Kabupaten Tanah Laut untuk penyelenggaraan Hari Santri Nasional karena kegiatan yang dilaksanakan dari santri, oleh santri dan untuk santri.
- Melakukan pendekatan kepada para stakeholder seperti pengusaha atau dermawan yang dapat membantu kontribusi pendanaan kepada pengurus FKPP Tanah Laut untuk menunjang kegiatan Hari Santri Nasional.

Tabel Peserta kegiatan Hari Santri Nasional yang diikuti oleh perwakilan Pondok Pesantren lingkup Kecamatan se Kabupaten Tanah Laut

NO	NAMA PONPES	PUTRA
1.	Ponpes Asy Syuhada	20 orang
2.	Ponpes Sirajul Huda	20 orang
3.	Ponpes Al Mubarak	20 orang
4.	Ponpes Darul Qur'an Istiqomah	20 orang
5.	Ponpes Addawatutamah	20 orang
6.	Ponpes Nurul Islam	20 orang
7.	Ponpes An Nisa	-
8.	Ponpes Nur Ihyaidin	20 orang
9.	Ponpes Al Fatah	20 orang
10.	Ponpes Al Kaustar	20 orang

Nama-Nama Cabang Lomba yang Akan Dipertandingkan Pada Lomba MTQ

NO	NAMA MATA LOMBA			KETERANGAN
1.	Golongan Murattal	1	1	
2.	Golongan Qori Anak-Anak	1	1	
3.	Golongan Qori Remaja	1	1	
4.	Golongan Qori Dewasa	1	1	
5.	Golongan Qiraat Murattal Dewasa	1	1	
6.	Golongan Qiraat Murattal Remaja	1	1	
7.	Golongan Qiraat Mujawwad Dewasa	1	1	
8.	Golongan Hafizh 1 Juz	1	1	
9.	Golongan Hafizh 5 juz	1	1	
10.	Golongan Hafizh 10 juz	1	1	
11.	Golongan Hafizh 20 juz	1	1	
12.	Golongan Tafsir Bahasa Indonesia	1	1	
13.	Golongan Tafsir Bahasa Inggris	1	1	
14.	Golongan Tafsir Bahasa Arab	1	1	
15.	Golongan MMQ	1	1	
16.	Golongan Fahmil Quran	3	3	
17.	Golongan Syarhil Quran	3	3	
18.	Golongan Khat Naskah	1	1	
19.	Golongan khat hiasan mushaf	1	1	
20.	Golongan khat dekorasi	1	1	
21.	Golongan khat kaligrafi	1	1	
Total		21	21	





❖ **Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat**

Untuk mencapai sasaran tersebut didukung oleh indikator sebagai berikut :

- Tahun 2020, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui program Pembinaan, Pengembangan, dan Pemberdayaan Kesejahteraan Rakyat dengan kegiatan Pembinaan, Pengembangan, Pemberdayaan Kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp 18.108.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 18.097.000.000,- dengan persentasi 99,83%. Sedangkan Jumlah guru-guru TKA/TPA, Madin/MIS, Pondok Pesantren dan Penyuluh Agama Honorer (PAH) sebanyak 3090 Orang sedangkan data yang masuk ke Bagian kesejahteraan rakyat sebanyak 3090 berkas, dan 5 orang yang meninggal dunia dan mengundurkan diri di tahun berjalan. Dan melaksanakan 1 kegiatan yang Festival Anak Shaleh TK, Propinsi Kalimantan selatan di desa kiram kabupaten Banjar. Kegiatan fasilitasi ini di dilaksanakan oleh 3 (Tiga) orang SDM yaitu Kepala Bagian, Kasubbag Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat , dan pengelola bimbingan kemasyarakatan.

Tabel Sasaran dan Indikator Kasubbag Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat

NO	SASARAN STRATEGIS /KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Memberikan bantuan dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Guru TK/TPA, Madin/MIS, Ponpes, dan Penyuluh Agama yang diberi Intensif	3.090 Orang	3085 Orang	99,83%	Kasubag Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat
		Jumlah guru TK/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan penyuluh Agama yang di monitoring	3.090 Orang	3085 Orang	99,83%	Kasubag Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat

SASARAN Memberikan Bantuan Dibidang Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat

Indikator 1 : Jumlah Guru TK/TPA Madin/MIS, Ponpes, dan Penyuluh Agama yang Diberi Intensif

Jumlah guru-guru agama yang terdaftar statusnya dilingkungan pada Bagian kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah kabupaten Tanah berjumlah 3090 orang yang terdiri 2 katagori ada yang berbentuk sekolahan dan ada yang berbentuk haloqah / penyuluhan, keduanya tersebut sama-sama memberikan informasi atau mendidik seseorang di bidang keagamaan, seperti TKA/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan Penyuluh Agama.

NO	SASARAN STRATEGIS /KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Memberikan bantuan dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Guru TK/TPA, Madin/MIS, Ponpes, dan Penyuluh Agama yang diberi Intensif	3.090 Orang	3085 Orang	99,83%	Kasubag Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat
		Jumlah guru TK/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan penyuluh Agama yang di monitoring	3.090 Orang	3085 Orang	99,83%	Kasubag Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat

Pendidikan agama pada Taman Kanan-Kanak Al Qur'an memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya berupa mengenal huruf dan cara membaca huruf al Qur'an dengan menggunakan iqra, pada taman pendidikan Al Qur'an (TPA)

memberikan ilmu kepada anak didiknya berupa ilmu tajwid, cara menulis al qur'an dan cara menghafal ayat-ayat al qur'an dan ditambah dengan bacaan-bacaan pada waktu shalat, serta do'a-do'a sehari hari , Madrasah Diniyah atau Madrasah Ibtidayah swasta memberikan anak didiknya berupa ilmu fiqih, ilmu al qur'an, ilmu hadist, bahasa arab, ilmu sejarah agama islam dan ilmu bahasa Indonesia serta cara membaca kitab berbahasa melayu, dan Pondok Pesantren memberikan ilmu pengetahuan agama kepada anak didiknya berupa ilmu membaca al qur'an, ilmu bahasa arab (ilmu nahwu, ilmu syoraf, ilmu mantiq, dan ilmu balagah) ilmu hadist, ilmu tafsir, ilmu asbabul tafsir , asbabul hadist, ilmu dan lain-lainnya.

Penyuluh Agama ini terbagi 3, yaitu penyuluh agama Islam, penyuluh agama Hindu dan penyuluh agama Kristen, masing masing penyuluh memberikan pengetahuan kepada umatnya masing-masing, contohnya penyuluh agama islam memberikan ilmu pengetahuan agamanya diberikan kepada muridnya bersifat umum disesuaikan dengan keperluan muridnya, seperti belajar ilmu al qur'an, ilmu fiqih, ilmu amaliyah, ilmu tasyauf dan lain-lainnya

NO	DATA PTT TAHUN 2020	JUMLAH GURU TPA	JUMLAH GURU MADIN	JUMLAH GURU PONPES	JUMLAH PENYULUH ISLAM	JUMLAH PENYULUH HINDU	JUMLAH PENYULUH KRISTEN
1	Pelaihari	439	31	125	48	4	7
2	Bajuin	122	-	-	16	-	3
3	Panyipatan	111	65	25	20	-	3
4	Takisung	160	48	17	18	-	-
5	Batu Ampar	206	7/6	28	19	4	5
6	Jorong	151	56	57	12	-	-
7	Kintap	209	60	60	20	4	-
8	Tambang Ulang	110	24	15	15	-	-
9	Kurau	99	19	12	10	-	-
10	Bumi Makmur	113	57	-	10	-	-
11	Bati Bati	163	99	162	22	-	-
JUMLAH		1879	465	501	210	12	18

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran diatas sebagai berikut :

- Sebagian kecil guru-guru agama terdaftar di bagian kesejahteraan rakyat memiliki pendidikan terakhirnya SD.
- Sebagian besar guru-guru Taman Pendidikan Al Qur'an yang terdaftar di Bagian Kesejahteraan rakyat tidak memahami metode mengajar

- Sarana dan prasaran yang dimiliki oleh sekolah masih banyak yang kurang. Solusi atau upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan tersebut yakni :

- Membuat peraturan dalam penerimaan guru-guru agama minimal pendidikan terakhir sekolah menengah atas atau sederajat.
- Melaksanakan pembinaan terhadap guru-guru Taman Pendidikan Al Qur'an oleh organisasi Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia.
- Meminta bantuan hibah kepada pemerintah daerah berupa hibah fisik dan berupa kegiatan yang berkaitan dengan memperlancar proses pendidikan

Rencana aksi perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah

- Membuat perencanaan yang berkaitan dengan pelatihan guru-guru agama
- memberikan bimbingan pembuatan proposal hibah kepada sekolah yang memohon bantuan pada pemerintah daerah.

NO	DATA PTT TAHUN 2020	JUMLAH GURU TPA	JUMLAH GURU MADIN	JUMLAH GURU PONPES	JUMLAH PENYULUH ISLAM	JUMLAH PENYULUH HINDU	JUMLAH PENYULUH KRISTEN
1	Pelaihari	439/437	31	125	48	4	7
2	Bajuin	122	-	-	16	-	3
3	Panyipatan	111/110	65	25	20	-	3
4	Takisung	160	48	17	18	-	-
5	Batu Ampar	206	7/6	28	19	4	5
6	Jorong	151	56	57	12	-	-
7	Kintap	209	60	60	20	4	-
8	Tambang Ulang	110/109	24	15	15	-	-
9	Kurau	99	19	12	10	-	-
10	Bumi Makmur	113	57	-	10	-	-
11	Bati Bati	163	99	162	22	-	-
JUMLAH		1879	465	501	210	12	18

Indikator 2: Jumlah Guru TK/TPA Madin/MIS, Ponpes, dan Penyuluh Agama yang Diberi Intensif

NO	SASARAN STRATEGIS /KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Memberikan bantuan dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat	Jumlah guru TK/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan penyuluh Agama yang di monitoring	3.090 Orang	3085 Orang	99,83%	Kasubag Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sangat memperhatikan masalah pendidikan agama masyarakat, yang mana pemerintah daerah banyak membantu sekolah sekolah agama dalam memberikan hibah fisik untuk membangun sekolah agama secara tunai. Selain memberikan bantuan bangunan kepada sekolah, pemerintah daerah juga memberikan insentif bagi guru-guru agama agar kesejahteraan guru tersebut sejahteraa. Jumlah guru-guru agama yang diberi insentif oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2020 sebanyak 3.090 orang dengan sejumlah dana Rp 18.000.000.000 Miliar per tahun, guru TKA/TPA, Madin/MIS, Ponpes menerima insentif sebesar Rp 500.000,- dan Penyuluh Agama per orang sebesar Rp 350.000,-.

Dalam melaksanakan monitoring ke sekolah sekolah TKA/TPA, Madin/MIS, Ponpes ada beberapa orang yang kami dapatkan informasi bahwa guru agama tersebut ada yang meninggal dan pindah mengikuti suaminya, sebanyak 5 orang.

Guru-guru agama yang diberi insentif terbagi empat bagian,yaitu

1. Guru Taman Kanak-Kanak Al Qur'an atau Taman Pendidikan Al Qur'an sebanyak 1883 Orang
2. Guru Madrasah Diniyah atau Madrasah Ibtidayah swasta sebanyak 466 orang
3. Guru Pondok Pesantren sebanyak 501 orang
4. Penyuluh Agama Islam sebanyak 210 orang
5. Penyuluh Agama Hindu sebanyak 12 orang
6. Penyuluh Agama Kristen sebanyak 18 orang

NO	DATA PTT TAHUN 2020	JUMLAH GURU TPA	JUMLAH GURU MADIN	JUMLAH GURU PONPES	JUMLAH PENYULUH ISLAM	JUMLAH PENYULUH HINDU	JUMLAH PENYULUH KRISTEN
1	Pelaihari	439/437	31	125	48	4	7
2	Bajuin	122	-	-	16	-	3
3	Panyipatan	111/110	65	25	20	-	3
4	Takisung	160	48	17	18	-	-
5	Batu Ampar	206	7/6	28	19	4	5
6	Jorong	151	56	57	12	-	-
7	Kintap	209	60	60	20	4	-
8	Tambang Ulang	110/109	24	15	15	-	-
9	Kurau	99	19	12	10	-	-
10	Bumi Makmur	113	57	-	10	-	-
11	Bati Bati	163	99	162	22	-	-
JUMLAH		1879	465	501	210	12	18

Melaksanakan rapat koordinasi dengan Dewan Pengurus Kecamatan dan Dewan Pengurus Kabupaten beserta Bagian Kesejahteraan Rakyat.

- 1) Memonitoring lebih awal terhadap guru-guru TKA/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan PAH sebelum menyerahkan berkas lamaran ke Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- 2) Diberitahukan kepada semua guru TKA/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan PAH untuk berhenti atau mengundurkan diri harus memberitahukan kepada Dewan Pengurus Kecamatan agar dicarikan penggantinya



Foto Kegiatan Rapat koordinasi dengan pengurus BKPRMI Kabupaten dan Kecamatan dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat

Hambatan dan solusi yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah :

- Kurangnya komunikasi antara guru dengan Kepala sekolah atau Dewan Pengurus Kecamatan BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH.
- Berkas tanda terima insentif yang di serahkan kordinator kepada kepala sekolah sering terlambat menyerahkan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat
- Dewan Pengurus Kabupaten BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH harus menginformasikan kepada kepala sekolah, Koordinator Kecamatan untuk mendata ulang TKA/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan PAH yang benar benar bersedia menjadi Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah

- Meminta kepada DPK BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH mengaktifkan kembali rapat rutin bulan pada setiap kecamatan.
- DPK BKPRMI, Madin, Ponpes dan PAH harus aktif menanyakan kepada Kepala sekolah tentang aktivitas guru-guru pengajar

- Membuat aturan secara lisan terhadap guru-guru agama berkaitan pencairan apabila satu sekolahan yang belum menyerahkan berkas tanda terima maka pencairan tidak bisa.

Rencana Aksi Perbaikan yang akan dilakukan kedepannya adalah :

- 1) Menambah kegiatan monitoring tempat TPA, Madin, Ponpes dan PAH

Foto kegiatan monitoring ke sekolah TPA, Madin dan Pondok Pesantren.



Analisis Capaian Sasaran Strategis Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	100%	100%	100%	Bagian Perekonomian Pembangunan Mengampu misi ke-5 "Membangun Sinergitas Yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat"
2	Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja positif	75%	50%	66,67%	
3	Meningkatnya kualitas manajemen administrasi pembangunan yang proporsional sesuai dengan kewenangan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan	75%	50%	66,67%	
4	Meningkatnya hasil promosi potensi Daerah	Persentase peningkatan investasi	50%	50%	100%	
ESELON IV						
1	Fasilitasi pengembangan potensi perekonomian	Jumlah Laporan terkait potensi Perekonomian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian
		Jumlah laporan permasalahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian
		Jumlah laporan kegiatan promosi daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian
2	Pembinaan Pengembangan dan Fasilitasi Perekonomian Pembangunan Daerah	Jumlah laporan fasilitasi pembinaan BUMD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
		Jumlah dokumen analisis investasi Pemerintah Daerah Kepada BUMD	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	Kasubbag Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Perekonomian Pembangunan	Jumlah Laporan Kegiatan TPID Kabupaten Tanah Laut	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Monitoring Dan Evaluasi Perekonomian Pembangunan
		Jumlah Laporan Pengawasan Produk KUR	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Kasubbag Monitoring Dan Evaluasi Perekonomian Pembangunan
		Jumlah Laporan Monitoring Perekonomian Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Monitoring Dan Evaluasi Perekonomian Pembangunan

Berikut disajikan Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Bagian Perekonomian Pembangunan terhadap capaian tahun sebelumnya

Tabel Capaian Sasaran Strategis Bagian Perekonomian Pembangunan terhadap capaian tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2020		
			2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase BUMD yang berkinerja positif	%	0%	60%	75%	50%	66,67%
3	Persentase Perangkat Daerah Yang Menyampaikan Laporan	%	0%	60%	75%	50%	66,67%
4	Persentase peningkatan investasi	%	0%	80%	50%	50%	100%

❖ Perbandingan Realisasi dengan Target

Rata-rata capaian kinerja Bagian Perekonomian Pembangunan dari target indikator adalah sebagai berikut:

- 1) Persentase Fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan adalah 100%, dengan rincian sebagai berikut :
 - Persentase Fasilitas Permasalahan dan kegiatan pengembangan potensi perekonomian capaian kinerjanya adalah 100%.
 - Kegiatan Fasilitasi Pembinaan BUMD dan penyusunan kajian pendukung revitalisasi manajemen BUMD capaian kinerjanya adalah 100%.
 - Fasilitasi penyelesaian permasalahan bidang perekonomian berupa penyusunan Perbup untuk restrukturisasi debitur **GAPURA KAROMAH** capaian kinerjanya adalah 100%.
 - Fasilitasi kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan kegiatan pendukungnya capaian kinerjanya adalah 100%.
 - Persentase fasilitasi kegiatan dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program permodalan dari Pemerintah Pusat capaian kinerjanya adalah 100%.
- 2) Persentase BUMD yang berkinerja positif adalah 50,00% dari target 75,00% atau capainya adalah 66,67%.

- 3) Persentase Perangkat Daerah Yang Menyampaikan Laporan adalah 50,00% dari target 75,00% atau capainya adalah 66,67%.
- 4) Persentase peningkatan investasi mencapai hasil 100% dari target yang ditetapkan.

❖ **Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait**

Realisasi capaian kinerja Bagian Perekonomian Pembangunan pada tahun 2020 berbanding dengan capaian kinerja tahun 2019 pada masing Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

- a) Persentase Fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan adalah 100% sama dengan capaian kinerja program tahun 2019 yaitu 100%.
- b) Persentase BUMD yang berkinerja positif capaiannya adalah 66,67% lebih baik dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu 60,00%
- c) Persentase Perangkat Daerah Yang Menyampaikan Laporan capaiannya adalah 66,67% lebih baik dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu 60,00%
- d) Persentase peningkatan investasi mencapai hasil 100% dari target yang ditetapkan, berbanding dengan capaian tahun 2019 yaitu diangka 80,00%

❖ **Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

SASARAN 1 Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Permasalahan Terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah

Indikator : Persentase Kebijakan Penyelesaian Permasalahan Terkait Perekonomian dan Pembangunan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase kebijakan penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	100%	100%	100%	Bagian Perekonomian Pembangunan Mengampu misi ke-5 "Membangun Sinergitas Yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat"

Persentase kebijakan penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan merupakan akumulasi dari kegiatan koordinasi dan fasilitasi yang

melahirkan beberapa kebijakan dibidang perekonomian guna menyelesaikan permasalahan dibidang perekonomian dan pembangunan. Selain fasilitasi penyelesaian permasalahan perekonomian dan pembangunan, juga kegiatan dalam rangka monitoring dan evaluasi bidang perekonomian dan pembangunan.

Capaian indikator kinerja Bagian Perekonomian Pembangunan pada tahun 2020 sebesar 100% sama dengan capaian kinerja program tahun 2019 yaitu 100%, namun ada beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain :

- Kurangnya komitmen dari SKPD yang menjadi lintas koordinasi dalam menyampaikan data yang diperlukan
- Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan untuk ditindaklanjuti dalam rangka mendukung upaya penyelesaian permasalahan kurang maksimal dilaksanakan
- Koordinasi dengan para penentu kebijakan, dengan para pelaksana hasil kebijakan, serta akademisi yang kompeten harus lebih ditingkatkan sehingga dampak dan hasil secara kualitatif dapat dinilai secara kuantitatif

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan evaluasi terhadap permasalahan bidang perekonomian pada tahun sebelumnya yang masih berpotensi muncul pada tahun berjalan
- Melakukan monitoring penerapan kebijakan bidang perekonomian
- Melakukan koordinasi dengan SKPD teknis untuk menggali potensi perekonomian di masyarakat yang dapat dikembangkan

Rencana aksi yang diperlukan

- Menyusun time *schedule* proses penerapan kebijakan penyelesaian permasalahan bidang perekonomian
- Monev secara berkala
- Rapat koordinasi setiap akhir triwulan



Koordinasi Penyaluran KUR dengan Bank Penyelur



Rapat Koordinasi terkait Penyertaan Modal Pemerintah



Rapat Koordinasi TPID Tanah Laut

SASARAN 2 Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing

Indikator : Persentase BUMD yang berkinerja positif

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja positif	75%	50%	66,67%	Bagian Perekonomian Pembangunan Mengampu misi ke-5 "Membangun Sinergitas Yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat"

Capaian indikator kinerja Bagian Perekonomian Pembangunan yaitu Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing pada tahun 2020 sebesar 66,67% lebih baik dari capaian tahun 2019 yaitu 60%, namun ada beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain :

- Masih belum selesainya pembahasan Raperda penyertaan modal untuk BUMD pada tingkat Legislatif
- Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan untuk ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan kinerja manajemen BUMD belum dilaksanakan secara maksimal oleh BUMD.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Secara aktif melakukan koordinasi dengan pihak Legislatif
- Melakukan monitoring penerapan kebijakan terhadap BUMD
- Melakukan koordinasi secara intens dengan BUMD

Rencana aksi yang diperlukan

- Menyusun Jadwal Monev ke BUMD
- Monitoring dan Evaluasi Laporan Triwulan, semesteran dan tahunan BUMD
- Rapat koordinasi setiap akhir triwulan

SASARAN 3 Meningkatnya Kualitas Manajemen Administrasi Pembangunan yang Proporsional sesuai dengan Kewenangan

Indikator : Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya kualitas manajemen administrasi pembangunan yang proporsional sesuai dengan kewenangan	Persentase Perangkat Daerah Yang Menyampaikan Laporan	75%	50%	66,67%	Bagian Perekonomian Pembangunan Mengampu misi ke-5 "Membangun Sinergitas Yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat"

Capaian indikator kinerja Bagian Perekonomian Pembangunan yaitu Meningkatnya kualitas manajemen administrasi pembangunan yang proporsional sesuai dengan kewenangan pada tahun 2020 sebesar 66,67% lebih baik dari capaian tahun 2019 yaitu 60%, namun ada beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain :

- Sub Kegiatan Administrasi Pembangunan merupakan nomenklatur baru di subbag Monev Perekonomian dan Pembangunan sehingga harus menyesuaikan tupoksi yang ada
- Belum ada regulasi dan kebijakan yang disusun untuk menjadi bahan acuan bagi SKPD mengirimkan laporan kegiatan pembangunan dan perekonomian.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan penambahan/perubahan tugas pokok dan fungsi subbag. Monev Perekonomian dan Pembangunan
- Melakukan penyusunan draft peraturan/regulasi sebagai acuan dalam pelaporan kegiatan SKPD dibidang Pembangunan
- Melakukan koordinasi secara intens dengan SKPD terkait

Rencana aksi yang diperlukan

- Menyusun draft susunan tugas pokok dan fungsi bidang monev pembangunan
- Menyusun draft peraturan/regulasi penyampian laporan kegiatan SKPD dibidang Pembangunan

SASARAN 4 Meningkatnya hasil promosi potensi Daerah

Indikator : Persentase peningkatan investasi

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya hasil promosi potensi Daerah	Persentase peningkatan investasi	50%	50%	100%	Bagian Perekonomian Pembangunan Mengampu misi ke-5 "Membangun Sinergitas Yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat"

Capaian indikator kinerja Bagian Perekonomian Pembangunan yang terakhir yaitu Meningkatnya hasil promosi potensi Daerah pada tahun 2020 sebesar 100% lebih baik dari capaian tahun 2019 yaitu 80%, namun ada beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain :

- Adanya pandemi covid 19 pada awal triwulan II membuat kegiatan promosi potensi daerah ditingkat baik lokal dan nasional menjadi terganggu.
- Kegiatan promosi melalui media digital masih kurang maksimal.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Menggiatkan promosi potensi daerah melalui platform digital dan media lainnya.
- Melakukan peninjauan kerjasama promosi dengan pihak Kementerian dan instansi lainnya untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Tanah Laut
- Melakukan koordinasi secara intens dengan SKPD terkait

Rencana aksi yang diperlukan

- Mmembentuk tim untuk mendukung promosi potensi daerah melalui platform digital
- Memetakan maupun merencanakan kolaborasi antarlembaga dan perusahaan

❖ Analisis Program Penunjang dan Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase kebijakan penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan di tunjangan dengan Program Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi Perekonomian Pembangunan Daerah dengan pagu Rp 579.517.620,- terealisasi Rp 495.803.760,-

dengan realisasi keuangan sebesar 85,55% dan dilaksanakan oleh 9 (sembilan) orang SDM.

Tabel Indikator Kinerja dan Realisasi Program Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi Perekonomian Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	SDM	Ket
1	Persentase Fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi Perekonomian Pembangunan Daerah	Rp 579.517.620	Rp 495.803.760	85,55%	<ul style="list-style-type: none"> - Kabag Perekonomian dan Pembangunan - Kasubbag. Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian - Kasubbag. Bina BUMD - Kasubbag. Monev Perekonomian Pembangunan - Pengadministrasi Umum - Pengolah Data - Staf PTT 3 orang 	Pagu anggaran mengalami <i>refocusing</i>
2	Persentase BUMD yang berkinerja positif						
3	Persentase Perangkat Daerah Yang Menyampaikan Laporan						
4	Persentase peningkatan investasi						

❖ Kasubag Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian

Untuk capaian Indikator sasaran pada Kasubbag Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian dilaksanakan melalui program Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi Perekonomian Pembangunan Daerah Kegiatan Pembinaan, Fasilitasi dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah dengan Pagu Rp 198.751.200,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 170.452.500,- atau 73,88% yang didukung oleh 3 org SDM.

Analisis Capaian Kinerja Sub Bagian Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian yang mengacu pada Indikator Sasaran Eselon III yaitu Persentase Permasalahan yang berhasil di tindak lanjuti di bidang pengembangan Potensi Perekonomian dengan indikator sasaran Eselon IV sebagai berikut :

Tabel Capaian Sasaran dan Indikator
 Kasubbag Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Fasilitasi pengembangan potensi perekonomian	Jumlah Laporan terkait potensi Perekonomian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian
		Jumlah laporan permasalahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian
		Jumlah laporan kegiatan promosi daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian

SASARAN 1 Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian

Indikator 1 : Jumlah Laporan Terkait Potensi Perekonomian

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Fasilitasi pengembangan potensi perekonomian	Jumlah Laporan terkait potensi Perekonomian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian

Dalam rangka pengembangan dan penggalian potensi perekonomian telah dilakukan beberapa kegiatan konsultasi dan koordinasi yang melibatkan semua SKPD dan *stakeholder* terkait dalam rangka menggali potensi perekonomian di masing-masing desa dan kecamatan. Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan penggalian potensi perekonomian antara lain :

- Ketersediaan data dari SKPD teknis masih kurang lengkap
- Informasi dari pihak desa dan kecamatan masih belum komperhensif
- Terbatasnya sarana dan prasarana terkait pengembangan potensi perekonomian

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan koordinasi yang lebih intens dengan SKPD Teknis
 - Melakukan kajian dan analisa terhadap potensi perekonomian yang terdapat di desa
- Rencana Aksi yang diperlukan
- Membentuk tim untuk menggali potensi perekonomian yang dapat dikembangkan

- Kerjasama dengan pihak ketiga untuk menganalisa setiap potensi perekonomian di beberapa desa yang menjadi sampel

SASARAN 1 Fasilitas Pengembangan Potensi Perekonomian

Indikator 2 : Jumlah Laporan Permasalahan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Fasilitas pengembangan potensi perekonomian	Jumlah laporan permasalahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Fasilitas Pengembangan Potensi Perekonomian

Program **GAPURA KAROMAH** sendiri merupakan Program yang di usung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala yang mana hal tersebut di harapkan dapat menindaklanjuti Permasalahan dari Usaha Mikro Kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Tanah Laut yaitu karena Maraknya Pinjaman dengan Bunga Tinggi yang terasa mencekik dan memberatkan bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan ketentuan bantuan berupa Pinjaman Modal Usaha sesuai ketentuan

Peraturan adalah dari 1 - 5 Juta Rupiah tanpa Bunga tanpa agunan dan 1 - 15 juta tanpa bunga dengan agunan ringan.

Adapun Realisasi Pinjaman modal usaha sampai dengan Bulan Desember 2020 sebesar Rp 6.413.500.000,- (*enam milyar empat ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*), dengan jumlah debitur 784 orang yang bergerak di Bidang Pertanian, Peternakan, Perdagangan, Industri dan Perikanan yang masing-masing di dukung oleh SKPD Teknis yang membidangi. Selama masa pandemi covid 19, untuk menjaga NPL dan stabilitas kredit program **GAPURA KAROMAH** dikeluarkan Perbup Nomor 44 Tahun 2020 tentang stimulus perekonomian. Salah satunya adalah dengan memberikan program restrukturisasi kepada debitur program **GAPURA KAROMAH** yang terdampak pandemi covid 19.

Adapun kendala dalam penyusunan laporan terkait pengembangan potensi perekonomian antara lain :

- Belum adanya kebijakan terkait kriteria produk-produk yang dapat berpotensi untuk dikembangkan

- Masih minimnya pengetahuan para pelaku usaha mikro dalam mengembangkan produknya
- Tidak pendamping khusus/tenaga ahli yang mendampingi dalam mengangkat suatu potensi daerah
- Adanya kebijakan dari pelaksana program **GAPURA KAROMAH** yang menghentikan sementara penyaluran program **GAPURA KAROMAH**

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan penyusunan draft kebijakan terkait pengembangan potensi perekonomian daerah.
- Menyusun kebijakan untuk dapat kembali menjalankan program **GAPURA KAROMAH** dengan menyesuaikan kondisi perekonomian daerah dan peraturan pusat

Rencana Aksi yang diperlukan

- Merevisi Perbup Nomor 44 tahun 2020 agar program **GAPURA KAROMAH** dapat kembali disalurkan
- Melakukan inventarisir sektor perekonomian yang terdampak covid 19

Rekomendasi :

- Perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Perbup Nomor 44 Tahun 2020 selama pandemi, terutama dalam melakukan seleksi peminjam, agar para pelaku usaha tetap dapat menjalankan usahanya dengan pinjaman modal dari **GAPURA KAROMAH** guna mendukung program pemulihan ekonomi nasional/daerah.
- Perlu dilakukan penyusunan mitigasi resiko terhadap penempatan sebagian dana **GAPURA KAROMAH** yang dikelola oleh pihak penyalur yaitu PT. BPR Tala.
- Program ini merupakan program satu satunya yang ada di Indonesia yang mana perlu lagi di tambah dukungan dari semua pihak dalam pelaksanaan dan pengawasannya sehingga dapat berhasil dalam menindaklanjuti permasalahan Dalam Bidang Pengembangan potensi Perekonomian.

SASARAN 1 Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian

Indikator 3 : Jumlah Laporan Kegiatan Promosi Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Fasilitasi pengembangan potensi perekonomian	Jumlah laporan kegiatan promosi daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian

Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan penggalian potensi unggulan daerah telah dilakukan beberapa kegiatan promosi yang melibatkan semua SKPD dan *stakeholder* terkait dalam rangka memperkenalkan produk-produk UKM Tanah Laut di tingkat Lokal dan Nasional. Namun sejak terjadinya pandemi covid 19 diawal Maret 2020 maka semua kegiatan promosi yang berskala nasional ditiadakan dan diganti dengan menggiatkan promosi produk-produk tersebut ditingkat lokal lingkup Kabupaten Tanah Laut. Adapun kendala dalam penyusunan laporan terkait kegiatan promosi produk unggulan daerah antara lain :

- Ketersediaan data dari SKPD teknis masih kurang lengkap
- Produk unggulan yang ditampilkan masih kurang variatif
- Terbatasnya sarana dan prasarana terkait pengembangan produk unggulan daerah
- Kegiatan promosi yang masih belum tepat sasaran

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan koordinasi yang lebih intens dengan SKPD Teknis
- Menggali produk potensial yang dapat dikembangkan
- Mengikuti event promosi yang lebih efektif dengan produk unggulan daerah

Rencana Aksi yang diperlukan

- Membentuk tim untuk menggali potensi unggulan daerah yang dapat dikembangkan
- Membentuk tim promosi daerah yang lebih efektif
- Melakukan pendataan produk-produk daerah yang bersifat spesifik

Rekomendasi :

- Perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk menggali potensi unggulan daerah lainnya yang bernilai ekonomi lebih tinggi dan memiliki ciri khas yang berbeda dengan daerah lain.
- Variasi produk-produk yang disertakan pada pameran diharapkan lebih banyak lagi untuk menarik minat pengunjung.

- Perlu dilakukan pendampingan dalam proses penggalian potensi unggulan sampai dengan prosuk tersebut dapat diterima dan mudah didapat oleh masyarakat sehingga produk tersebut tidak mandek ditengah jalan dan akhirnya menjadi produk yang biasa dan kurang dikenal masyarakat.
- Diharapkan adanya kerjasama antara pelaku UKM dengan perusahaan perdagangan ritel besar yang ada di Kabupaten Tanah Laut untuk memperkuat pasar produk unggulan daerah.

❖ **Kasubbag Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

Untuk capaian Indikator sasaran pada Kasubbag Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilaksanakan melalui program Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi Perekonomian Pembangunan Daerah Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Pagu Rp 193.439.060,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 142.921.260,- atau 73,88% yang didukung oleh 2 org SDM.

Analisa Capaian Kinerja Sub Bagian Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengacu pada Indikator Sasaran Eselon III yaitu Presentase Permasalahan yang berhasil di tindak lanjuti dibidang Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan indikator sasaran Eselon IV sebagai berikut :

Tabel Capaian Sasaran dan Indikator
Kasubbag Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Pembinaan Pengembangan dan Fasilitasi Perekonomian Pembangunan Daerah	Jumlah laporan fasilitasi pembinaan BUMD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
		Jumlah dokumen analisis investasi Pemerintah Daerah Kepada BUMD	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	Kasubbag Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

SASARAN 2 Pembinaan Pengembangan dan Fasilitas Perekonomian Pembangunan Daerah

Indikator 1 : Jumlah Laporan Fasilitas Pembinaan BUMD

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Pembinaan Pengembangan dan Fasilitas Perekonomian Pembangunan Daerah	Jumlah laporan fasilitas pembinaan BUMD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Sehubungan Raperda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) supaya bersama-sama dapat menanggulangi, dari pihak Perusahaan Daerah turut melakukan komunikasi dan pendekatan kepada Legeslatif tidak hanya dari pihak Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Untuk Peraturan Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut kepada Bank Kalimantan Selatan masih berproses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanah Laut.

Adapun kendala dalam penyusunan laporan Permasalahan Bina BUMD antara lain:

- BUMD masih kekurangan modal kerja.
- BUMD masih kekurangan tenaga ahli dan terampil dalam menjalankan usahanya
- BUMD belum berubah badan hukum sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Melakukan penyusunan kajian analisa kelayakan investasi pemerintah untuk menambah modal BUMD.
- Mendorong BUMD agar bekerja secara profesional dalam melakukan rekrutmen tenaga kerja
- Memfasilitasi BUMD dalam melakukan perubahan badan hukum

Rencana Aksi yang diperlukan

- Melakukan menginventarisir permasalahan dan kendala yang dihadapi pada Perusahaan Daerah.
- Menyusun jadwal penyampaian laporan progress kemajuan kinerja BUMD
- Menyusun target triwulan, semester dan tahunan BUMD

Rekomendasi :

- Agar setiap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mempunyai target langkah-langkah kedepan.
- Perlunya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) supaya menginventarisir permasalahan dan kendala yang dihadapi pada Perusahaan Daerah.
- Perlunya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyampaikan progres kegiatan operasional.

SASARAN 2 Pembinaan Pengembangan dan Fasilitasi Perekonomian Pembangunan Daerah

Indikator 2 : Jumlah Dokumen Analisis Investasi Pemerintah Daerah Kepada BUMD

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
2	Pembinaan Pengembangan dan Fasilitasi Perekonomian Pembangunan Daerah	Jumlah laporan fasilitasi pembinaan BUMD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
		Jumlah dokumen analisis investasi Pemerintah Daerah Kepada BUMD	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	Kasubbag Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Dalam rangka terbinanya manajemen perusahaan daerah di Kabupaten Tanah Laut sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Laut, maka perlu dibentuk Tim Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 melalui Surat Keputusan Bupati, serta terfasilitasi dan terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi sebagai salah satu langkah pembinaan terhadap perusahaan daerah agar perusahaan daerah berjalan sesuai prinsip *good governance* dan etika bisnis yang berlaku. Terlaksananya koordinasi antar Instansi dalam rangka pembinaan pelaksanaan pengelolaan manajemen dan kegiatan operasional perusahaan daerah, serta mengupayakan atau memfasilitasi penyelesaian masalah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Adapun 4 (empat) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu;

1. BUMD PT. BPR Tanah Laut;
 - a. Telah berubah badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD), menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut .

- b. Telah disusun kajian analisa investasi untuk menambah penyertaan modal Pemerintah kepada PT. BPR Tala
 - c. Sebagai salah satu bank penyalur pada program **GAPURA KAROMAH**.
2. BUMD PD. Baratala Tuntung Pandang;
Telah dilaksanakan penyusunan kajian kelayakan oprasional usaha yang bekerjasama dengan pihak akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat.
3. BUMD PDAM;
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut berupa asset dan hibah.
4. BUMD PT. Tanah Laut Manuntung;
- a. Telah dilakukan penyusuna *draft* Perda Penyertaan Modal Pemerintah Kepada PT. Tanah Laut Manuntung
 - b. Dipersiapkan untuk menjadi Badan Usaha Pelabuhan (BUP) untuk mendukung kawasan industri Jorong.
 - c. Pemegang saham Utama adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 60% dan PT. CMN sebesar 40%.

Adapun kendala dalam penyusunan laporan terkait Bina BUMD antara lain:

- Belum lengkapnya data pelaporan dari BUMD.
- Manajemen BUMD belum menerapkan Good Governance
- Raperda penyertaan modal kepada BUMD masih belum di sahkan oleh pihak legislatif

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan asistensi pelaporan BUMD.
- Mengusulkan kepada pimpinan agar dilakukan peningkatan kapasitas manajemen BUMD dengan fasilitasi Pemerintah Daerah.
- Secara intens melakukan koordinasi dengan pihak legislatif terkait kemajuan proses Raperda penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD

Rencana Aksi yang diperlukan

- Membuat telahaan kepada pimpinan terkait rencana peningkatan kapasitas manajemen BUMD kepada pimpinan.
- Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan penilaian pelaporan BUMD agar sesuai aturan yang berlaku.

Rekomendasi :

- Agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyampaikan progres kegiatan operasional.
- Sehubungan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), agar masing-masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mencantumkan langkah-langkah jangka pendek, dan langkah-langkah strategis.
- Perlunya dilaksanakan expose oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan menghadirkan pihak Pemerintah Daerah dan para calon pemegang saham.

❖ Kasubbag Monev Perekonomian Pembangunan

Untuk capaian Indikator sasaran pada Kasubbag Monev Perekonomian Pembangunan dilaksanakan melalui program Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi Perekonomian Pembangunan Daerah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perekonomian Pembangunan dengan Pagu Rp 187.327.360,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 182.430.000,- 97,39% yang didukung oleh 3 org SDM.

Analisa Capaian Kinerja Sub Bagian Monev Perekonomian Pembangunan yang mengacu pada Indikator Sasaran Eselon III yaitu persentase permasalahan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi penyelesaiannya dengan indikator sasaran Eselon IV sebagai berikut :

Tabel Capaian Sasaran dan Indikator

Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Perekonomian Pembangunan

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Perekonomian Pembangunan	Jumlah Laporan Kegiatan TPID Kabupaten Tanah Laut	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Perekonomian Pembangunan
		Jumlah Laporan Pengawasan Produk KUR	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Perekonomian Pembangunan
		Jumlah Laporan Monitoring Perekonomian Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Perekonomian Pembangunan

SASARAN 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Perekonomian Pembangunan

Indikator 1 : Jumlah Laporan Kegiatan TPID Kabupaten Tanah Laut

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Perekonomian Pembangunan	Jumlah Laporan Kegiatan TPID Kabupaten Tanah Laut	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Perekonomian Pembangunan

Dasar hukum pelaksanaan tim pengendalian inflasi daerah adalah SK Bupati Tanah Laut nomor 188.45/313-KUM/2020 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tanah Laut. Selama pandemi covid 19 adapun kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Melakukan operasi pasar gas LPG 3 kg bersubsidi sebanyak 12.560 tabung dari bulan April sampai dengan September 2020 hasil kerjasama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan PT. Pertamina MO Regional 6 Kalimantan, hal ini dikarenakan terjadinya lonjakan harga gas LPG 3 Kg bersubsidi selama pandemi covid 19.
2. Bekerjasama dengan Bulog wilayah Kalimantan Selatan untuk melakukan operasi pasar gula pasir di bulan april 2020 pada saat harga gula pasir melonja hingga 70%.
3. Melaksanakan pasar murah sembako secara tertutup di dua Desa yaitu Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan dan Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung.
4. Melaksanakan pasar murah menjelang idul fitri dan idul adha dengan menerapkan protokol kesehatan kepada para pengunjung.

Adapun kendala dalam penyusunan laporan terkait pengembangan potensi perekonomian antara lain :

- Belum adanya tata niaga yang mengatur hilirisasi hasil peternakan dan pertanian.
- Monitoring harga pasar dan ketersediaan stock masih belum optimal
- Kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan monitoring keseluruhan Desa dan Kecamatan

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Mengusulkan kepada pimpinan agar daerah memiliki kebijakan terkait tata niaga hilirisasi produk pangan yang berpengaruh terhadap ketersediaan pasokan bahan pokok.
- Optimalisasi monitoring harga dan ketersediaan bahan pokok dengan memaksimalkan potensi SDM yang ada di Desa dan Kecamatan

Rencana Aksi yang diperlukan

- Membuat telahaan kepada pimpinan terkait kebijakan hilirisasi hasil pertanian dan peternakan.
- Membentuk tim yang melibatkan pihak Desa dan Kecamatan agar dapat memantau pergerakan harga dan ketersediaan bahan pokok.

SASARAN 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Perekonomian Pembangunan

Indikator 2 : Jumlah Laporan Pengawasan Produk KUR

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Perekonomian Pembangunan	Jumlah Laporan Pengawasan Produk KUR	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Perekonomian Pembangunan

Salah satu program prioritas nasional yang menjadi perhatian dan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah Program KUR. Untuk memudahkan pengawasan, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyaluran KUR Kabupaten Tanah Laut melalui Keputusan Bupati yang beranggotakan SKPD Teknis, Bank Penyalur, Perusahaan Penjamin KUR dan instansi vertikal yang membidangi. Tujuan dibentuknya tim ini adalah untuk memudahkan koordinasi antar *stakeholder* terkait. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Melakukan upload data calon penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) potensial untuk dapat dibiayai KUR kedalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dengan penanggungjawab Pemerintah Kabupaten.
2. Mengidentifikasi data calon penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang di upload oleh

penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin, sesuai wilayah masing-masing kedalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

3. Melakukan pendampingan/monitoring dan evaluasi atas kredit yang diterima atau calon yang belum berhasil mengakses kredit.
4. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) minimal 1 kali dalam sebulan melalui yang terkoordinasi maupun yang dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
5. Membuat Iklan KUR
6. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Tanah Laut melalui Bagian Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Capaian serapan KUR ditahun 2020 adala sebesar Rp 293.020.970.100,- (dua ratus sembilan puluh tiga milyar dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah), jumlah ini meningkat sebesar Rp 18.405.570.100 (delapan belas milyar empat ratus lima juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah) atau meningkat sebesar 6,7%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan ini antara lain :

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan monev seperti alat transportasi mobil untuk ke desa – desa yang terpencil.
2. Masih kurangnya platfon pendanaan KUR yang diberikan Pemerintah Pusat untuk Bank Penyalur yang ada di Kabupaten Tanah Laut.
3. Koordinasi antar SKPD pembina UMKM masih kurang sehingga terjadi tumpang tindih jadwal pelatihan UMKM.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Memaksimalkan kerjasama antar SKPD yang tergabung dalam Tim Monitoring KUR agar dapat melakukan monitoring debitur KUR pada saat melakukan pembinaan UMKM.
- Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kementerian yang membidangi program KUR untuk menambah platfon pembiayaan KUR

Rencana Aksi yang diperlukan

- Kerjasama monitoring debitur KUR dengan SKPD Teknis
- Konsultasi dan koordinasi dengan bank penyalur KUR untuk meminta data sebagai dasar pengajuan kepada Kementerian.

SASARAN 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Perekonomian Pembangunan

Indikator 3 : Jumlah Laporan Monitoring Perekonomian Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Perekonomian Pembangunan	Jumlah Laporan Monitoring Perekonomian Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Perekonomian Pembangunan

Dalam rangka peningkatan dibidang perekonomian untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat dilakukan monitoring terhadap kegiatan pembangunan prasaranaan perekonomian yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh SKPD Teknis. Monitoring dan evaluasi juga dilaksanakan dalam rangka memastikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mempermudah kegiatan perekonomian dan yang lainnya .

Permasalahan dan kendala yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan ini antara lain :

- Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan monev seperti alat transportasi mobil untuk ke desa – desa yang terpencil.
- Luasnya cakupan area kerja dan permasalahan teknis lainnya.
- Koordinasi antar SKPD pelaksana yang mempunyai tupoksi pembangunan prasarana penunjang perekonomian masih kurang lancar.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

- Memaksimalkan kerjasama antar SKPD yang memiliki program pengembangan infrastruktur terkait perekonomian.
- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi serta sosialisasi program permodalan pemerintah

Rencana Aksi yang diperlukan

- Kerjasama monitoring dengan SKPD Teknis
- Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Bagian Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan

4. Perbandingan Realisasi Capaian Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020

Tabel Realisasi Capaian Sasaran Strategis
 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 dan Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2018-2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2019	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6
Eselon II					
Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81,84	82,33	102,92 %
Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	1	5	5	5
Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	ST 3,060	T 2,9729	Nilai belum terbit	Nilai belum terbit
Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase dengan nilai RB Minimal B	70%	Belum dilakukan Penilaian RB terhadap SKPD	55%	78,57%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	90%	40%	92,5%	102,77%
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	85	52,02	91,24	175,4 %
	Nilai ZI Sekretariat Daerah	80	-	84,65	
	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	82	84,35	Masih Proses Penilaian	Masih Proses Penilaian
	Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3,5	-	-	Belum dilakukan penilaian Maturitas SPIP
Meningkatnya kebijakan perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diterapkan	100%	100%	100%	100%

SASARAN STRATEGIS SESUAI RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2018-2023	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2019	REALISASI 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6
Eselon III					
Meningkatnya kualitas pelaksanaan layanan Sekretariat Daerah	Persentase Bagian dengan nilai IKM Minial Baik	80	81,84	82,33	102,92 %
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	100%	100%	82%	82%
	Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
	Persentase fasilitasi pelaksanaan pilkada (Presiden/Gubernur/Bupati)	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga	Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	100%	100%	175%	175%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	65%	62,5%	92,5%	92,5%
Meningkatnya Nilai Area Perubahan RB SKPD	Nilai Komponen Area Perubahan RB SKPD	70	<i>Belum dilakukan Penilaian RB terhadap SKPD</i>	55	78.57%
	Persentase SKPD dengan budaya kerja baik	10%	5%	17,5%	116,67%
Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80	100%	100%	100%	100%



	Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur(SOP)	100%	100%	95%	95%
Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	100%	100%	100%	100%
	Persentase Analisa dan evauasi jabatan sesuai proporsinya	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pengelolaan Pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Peningkatan komponen Area Perubahan RB Sekretariat Daerah	85	52,02	91,24	175,4 %
	Peningkatan komponen Area Perubahan ZI Sekretariat Daerah	80	-	84,65	
	Peningkatan komponen SAKIP Sekretariat Daerah	82	84,35	Masih Proses Penilaian	Masih Proses Penilaian
	Persentase Peningkatan unsur SPIP Sekretariat Daerah	3,5	-	-	Belum dilakukan penilaian Maturitas SPIP
Meningkatnya layanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	Persentase pelayanan Administrasi Umum, Keperencanaan, Perencanaan dan Keuangan Pimpinan Bagian lingkup Sekrtariat Daerah	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	100%	-	55%	55%
Meningkatnya Pelayanan terhadap stakeholder dalam hal produk hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Produk hukum Daeah/lainnya yang harmonis	100%	100%	100%	100%
Tingkat Penanganan masalah hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Persentase masalah hukum yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%



Peningkatan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Hasil Penilaian atas Pemenuhan HAM	Nilai 75	100%	Nilai 79,64	Nilai 79,64
Produk Hukum Daerah yang terdokumentasi dan di publikasikan	Persentase Produk Hukum Daerah yang terdokumentasi dan di publikasikan	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah, kehumasan dan keprotokolan	Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	100%	100%	100%	100%
	Persentase kegiatan kehumasan KDH/WKDH/SKPD/ Masyarakat yang terlayani	100%	100%	100%	100%
	Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu daerah yang terlayani keprokolannya	100%	100%	100%	100%
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%	0%
Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/ SKPD/ Masyarakat dengan baik	100%	86,83%	95%	95%
Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda terkait sarana prasarana/ aset milik Setda dikelola dengan baik	100%	61,3%	100%	100%
Meningkatnya kerukunan umat beragama	Persentase peningkatan pelayanan lembaga keagamaan	100%		84,93%	84,93%
Meningkatnya peran Organisasi/lembaga pendidikan keagamaan dan kesejahteraan sosial	Persentase layanan kesejahteraan sosial bagi lembaga pendidikan keagamaan	100%		99,83%	99,94%
Meningkatnya peran Organisasi/Lembaga Keagamaan/SKPD Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	100%		11,77%	11,77%
Meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	100%	100%	100%	100%



Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja positif	75%		50%	66,67%
Meningkatnya kualitas manajemen administrasi pembangunan yang proporsional sesuai dengan kewenangan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan	75%		50%	66,67%
Meningkatnya hasil promosi potensi Daerah	Persentase peningkatan investasi	50%		50%	100%

5. Laporan Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020

Laporan pengukuran kinerja Sekretariat Daerah dimaksudkan untuk memberikan gambaran dalam hal pencapaian kinerja untuk Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini :

CAPAIAN IKU ESELON II

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun Lalu	Target	Capaian					Target Akhir Renstra	2020 terhadap target akhir Renstra (%)	Penanggung Jawab (Bagian)	Keterangan
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Capaian %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,84	80	-	81,99	-	82,33	100,6%	82	100,4%	Tata Usaha dan Keuangan	
2	Inovasi Publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	100%	1 inovasi	-	5	-	-	500%	2	5 SKPD	Organisasi	
3	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	T 2,9729	ST 3,075	-	-	-	-	-	10 Dokumen	2 Dokumen	Tata Pemerintahan	Nilai LPPD Tahun 2020 belum keluar
4	Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase dengan nilai RB minima B	<i>Belum dilakukan Penilaian RB terhadap SKPD</i>	70%				55%	78,57%				
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	52,02	80	-	-	91,24	-	175,4%	95	96,05%	Tata Usaha dan Keuangan	
		Nilai ZI Sekretariat Daerah	-	82	-	-	84,64	-	103,2%	85	99,6%	Tata Usaha dan Keuangan	
		Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	75,54	85	-	-	84,35	-	111,6%	85	99,24%	Tata Usaha dan Keuangan	
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3,7	3,5	-	-	-	-	-	-	3,7	3,7%	Tata Usaha dan Keuangan



No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun Lalu	Target	Capaian					Target Akhir Renstra	2020 terhadap target akhir Renstra (%)	Penanggung Jawab (Bagian)	Keterangan
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Capaian %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang diterapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perekonomian Pembangunan	

CAPAIAN IKU ESELON III

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun Lalu	Target	Capaian					Target Akhir Renstra	2020 terhadap target akhir Renstra (%)	Penanggung Jawab	Hasil Evaluasi
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Capaian %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	100%	100%	8%	14%	38%	22%	82%	100%	100%	Tata Pemerintahan	
		Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan	100%	100%	-	50%	-	100%	100%	100%	100%		
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	100%	100%	50%	-	-	50%	100%	100%	100%		
		Persentase fasilitasi pelaksanaan pilkada (Presiden/Gubernur/Bupati)	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%		
3	Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	100%	100%	-	100%	-	-	100%	100%	100%		



4	Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga	Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	100%	100%	25%	25%	50%	75%	175%	100%	100%		
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	-	70%	-	-	92,5%	-	132,5%			Organisasi	
6	Meningkatnya Nilai Area Perubahan Reformasi Birokrasi SKPD	Nilai Komponen Area Perubahan RB SKPD	<i>dilakukan Penilaian RB terhadap SKPD</i>	70	-	-	-	55	78.57%				
		Persentase SKPD dengan budaya kerja baik		50%	15%	-	-	-	17,5%	116,67%	30%		
7	Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80		100%	100%	-	-	100%	-	100%	100%		
		Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur(SOP)		100%	100%	-	-	-	95%	95%	100%		
8	Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif		100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%		
		Persentase Analisa dan evauasi jabatan sesuai proporsinya		100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%		
8	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu		100%	100%	39%	31%	23%	7%	100%	100%	20%	Pengadaan Barang/Jasa



9	Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	-	100%	5%	37.5%	12.5%	0	55%			Pengadaan Barang/Jasa	
10	Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	-	100%	5%	37.5%	12.5%	0	55%			Pengadaan Barang/Jasa	
11	Meningkatnya Pelayanan terhadap stakeholder dalam hal produk hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Produk hukum Daerah/lainnya yang harmonis	237%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Hukum	
12	Tingkat Penanganan masalah hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Persentase masalah hukum yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
13	Peningkatan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Hasil Penilaian Atas Pemenuhan HAM	Nilai 75	Nilai 75	-	-	-	79,64	100%				
14	Produk Hukum Daerah yang terdokumentasi dan di publikasikan	Persentase Produk Hukum Daerah yang terdokumentasi dan di publikasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
15	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah, kehumasan dan keprotokolan	Persentase penyebaran informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	75%	100%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	100%	Humas dan Keprotokolan	
		Persentase kegiatan kehumasan KDH/WKDH/ SKPD/ Masyarakat yang terlayani	100%	100%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	100%		



		Persentase kegiatan KDH/WKDH SKPD/ tamu daerah yang terlayani keprokolannya	100%	100%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	100%		
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	80%	100%	0	0	0	0	0%	100%	100%		
16	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/ SKPD/Masyarakat dengan baik	100%	100%	10%	30%	30%	13.17%	86.83%	100%		Umum	
17	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda terkait sarana prasarana/ aset milik Setda dikelola dengan baik	61,30%	100%	50%	0%	0%	42.52%	92.52%	100%			
18	Meningkatnya layanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan Pimpinan/Bagian lingkup Sekretariat Daerah	100%	100%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	25	Tata Usaha dan Keuangan	
19	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Peningkatan Komponen Area Perubahan RB Sekretariat Daerah	52,02	80	-	-	91,24	-	175,4%	95	96,05%		
		Peningkatan Komponen Area Perubahan ZI Sekretariat Daerah	-	82	-	-	84,64	-	103,2%	85	99,6%		
		Peningkatan Komponen Area Perubahan SAKIP Sekretariat Daerah	75,54	85	-	-	84,35	-	111,6%	85	99,24%		
		Peningkatan Komponen Area Perubahan SPIP Sekretariat Daerah	3,7	3,5	-	-	-	-	-	-	3,7	3,7%	



20	Meningkatnya kualitas pelaporan lingkup Sekretariat Daerah	Persentase peningkatan mutu penyusunan pelaporan/kinerja yang tepat waktu sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	25		
21	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Persentase peningkatan pelayanan lembaga keagamaan	86%	100%	9,6%	35,6%	30,1%	9,6%	84,93%	100%	84,93%	Kesejahteraan Rakyat	
22	Meningkatnya peran Organisasi/lembaga pendidikan keagamaan dan kesejahteraan sosial	Persentase layanan kesejahteraan sosial bagi lembaga pendidikan keagamaan	99,51	100%	25%	25%	25%	24,94%	99,94%	100%	99,94%		
23	Meningkatnya peran Organisasi/Lembaga Keagamaan/SKPD Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	61,74	100%	8,4%	2,4%	0,6%	0,4%	11,77%	100%	11,77%		
24	Meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	100%	100%	30%	20%	25%	25%	100%	100%	100%	Perekonomian Pembangunan	
25	Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja positif	60%	75%	10%	15%	20%	20%	10%	100%	75%		
26	Meningkatnya kualitas manajemen administrasi pembangunan yang proporsional sesuai dengan kewenangan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan	60%	75%	10%	15%	20%	20%	10%	100%	75%		
27	Meningkatnya hasil promosi potensi Daerah	Persentase peningkatan investasi	80%	50%	5%	10%	15%	10%	10%	100%	50%		

CAPAIAN IKU ESELON IV

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun Lalu	Target	Capaian					Target Akhir Renstra	2020 terhadap target akhir Renstra (%)	Bagian	Hasil Evaluasi
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Capaian %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Memfasilitasi permasalahan penyelenggaraan pemerintah umum	Jumlah rapat penyelenggaraan pemerintahan umum yang berhasil difasilitasi dengan baik	100%	50 Kali	4 Kali	7 Kali	19 Kali	11 Kali	82%	250 Kali	16,4%	Tata Pemerintahan	
2	Memfasilitasi kegiatan pembinaan Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan Kecamatan yang berhasil difasilitasi dengan baik	100%	11 Kali	3 Kali	3 Kali	2 Kali	3 Kali	100%				
3	Memfasilitasi kegiatan perayaan Hari Besar Nasional dan Kabupaten	Jumlah kegiatan perayaan Hari Besar Nasional dan Kabupaten yang berhasil difasilitasi dengan baik	100%	10 Kali	-	-	4 Kali	3 Kali	70%	50 Kali	14 %		
4	Memfasilitasi kegiatan SKPD untuk Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Jumlah kegiatan yang berhasil difasilitasi dengan baik untuk penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	100%	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	-	100%	10 Dokumen	20%		
5	Memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemilu dan pilkada melalui Tim Desk	Jumlah kegiatan penyelenggara pemilu dan pilkada (Tim Desk) yang difasilitasi dengan baik	83,33%	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	100%	10 Dokumen	20%		



6	Memfasilitasi permasalahan pada kegiatan tata batas antar daerah Kabupaten /Kota	Jumlah permasalahan pada kegiatan tata batas antar daerah Kabupaten/Kota yang berhasil difasilitasi dengan baik	100%	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	100%	5 Dokumen	20%		
7	Memfasilitasi kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri	Jumlah dokumen kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil difasilitasi dengan baik	100%	4 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	200%	23 Dokumen	22,5%		
8	Memfasilitasi koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah	100%	9 Kali	2 Kali	1 Kali	3 Kali	3 Kali	100%	40 Kali	22,5%		
9	Pelaksanaan penataan kelembagaan yang efektif	Jumlah SKPD yang telah memiliki uraian tugas rinci dan jelas	100%	40	40	-	-	-	100%	40		Organisasi	
		Jumlah SKPD yang memiliki SOTK yang jelas	100%	40	40	-	-		100%	40			
10	Pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan	Jumlah perangkat daerah yang memiliki informasi jabatan	100%	40	40	-	-		100%	40			
		Jumlah perangkat daerah yang memiliki evaluasi jabatan	100%	40	40	-	-		100%	40			
		Jumlah perangkat daerah yang dianalisis beban kerja	100%	40	40	-	-		100%	40			
11	Penguatan ketatalaksanaan	Jumlah dokumen SOP yang sudah ditetapkan	100%	5	-	-	-	5 SOP	100%	40			



		Jumlah regulasi standarisasi pedoman kerja	100%	5 Perbup/SK	-	-	-	5 Perbup/SK	100%	20			
12	Penguatan Layanan Publik	Jumlah unit pelayanan publik yang melaksanakan standar pelayanan publik	100%	3 SKPD	-	-	-	3 SKPD	100%	15			
		Jumlah SKPD yang berpartisipasi pada Inovasi pelayanan publik	100%	5 SKPD	-	5 SKPD	-	-	100%	30			
13	Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja Bupati Tanah Laut sesuai Permenpan 53 Tahun 2014	Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun sesuai Permenpan 53 Tahun 2014	100%	1	1	-	-	-	100%	1			
14	Pelaksanaan Pembinaan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah SKPD yang di diasistensi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	100%	40	40	-	-	-	100%	40			
15	Penguatan Sistem Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan fasilitasi reformasi birokrasi	100%	1	-	-	-	-	100%	1			
16	Pelaksanaan Penerapan Budaya Kerja	Jumlah SKPD yang dibina budaya kerja	100%	40	10	10	10	10	100%	40			
17	Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya	Jumlah terlaksanakannya pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya	100%	360 hari	90 hari	90 hari	90 hari	90 hari	100%	100%		Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksana 100%
18	Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	Jumlah paket pengadaan yang masuk dalam LPSE sesuai prosedur	100%	90 Paket	10 Paket	25 Paket	50 Paket	5 Paket	100%				Terlaksana 100%



19	Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah terlaksanakannya kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	100%	90 Paket	10 Paket	25 Paket	50 Paket	5 Paket	100%				Terlaksana 100%
20	Sosialisasi/ Penyuluh Hukum	Jumlah fasilitasi SKPD yang didampingi dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	100%	40 SKPD	27 SKPD	13 SKPD	0 SKPD	0 SKPD	100%				Terlaksana 100%
21	Memfasilitasi pembinaan SKPD dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	Jumlah fasilitasi pembinaan SKPD dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	100%	40 SKPD	27 SKPD	13 SKPD	0 SKPD	0 SKPD	100%				Terlaksana 100%
22	Memfasilitasi pengelolaan personil Bagian pengadaan barang/jasa	Jumlah fasilitasi pengelolaan personil Bagian Pengadaan Barang/Jasa	100%	25 Orang	13 Orang	10 Orang	0 Orang	2 Orang	100%				Terlaksana 100%
23	Mengoreksi, sinkronisasi dan Fasilitasi Penyusunan Perda, Perbup, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati	Jumlah produk hukum yang dikoreksi atau yang diharmonisasi	-	975	527	736	876	1175	120,51%			Hukum	Meningkat karena adanya produk hokum terkait penanganan dan penanggulangan Covid-19
24	Melakukan fasilitasi dan harmonisasi Peraturan Daerah sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik	Jumlah produk hukum daerah yang telah difasilitasi dan diharmonisasi sesuai ketentuan perundang-undangan	-	19	-	-	-	7	36,84%				Akibat dari Refocusing anggaran dan pembatasan perjalanan dinas baik anggota dewan maupun Dinas
25	Fasilitasi Naskah kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama atau naskah keperdataan lainnya	Jumlah kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama dan NPHD lainnya yang ditelaah, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	-	400%	40	412	456	497	124,25%				Adanya peningkatan NPHD dari SKPD pengusul



26	Fasilitasi penanganan masalah hukum dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Jumlah masalah hukum yang di tangani	-	4	2	2	3	6	150%				Adanya tambahan kasus di akhir tahun (TW IV)
27	Fasilitasi Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KPP HAM)	Jumlah kegiatan Rencana Aksi Nasional Asasi Manusia (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KPP HAM)	100%	4	1	2	3	4	100%				
28	Dokumentasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Registrasi dan dokumentasi produk hukum daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
		Jumlah Cetak Produk Hukum Daerah	-	320			-	320	100%				
29	Informasi Hukum	Jumlah Sosialisasi /Penyuluhan Hukum dan Seminar Hukum yang dilaksanakan		1			1	6	600%				
30	Publikasi Produk Hukum Daerah	Jumlah kegiatan pengelolaan website jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Kabupaten Tanah Laut		365 Hari	91	122	274	365	100%				
31	Memberikan pelayanan kehumasan kepada KDH/WKDH/ SKPD dan Masyarakat	Jumlah pelayanan kehumasan KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat	100%	200 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	100%	100%	100%	Humas dan Protokol	
32	Kegiatan KDH/WKDH/ SKPD dan Masyarakat terliput pendokumentasiannya	Jumlah liputan pendokumentasian KDH/WKDH/ SKPD dan Masyarakat	100%	300 kali	75 kali	75 kali	75 kali	75 kali	100%	100%	100%		
33	Pembangunan pemerintahan daerah yang terpublikasikan dan diberikan	Jumlah Publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah melalui media cetak, elektronik, online dan media sosial	100%	1000 berita	204 berita	250 berita	234 berita	312 berita	100%	100%	100%		



34	Kegiatan KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat terlayani peliputan, pemberitaanya	Jumlah liputan pemberitaan kegiatan KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat	100%	280 kali	42 kali	70 kali	84 kali	84 kali	100%	100%	100%		
35	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah dokumen pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	0%	1 kali	0	0	0	0	0%	0%	0%		
36	Kegiatan keprotokolanan KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat yang terlayani	Jumlah kegiatan KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat yang terlayani keprotokolannya	100%	430 kali	80 kali	110 kali	113 kali	127 kali	100%	100%	100%		
37	Pelayanan tamu KDH/WKDH yang terlayani	Jumlah tamu KDH/WKDH yang terlayani dengan baik	100%	28 kali	5 kali	7 kali	9 kali	7 kali	100%	100%	100%		
38	Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana/aset Sekretariat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana/aset milik Setda yang terpelihara dan terkelola dengan baik	60.09%	360 Hari	90 Hari	90 Hari	90 Hari	90 Hari	100%			Umum	
39	Melaksanakan Pelayanan Urusan pimpinan/Bagian/SKPD dan Masyarakat	Jumlah layanan pimpinan/Bagian/SKPD dan Masyarakat terlayani dengan baik	92%	360 Hari	90 Hari	90 Hari	90 Hari	90 Hari	100%				
40	Melaksanakan Pelayanan bidang transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah layanan transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah terlayani dengan baik	100%	360 Hari	90 Hari	90 Hari	90 Hari	90 Hari	100%				
41	Melaksanakan pengadaan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset yang didistribusikan di Lingkup Sekretariat Daerah	72.56%	2 Jenis	1 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	1 Jenis	100%				
42	Melaksanakan Pengelolaan, Pencatatan Aset dan Penghapusan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset Sekretariat Daerah yang terkelola dan tercatat dengan baik	85.61%	6 Penghapusan aset	1 Penghapusan aset	4 Penghapusan aset	1 Penghapusan aset	0 Penghapusan aset	100%				



43	Melaksanakan Rumusan Analisa Kebutuhan Barang di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen analisa kebutuhan barang berupa rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) sesuai standar dan kebutuhan di lingkup Sekretariat Daerah	68.56%	9 Dokumen	1	2	0	4	77.77%				
44	Memberikan pelayanan Surat Menyurat lingkup Setda sesuai SOP	Jumlah SKPD/Bagian lingkup Setda yang terlayani administrasi surat menyurat	100%	54	13	12	13	12	100%	54	54	Tata Usaha dan Kepegawaian	
45	Memberikan pelayanan Administrasi Kepegawaian lingkup Setda	Jumlah administrasi kepegawaian lingkup Setda yang terselesaikan	100%	250 Berkas	65	63	62	60	100%	250	100%		
46	Memberikan pelayanan Administrasi Pimpinan lingkup Setda	Persentase pelayanan administrasi pimpinan daerah (KDH/WKDH/ Sekda)	100%	100%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	100%		
47	Pengelolaan dan penyimpanan arsip lingkup Setda	Persentase arsip yang terkelola sesuai SOP	100%	100%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	100%		
48	Penyusunan Laporan Pelaksanaan RB Sekretariat Daerah dan ZI Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan RB Sekretariat Daerah dan ZI Sekretariat Daerah	2	2	-	-	2	-	100%	10	20%		
49	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	2	2	-	1	-	1	100%	40%	20%		
50	Menyusun laporan kinerja Setda	Jumlah laporan yang disusun sesuai ketentuan, (Bulanan, Triwulan/Rekon/ Semester, CALK, LPPD Setda, LAKIP Setda dan SKM Setda)	100%	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	100%		100 Dokumen		



51	Menyusun perencanaan dan keuangan Setda	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai aturan, (Renstra Setda, Renja, RKA, DPA)	100%	8 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	-	3 Dokumen	100%		31 Dokumen		
52	Memberikan fasilitasi kepada masyarakat berupa hibah, koordinasi dan kegiatan bidang sosial dan kebudayaan	Jumlah dokumen hibah yang masuk secara tepat syarat	63,3%	73 Dokumen	7 Dokumen	51 Dokumen	22 Dokumen	7 Dokumen	84,93%	-	-	Kesejahteraan Rakyat	11 Dokumen yang tidak mencairkan
		Jumlah kegiatan bidang sosial yang difasilitasi	63,3%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-	50%	-	-		Dana UKS dipindahkan ke refocusing
		Jumlah organisasi/ lembaga sosial keagamaan yang diberikan bantuan hibah	63,30%	73 Organisasi/ Lembaga Keagamaan	7 Organisasi/L embaga Keagamaan	51 Organisasi/ Lembaga Keagamaan	22 Organisasi/ Lembaga Keagamaan	7 Organisasi/ Lembaga Keagamaan	84,93%	-	60 Organisasi/ Lembaga Keagamaan		11 Dokumen yang tidak mencairkan karena Covid-19
53	Melakukan pengawasan terhadap pendidikan keagamaan	Jumlah pendidikan keagamaan yang dibina	66,60%	2 Pendidikan	2 Pendidikan	-	-	-	100%	-	-		
54	Melakukan kegiatan keagamaan	Jumlah organisasi/ lembaga keagamaan yang dibantu untuk kegiatan keagamaan	100%	2 Organisasi	1 Organisasi	-	1 Organisasi	-	100%	-	-		
		Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan	-										
55	Memberikan fasilitasi bantuan dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Guru TK/TPA, Madin/MIS, Ponpes, dan Penyuluh Agama yang diberi Intensif	99,90%	3090 Guru	3090 Guru	3090 Guru	3087 Guru	3085 Guru	99,83%	3090 Guru	3090 Guru		5 Guru yang tidak dicairkan karena meninggal dan mengundurkan diri
		Jumlah guru TK/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan penyuluh Agama yang di monitoring	99,90%	3090 Guru	3090 Guru	3090 Guru	3087 Guru	3085 Guru	99,83%	3090 Guru	3090 Guru		5 Guru yang tidak dicairkan karena meninggal dan mengundurkan diri
		Jumlah kegiatan bidang kesejahteraan yang di fasilitasi	-	1 Kegiatan	-	-	-	1 Kegiatan	100%	-	-		



56	Fasilitasi pengembangan potensi perekonomian	Jumlah laporan terkait potensi Perekonomian	100%	1 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	100%	5 Dokumen	40%	Perekonomian Pembangunan	
		Jumlah laporan permasalahan pengembangan potensi perekonomian	100%	1 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	33,33%		
		Jumlah laporan kegiatan promosi daerah	100%	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	100%	100%	5 Dokumen	40%		
57	Pembinaan Pengembangan dan Fasilitasi Perekonomian Pembangunan Daerah	Jumlah laporan fasilitasi Pembinaan BUMD	100%	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	100%	100%	5 Dokumen	40%		
		Jumlah dokumen analisis investasi Pemerintah Daerah kepada BUMD	100%	3 Dokumen	0	2 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	10 Dokumen	40%		
58	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Perekonomian Pembangunan	Jumlah laporan kegiatan TPID Kabupaten Tanah Laut	100%	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	100%	100%	5 Dokumen	40%		
		Jumlah laporan Pengawasan Program KUR	100%	2 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	10 Dokumen	40%		
		Jumlah Laporan Monitoring Perekonomian Daerah	100%	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	100%	100%	5 Dokumen	40%		

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2020

Tahun Anggaran 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar Rp 48.427.767.828,-

Tabel Anggaran Langsung dan Realisasi APBD Sekretariat Daerah Tahun 2020

NO	BAGIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tata Pemerintahan	1.825.944.200,00	1.018.174.144,00	55.76
2	Hukum	869.806.500,00	785.472.800,00	90.30
3	Organisasi	409.816.840,00	198.325.300,00	48.39
4	Perekonomian Pembangunan	579.517.620,00	495.803.760,00	85.55
5	Pengadaan Barang dan Jasa	736.109.060,00	564.037.766,00	76.62
6	Kesejahteraan Rakyat	19.774.259.800,00	18.582.115.400,00	93.97
7	Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan	3.429.958.100,00	3.152.605.602,00	91.91
8	Umum	15.530.710.185,00	11.927.749.227,00	76.80
9	Tata Usaha dan Keuangan	5.271.645.523,00	4.898.224.207,00	92.92
	JUMLAH	48.427.767.828,00	41.622.508.206,00	85.95

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2020 ini dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung Tupoksi Sekretariat Daerah yang terdiri dari 15 (lima belas) Program dan 46 (empat puluh enam) Kegiatan.

Tabel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PENDAPATAN	138.256.000,00	62.720.000,00	45,37
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	138.256.000,00	62.720.000,00	45,37
	Pendapatan Restribusi Daerah	138.256.000,00	54.920.000,00	39,72
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	7.800.000,00	0,00
2	BELANJA	66.197.829.354,00	56.675.451.002,00	85,62
	BELANJA OPERASI	61.897.456.220,00	52.879.392.702,00	85,43
	Belanja Pegawai	17.770.061.526,00	15.052.942.796,00	84,71
	Belanja Barang	44.127.394.694,00	37.826.446.906,00	85,72
3	BELANJA MODAL	4.300.373.134,00	3.796.058.300,00	88,27
	Belanja Peralatan dan Mesin	3.095.270.424,00	2.645.728.800,00	85,48

	Belanja Bangunan dan Gedung	1.100.802.710,00	1.048.237.000,00	95,22
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	30.000.000,00	29.947.500,00	99,83
	Belanja Aset Lainnya	74.300.000,00	72.145.000,00	97,10
	JUMLAH	66.059.573.354,00	56.612.731.002,00	85,70

Untuk anggaran pendapatan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2020 dari target Rp 138.256.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp 62.720.000,00 (45,37%), hal ini dikarenakan kurangnya pemakaian kekayaan daerah oleh masyarakat/SKPD sehubungan adanya Pandemi Covid-19.

2. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Tahun 2020

Untuk anggaran belanja program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 58.781.118.702,52,- dengan capaian realisasi sebesar Rp 51.736.538.235,00,- (88,02%), sedangkan untuk anggaran belanja program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 48.427.767.828,00,- dengan capaian realisasi sebesar Rp 35.142.616.694,00,- (85,70%). Terjadi penurunan capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 2,63%, hal ini dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang ditiadakan serta adanya rasionalisasi anggaran sehubungan dengan adanya Pandemi Covid-19. Terkait hal tersebut di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Perbandingan Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020

No	Program/Kegiatan Tahun 2019	Program/Kegiatan Tahun 2020	Anggaran (Rp)		% Realisasi	
			2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bagian Tata Pemerintahan						
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama antar Pemerintahan	963.245.400,00	1.613.792.200	55,19	55,76



	Kegiatan Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Pengamanan Batas Daerah	116.510.500,00	115.374.700	73,66	83,40
	Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri	Kegiatan Pembinaan dan Tata Kelola Pemerintahan Umum	17.094.900,00	154.787.600	44,59	51,19
	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama	829.640.000,00	1.343.629.900	52,81	51,02
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	71.297.700,00	212.152.000	42,18	74,07
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai – Nilai Budaya Bangsa	71.297.700,00	212.152.000	42,18	74,07
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		207.828.200,00		61,20	
	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa		207.828.200,00		61,20	
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan		9.658.200,00		28,78	
	Kegiatan Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah		9.658.200,00		28,78	
	Program Pendidikan Politik Masyarakat		57.464.800,00		82,44	
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		57.464.800,00		82,44	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		45.848.700,00		86,30	
	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		18.351.200,00		91,67	
	Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)		27.497.500,00		82,72	
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		37.237.500,00		50,78	
	Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam		37.237.500,00		50,78	



	Penyediaan Pelayanan Publik					
Bagian Organisasi						
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Program Pembinaan, Pengembangan, Penataan Kelembagaan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan	59.247.200,00	409.816.840	65,45	48,39
	Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja	59.247.200,00	107.445.800	64,45	30,13
	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan	Kegiatan Pembuatan ID Card Pegawai	521.584.400,00	37.720.800	63,97	99,65
	Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring Kelembagaan	Kegiatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	59.889.900,00	56.090.560	44,22	38,88
	Kegiatan Pembuatan Tufoksi dan Uraian Tugas	Kegiatan Pengembangan dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	32.863.900,00	48.339.020	48,34	70,60
	Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja	Kegiatan Pengembangan dan Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan	132.903.200,00	121.086.000	54,67	51,42
	Pembuatan Id Card Pegawai	Kegiatan Pengembangan dan Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	89.150.000,00	39.134.660	99,82	25,97
	Kegiatan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)		25.263.000,00		89,35	
	Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan Pejabat Struktural		56.627.400,00		51,39	
	Kegiatan Penyusunan Analisis Beban Kerja		45.741.000,00		73,83	
	Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Kinerja Pelayanan Publik		26.210.000,00		30,16	
	Kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur		23.690.000,00		65,14	
	Kegiatan Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah		29.246.000,00		71,23	



Bagian Hukum						
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Program Fasilitas Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan HAM, Dokumentasi Hukum	361.360.800,00	869.806.500	59,94	90,30
	Kegiatan Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintah dibawahnya	Kegiatan Fasilitas Produk Hukum	361.360.800,00	366.442.000	59,94	93,11
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum dan HAM Pemerintah Daerah	669.295.500,00	313.479.600	82,51	89,65
	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum	264.375.500,00	189.884.900	87,51	85,97
	Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan		404.920.000,00		79,35	
Bagian Pengadaan Barang/Jasa						
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Pembinaan, Pengelolaan, Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	278.919.850,00	736.109.060	87,92	76,62
	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan Pembinaan, Pengelolaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	278.919.850,00	311.531.840	87,92	93,82
	Program Kerjasama Pembangunan	Kegiatan Pembinaan dan Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	350.999.750,00	180.954.020	94,89	45,31
	Kegiatan Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	Kegiatan Pembinaan Kompetensi dan Evaluasi Pelaporan	216.000.000,00	243.623.200	93,55	77,90
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		134.999.750,00		97,03	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		198.719.850,00		91,64	
	Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		198.719.850,00		91,64	
Bagian Perekonomian Pembangunan						
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Program Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitas Perekonomian Pembangunan Daerah	149.009.800,00	579.517.620	76,84	85,55
	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Kegiatan Pembinaan, Fasilitas dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah	149.009.800,00	198.751.200	76,64	85,55



	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan dan Perdagangan	Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitas Usaha Bdan Usaha Milik Daerah (BUMD)	69.072.300,00	193.439.060	85,67	73,88
	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perekonomian Pembangunan	69.072.300,00	187.327.360	85,67	97,39
	Program Kerjasama Pembangunan		202.499.900,00		62,87	
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		202.499.900,00		62,87	
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		329.234.600,00		79,57	
	Kegiatan Pengembangan Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan		329.234.600,00		79,57	
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		70.000.000,00		77,05	
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		70.000.000,00		77,05	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah		267.191.600,00		75,54	
	Kegiatan Peningkatan Manajemen Investasi Daerah		267.191.600,00		75,54	
Bagian Kesejahteraan Rakyat						
	Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Rakyat	37.597.500,00	19.774.259.800	87,98	93,97
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kegiatan Pembinaan, Pengembangan, Pemberdayaa Sosail dan Kebudayaan	37.597.500,00	131.869.000	87,98	61,76
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kegiatan Pembinaan, Pengembangan, Pemberdayaan Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat	1.377.373.100,00	18.485.415.200	30,09	99,35
	Kegiatan Peningkatan dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Agama	629.904.500,00	1.156.975.600	0	11,77



	Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat		747.468.600,00		55,45	
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		2.897.719.300,00		88,01	
	Kegiatan Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan		947.600.000,00		96,07	
	Kegiatan Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan		724.000.000,00		84,10	
	Program Pendidikan Non Formal		17.470.517.000,00		99,51	
	Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal		17.470.517.000,00		99,51	
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga		134.999.200,00		98,50	
	Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi		134.999.200,00		98,50	
Bagian Humas dan Protokol						
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Program Kerjasama Informasi dan Mass Media	306.039.648,00	2.392.390.200	91,09	97,35
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	306.039.648,00	2.392.390.200	91,09	97,35
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Program Pembinaan, Pengembangan, Fasilitasi Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan	386.072.400,00	1.037.567.900	98,49	79,38
	Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Kegiatan Pengembangan Hubungan Masyarakat	386.072.400,00	586.311.700	98,49	79,60
	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Permanen Pembangunan	2.840.442.940,00	71.183.800	95,12	0,00
	Kegiatan Penyebarluasan	Fasilitasi dan Pelayanan Protokol Pemerintah Daerah	678.908.800,00	380.072.400	88,06	93,89



	Informasi Pembangunan Daerah					
	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		2.161.534.140,00		97,34	
Bagian Umum						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.719.427.968,90	3.479.413.560	74,63	65,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kegiatan Penyediaan Jasa, Bahan, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	2.548.500.000,00	3.356.913.560	61,26	64,02
	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kegiatan Penyusunan Tabulasi Aset Daerah	639.748.000,00	119.500.000	51,27	92,57
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	175.000.000,00	9.830.296.625	45,12	80,44
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prarana Perkantoran	76.741.268,90	2.625.542.724	72,90	87,22
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	131.075.700,00	3.796.123.591	79,91	73,24
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	3.148.363.000,00	1.240.064.000	91,65	98,33
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	11.094.866.001,68	690.098.600	86,38	84,34
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Jabatan/Dinas	3.571.654.000,00	493.665.000	96,07	83,17
	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas	508.655.491,88	329.321.710	75,68	56,63
	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Program Fasilitas Kegiatan dan Kebijakan KDH dan WKDH	116.243.437,00	2.221.000.000	58,20	89,05
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan dan Jasa Bagi KDH/WKDH	715.125.000,00	75.000.000	70,41	79,19
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi KDH/WKDH	724.129.671,00	890.000.000	91,46	98,27



	Kegiatan Pengadaan Mebeleur	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Rumah Jabatan	196.688.743,80	1.056.000.000	43,57	73,29
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH	778.875.000,00	200.000.000	86,21	96,63
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		2.655.707.158,00		81,52	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		419.050.000,00		72,80	
	Kegiatan Rehabilitas Sedang/Berat Rumah Jabatan		838.765.000,00		88,53	
	Kegiatan Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor		569.972.500,00		98,99	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah		148.688.500,00		68,56	
	Kegiatan Penyusunan Tabulasi Data Aset Tetap		148.688.500,00		68,56	
Bagian Tata Usaha dan Keuangan						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administasi Perkantoran	10.247.305.794,00	5.190.124.423	92,63	94,07
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi	36.135.000,00	1.802.745.223	20,09	99,16
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	132.080.960,00	3.387.379.200	95,54	91,37
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Staf Ahli Bupati	85.104.000,00	0	29,87	0,00
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.822.500,00	20.000.000	0	0,00
	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	6.716.155.338,00	20.000.000	92,63	0,00
	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam Daerah	Kegiatan Penagdaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	335.903.100,00	0	95,34	0,00

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	2.940.104.896,00	61.521.100	94,97	25,47
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD	146.500.000,00	40.550.000	88,28	19,15
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	146.500.000,00	10.171.100	88,28	45,35
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	28.161.000,00	10.800.000	24,96	30,49
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		28.161.000,00		24,96	
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		7.404.300,00		0	
	Kegiatan Pengadaan Sarana Pengelohan dan Penyimpanan Arsip		7.404.300,00		0	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		18.198.000,00		73,85	
	Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS		18.198.000,00		73,85	

3. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Tahun Anggaran 2020 Sekretariat Daerah telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan DPA SKPD Tahun Anggaran 2020, dengan total anggaran sebesar Rp 48.427.767.828,00,- dengan jumlah Program 15 (lima belas) dan 46 (empat puluh enam) Kegiatan. Adanya beberapa kegiatan yang ditiadakan/tidak dilaksanakan serta adanya rasionalisasi anggaran sehubungan dengan adanya Pandemi Covid-19. Tekait realisasi keuangan atas pelaksanaan sasaran dan program dapat dilihat pada tabel berikut ini :



SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN PROGRAM (RP)	PENANGGUNG JAWAB	
1	2	3	4	5	4	
Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD - Penyusunan Laporan Keuangan - Pengendalian, evaluasi dan 	61.521.100,00	Bagian Tata Usaha dan Keuangan	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Layanan Sekretariat Daerah	Persentase Bagian dengan Nilai IKM Minimal Baik					
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariatn Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah					
	Nilai ZI Sekretariat Daerah					
	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah					
Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepemerintahan yang baik Lingkup Sekretariat Daerah	Peningkatan Komponen Area Perubahan RB Sekretariat Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja SKPD			Bagian Tata Usaha dan Keuangan	
	Peningkatan Komponen Area Perubahan ZI Sekretariat Daerah					
	Peningkatan Komponen SAKIP Sekretariat Daerah					
	Peningkatan unsur SPIP Sekretariat Daerah					
Meningkatnya layanan Administrasi umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Pimpinan Bagian Lingkup Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana Prasarana Kerja dan Kullitas Sumber Daya Manusia - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kemampuan teknis aparatur - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya - Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi - Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD - Fasilitasi kegiatan Staf Ahli Bupati 	5.210.124.423	Bagian Tata Usaha dan Keuangan	
Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah Inovasi SKPD yang didaftarkan	Pembinaan, pengembangan, Penataan Kelembagaan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan	Pengembangan dan Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	409.816.840,00	Bagian Organisasi	
Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B					Penerapan RB Pemerintah Daerah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB					Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10					Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja



Meningkatnya Nilai Area Perubahan RB SKPD	Nilai Komponen Area Perubahan RB SKPD		Penerapan RB Pemerintah Daerah				
	Persentase SKPD dengan budaya kerja baik		Penerapan RB Pemerintah Daerah				
Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80		Pengembangan dan Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik				
	Persentase SKPD yang memiliki standar Operasional Prosedur (SOP)		Pembuatan ID Card Pegawai				
Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase Perangkat Daerah dengan kelembagaan yang efektif		Pengembangan dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah				
	Persentase analisa dan evaluasi jabatan sesuai proporsinya		Pengembangan dan Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan				
Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Pengamanan Batas Daerah	Pembinaan dan Tata Kelola Pemerintahan umum		Bagian Tata Pemerintahan		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah	Persentase Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintah Umum yang berhasil di tindaklanjuti						
	Persentase Pemenuhan IKK						
	Persentase Permasalahan pada kegiatan tata batas antar Daerah yang berhasil ditindaklanjuti						
Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di luar negeri yang berhasil ditindaklanjuti	Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama Daerah	1.613.792.200,00					
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai budaya bangsa	Persentase pelaksanaan hari besar Nasional/Kabupaten	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	212.152.000,00			
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabuptaen Tanah Laut secara Elektronik	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standard an tepat waktu	Pembinaan, Pengelolaan, Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan, Pengelolaan dan layanan pengadaan secara elektronik - Pembinaan dan fasilitasi pengadaan barang/jasa pemerintah 	736.109.060,00	Bagian Pengadaan Barang/Jasa		
Meningkatnya Pelayanan terhadap	Persentase Produk Hukum	Fasilitasi Produk Hukum Daerah,	Fasilitasi produk hukum daerah	869.806.500,00	Bagian Hukum		



stakeholder dalam hal produk hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Daerah/lainnya yang harmonis	Bantuan Hukum dan HAM, Dokumentasi Hukum			
Tingkat Penanganan masalah hukum di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut	Persentase Masalah hukum yang diselesaikan		Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM Pemerintah Daerah		
Peningkatan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Hasil Penilaian atas Pemenuhan HAM				
Produk Hukum Daerah yang terdokumentasi dan di publikasikan	Persentase Produk Hukum Daerah yang terdokumentasi dan di publikasikan		Fasilitasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum		
Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan Daerah, kehumasan dan keprotokolan	Persentase penyebaran informasi/ pemberitaan pembangunan pemerintah Daerah yang bias di akses masyarakat melalui media	Kerjasama Informasi dan Mass Media	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	2.392.390.200,00	Humas dan Keprotokolan
	Persentase kegiatan kehumasan KDH/WKDH/SKPD/Masyarakat yang terlayani	Pembinaan, Pengembangan, Fasilitasi Humas dan Keprotokolan	- Pengembangan Humas - Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan	1.037.567.900,00	
	Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ta mu Daerah yang terlayani kerotokolannya		Fasilitasi dan Pelayanan Protokol Pemerintah Daerah		
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-		
Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/skp d/Masyarakat dengan baik	- Program Pemenuhan , Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan kualitas Sumber Daya Manusia	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Peerkantoran - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - Penyediaan Makanan dan Minuman - Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Rumah Jabatan /Dinas - Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Jabatan/Dinas - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan /Dinas	9.830.296.625	Bagian Umum
		- Program Fasilitasi Kegiatan dan Kebijakan KDH dan WKDH	- Penyediaan Pelengkapan dan jasa bagi KDH/WKDH - Rapat-rapat koordinasi dan	2.221.000.000	



			<ul style="list-style-type: none"> konsultasi KDH/WKDH - Penyediaan Makanan dan Minuman rumah jabatan - Pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH 		
Meningkatnya Pengelolaan Barang/Aset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda terkait sarana prasarana / aset milik Setda dikelola dengan baik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran - Penyusunan Tabulasi Aset Daerah 	3.479.413.560	
Meningkatnya kualitas layanan untuk kesejahteraan rakyat	Persentase layanan keagamaan yang ditindaklanjuti	Pembinaa, Pengembangan dan Pemberdayaan Kesra		19.774.259.800,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya layanan bantuan sosial keagamaan	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan				
Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang di terapkan	Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi Perekonomian Pembangunan Daerah	Pembinaan, Fasilitasi dan Pengembangan Potensi perekonomian Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi Usaha BUMD - Monev dan Pelaporan Perekonomian Pembangunan 	579.517.620,00	Perekonomian Pembangunan
Meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase kebijakan penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan				

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

LKj bagi Sekretariat Daerah mempunyai makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam pengukuran kinerja yang telah dilakukan dan dikuatkan dengan data dukung yang menguraikan bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2020, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2020, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya, juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Secara umum pencapaian kinerja sasaran telah memenuhi target sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, namun masih terdapat beberapa indikator sasaran yang tidak tercapai yaitu untuk indikator sasaran Eselon III yang belum tercapai 3 (tiga) indikator kemudian indikator sasaran Eselon IV yang belum tercapai 7 (tujuh) indikator, hal ini dikarenakan program dan kegiatan sebagai penunjang indikator sasaran tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dari hasil analisa pencapaian sasaran

dan IKU terhadap unit kerja lingkup Sekretariat Daerah teridentifikasi beberapa hambatan antara lain :

1. Terbenturnya jadwal kegiatan Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (*Coffee Morning*) dengan jadwal undangan lain yang sudah dijadwalkan.
2. Bobot nilai per IKK terdapat banyak kekurangan karena realisasi capaian IKK dari SKPD yang kecil atau bahkan kegiatannya tidak / belum dilaksanakan
3. Belum dilakukan reviu oleh APIP terhadap dokumen LPPD SKPD
4. Adanya penyampaian opsi-opsi maupun usulan titik segmen batas yang berbeda-beda oleh pihak Kabupaten Banjar pada setiap pelaksanaan rapat koordinasi yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
5. Penyusunan Dokumen Kerjasama yang tidak sesuai dengan SOP
6. Kurangnya koordinasi SKPD terkait agenda kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dalam rangka Hari Besar Nasional/Babupaten
7. Kurangnya komitmen dan keterlibatan pimpinan dan seluruh pejabat struktural dalam kegiatan Akuntabilitas Kinerja.
8. Kurang selarasnya dokumen AKIP Karena laporan kinerja disusun berdasarkan dokumen perencanaan.
9. Belum terlaksananya optimalisasi internalisasi roadmap RB sampai dengan level organisasi terendah
10. Belum berperan optimalnya agen perubahan dan role model dalam menjalankan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi.
11. Belum optimalnya Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.
12. Masih belum ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pedoman pengembangan budaya kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
13. Masih kurangnya kesadaran ASN akan pentingnya budaya kerja yang baik.
14. Kurangnya komitmen bersama antar pimpinan dan seluruh Kepala SKPD dalam menciptakan budaya kerja yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
15. Masih ada beberapa SKPD yang kualitas pelayanannya kurang baik
16. Masih ada SKPD yang belum memperbaharui SOP SKPDnya walaupun nomenklaturnya sudah berubah.

17. Dalam penyusunan uraian tugas, SKPD belum dapat membedakan antara uraian tugas jabatan dengan rincian kegiatan jabatan
18. Masih kurangnya pengetahuan dari pemangku jabatan di SKPD tentang informasi tiap jabatan di SKPD-nya.
19. Sumber Daya Manusia Pelayanan belum sepenuhnya menerapkan *Service Excellent*
20. Adanya beberapa komponen Area Perubahan Reformasi Birokrasi yang belum sepenuhnya terpenuhi
21. Sumber Daya Manusia pengelolaan Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya paham terhadap sub komponen Area Perubahan Reformasi Birokrasi
22. Adanya beberapa komponen Area Perubahan Zona Integritas yang belum sepenuhnya terpenuhi
23. Sumber Daya Manusia pengelolaan Zona Integritas belum sepenuhnya paham terhadap sub komponen Area Perubahan Zona Integritas
24. Petugas penyusun laporan kinerja kurang memahami maksud komponen SAKIP;
25. Petugas penyusun laporan kinerja kurang memahami maksud unsur-unsur SPIP;
26. Kurangnya pemahaman para PA/KPA dan PPK dalam menyusun Perencanaan Pengadaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
27. Pelaksanaan pengelolaan system informasi pengadaan barang/jasa tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya secara elektronik (Pengadaan Langsung secara elektronik (e-PL) masih ada yang dilaksanakan secara manual, hal tersebut terjadi karena pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standard an Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, masih membolehkan pelaksanaan secara manual);
28. Sulitnya membina hubungan dengan para pemangku kepentingan guna menciptakan proses pengadaan barang/jasa yang selaras
29. Terlalu banyaknya draf produk hukum daerah yang masuk terutama draf keputusan bupati dan *draf* rancangan peraturan bupati atau belum adanya simplikasi baik produk hukum pengaturan maupun penetapan
30. Prosedur penetapan pembuatan produk hukum yang panjang sehingga perjalanan dari mulai *draf* s/d penetapan terkesan lama

31. belum siapnya SKPD pengusul terhadap draft dan kajian rancangan peraturan daerah (naskah akademik)
32. kurang tanggapnya SKPD atau Pemberi Kuasa dalam memenuhi berkas atau dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan membuat jawaban dan bukti-bukti didalam persidangan
33. Proses penginputan atau pengunggahan data serta file produk hukum daerah dilakukan setelah proses pembaharuan terhadap website JDIH selesai sekitar bulan Juli 2021
34. File atau dokumen Peraturan Daerah Tahun 2005 kebawah yang belum ditemukan arsipnya karena proses pengarsipan waktu itu masih belum sebgus saat ini. kebawah dan Peraturan Bupati Tahun 2013 kebawah tidak tersedia karena terkendala tidak adanya file atau dokumen karena ditahun-tahun tersebut Perbup langsung dicetak oleh SKPD masing-masing.
35. Kurang tertibnya usulan RKBU dari Bagian-Bagian sehingga mengakibatkan kurang terakomodir kebutuhan di setiap Bagian.
36. Kurangnya kesadaran dalam memelihara asset daerah.
37. Banyaknya jumlah asset yang tidak ditemukan dan dalam keadaan rusak berat (RB)
38. Kurangnya komitmen dari SKPD yang menjadi lintas koordinasi dalam menyampaikan data yang diperlukan
39. Koordinasi dengan para penentu kebijakan, dengan para pelaksana hasil kebijakan, serta akademisi yang kompeten harus lebih ditingkatkan sehingga dampak dan hasil secara kualitatif dapat dinilai secara kuantitatif
40. Bagi pengurus organisasi /kelembagaan keagamaan yang memohon bantuan hibah fisik maupun kegiatan kebanyakan tidak memahami bagaimana membuat proposal.
41. Lambatnya dalam hal pencairan dana hibah dikarenakan administrasi dari pemohon proposal hibah yang tidak lengkap.
42. Permintaan RAB proposal pencairan dengan permintaan RAB proposal awal berbeda yang akan dikerjakan.

Beberapa hambatan yang terjadi, akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan

menjadikan Lkj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Strategi yang dapat dilakukan untuk peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut di tahun mendatang antara lain :

1. Mensinkronkan jadwal kegiatan rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (*Coffee Morning*) agar tidak terbentur dengan jadwal agenda
2. Mengadakan sosialisasi penyusunan LPPD dengan narasumber dari Tim Evaluasi Pusat
3. Mengajukan kepada pimpinan usulan *reward* dan *punishment* terhadap SKPD terkait penyusunan dan skor LPPD
4. Adanya penilaian terhadap LPPD SKPD layaknya seperti SPIP, Reformasi Birokrasi, Zona Integritas dan SAKIP
5. Melaksanakan koordinasi dengan Tim PBD Provinsi Kalimantan Selatan untuk segera melakukan fasilitasi survey lapangan untuk persiapan pemancangan batas Penegasan Batas Daerah di titik-titik yang disepakati.
6. Meningkatkan koordinasi dengan Tim PBD Kalimantan Selatan untuk penyelesaian dokumen-dokumen yang diperlukan untuk Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penegasan Batas Daerah
7. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait rencana kegiatan-kegiatan penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah yang akan direalisasikan di tahun anggaran berjalan maupun anggaran tahun berikutnya.
8. Membuat SOP terkait penyusunan Dokumen Kerjasama Daerah agar SKPD dapat lebih awal menyampaikan *draft* dokumen tersebut sehingga Bagian Tata Pemerintahan dapat memfasilitasi kegiatan secara maksimal
9. Lebih cepat mengkoordinasikan dalam menyinkronkan jadwal agenda kegiatan Pejabat Provinsi Kalimantan Selatan yang akan di undang pada Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut.
10. Memberikan *reward* dan *punishment* kepada SKPD sesuai dengan nilai beberapa indikator salah satunya adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperoleh.



11. Mengintegrasikan seluruh sistem pengukuran kinerja individu dan organisasi.
12. Dilaksanakan *workshop* dalam rangka peningkatan aparatur pengawas dan auditor
13. Optimalisasi internalisasi roadmap RB sampai dengan level organisasi terendah
14. Optimalisasi agen perubahan dan role model dalam menjalankan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi.
15. Melaksanakan rapat Tim secara berkala agar reformasi birokrasi bisa menjalankan tugas secara optimal.
16. Menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang padoman pengembangan budaya kerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tanah Laut.
17. Melaksanakan sosialisasi terhadap nilai-nilai yang sudah ditetapkan.
18. Membentuk Kelompok Budaya Kerja (KBK) pada seluruh SKPD.
19. meningkatkan komitmen bersama antar pimpinan dan seluruh Kepala SKPD dalam menciptakan budaya kerja yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
20. Meningkatkan peran Agen Perubahan yaitu agen perubahan yang benar-benar dapat menjadi contoh dan teladan (*role model*) dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi
21. Memberikan reward dan punishment bagi SKPD yang terlambat menyampaikan Laporan Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat di SKPD
22. Mengadakan bimtek tentang SOP untuk lebih mengetahui tata cara penyusunan SOP SKPD.
23. Bimbingan teknis *Service Excellent* untuk Sumber Daya Manusia pelayanan
24. Bimtek terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
25. Melakukan koordinasi lebih intens ke Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten
26. Bimtek terkait Pelaksanaan Zona Integritas
27. Koordinasi dengan Tim Pembina ZI Kabupaten secara intens
28. Melaksanakan Bimtek terkait penyusunan Laporan Kinerja;
29. Melaksanakan Monev terkait capaian kinerja
30. Koordinasi lebih intens dengan Pembina SAKIP Kabupaten
31. Melaksanakan Bimtek terkait Manajemen Risiko
32. Melaksanakan Monev terkait Rencana Tindak Lanjut Risiko



33. Koordinasi lebih intens dengan Pembina SPIP Kabupaten
34. Melaksanakan pelatihan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
35. Mengagendakan rapat dengan para pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi tentang pengadaan barang/jasa.
36. Petugas perlu menambahkan kolom baru yaitu kolom “tanggal berkas kembali/diterima” setelah perbaikan oleh SKPD pada buku tanda terima, sehingga bisa dilihat SKPD mana yang telah mengembalikan dan yang belum mengembalikan berkas.
37. Penambahan anggaran pembuatan (naskah akademik) untuk kajian Rancangan Peraturan Daerah
38. Tetap terus melakukan koordinasi dan komunikasi dalam persiapan dalam penanganan perkara.
39. Memberikan sanksi administratif yaitu Pemotongan TPP sebesar 2% kepada SKPD yang bersangkutan
40. Melakukan pengumpulan dan pencarian terhadap dokumen-dokumen yang belum lengkap baik diruang arsip atau pada SKPD-SKPD terkait secara bertahap
41. Meningkatkan kualitas pemberitaan dan publikasi kegiatan pemerintah daerah melalui media sosial yang di kelola pada bagian humas dan keprotokolan.
42. Meningkatkan kerja sama dengan seluruh instansi dalam pelaksanaan kegiatan KDH/WKDH agar tidak terjadi tumpang tindih jadwal kegiatan sehingga seluruh kegiatan dapat terfasilitasi dan terpublikasikan.
43. Meningkatkan kualitas sarana penyimpanan dokumentasi kegiatan pimpinan.
44. Meningkatkan kualitas pelayanan keprotokolan kegiatan pimpinan.
45. Meningkatkan kerja sama dengan seluruh instansi dalam pelaksanaan kegiatan KDH/WKDH agar tidak terjadi tumpang tindih jadwal kegiatan sehingga seluruh kegiatan dapat terlayani keprotokolannya dengan baik.
46. Membuat surat edaran tentang penggunaan asset Daerah
47. Membuat berita acara penelusuran asset yang tidak ditemukan dan diusulkan untuk dihapus atau hibah.
48. Menyusun time *schedule* proses penerapan kebijakan penyelesaian permasalahan bidang perekonomian

49. Melaksanakan sosialisasi kepada penerima pencairan hibah secara langsung dan sosialisasi bagaimana membuat laporan keuangan bantuan hibah
50. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas realisasi kemajuan pelaksanaan hibah kepada pemohon proposal secara berkelanjutan serta pengawasan terus menerus

C. Penyelamatan UMKM dan Pemberian Pelayanan Publik Di Era Pandemi Covid-19

Pada awal Maret 2020 muncul pandemi Covid-19 di Indonesia, dan hal ini telah meluluhlantakan sendi-sendi perekonomian Indonesia. Dampak ini tidak hanya dirasakan secara nasional tapi juga di daerah-daerah. Salah satu indikasinya adalah dengan banyaknya UMKM di daerah yang mati suri karena daya beli masyarakat yang mulai rendah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah mengambil langkah kebijakan yang brilian untuk mengatasi pandemi ini agar masyarakat tidak begitu terdampak perekonomiannya khususnya para pelaku usaha UMKM, hal ini sejalan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 44 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Daerah sebagai Langkah Kebijakan mengatasi Krisis Akibat Dampak Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui program dan kegiatan pada Bagian-bagian lingkup Sekretariat Daerah adalah ;

1. Operasi Gas LPG 3 Kg Bersubsidi

Melalui surat Bupati Nomor 500/1330-Perekobang/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 Perihal Permintaan kegiatan Operasi Pasar Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di 11 Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, telah melakukan operasi gas LPG 3 Kg bersubsidi selama masa Covid-19 dari bulan April s/d Oktober Tahun 2020 sebanyak 9800 tabung. Operasi pasar dilaksanakan secara bergantian di tiap Kecamatan dengan tujuan pemerataan dan untuk melakukan penetrasi harga gas LPG di pasaran/masyarakat yang mencapai Rp 30.000 s/d Rp 40.000 per tabung selama pandemi Covid-19.



2. Operasi Pasar Gula Pasir

Melalui Surat Bupati Tanah Laut Nomor 500/Perekobang/III/2020 mengajukan permohonan operasi pasar untuk komoditas gula pasir, dan pada tanggal 23 April Bulog menginformasikan bahwa Kabupaten Tanah Laut untuk tahap pertama mendapat kuota 2.500 Kg agar disalurkan dalam operasi pasar di masa pandemi Covid-19.



3. Program Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat melalui Kredit tanpa Agunan dan Rente untuk Ekonomi Lemah (GAPURA KAROMAH)

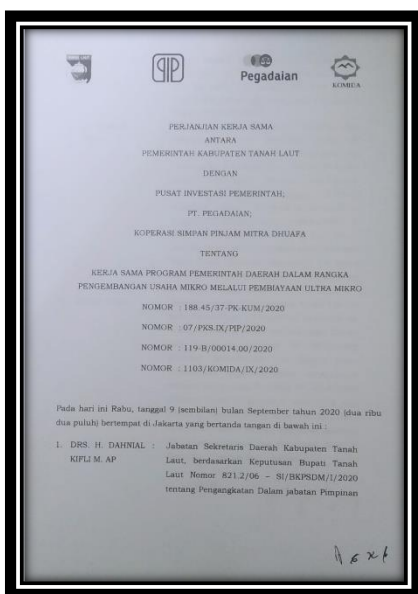
Melalui Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 44 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Daerah sebagai Langkah Kebijakan Mengatasi Krisis Akibat Dampak Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) untuk Program GAPURA KAROMAH, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memberikan bantuan kepada para pelaku usaha mikro yang telah menerima pinjaman modal kerja tanpa agunan dan bunga 0% serta memberikan keringanan bagi para debitur program GAPURA

KAROMAH yaitu memberikan keringanan penundaan pembayaran angsuran sampai dengan akhir tahun 2020 melalui program restrukturisasi kredit.



4. Program UMi dan Pendampingan Usaha

Program UMi adalah pembiayaan Ultra Mikro dengan sasaran para pelaku usaha mikro untuk membantu para pelaku usaha mikro selama pandemi Covid-19, diberlakukan keringanan pembayaran dengan cara penundaan pembayaran angsuran hingga akhir Desember 2020 dan juga dilakukan pendampingan bagi pelaku UMK yang telah menjadi debitur UMi dalam bentuk pelatihan pemasaran, bantuan promosi dan jenis pendampingan lainnya sesuai kebutuhan.



Selanjutnya pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Bagian PBJ di era pandemi Covid-19 adalah dengan menerbitkan Surat Edaran dari LKPP yang berisi



tentang mekanisme baru pengadaan barang dan jasa dalam masa penanganan wabah Virus Corona di Indonesia mengakibatkan prosedur pelayanan publik dan prosedur pengadaan barang/jasa kondisi darurat harus dilakukan lebih sederhana dan berbeda dengan melalui penunjukan langsung, yaitu Pengguna Anggaran (PA) memerintahkan PPK menunjuk penyedia melaksanakan pekerjaan berdasarkan kebutuhan PA untuk penanganan Covid-19.

Direalokasinya Anggaran untuk penanganan darurat wabah Covid-19 yang berdampak pada :

1. Banyak paket yang tidak jadi ditenderkan karena adanya realokasi anggaran untuk penanganan darurat wabah Covid-19.
2. Terbatasnya personil UKPBJ dalam mengikuti bimbingan teknis secara tatap muka langsung dan lebih diarahkan untuk mengikuti bimtek secara *daring* (dalam jaringan).
3. Terbatasnya penyelenggaraan kegiatan pembinaan pelaku pengadaan.

Pelayanan publik pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa, khususnya LPSE, diarahkan untuk tidak bertatap muka langsung dan dapat dilakukan melalui *system* saja.

Adanya perubahan Pelayanan Publik terkait prosedur registrasi dan verifikasi bagi pelaku usaha yang dilakukan oleh verifikator LPSE pada tahapan/proses verifikasi dokumen yang sebelumnya dilakukan dengan tatap muka (pelaku usaha datang ke kantor LPSE) dengan membawa dokumen asli menjadi dilakukan secara *daring*.

Demikian laporan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut ini dibuat, semoga dapat menjadi salah satu bahan yang dapat memberikan data dan informasi untuk pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja.

Pelaihari, 26 Januari 2021

Sekretaris Daerah,
Kabupaten Tanah Laut

Drs. H. DAHNIAL KIFLI,MAP
NIP. 19640425 1987033 1 012



INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON II, ESELON III, ESELON IV SEKRETARIAT DAERAH



SETELAH EVALUASI

KABUPATEN TANAH LAUT

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	Kinerja Utama/Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Rumus	Penanggungjawab/ Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM SETDA	Sekda dan Bagian Tata Usaha dan Keuangan
2	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	Jumlah Inovasi SKPD yang didaftarkan dalam kompetisi Inovasi	Sekda dan Bagian Organisasi
3.1	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	Skor yang diperoleh dari hasil penilaian LPPD oleh Kemendagri	Sekda dan Bagian Tata Pemerintahan
3.2	Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	$\frac{\text{Jumlah SKPD dengan nilai RB minimal B}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	Sekda dan Bagian Organisasi
3.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	$\frac{\text{Jumlah SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	Sekda dan Bagian Organisasi
3.4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	Nilai yang diperoleh dari penilaian RB oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Sekda dan Bagian Tata Usaha dan Keuangan
		Nilai ZI Sekretariat Daerah	Nilai yang diperoleh dari penilaian ZI oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Sekda dan Bagian Tata Usaha dan Keuangan
		Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai yang diperoleh dari penilaian SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut	Sekda dan Bagian Tata Usaha dan Keuangan
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	Nilai yang diperoleh dari penilaian SPIP oleh BPKP Prov. KAL-SEL dan Inspektorat Kabupaten Tanah Laut	Sekda dan Bagian Tata Usaha dan Keuangan
4	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	$\frac{\sum \text{kebijakan perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{kebijakan perekonomian dan pembangunan yang dihasilkan}} \times 100\%$	Sekda dan Bagian Perekonomian Pembangunan

SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. DAHNIAL KIFLI, MAP
NIP. 19640425 198703 1 012

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
ESELON IIB
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NO.	Kinerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Rumus	Penanggungjawab /Sumber Data
1	2		4	5
1	Meningkatnya Capaian Administrasi Hukum, Pemerintahan dan Organisasi	Persentase Capaian Kinerja Bidang Administrasi Hukum		ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN
		Persentase Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan		
		Persentase Capaian Kinerja Bidang Organisasi		
2	Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Ekonomi, Pelayanan Barang/Jasa dan Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Kinerja di Bidang Ekonomi		ASISTEN BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Persentase Capaian Kinerja di Bidang Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa		
		Persentase Capaian Kinerja di Bidang Pelayanan Kesejahteraan Rakyat		
3	Meningkatnya Capaian Kinerja Administrasi di Bidang Humas Protokol, Umum dan Tata Usaha Keuangan	Persentase Capaian Kinerja Administrasi di Bidang Humas Protokol		ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM
		Persentase Capaian Kinerja Administrasi di Bidang Umum		
		Persentase Capaian Kinerja Administrasi di Bidang Tata Usaha Keuangan		

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
ESELON III
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NO.	Kinerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Rumus	Penanggungjawab /Sumber Data
1	2		4	5
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan layanan Sekretariat Daerah	Persentase Bagian dengan nilai IKM Minimal Baik	$\frac{\sum \text{Bagian dengan nilai IKM Minimal Baik}}{\sum \text{Bagian Lingkup Setda}} \times 100\%$	Bagian TU dan Keuangan
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	$\frac{\sum \text{permasalahan penyelenggaraan pemerintahan umum yang berhasil di tindaklanjuti}}{\sum \text{permasalahan penyelenggaraan pemerintahan umum}} \times 100\%$	Bagian Tapem
		Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan	$\frac{\sum \text{pelaksanaan Hari Besar Nasional/Kabupaten}}{\sum \text{Hari Besar Nasional/Kabupaten}} \times 100\%$	Bagian Tapem
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	$\frac{\text{permasalahan pada kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti}}{\sum \text{kegiatan tata batas antar daerah}} \times 100\%$	Bagian Tapem
		Persentase fasilitasi pelaksanaan pilkada (Presiden/Gubernur/Bupati)	$\frac{\sum \text{Pelaksanaan Pilkada yang difasilitasi}}{\sum \text{Pelaksanaan Pilkada}} \times 100\%$	Bagian Tapem
4	Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	$\frac{\sum \text{IKK yang dipenuhi}}{\sum \text{IKK sesuai pedoman penyusunan}} \times 100\%$	Bagian Tapem

NO.	Kinerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Rumus	Penanggungjawab /Sumber Data
1	2		4	5
5	Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga	Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	$\frac{\sum \text{dokumen kerjasama berhasil ditindak lanjuti}}{\sum \text{kerjasama}} \times 100\%$	Bagian Tapem
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	$\frac{\sum \text{SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10}}{\sum \text{SKPD}} \times 100\%$	Bagian Organisasi
7	Meningkatnya Nilai Area Perubahan RB SKPD	Nilai Komponen Area Perubahan SKPD	$\frac{\sum \text{SKPD dengan nilai RB minimal cukup}}{\sum \text{SKPD}} \times 100\%$	Bagian Organisasi
		Persentase SKPD dengan budaya kerja baik	$\frac{\sum \text{SKPD dengan budaya kerja baik}}{\sum \text{SKPD}} \times 100\%$	Bagian Organisasi
8	Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80	$\frac{\sum \text{SKPD yang mempunyai nilai SKM minimal 80}}{\sum \text{SKPD}} \times 100\%$	Bagian Organisasi
		Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur(SOP)	$\frac{\sum \text{SKPD yang menyusun SOP}}{\sum \text{SKPD}} \times 100\%$	Bagian Organisasi
9	Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	$\frac{\sum \text{SKPD memiliki kelembagaan efektif}}{\sum \text{SKPD}} \times 100\%$	Bagian Organisasi
		Persentase Analisa dan evauasi jabatan sesuai proporsinya	$\frac{\sum \text{SKPD yang memliki analisa dan evaluasi}}{\sum \text{SKPD}} \times 100\%$	Bagian Organisasi

NO.	Kinerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Rumus	Penanggungjawab /Sumber Data
1	2		4	5
10	Meningkatnya kualitas pengelolaan Pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Peningkatan komponen Area Perubahan RB Sekretariat Daerah	Pelaksanaan RB dengan 8 (delapan) komponen area perubahan RB	Bagian TU dan Keuangan
		Peningkatan komponen Area Perubahan ZI Sekretariat Daerah	Pelaksanaan ZI dengan 6 (enam) komponen area perubahan ZI	Bagian TU dan Keuangan
		Peningkatan komponen SAKIP Sekretariat Daerah	Pelaksanaan SAKIP dengan komponen dan sub komponen SAKIP	Bagian TU dan Keuangan
		Peningkatan unsur SPIP Sekretariat Daerah	Pelaksanaan SPIP dengan unsur dan sub unsur SPIP	Bagian TU dan Keuangan
11	Meningkatnya layanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	Persentase pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Pimpinan Bagian lingkup Sekretariat Daerah	$\frac{\text{Jumlah dokumen pelayanan kepegawaian perencanaan dan keuangan pimpinan/bagian yang terlayani}}{\text{Jumlah pelayanan kepegawaian, perencanaan dan keuangan pimpinan/bagian}} \times 100\%$	Bagian TU dan Keuangan
12	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	$\frac{\text{Paket pengadaan barang dan jasa yang terlayani secara elektronik}}{\sum \text{Paket pengadaan barang dan jasa (tender/seleksi) dalam rencana umum pengadaan}} \times 100\%$ <p><i>Makna indikator : indikator tersebut mencerminkan presentasi realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemkab Tala secara elektronik, alasan : dengan indikator tersebut dapat dilihat presentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemkab Tala dengan sistem berbanding dengan rencana umum pengadaan elektronik, rumus : perbandingan jumlah pelaksanaan pengadaan barang jasa secara elektronik dengan rencana umum pengadaan sistem elektronik</i></p>	Bagian PBJ

NO.	Kinerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Rumus	Penanggungjawab /Sumber Data
1	2		4	5
13	Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	$\frac{\sum \text{SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa melalui sistem LPSE}}{\sum \text{SKPD Pemerintah Kab. Tanah Laut}} \times 100\%$	Bagian PBJ
14	Meningkatnya Pelayanan terhadap stakeholder dalam hal produk hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Produk hukum Daeah/lainnya yang harmonis	$\frac{\sum \text{produk hukum daerah/naskah perjanjian daerah/naskah keperdataan lainnya yang diusulkan SKPD yang diharmonisasikan}}{\text{produk hukum daerah/naskah perjanjian daerah/naskah keperdataan lainnya yang diusulkan SKPD}} \times 100\%$	Bagian Hukum
15	Tingkat Penanganan masalah hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Persentase masalah hukum yang diselesaikan	$\frac{\text{Fasilitasi penyelesaian masalah hukum ligasi dan/atau non litigasi yang disampaikan kepada pemerintah daerah (Bagian Hukum) yang diproses}}{\sum \text{Fasilitasi penyelesaian masalah hukum litigasi dan non litigasi yang diproses untuk difasilitasi}} \times 100\%$	Bagian Hukum
16	Peningkatan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Hasil Penilaian atas Pemenuhan HAM	$\frac{\text{Investasi data kegiatan SKPD/Instansi terkait dalam pemenuhan dan penghormatan HAM yang disampaikan kepada pemerintah daerah}}{\sum \text{kegiatan SKPD/Instansi terkait terhadap pemenuhan dan penghargaan HAM}} \times 100\%$	Bagian Hukum
17	Produk Hukum Daerah yang terdokumentasi dan di publikasikan	Persentase Produk Hukum Daerah yang terdokumentasi dan di publikasikan	$\frac{\text{Produk hukum daerah yang telah difasilitasi yang diproses}}{\sum \text{produk hukum daerah yang telah difasilitasi}} \times 100\%$	Bagian Hukum
18	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah, kehumasan dan keprotokolkan	Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	$\frac{\sum \text{penyebarluasan informasi pembangunan yang bisa di akses bagi masyarakat}}{\sum \text{Media informasi}} \times 100\%$	Bagian Humas dan Keprotokolkan

NO.	Kinerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Rumus	Penanggungjawab /Sumber Data
1	2		4	5
		Persentase kegiatan kehumasan KDH/WKDH/SKPD/ Masyarakat yang terlayani	$\frac{\sum \text{kegiatan kehumasan KDH/WKDH /SKPD/ Masyarakat yang dilayani}}{\sum \text{kegiatan setahun KDH/WKDH /SKPD/ Masyarakat}} \times 100\%$	Bagian Humas dan Keprotokolan
		Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu daerah yang terlayani keprokolannya	$\frac{\sum \text{terlayannya kegiatan keprotokolan KDH/WKDH/Masyarakat}}{\sum \text{kegiatan Keprotokolan KDH/WKDH /SKPD/Masyarakat}} \times 100\%$	Bagian Humas dan Keprotokolan
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\sum \text{pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{pengaduan masyarakat}} \times 100\%$	Bagian Humas dan Keprotokolan
19	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/SKPD/ Masyarakat dengan baik	$\frac{\sum \text{terlayannya Pimpinan/Bagian/SKPD /Masyarakat dengan baik}}{\sum \text{Layanan Pimpinan/Bagian/SKPD/Masyarakat}} \times 100\%$	Bagian Umum
20	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda terkait sarana prasarana/ aset milik Setda terkelola dengan baik	$\frac{\sum \text{terlayannya sarana dan prasarana/aset Bagian-Bagian lingkup Setda yang terkelola dengan baik}}{\sum \text{Layanan Sarpras/aset pada Bagian-Bagian}} \times 100\%$	Bagian Umum
21	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Persentase peningkatan pelayanan lembaga keagamaan	$\frac{(\sum \text{Realisasi lembaga keagamaan yang mendapat bantuan tahun n}) - (\sum \text{Realisasi lembaga keagamaan yang mendapat bantuan tahun n-1})}{(\sum \text{Realisasi lembaga keagamaan yang mendapat bantuan tahun n-1})} \times 100\%$	Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO.	Kinerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Rumus	Penanggungjawab /Sumber Data
1	2		4	5
22	Meningkatnya peran Organisasi/lembaga pendidikan keagamaan dan kesejahteraan sosial	Persentase layanan kesejahteraan sosial bagi lembaga pendidikan keagamaan	$\frac{(\sum \text{Realisasi tenaga pengajar pada lembaga pendidikan keagamaan yang mendapat insentif tahun } n) - (\sum \text{Realisasi tenaga pengajar pada lembaga pendidikan keagamaan yang mendapat insentif tahun } n-1)}{(\sum \text{Realisasi tenaga pengajar pada lembaga pendidikan keagamaan yang mendapat insentif tahun } n-1)} \times 100\%$	Bagian Kesejahteraan Rakyat
23	Meningkatnya peran Organisasi/ Lembaga Keagamaan/SKPD Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	$\frac{(\sum \text{Realisasi hasil rekomendasi kegiatan yang ditindak lanjuti tahun } n) - (\sum \text{Realisasi hasil rekomendasi kegiatan yang ditindak lanjuti tahun } n-1)}{(\sum \text{Realisasi hasil rekomendasi kegiatan yang ditindak lanjuti tahun } n-1)} \times 100\%$	Bagian Kesejahteraan Rakyat
24	Meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Presentase fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	$\frac{\text{Penyelesaian permasalahan bidang pengembangan potensi perekonomian yang difasilitasi}}{\sum \text{permasalahan bidang pengembangan potensi perekonomian}} \times 100\%$	Bagian Perekonomian Pembangunan
25	Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja positif	$\frac{\sum \text{BUMD yang berkinerja Positif}}{\sum \text{BUMD yang dibina}} \times 100\%$	Bagian Perekonomian Pembangunan
26	Meningkatnya kualitas manajemen administrasi pembangunan yang proporsional sesuai dengan kewenangan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan	$\frac{\sum \text{SKPD yang menyampaikan laporan adm pembangunan dan perekonomian}}{\sum \text{SKPD yang melaksanakan kegiatan pembangunan dan}} \times 100\%$	Bagian Perekonomian Pembangunan
27	Meningkatnya hasil promosi potensi Daerah	Persentase peningkatan investasi	$\frac{\sum \text{Total invetasi} - \text{Realisasi investasi tahun } N}{\sum \text{Total invetasi}} \times 100\%$	Bagian Perekonomian Pembangunan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
ESELON IV
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

NO.	Kinerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Rumus	Penanggungjawab /Sumber Data
1	2		4	5
1	Memfasilitasi permasalahan penyelenggaraan pemerintah umum	Jumlah rapat penyelenggaraan pemerintahan umum yang berhasil difasilitasi dengan baik	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan rapat pemerintahan umum	KASUBBAG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2	Memfasilitasi kegiatan pembinaan Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan Kecamatan yang berhasil difasilitasi dengan baik	Jumlah pelaksanaan fasilitasi untuk permasalahan penyelenggaraan pemerintahan umum	KASUBBAG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
3	Memfasilitasi kegiatan perayaan Hari Besar Nasional dan Kabupaten	Jumlah kegiatan perayaan Hari Besar Nasional dan Kabupaten yang berhasil difasilitasi dengan baik	Jumlah kegiatan fasilitasi (rakor) pelayanan hari besar Nasional dan Kabupaten	KASUBBAG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
4	Memfasilitasi kegiatan SKPD untuk Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Jumlah kegiatan yang berhasil difasilitasi dengan baik untuk penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Jumlah kegiatan fasilitasi SKPD untuk penyusunan LKPJ dan LPPD sesuai pedoman penyusunan	KASUBBAG OTONOMI DAERAH
5	Memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemilu dan pilkada melalui Tim Desk	Jumlah kegiatan penyelenggara pemilu dan pilkada (Tim Desk) yang di fasilitasi dengan baik	Jumlah kegiatan fasilitasi monitoring dan evaluasi pada penyelenggaraan pemilu dan pilkada	KASUBBAG OTONOMI DAERAH
6	Memfasilitasi permasalahan pada kegiatan tata batas antar daerah Kabupaten /Kota	Jumlah permasalahan pada kegiatan tata batas antar daerah Kabupaten/Kota yang berhasil difasilitasi dengan baik	Jumlah kegiatan fasilitasi (rakor) tata batas antar daerah	KASUBBAG OTONOMI DAERAH
7	Memfasilitasi kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri	Jumlah dokumen kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil difasilitasi dengan baik	Jumlah dokumen kerjasama yang dibentuk	KASUBBAG KERJASAMA

NO.	Kinerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Rumus	Penanggungjawab /Sumber Data
1	2		4	5
8	Memfasilitasi koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah	KASUBBAG KERJASAMA
9	Pelaksanaan penataan kelembagaan yang efektif	Jumlah SKPD yang telah memiliki uraian tugas rinci dan jelas	Jumlah SKPD yang memiliki Perbup uraian tugas yang rincikan jelas	KASUBBAG KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN
		Jumlah SKPD yang memiliki SOTK yang jelas	Jumlah SKPD yang memiliki Perbup SOTK yang jelas	KASUBBAG KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN
10	Pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan	Jumlah perangkat daerah yang memiliki informasi jabatan	Jumlah perangkat daerah yang memiliki Perbup Informasi jabatan	KASUBBAG KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN
		Jumlah perangkat daerah yang memiliki evaluasi jabatan	Jumlah perangkat daerah yang memiliki Perbup evaluasi jabatan	KASUBBAG KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN
		Jumlah perangkat daerah yang dianalisis beban kerja	Jumlah perangkat daerah yang memiliki Perbup analisis beban kerja	KASUBBAG KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN
11	Penguatan ketatalaksanaan	Jumlah dokumen SOP yang sudah ditetapkan	Jumlah dokumen SOP SKPD yang sudah ditetapkan menjadi Perbup sesuai dengan Permenpan Nomor 35 Tahun 2012	KASUBBAG TATA LAKSANA DAN PELAYANAN PUBLIK
		Jumlah regulasi standarisasi pedoman kerja	Jumlah regulasi standarisasi pedoman kerja SKPD yang telah dibuat	KASUBBAG TATA LAKSANA DAN PELAYANAN PUBLIK
12	Penguatan Layanan Publik	Jumlah unit pelayanan publik yang melaksanakan standar pelayanan publik	Jumlah SKPD yang sudah memiliki standar pelayanan publik sesuai dengan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014	KASUBBAG TATA LAKSANA DAN PELAYANAN PUBLIK
		Jumlah SKPD yang berpartisipasi pada Inovasi pelayanan publik	Jumlah SKPD yang sudah mengikuti kompetisi Inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kemenpanrb	KASUBBAG TATA LAKSANA DAN PELAYANAN PUBLIK

NO.	Kinerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Rumus	Penanggungjawab /Sumber Data
1	2		4	5
13	Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja Bupati Tanah Laut sesuai Permenpan 53 Tahun 2014	Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun sesuai Pemenpan 53 Tahun 2014	Jumlah laporan kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun <i>n</i> sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014	KASUBBAG PEMBERDAYAAN APARATUR DAN AKUNTABILITAS KINERJA
14	Pelaksanaan Pembinaan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah SKPD yang di diasistensi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Jumlah laporan kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Pelaksanaan Pembinaan pada skpd <i>n</i> Laporan dengan Permenpan 53 Tahun 2014	KASUBBAG PEMBERDAYAAN APARATUR DAN AKUNTABILITAS KINERJA
15	Penguatan Sistem Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan fasilitasi reformasi birokrasi	Jumlah SKPD yang diasistensi laporan akuntabilitas kinerja Instansi pada tahun <i>n</i> sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014	KASUBBAG PEMBERDAYAAN APARATUR DAN AKUNTABILITAS KINERJA
16	Pelaksanaan Penerapan Budaya Kerja	Jumlah SKPD yang dibina budaya kerja	Jumlah SKPD yang dibina budaya kerja pada tahun <i>n</i> untuk meningkatkan budaya kerja pada SKPD	KASUBBAG PEMBERDAYAAN APARATUR DAN AKUNTABILITAS KINERJA
17	Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya	Jumlah terlaksanakannya pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya	Sub Bagian LPSE melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan infrastruktur pendukung pengadaan barang dan jasa secara elektronik untuk menjamin terselenggaranya akses pelayanan 1x24 jam dalam sehari selama 1 tahun berjalan	KASUBBAG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
18	Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	Jumlah paket pengadaan yang masuk dalam LPSE sesuai prosedur	Sub Bagian LPSE memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan terselenggaranya. Jumlah paket pengadaan yang tayang pada website lpse.tanahlautkab.go.id dengan target sebanyak 150 paket dalam 1 tahun	KASUBBAG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

NO.	Kinerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Rumus	Penanggungjawab /Sumber Data
1	2		4	5
19	Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah terlaksanakannya kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	Sub bagian pengadaan barang/jasa memiliki target untuk memfasilitasi kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa. Jumlah permohonan proses pemilihan penyedia yang ditindaklanjuti menjadi acuan/indikator kinerja	KASUBBAG PENGADAAN BARANG DAN JASA
20	Sosialiasi/ Penyuluh Hukum	Jumlah fasilitasi SKPD yang didampingi dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	Sub bagian pengadaan barang/jasa memiliki target untuk mendampingi SKPD dalam penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak target tersebut menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan	KASUBBAG PENGADAAN BARANG DAN JASA
21	Memfasilitasi pembinaan SKPD dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	Jumlah fasilitasi pembinaan SKPD dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	Sub bagian pembinaan kompetensi memiliki jumlah target untuk melaksanakan fasilitasi membina SKPD dalam hal pengadaan barang/jasa. Jumlah target tersebut menjadi acuan dalam bekerja untuk dilaksanakan	KASUBBAG PEMBINAAN KOMPETENSI DAN EVALUASI PELAPORAN
22	Memfasilitasi pengelolaan personil Bagian pengadaan barang/jasa	Jumlah fasilitasi pengelolaan personil Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Sub bagian pembinaan kompetensi memiliki jumlah target untuk memfasilitasi personil UKPBJ untuk ditingkatkan kompetensi dan perjenjangannya	KASUBBAG PEMBINAAN KOMPETENSI DAN EVALUASI PELAPORAN
23	Mengoreksi, sinkronisasi dan Fasilitasi Penyusunan Perda, Perbup, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati	Jumlah produk hukum yang dikoreksi atau yang diharmonisasi	Jumlah seluruh produk hukum yang telah dikoreksi, disinkronisasi atau yang diharmonisasi	KASUBBAG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
24	Melakukan fasilitasi dan harmonisasi Peraturan Daerah sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik	Jumlah produk hukum daerah yang telah difasilitasi dan diharmonisasi sesuai ketentuan perundang-undangan	Jumlah Peraturan Daerah yang telah difasilitasi dan diharmonisasi sesuai ketentuan perundang-undangan	KASUBBAG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

NO.	Kinerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Rumus	Penanggungjawab /Sumber Data
1	2		4	5
25	Fasilitasi Naskah kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama atau naskah keperdataan lainnya	Jumlah kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama dan NPHD lainnya yang ditelaah, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Fasilitasi Naskah kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama atau naskah keperdataan lainnya yang diajukan ke bagian hukum untuk ditelaah dan disesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	KASUBBAG BANTUAN HUKUM & HAM
26	Fasilitasi penanganan masalah hukum dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Jumlah masalah hukum yang di tangani	Jumlah permasalahan hukum yang difasilitasi oleh bagian hukum	KASUBBAG BANTUAN HUKUM & HAM
27	Fasilitasi Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KPP HAM)	Jumlah kegiatan Rencana Aksi Nasional Asasi Manusia (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KPP HAM)	Jumlah fasilitasi kegiatan pengumpulan data untuk Rencana Aksi Nasional Asasi Manusia (RANHAM) pada tahun berjalan dan pengumpulan data untuk penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi	KASUBBAG BANTUAN HUKUM & HAM
28	Dokumentasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Registrasi dan dokumentasi produk hukum daerah	Jumlah Registrasi dan dokumentasi produk hukum daerah yang masuk ke bagian hukum	KASUBBAG DOKUMENTASI & INFORMASI HUKUM
		Jumlah Cetak Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang telah dicetak atau dibukukan	KASUBBAG DOKUMENTASI & INFORMASI HUKUM
29	Informasi Hukum	Jumlah Sosialisasi /Penyuluhan Hukum dan Seminar Hukum yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan Sosialisasi /Penyuluhan Hukum dan Seminar Hukum dalam menyebarkan informasi hukum kepada SKPD/Masyarakat	KASUBBAG DOKUMENTASI & INFORMASI HUKUM
30	Publikasi Produk Hukum Daerah	Jumlah kegiatan pengelolaan website jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Kabupaten Tanah Laut	Jumlah kegiatan publikasi melalui website jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Kabupaten Tanah Laut selama satu tahun	KASUBBAG DOKUMENTASI & INFORMASI HUKUM
31	Memberikan pelayanan kehumasan kepada KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat	Jumlah pelayanan kehumasan KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat	Jumlah kegiatan KDH/WKDH/SKPD dan masyarakat yang terlayani kegiatan	KASUBBAG HUBUNGAN MASYARAKAT
32	Kegiatan KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat terliput pendokumentasiannya	Jumlah liputan pendokumentasian KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat	Jumlah kegiatan KDH/WKDH/SKPD dan masyarakat yang terliput dan terdokumentasi	KASUBBAG HUBUNGAN MASYARAKAT
33	Pembangunan pemerintahan daerah yang terpublikasikan dan diberikan	Jumlah Publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah melalui media cetak, elektronik, online dan media sosial	Jumlah publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintah daerah yang terbit melalui media cetak, elektronik, online dan media sosial	KASUBBAG PEMBERITAAN

NO.	Kinerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Rumus	Penanggungjawab /Sumber Data
1	2		4	5
34	Kegiatan KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat terlayani peliputan, pemberitaanya	Jumlah liputan pemberitaan kegiatan KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat	Jumlah kegiatan KDH/WKDH/SKPD dan masyarakat yang terliput dan terdokumentasi	KASUBBAG PEMBERITAAN
35	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah dokumen pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah dokumen dari tandaklanjut pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan sesuai dengan SOP	KASUBBAG PEMBERITAAN
36	Kegiatan keprotokolan KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat yang terlayani	Jumlah kegiatan KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat yang terlayani keprotokolannya	Jumlah kegiatan KDH/WKDH/SKPD dan masyarakat yang terlayani keprotokolannya sesuai dengan SOP	KASUBBAG KEPROTOKOLAN
37	Pelayanan tamu KDH/WKDH yang terlayani	Jumlah tamu KDH/WKDH yang terlayani dengan baik	Jumlah tamu KDH/WKDH yang terlayani dengan baik sesuai dengan SOP	KASUBBAG KEPROTOKOLAN
38	Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana/aset Sekretariat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana/aset milik Setda yang terpelihara dan dikelola dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana aset Setda yang tercatat dalam sensus barang serta terpelihara dengan baik	KASUBBAG UMUM & RUMAH TANGGA
39	Melaksanakan Pelayanan Urusan pimpinan/Bagian/SKPD/ dan Masyarakat	Jumlah layanan pimpinan/Bagian/SKPD dan Masyarakat terlayani dengan baik	Jumlah layanan kepada pimpinan/Bagian/SKPD dan layanan umum kepada masyarakat	KASUBBAG UMUM & RUMAH TANGGA
40	Melaksanakan Pelayanan bidang transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah layanan transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah terlayani dengan baik	Jumlah terlayannya sewa bus, sewa gedung dan pelayanan konsumsi dalam rangka kegiatan-kegiatan hari besar dan nasional	KASUBBAG UMUM & RUMAH TANGGA
41	Melaksanakan pengadaan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset yang didistribusikan di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah terpenuhinya permintaan barang dan perlengkapan kantor untuk bagian-bagaian lingkup Setda	KASUBBAG PERLENGKAPAN
42	Melaksanakan Pengelolaan, Pencatatan Aset dan Penghapusan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset Sekretariat Daerah yang dikelola dan tercatat dengan baik	Jumlah aset Setda yang tercatat dalam simda BMD	KASUBBAG PERLENGKAPAN
43	Melaksanakan Rumusan Analisa Kebutuhan Barang di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen analisa kebutuhan barang berupa rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) sesuai standar dan kebutuhan di lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen RKBMD perbagian lingkup Setda	KASUBBAG PERLENGKAPAN

NO.	Kinerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Rumus	Penanggungjawab /Sumber Data
1	2		4	5
44	Memberikan pelayanan Surat Menyurat lingkup Setda sesuai SOP	Jumlah SKPD/Bagian lingkup Setda yang terlayani administrasi surat menyurat	Jumlah administrasi surat menyurat yang terlayani sesuai SOP	KASUBBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
45	Memberikan pelayanan Administrasi Kepegawaian lingkup Setda	Jumlah administrasi kepegawaian lingkup Setda yang terselesaikan	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan	KASUBBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
46	Memberikan pelayanan Administrasi Pimpinan lingkup Setda	Persentase pelayanan administrasi pimpinan daerah (KDH/WKDH/Sekda)	Jumlah layanan administrasi pimpinan daerah (KDH/WKDH/Sekda) yang dilaksanakan	KASUBBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
47	Pengelolaan dan penyimpanan arsip lingkup Setda	Persentase arsip yang terkelola sesuai SOP	Jumlah dokumen arsip yang terkelola sesuai SOP	KASUBBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
48	Penyusunan Laporan Pelaksanaan RB Sekretariat Daerah dan ZI Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan RB Sekretariat Daerah dan ZI Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan RB Sekretariat Daerah dan ZI Sekretariat Daerah	KASUBBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
49	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	KASUBBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
50	Menyusun laporan kinerja Setda	Jumlah laporan yang disusun sesuai ketentuan, (Bulanan, Triwulan/Rekon/Semester, CALK, LPPD Setda, SAKIP Setda dan SKM Setda)	Jumlah dokumen laporan kinerja Setda yang disusun sesuai aturan	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
51	Menyusun perencanaan dan keuangan Setda	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai aturan, (Renstra Setda, Renja, RKA, DPA)	Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan yang disusun sesuai aturan	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
52	Memberikan fasilitasi kepada masyarakat berupa hibah, koordinasi dan kegiatan bidang sosial dan kebudayaan	Jumlah dokumen hibah yang masuk secara tepat syarat	Jumlah dokumen hibah yang masuk secara tepat syarat sesuai dengan SOTK dan Perbup	KASUBAG SOSIAL DAN KEBUDAYAAN
		Jumlah kegiatan bidang sosial yang difasilitasi	Jumlah proposal yang sesuai dengan SOTK bidang sosial yang difasilitasi	KASUBAG SOSIAL DAN KEBUDAYAAN
		Jumlah organisasi/lembaga sosial keagamaan yang diberikan bantuan hibah	Jumlah proposal organisasi/lembaga sosial keagamaan yang masuk dan diberikan bantuan hibah sesuai dengan SOTK dan Perbup	KASUBAG SOSIAL DAN KEBUDAYAAN

NO.	Kinerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Rumus	Penanggungjawab /Sumber Data
1	2		4	5
53	Melakukan pengawasan terhadap pendidikan keagamaan	Jumlah pendidikan keagamaan yang dibina	Jumlah Pendidikan Keagamaan yang sesuai dengan SOTK yang dibina	KASUBAG PENDIDIKAN DAN AGAMA
54	Melakukan kegiatan keagamaan	Jumlah organisasi/lembaga keagamaan yang dibantu untuk kegiatan keagamaan	Jumlah organisasi/lembaga keagamaan yang dibantu untuk kegiatan keagamaan yang sesuai perbup SOTK dan perbup	KASUBAG PENDIDIKAN DAN AGAMA
		Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan	Jumlah Kegiatan keagamaan yang difasilitasi	KASUBAG PENDIDIKAN DAN AGAMA
55	Memberikan fasilitasi bantuan dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Guru TK/TPA, Madin/MIS, Ponpes, dan Penyuluh Agama yang diberi Intensif	Jumlah guru-guru TK/TPA, Madin/Mis, Ponpes dan penyuluh Agama yang menjadi PTT serta menerima insentif sesuai Perbup dan SK	KASUBAG KEMASYARAKATAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Jumlah guru TK/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan penyuluh Agama yang di monitoring	Jumlah guru-guru TK/TPA, Madin/Mis, Ponpes dan penyuluh Agama yang menjadi PTT serta menerima insentif sesuai Perbup dan SK	KASUBAG KEMASYARAKATAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Jumlah kegiatan bidang kesejahteraan yang di fasilitasi	Memfasilitasi kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	KASUBAG KEMASYARAKATAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
56	Fasilitasi pengembangan potensi perekonomian	Jumlah laporan terkait potensi Perekonomian	Jumlah laporan identifikasi potensi daerah bidang perekonomian yang dapat dikembangkan	KASUBBAG FASILITASI PENGEMBANGAN POTENSI PEREKONOMIAN
		Jumlah laporan permasalahan pengembangan potensi perekonomian	Jumlah identifikasi permasalahan dalam pengembangan potensi perekonomian dan penyelesaian permasalahan tersebut	KASUBBAG FASILITASI PENGEMBANGAN POTENSI PEREKONOMIAN
		Jumlah laporan kegiatan promosi daerah	Jumlah kegiatan-kegiatan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut dalam rangka antisipasi lonjakan harga barang dan jasa di Tanah Laut	KASUBBAG FASILITASI PENGEMBANGAN POTENSI PEREKONOMIAN

NO.	Kinerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Rumus	Penanggungjawab /Sumber Data
1	2		4	5
57	Pembinaan Pengembangan dan Fasilitasi Perekonomian Pembangunan Daerah	Jumlah laporan fasilitasi Pembinaan BUMD	Jumlah kegiatan pembinaan BUMD oleh Tim Pembina dan Pengendali BUMD	KASUBBAG BINA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
		Jumlah dokumen analisis investasi Pemerintah Daerah kepada BUMD	Jumlah kegiatan penyusunan kajian/analisa investasi daerah dalam bentuk PMP (Penyertaan Modal Pemerintah) baik uang atau barang kepada BUMD	KASUBBAG BINA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
58	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Perekonomian Pembangunan	Jumlah laporan kegiatan TPID Kabupaten Tanah Laut	Jumlah laporan fasilitasi kegiatan mempromosikan produk-produk unggulan daerah Kabupaten Tanah Laut di dalam dan di luar daerah	KASUBBAG MONITORING DAN EVALUASI PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN
		Jumlah laporan Pengawasan Program KUR	Jumlah laporan kegiatan Tim monev keuangan Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan monev debit KUR, sosialisasi KUR kepada pelaku usaha, dan evaluasi capaian penyaluran KUR di Tanah Laut	KASUBBAG MONITORING DAN EVALUASI PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN
		Jumlah laporan monitoring perekonomian daerah	Jumlah laporan kegiatan monev terhadap sarana dan prasarana perekonomian daerah yang di tiap Kecamatan di Kab. Tanah Laut dan monev sarana dan prasarana penunjang perekonomian masyarakat	KASUBBAG MONITORING DAN EVALUASI PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Telp (0512) 22384 Pelaihari

Pelaihari, 10 September 2020

Kepada Yth
Sekretaris Daerah
Cq. Kepala Bagian Tata Usaha dan
Keuangan

di-
Pelaihari

SURAT PENGANTAR

No. 800/ 710 /Insp/ 2020

No	Jenis Surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilita Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) Tahun 2019. Hasil Perbaikan	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk bahan selanjutnya.

An, Inspektur
Sekretaris

FIFIANA FITRI AMALIA, SE, ME. Ak

Pembina (IV/a)

NIP. 19780909 2006042 017



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT

Jalan A Syairani Kompl. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 22384 Pelaihari

Nomor : 700/ 170 / LHE – Insp/ 2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem
AKIP) Tahun 2019. Hasil perbaikan

Pelaihari, 8 September 2020

Kepada Yth.
Sekretaris Daerah
di-

Pelaihari

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor: KEP 135/M/2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, PermenPAN dan RB Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor : 094/333 / Insp/ 2020 tanggal 11 Juni 2020, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kab. Tanah Laut dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (Lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/ Kinerja organisasi sesuai hasil perbaikan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2019, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja (Renja), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Sekretariat Daerah Kab. Tanah Laut, memperoleh nilai sebesar **84.35** dengan kategori **A (Memuaskan)**, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi angka tertimbang dari seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Tanah Laut, dengan rincian sebagai berikut:

a. *Perencanaan Kinerja.*

Diperoleh nilai sebesar 20 dari yang diharapkan sebesar 30 atau dengan angka tertimbang sebesar 100 % masuk kategori **AA (Sangat Memuaskan)**,

b. *Pengukuran Kinerja.*

Diperoleh nilai sebesar 23.44 dari yang diharapkan sebesar 25% atau dengan angka tertimbang sebesar 93.75 % berkategori **AA (Sangat Memuaskan)**,

c. *Pelaporan Kinerja.*

Diperoleh nilai sebesar 11.06 dari yang diharapkan sebesar 15 atau dengan angka tertimbang sebesar 73.71 % berkategori **BB (Sangat Baik)**, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal

d. *Evaluasi Internal*

Diperoleh nilai sebesar 6.70 dari yang diharapkan sebesar 10 atau dengan angka tertimbang sebesar 67 % berkategori berkategori **B (Baik)** , Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan

e. *Pencapaian Kinerja.*

Diperoleh nilai sebesar 13.15 dari yang diharapkan sebesar 20% atau dengan angka tertimbang sebesar 65.77% berkategori BB (Akuntabel), berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Sekertaris Daerah Kab. Tanah Laut beserta seluruh jajarannya, agar dilakukan perbaikan yaitu terhadap Dokumen Perencanaan yang ada, agar dilakukan reuiu secara berkala.

Pengukuran Kinerja :

- pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dilaksanakan secara berkala
- Perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap dokumen perjanjian kinerja agar dapat dijadikan dasar pemberian reward and punishment
- Pengukuran kinerja agar dilaksanakan secara berjenjang.

Pelaporan Kinerja :

- Didalam laporan kinerja agar disajikan informasi mengenai analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan target jangka menengah
- Informasi dan data kinerja yang andal agar dimanfaatkan untuk perbaikan Perencanaan, menilai, memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta meningkatkan kinerja

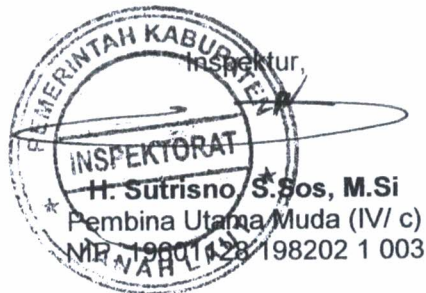
Evaluasi Internal

- Monitoring dan Evaluasi secara berkala atas pelaksanaan program dan rencana aksi agar dapat memberikan simpulan keberhasilan atau kegagalan program beserta rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan
- Perlu dilaksanakannya monitoring evaluasi terhadap rencana aksi dan program kegiatan serta dilakukan tindak lanjut perbaikan dalam bentuk langkah-langkah yang nyata.

Pencapaian Kinerja :

- Pencapaian kinerja organisasi agar lebih di tingkatkan untuk menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kab. Tanah Laut hasil perbaikan dengan beberapa rekomendasi tersebut di atas untuk ditindak lanjuti guna perbaikan dan peningkatan kinerja Instansi kedepannya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Wakil Bupati Tanah Laut di Pelaihari
3. Menteri PAN dan RB di Jakarta
4. Arsip

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DAERAH**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS
		Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30.00	100.00%	30.00
I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)		10.00	100.00%	10.00
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)		2.00	100.00%	2.00
1	Renstra SKPD telah disusun	Y	1.00	
2	Renstra telah memuat tujuan	Y	1.00	OK
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)	A	1.00	OK
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya	A	1.00	OK
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran	Y	1.00	OK
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran	A	1.00	OK
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan	A	1.00	OK
8	Renstra telah menyajikan IKU	A	1.00	OK
9	Renstra telah dipublikasikan	Y	1.00	OK
b. KUALITAS RENSTRA (5%)		5.00	100.00%	5.00
10	Tujuan telah berorientasi hasil	A	1.00	OK
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik	A	1.00	OK
12	Sasaran telah berorientasi hasil	A	1.00	OK
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	A	1.00	OK
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik	A	1.00	OK
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan	A	1.00	OK
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD	A	1.00	OK
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan	A	1.00	OK
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)		3.00	100.00%	3.00
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	A	1.00	OK
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan	A	1.00	OK
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala	A	1.00	OK
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)		20.00	100.00%	20.00
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)		4.00	100.00%	4.00
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun	Y	1.00	
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun	Y	1.00	OK
3	PK telah menyajikan IKU	A	1.00	OK
4	PK telah dipublikasikan	Y	1.00	OK
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)		10.00	100.00%	10.00
5	Sasaran telah berorientasi hasil	A	1.00	OK
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	A	1.00	OK
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik	A	1.00	OK

8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A	1.00	OK
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A	1.00	OK
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		A	1.00	OK
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		A	1.00	OK
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1.00	OK
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1.00	OK
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1.00	OK
	c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	6.00	100.00%	6.00	
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1.00	OK
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		A	1.00	OK
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		A	1.00	OK
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan		A	1.00	OK
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		A	1.00	OK
	B. PENGUKURAN KINERJA (25%)	25.00	93.75%	23.44	
	I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	5.00	100.00%	5.00	
1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1.00	
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1.00	
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1.00	OK
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1.00	OK
	II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)	12.50	100.00%	12.50	
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1.00	OK
6	IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja		A	1.00	OK
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		A	1.00	OK
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1.00	OK
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		A	1.00	OK
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		A	1.00	OK
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		A	1.00	OK
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		A	1.00	OK
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1.00	OK
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y	1.00	OK
	III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)	7.50	79.17%	5.94	
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		A	1.00	OK
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		A	1.00	OK
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		A	1.00	OK
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward & punishment</i>		E	-	OK
19	IKU telah <i>direviu secara berkala</i>		B	0.75	OK

20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		A	1.00	OK
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15.00	73.71%	11.06	
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)		3.00	100.00%	3.00	
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1.00	
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1.00	OK
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1.00	OK
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		A	1.00	OK
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)		7.50	71.43%	5.36	
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		A	1.00	OK
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		A	1.00	OK
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		A	1.00	OK
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		C	0.50	OK
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		D	-	OK
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		A	1.00	OK
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		C	0.50	OK
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)		4.50	60.00%	2.70	
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1.00	OK
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>		C	0.50	OK
14	Informasi yang disajikan telah <i>digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		C	0.50	OK
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		C	0.50	OK
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		C	0.50	OK
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10.00	67.00%	6.70	
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)		2.00	100.00%	2.00	
1	<i>Terdapat pemantauan mengenai kemajuan</i> pencapaian kinerja beserta hambatannya		Y	1.00	
2	<i>Evaluasi program</i> telah dilakukan		Y	1.00	
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		A	1.00	OK
II. KUALITAS EVALUASI (5%)		5.00	64.00%	3.20	
5	Evaluasi <u>program</u> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		B	0.75	OK
6	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0.75	OK
7	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		C	0.50	OK
8	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		B	0.75	OK
9	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		B	0.75	OK
10	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah menunjukkan perbaikan setiap periode		C	0.34	OK
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)		3.00	50.00%	1.50	

11	Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		C	0.50	OK
12	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		C	0.50	OK
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20.00		65.77%	13.15
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)		7.50		66.67%	5.00
1	Target dapat dicapai		B	2.00	
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		B	1.00	
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		B	2.00	
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)		12.50		163.10%	8.15
4	Target dapat dicapai			0.64	
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			1.67	
6	Analisis capaian kinerja telah memadai			2.33	
7	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			3.52	
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100.00		84.35%	84.35



POHON KINERJA

SEKRETARIAT DAERAH



SETELAH EVALUASI

KABUPATEN TANAH LAUT

POHON KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

MISI SEKRETARIAT DAERAH

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya
2. Menciptakan Inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

SEKRETARIS DAERAH

Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah
2. Inovasi Publik yang di ciptakan oleh SKPD
3. 3.1 Meningkatnya skor LPPD Kabupaten
3.2 Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah
3.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten
3.4 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah
4. Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan

Indikator Kinerja Utama :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Jumlah Inovasi SKPD yang didaftarkan
3. 3.1 Skor LPPD Kabupaten
3.2 Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B
3.3 Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB
3.4.1 Nilai RB Sekretariat Daerah
3.4.2 Nilai ZI Sekretariat Daerah
3.4.3 Nilai SAKIP Sekretariat Daerah
3.4.4 Nilai SPIP Sekretariat Daerah
4. Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan

ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN

Kinerja Utama :

Meningkatnya Capaian Admininstrasi Hukum, Pemerintahan dan Organisasi

Indikator Kinerja :

- Persentase Capaian Kinerja Bidang Administrasi Hukum
- Persentase Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan
- Persentase Capaian Kinerja Bidang Organisasi

ASISTEN BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kinerja Utama :

Meningkatnya Capaian Kinerja di Bidang Ekonomi, Pelayanan Barang/Jasa dan Pelayanan Kesejahteraan Rakyat

Indikator Kinerja :

- Persentase Capaian Kinerja di Bidang Ekonomi
- Persentase Capaian Kinerja di Bidang Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
- Persentase Capaian Kinerja di Bidang Pelayanan Kesejahteraan Rakyat

ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM

Kinerja Utama :

Meningkatnya Capaian Kinerja Admininstrasi di Bidang Humas Protokol, Umum dan Tata Usaha Keuangan

Indikator Kinerja :

- Persentase Capaian Kinerja Administrasi di Bidang Humas Protokol
- Persentase Capaian Kinerja Administrasi di Bidang Umum
- Persentase Capaian Kinerja Administrasi di Bidang Tata Usaha Keuangan

**POHON KINERJA
BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

KEPALA BAGIAN ORGANISASI

Kinerja Utama :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Meningkatnya Nilai Area Perubahan RB SKPD
3. Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
4. Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan

Indikator Kinerja :

1. Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10
2. 2.1 Nilai Komponen Area Perubahan RB SKPD
2.2 Persentase SKPD dengan budaya kerja baik
3. 3.1 Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80
3.2 Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)
4. 4.1 Persentase perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif
4.2 Persentase Analisis evaluasi jabatan sesuai proporsinya

KASUBBAG KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

Kinerja Utama :

1. Pelaksanaan penataan kelembagaan yang efektif
2. Pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan

Indikator Kinerja :

1. 1.1 Jumlah SKPD yang telah memiliki uraian tugas rinci dan jelas
1.2 Jumlah SKPD yang memiliki SOTK yang jelas
2. 2.1 Jumlah perangkat daerah yang memiliki informasi jabatan
2.2 Jumlah perangkat daerah yang memiliki evaluasi jabatan
2.3 Jumlah perangkat daerah yang dianalisis beban kerja

KASUBBAG TATA LAKSANA DAN PELAYANAN PUBLIK

Kinerja Utama :

1. Penguatan ketatalaksanaan
2. Penguatan Layanan Publik

Indikator Kinerja :

1. 1.1 Jumlah dokumen SOP yang sudah ditetapkan
1.2 Jumlah egulasi standarisasi pedoman kerja
2. 2.1 Jumlah unit pelayanan publik yang melaksanakan standar pelayanan publik
2.2 Jumlah SKPD yang berpartisipasi pada Inovasi pelayanan publik

**KASUBBAG PEMBERDAYAAN APARATUR DAN
AKUNTABILITAS KINERJA**

Kinerja Utama :

1. Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja Bupati Tanah Laut sesuai Permenpan 53 Tahun 2014
2. Pelaksanaan Pembinaan Laporan Kinerja SKPD
3. Penguatan Sistem Reformasi Birokrasi
4. Pelaksanaan Penerapan Budaya Kerja

Indikator Kinerja :

1. Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun sesuai Pemenpan 53 Tahun 2014
2. Jumlah SKPD yang di diasistensi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
3. Jumlah laporan fasilitasi reformasi birokrasi
4. Jumlah SKPD yang dibina budaya kerja

**POHON KINERJA
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Kinerja Utama :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah
3. Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD
4. Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga

Indikator Kinerja :

1. 1.1 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti
1.2 Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan
2. 1.1 Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti
1.2 Persentase fasilitasi pelaksanaan pilkada (Presiden/Gubernur/ Bupati)
3. Persentase Pemenuhan IKK SKPD
4. Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti



KASUBBAG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Kinerja Utama :

- Memfasilitasi permasalahan penyelenggaraan pemerintah umum
- Memfasilitasi kegiatan pembinaan Kecamatan
- Memfasilitasi kegiatan perayaan Hari Besar Nasional dan Kabupaten

Indikator Kinerja :

- Jumlah rapat penyelenggaraan pemerintahan umum yang berhasil difasilitasi dengan baik
- Jumlah kegiatan pembinaan Kecamatan yang berhasil difasilitasi dengan baik
- Jumlah kegiatan perayaan Hari Besar Nasional dan Kabupaten yang berhasil difasilitasi dengan baik

KASUBBAG OTONOMI DAERAH

Kinerja Utama :

- Memfasilitasi kegiatan SKPD untuk Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
- Memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemilu dan pilkada melalui Tim Desk
- Memfasilitasi permasalahan pada kegiatan tata batas antar daerah Kabupaten /Kota

Indikator Kinerja :

- Jumlah kegiatan yang berhasil difasilitasi dengan baik untuk penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
- Jumlah kegiatan penyelenggara pemilu dan pilkada (Tim Desk) yang di fasilitasi dengan baik
- Jumlah permasalahan pada kegiatan tata batas antar daerah Kabupaten/Kota yang berhasil difasilitasi dengan baik

KASUBBAG KERJASAMA

Kinerja Utama :

- Memfasilitasi kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri
- Memfasilitasi koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya

Indikator Kinerja :

- Jumlah dokumen kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil difasilitasi dengan baik
- Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

**POHON KINERJA
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

KEPALA BAGIAN HUKUM

Kinerja Utama :

- Meningkatnya Pelayanan terhadap stakeholder dalam hal produk hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tingkat Penanganan masalah hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- Peningkatan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut
- Produk Hukum Daerah yang terdokumentasi dan di publikasikan

Indikator Kinerja :

- Persentase Produk hukum Daerah/lainnya yang harmonis
- Persentase masalah hukum yang diselesaikan
- Hasil Penilaian atas Pemenuhan HAM
- Persentase Produk Hukum Daerah yang terdokumentasi dan di publikasikan

KASUBBAG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Kinerja Utama :

- Mengoreksi, sinkronisasi dan Fasilitasi Penyusunan Perda, Perbup, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati
- Melakukan fasilitasi dan harmonisasi Peraturan Daerah sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik

Indikator Kinerja :

- Jumlah produk hukum yang dikoreksi atau yang diharmonisasi
- Jumlah produk hukum daerah yang telah difasilitasi dan diharmonisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KASUBBAG BANTUAN HUKUM DAN HAM

Kinerja Utama :

- Fasilitasi Naskah kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama atau naskah keperdataan lainnya
- Fasilitasi penanganan masalah hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- Fasilitasi Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KPP HAM)

Indikator Kinerja :

- Jumlah kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama dan NPHD lainnya yang ditelaah, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Jumlah masalah hukum yang di tangani
- Jumlah kegiatan Rencana Aksi Nasional Asasi Manusia (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KPP HAM)

KASUBBAG DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Kinerja Utama :

- Dokumentasi Produk Hukum Daerah
- Informasi Hukum
- Publikasi Produk Hukum Daerah

Indikator Kinerja :

- Jumlah Registrasi dan dokumentasi produk hukum daerah
- Jumlah Cetak Produk Hukum Daerah
- Jumlah Sosialisasi /Penyuluhan Hukum dan Seminar Hukum yang dilaksanakan
- Jumlah kegiatan pengelolaan *website* jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Kabupaten Tanah Laut

**POHON KINERJA
BAGIAN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN

Kinerja Utama :

- Meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah
- Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing
- Meningkatnya kualitas manajemen administrasi pembangunan yang proporsional sesuai dengan kewenangan
- Meningkatnya hasil promosi potensi Daerah

Indikator Kinerja :

- Presentase fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan
- Presentase BUMD yang berkinerja positif
- Presentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan
- Presentase peningkatan investasi

KASUBBAG FASILITASI PENGEMBANGAN POTENSI PEREKONOMIAN

Kinerja Utama :

- Fasilitasi pengembangan potensi perekonomian

Indikator Kinerja :

- Jumlah laporan terkait potensi Perekonomian
- Jumlah laporan permasalahan pengembangan potensi perekonomian
- Jumlah laporan kegiatan promosi daerah

KASUBBAG BINA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Kinerja Utama :

- Pembinaan Pengembangan dan Fasilitasi Perekonomian Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja :

- Jumlah laporan fasilitasi Pembinaan BUMD
- Jumlah dokumen analisis investasi Pemerintah Daerah kepada BUMD

KASUBBAG MONITORING DAN EVALUASI PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN

Kinerja Utama :

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Perekonomian Pembangunan

Indikator Kinerja :

- Jumlah laporan kegiatan TPID Kabupaten Tanah Laut
- Jumlah laporan Pengawasan Program KUR
- Jumlah laporan monitoring perekonomian daerah

**POHON KINERJA
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kinerja Utama :

- Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik
- Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE

Indikator Kinerja :

- Presentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai satandar dan tepat waktu
- Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE

**KASUBBAG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
(LPSE)**

Kinerja Utama :

- Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya
- Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik

Indikator Kinerja :

- Jumlah terlaksanakannya pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya
- Jumlah paket pengadaan yang masuk dalam LPSE sesuai prosedur

KASUBBAG PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kinerja Utama :

- Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu
- Memfasilitasi pendampingan SKPD dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak

Indikator Kinerja :

- Jumlah terlaksanakannya kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu
- Jumlah fasilitasi SKPD yang didampingi dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak

**KASUBBAG PEMBINAAN KOMPETENSI DAN
EVALUASI PELAPORAN**

Kinerja Utama :

- Memfasilitasi pembinaan SKPD dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
- Memfasilitasi pengelolaan personil Bagian pengadaan barang/jasa

Indikator Kinerja :

- Jumlah fasilitasi pembinaan SKPD dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
- Jumlah fasilitasi pengelolaan personil Bagian Pengadaan Barang/Jasa

**POHON KINERJA
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

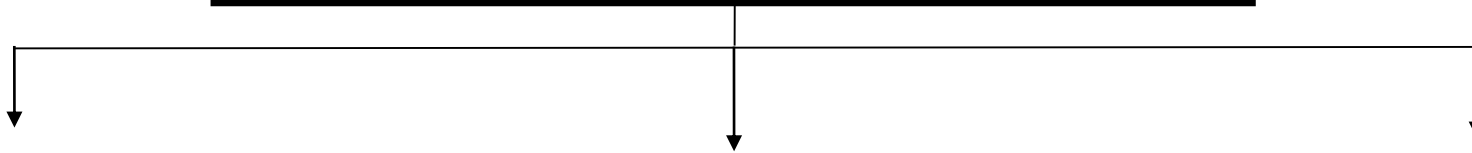
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kinerja Utama :

- Meningkatnya kerukunan umat beragama
- Meningkatnya layanan bantuan sosial keagamaan
- Meningkatnya peran Organisasi/ Lembaga Keagamaan/SKPD Bidang Pemuda dan Olahraga

Indikator Kinerja :

- Persentase peningkatan lembaga sosial dan keagamaan
- Persentase layanan bantuan sosial keagamaan
- Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga



KASUBAG SOSIAL DAN KEBUDAYAAN

Kinerja Utama :

- Memberikan fasilitasi kepada masyarakat berupa hibah, koordinasi dan kegiatan bidang sosial dan kebudayaan

Indikator Kinerja :

- Jumlah dokumen hibah yang masuk secara tepat syarat
- Jumlah kegiatan bidang sosial yang di fasilitasi
- Jumlah organisasi/lembaga sosial keagamaan yang diberikan bantuan hibah

KASUBAG PENDIDIKAN DAN AGAMA

Kinerja Utama :

- Melakukan pengawasan terhadap pendidikan keagamaan
- Melakukan kegiatan keagamaan

Indikator Kinerja :

- Jumlah pendidikan keagamaan yang dibina
- Jumlah organisasi/lembaga keagamaan yang dibantu untuk kegiatan keagamaan
- Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan

KASUBAG KEMASYARAKATAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

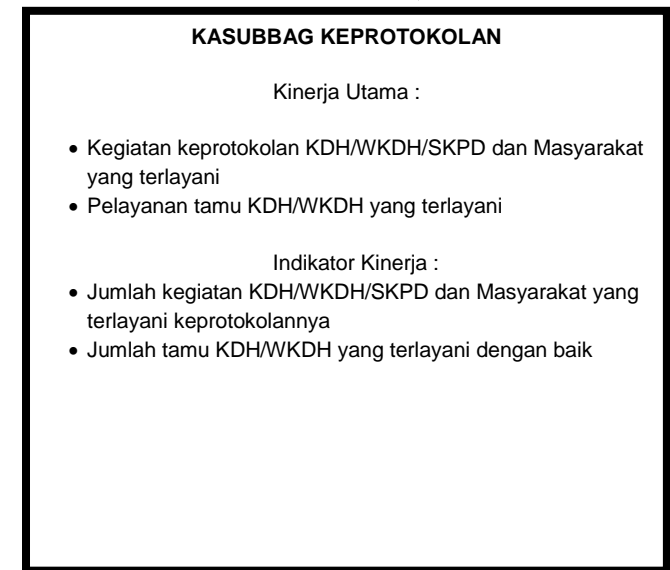
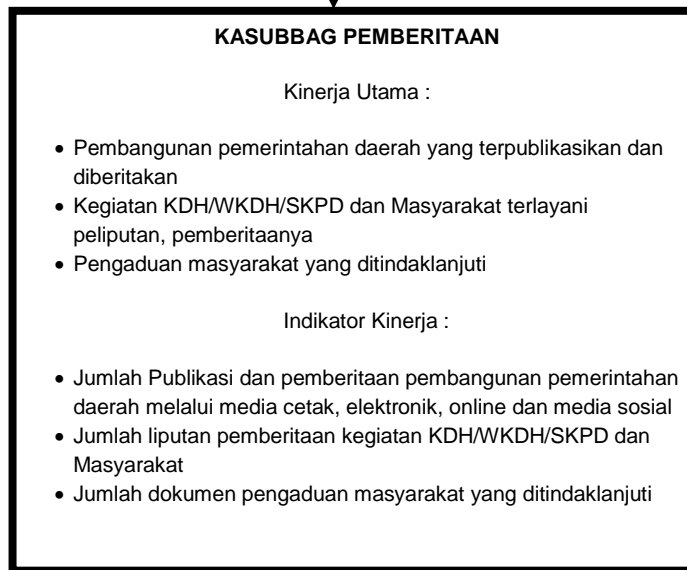
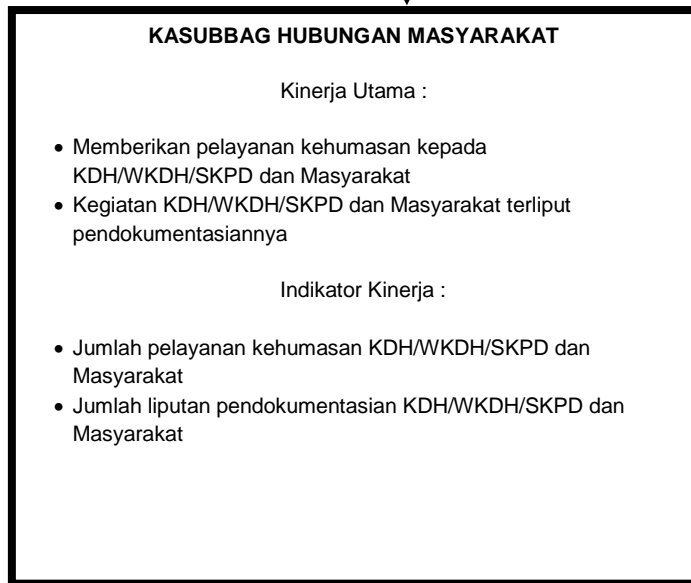
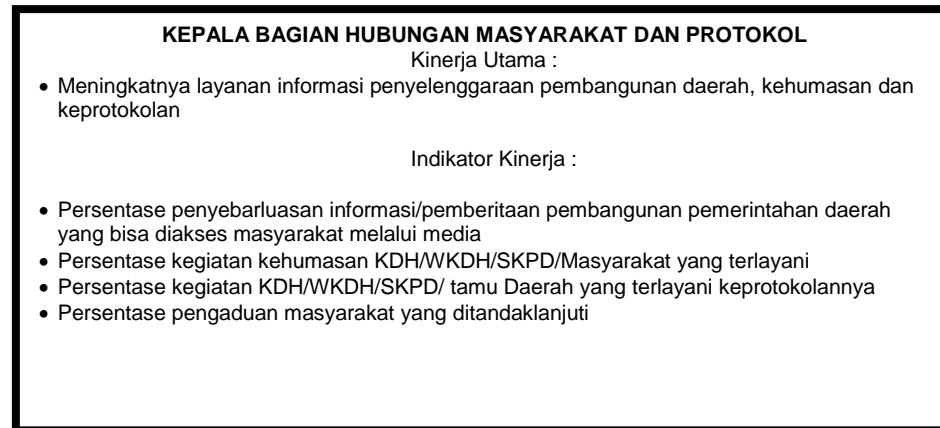
Kinerja Utama :

- Memberikan fasilitasi dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat

Indikator Kinerja :

- Jumlah Guru TK/TPA, Madin/MIS, Ponpes, dan Penyuluh agama yang diberi Intensif
- Jumlah guru TK/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan penyuluh Agama yang di monitoring
- Jumlah kegiatan bidang kesejahteraan yang di fasilitasi

POHON KINERJA
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT



**POHON KINERJA
BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

KEPALA BAGIAN UMUM

Kinerja Utama :

- Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik
- Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib

Indikator Kinerja :

- Persentase layanan Pimpinan/Bagian/SKPD/Masyarakat dengan baik
- Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda sarana prasarana / aset milik Setda terkelola dengan baik

KASUBBAG UMUM & RUMAH TANGGA

Kinerja Utama :

- Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana/aset Sekretariat Daerah
- Melaksanakan Pelayanan Urusan pimpinan/Bagian/SKPD/ dan Masyarakat
- Melaksanakan Pelayanan bidang transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah

Indikator Kinerja :

- Jumlah sarana dan prasarana/aset milik Setda yang terpelihara dan terkelola dengan baik
- Jumlah layanan pimpinan/Bagian/SKPD dan Masyarakat terlayani dengan baik
- Jumlah layanan transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah terlayani dengan baik

KASUBBAG PERLENGKAPAN

Kinerja Utama :

- Melaksanakan pengadaan aset di Lingkup Sekretariat Daerah
- Melaksanakan Pengelolaan, Pencatatan Aset dan Penghapusan aset di Lingkup Sekretariat Daerah
- Melaksanakan Rumusan Analisa Kebutuhan Barang di Lingkup Sekretariat Daerah

Indikator Kinerja :

- Jumlah aset yang didistribusikan di Lingkup Sekretariat Daerah
- Jumlah Aset Sekretariat Daerah yang terkelola dan tercatat dengan baik
- Jumlah dokumen analisa kebutuhan barang berupa rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) sesuai standar dan kebutuhan di lingkup Sekretariat Daerah

POHON KINERJA
BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN

Kinerja Utama :

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan layanan Sekretariat Daerah
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan Pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah
3. Meningkatnya layanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan

Indikator Kinerja :

1. Persentase Bagian dengan nilai IKM Minimal Baik
2. 2.1 Peningkatan komponen Area Perubahan RB Sekretariat Daerah
2.2 Peningkatan komponen Area Perubahan ZI Sekretariat Daerah
2.3 Peningkatan komponen SAKIP Sekretariat Daerah
2.4 Peningkatan unsur SPIP Sekretariat Daerah
3. Persentase pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Pimpinan Bagian lingkup Sekretariat Daerah

KASUBBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN

Kinerja Utama :

- Memberikan pelayanan Surat Menyurat lingkup Setda sesuai SOP
- Memberikan pelayanan Administrasi Kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah
- Memberikan pelayanan Administrasi Pimpinan lingkup Sekretariat Daerah
- Pengelolaan dan penyimpanan arsip lingkup Sekretariat Daerah
- Penyusunan Laporan Pelaksanaan RB Sekretariat Daerah dan ZI Sekretariat Daerah
- Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah

Indikator Kinerja :

- Jumlah SKPD/Bagian lingkup Setda yang terlayani administrasi surat menyurat
- Jumlah administrasi kepegawaian lingkup Setda yang terselesaikan
- Persentase Pelayanan administrasi pimpinan daerah (KDH/WKDH/Sekda)
- Persentase arsip yang terkelola sesuai SOP
- Jumlah Dokumen laporan RB Sekretariat Daerah dan ZI Sekretariat Daerah
- Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah

KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Kinerja Utama :

- Menyusun laporan kinerja Sekretariat Daerah
- Menyusun perencanaan dan keuangan Sekretariat Daerah

Indikator Kinerja :

- Jumlah laporan yang disusun sesuai ketentuan, (Bulanan, Triwulan/Rekon/Semester, CALK, LPPD Sekretariat Daerah, SAKIP Sekretariat Daerah dan SPIP Sekretariat Daerah)
- Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai aturan, (Renstra Sekretariat Daerah, Renja, RKA, DPA)



MATRIK KESELARASAN TAHUN 2020 SEKRETARIAT DAERAH



SETELAH EVALUASI

KABUPATEN TANAH LAUT

MATRIK KESELARASAN

SATKER : SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	NO.	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)				
						URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	TERKAIT	TIDAK TERKAIT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
1	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten		Skor LPPD Kabupaten		1	Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama antar Pemerintahan	Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD		Pembinaan dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Pengamanan Batas Daerah	Memfasilitasi kegiatan SKPD untuk Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Jumlah kegiatan yang berhasil difasilitasi dengan baik untuk penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		115,374,700			
						Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti				Memfasilitasi permasalahan pada kegiatan tata batas antar daerah Kabupaten/Kota	Jumlah permasalahan pada kegiatan tata batas antar daerah Kabupaten/Kota yang berhasil difasilitasi dengan baik					
							Persentase fasilitasi pelaksanaan pilkada (Presiden/Gubernur/Bupati)				Memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemilu dan pilkada melalui Tim Desk	Jumlah kegiatan penyelenggara pemilu dan pilkada (Tim Desk) yang di fasilitasi dengan baik					
							Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga	Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti		Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama Daerah	Memfasilitasi kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri	Jumlah dokumen kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil difasilitasi dengan baik		1,343,629,900			
							Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti		Pembinaan dan Tata Kelola Pemerintahan Umum	Memfasilitasi permasalahan penyelenggaraan pemerintah umum	Jumlah rapat penyelenggaraan pemerintahan umum yang berhasil difasilitasi dengan baik		154,787,600			
					2	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan		Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Memfasilitasi kegiatan perayaan Hari Besar Nasional dan Kabupaten	Jumlah kegiatan perayaan Hari Besar Nasional dan Kabupaten yang berhasil difasilitasi dengan baik		212,152,000			
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten		Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB		1	Pembinaan, Pengembangan, Penataan Kelembagaan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Aparatur dan Analisa Foemasi Jabatan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10		Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja	Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja Bupati Tanah Laut sesuai Permenpan 53 Tahun 2014	Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun sesuai Penmanpan 53 Tahun 2014		107,445,800			
3	Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah		Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B				Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal cukup		Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah daerah	Penguatan Sistem Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan fasilitasi reformasi birokrasi		56,090,560			
								Persentase SKPD dengan budaya kerja baik			Pelaksanaan Penerapan Budaya Kerja	Jumlah SKPD yang dibina budaya kerja					

NO.	SASARAN STRATEGIS	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	NO.	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)		
						URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	TERKAIT	TIDAK TERKAIT
4	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD		Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan				Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)		Pengembangan dan Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Penguatan ketatalaksanaan	Jumlah dokumen SOP yang sudah ditetapkan pelayanan publik		39,134,660	
								Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80		Pembuatan ID Card Pegawai	Penguatan Layanan Publik	Jumlah unit pelayanan publik yang melaksanakan standar pelayanan publik		37,720,800	
							Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif		Pengembangan dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan penataan kelembagaan yang efektif	Jumlah SKPD yang telah memiliki uraian tugas rinci dan jelas		48,339,020	
								Persentase Analisa dan evaluasi jabatan sesuai proporsinya		Pengembangan dan Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan	Pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan	Jumlah perangkat daerah yang memiliki evaluasi jabatan		121,086,000	
					1	Pembinaan, Pengelolaan, Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu		Pembinaan, Pengelolaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya	Jumlah terlaksanakannya pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya		311,531,840	
							Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE		Pembinaan dan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah terlaksanakannya kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu		180,954,020	
										Pembinaan Kompetensi dan Evaluasi Pelaporan	Memfasilitasi pembinaan SKPD dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	Jumlah fasilitasi dalam pembinaan SKPD dalam pengadaan barang/jasa pemerintah		243,623,200	
					1	Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan HAM, Dokumentasi Daerah	Peningkatan kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Hasil Penilaian atas Pemenuhan HAM		Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM Pemerintah Daerah	Fasilitasi Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (KPP HAM)	Terlaksananya kegiatan-kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KPP HAM)		313,479,600	
							Tingkat Penanganan masalah hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Persentase masalah hukum yang diselesaikan			Fasilitasi penanganan masalah hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Jumlah masalah hukum yang di tangani			

NO.	SASARAN STRATEGIS	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	NO.	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)		
						URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	TERKAIT	TIDAK TERKAIT
							Meningkatnya Pelayanan terhadap stakeholder dalam hal produk hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah/lainnya yang harmonis		Fasilitasi Produk Hukum Daerah	Mengoreksi, sinkronisasi dan Fasilitasi Penyusunan Perda, Perbup, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati	Jumlah produk hukum yang dikoreksi atau yang diharmonisasi		366,442,000	
							Produk Hukum Daerah yang terdokumentasi dan dipublikasikan	Persentase Produk Hukum Daerah yang terdokumentasi dan dipublikasikan		Fasilitasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Publikasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang terpublikasi		439,339,500	
					2	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah, kehumasan dan keprotokolan	Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media		Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Pembangunan pemerintahan daerah yang terpublikasikan dan diberikan	Jumlah Publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah melalui media cetak, elektronik, online dan media sosial		2,392,390,200	
							Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti			Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah dokumen pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti				
					2	Pembinaan, Pengembangan, Fasilitasi Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan	Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media			Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan	Kegiatan KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat terliput pendokumentasiannya	Jumlah liputan pendokumentasian KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat		71,183,800	
							Persentase kegiatan kehumasan KDH/WKDH/SKPD/ Masyarakat yang terlayani			Pengembangan Hubungan Masyarakat	Memberikan pelayanan kehumasan kepada KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat	Jumlah pelayanan kehumasan KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat		586,311,700	
							Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu daerah yang terlayani keprotokolannya			Fasilitasi dan Pelayanan Protokol Pemerintah Daerah	Kegiatan keprotokolan KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat yang terlayani	Jumlah kegiatan KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat yang terlayani keprotokolannya		380,072,400	

NO.	SASARAN STRATEGIS	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	NO.	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)		
						URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	TERKAIT	TIDAK TERKAIT
					1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/SKP D/Masyarakat dengan baik		Penyediaan Jasa, Bahan, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Melaksanakan Pelayanan Urusan Pimpinan/Bagian/SKPD/ dan Masyarakat	Jumlah Layanan Pimpinan/Bagian/SKPD dan Masyarakat terlayani dengan baik		3,359,913,560	
					2	Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda terkait sarana prasarana/ aset milik Setda dikelola dengan baik		Penyusunan Tabulasi Aset Daerah	Melaksanakan Rumusan Analisa Kebutuhan Barang di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen analisa kebutuhan barang berupa rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) sesuai standar dan kebutuhan di lingkup Sekretariat Daerah		119,500,000	
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Melaksanakan pengadaan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset yang didistribusikan di Lingkup Sekretariat Daerah		2,625,542,724				
							Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/SKP D/Masyarakat dengan baik		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana/aset Sekretariat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana/aset milik Setda yang terpelihara dan dikelola dengan baik		3,796,123,591	
							Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda terkait sarana prasarana/ aset milik Setda dikelola dengan baik		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Melaksanakan Pengelolaan, Pencatatan Aset dan Penghapusan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset Sekretariat Daerah yang dikelola dan tercatat dengan baik		655,481,000	
							Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/SKP D/Masyarakat dengan baik		Penyediaan Makanan dan Minuman	Melaksanakan Pelayanan bidang transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah layanan transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah terlayani dengan baik		1,240,064,000	
							Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Melaksanakan Pelayanan Urusan pimpinan/Bagian/SKPD/ dan Masyarakat	Jumlah layanan pimpinan/Bagian/SKPD dan Masyarakat terlayani dengan baik		690,098,600				
							Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Jabatan/Dinas	Melaksanakan Pelayanan Urusan pimpinan/Bagian/SKPD/ dan Masyarakat	Jumlah layanan pimpinan/Bagian/SKPD dan Masyarakat terlayani dengan baik		493,665,000				
							Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas	Melaksanakan Pengelolaan, Pencatatan Aset dan Penghapusan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset Sekretariat Daerah yang dikelola dan tercatat dengan baik		329,321,710				

NO.	SASARAN STRATEGIS	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	NO.	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)		
						URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	TERKAIT	TIDAK TERKAIT
					3	Fasilitasi Kegiatan dan Kebijakan KDH dan WKDH	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/SKP D/Masyarakat dengan baik		Penyediaan Perlengkapan dan Jasa Bagi KDH/WKDH	Melaksanakan Pelayanan Urusan pimpinan/Bagian/SKPD/ dan Masyarakat	Jumlah layanan pimpinan/Bagian/SKPD dan Masyarakat terlayani dengan baik		75,000,000	
										Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi KDH/WKDH			890,000,000		
										Penyediaan Makanan dan Minuman Rumah Jabatan			1,056,000,000		
										Pemeliharaan Kesehatan KDH dan WKDH			200,000,000		
					1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya layanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	Persentase pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Pimpinan Bagian lingkup Sekretariat Daerah		Penyediaan Rapat - Rapat, Konsultasi, dan Koordinasi	Memberikan pelayanan Administrasi Kepegawaian lingkup Setda	Jumlah administrasi kepegawaian lingkup Setda yang terselesaikan		1,802,745,223	
										Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD			3,387,379,200		
										Fasilitasi Kegiatan Staf Ahli Bupati	Memberikan pelayanan Administrasi Pimpinan lingkup Setda	Persentase pelayanan administrasi pimpinan daerah (KDH/WKDH/Sekda)		-	
5	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat		2	Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya layanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	Persentase pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Pimpinan Bagian lingkup Sekretariat Daerah		Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	Memberikan pelayanan Administrasi Kepegawaian lingkup Setda	Jumlah administrasi kepegawaian lingkup Setda yang terselesaikan		20,000,000	
										Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya			-		
					3	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Meningkatnya layanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	Persentase pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan Pimpinan Bagian lingkup Sekretariat Daerah		Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD	Menyusun perencanaan dan keuangan Setda	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai aturan, (Renstra Setda, Renja, RKA, DPA)		40,550,000	
										Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja			10,800,000		
6	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah		Nilai RB Sekretariat Daerah				Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Peningkatan komponen Area Perubahan RB Sekretariat Daerah		Penyusunan Laporan Keuangan	Menyusun laporan kinerja Setda	Jumlah laporan yang disusun sesuai ketentuan, (Bulanan, Triwulan/Rekon/Semester, CALK, LPPD Setda, LAKIP Setda dan SKM Setda)		10,171,100	
			Nilai ZI Sekretariat Daerah					Peningkatan komponen Area Perubahan ZI Sekretariat Daerah							
			Nilai SAKIP Sekretariat Daerah					Peningkatan komponen SAKIP Sekretariat Daerah							
			Nilai SPIP Sekretariat Daerah					Persentase Peningkatan unsur SPIP Sekretariat Daerah							

NO.	SASARAN STRATEGIS	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	NO.	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)		
						URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN TERKAIT DGN SASARAN (Y/T)	TERKAIT	TIDAK TERKAIT
					1	Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Persentase peningkatan lembaga sosial dan keagamaan		Pembinaan, Pengembangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat	Memberikan fasilitasi dibidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Guru TK/TPA, Madin/MIS, Ponpes, dan Penyuluh Agama yang diberi Intensif		18,485,415,200	
							Meningkatnya peran Organisasi/ Lembaga Keagamaan/SKPD Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga		Pembinaan, Pengembangan, Pemberdayaan Pendidikan dan Agama	Melakukan pengawasan terhadap pendidikan keagamaan	Jumlah pendidikan keagamaan yang dibina		1,156,975,600	
							Meningkatnya layanan bantuan sosial keagamaan	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan		Pembinaan, Pengembangan, Pemberdayaan Sosial dan Kebudayaan	Memberikan fasilitasi kepada masyarakat berupa hibah, koordinasi dan kegiatan bidang sosial dan kebudayaan	Jumlah dokumen hibah yang masuk secara tepat syarat		131,869,000	
7	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan		Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan		1	Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi Perekonomian Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan pembangunan daerah	Persentase fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan		Pembinaan, Fasilitasi dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah	Fasilitasi pengembangan potensi perekonomian	Jumlah laporan terkait potensi Perekonomian		198,751,200	
							Meningkatnya kualitas manajemen administrasi pembangunan yang proporsional sesuai dengan kewenangan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perekonomian Pembangunan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Perekonomian Pembangunan	Laporan monitoring perekonomian daerah		187,327,360	
							Meningkatnya hasil promosi potensi Daerah	Persentase peningkatan investasi				Jumlah laporan kegiatan TPID Kabupaten Tanah Laut			
							Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdaya saing	Fasilitasi pembinaan dan movev BUMD Kabupaten Tanah Laut		Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi Usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Pembinaan Pengembangan dan Fasilitasi Perekonomian Pembangunan Daerah	Jumlah laporan fasilitasi Pembinaan BUMD		193,439,060	

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Drs. H. DAHNIAL KIFLI, M.AP.
NIP. 19640425 198703 1 012



RENCANA AKSI TAHUN 2020 SEKRETARIAT DAERAH



SETELAH EVALUASI

KABUPATEN TANAH LAUT

RENCANA AKSI KINERJA 2020
SEKRETARIAT DAERAH

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN					PENANGGUNG JAWAB	
No	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEU	ANGGARAN / DPA		
ESELON II											
1	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	TW.1	0	Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama antar Pemerintahan	Pembinaan dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Pengamanan Batas Daerah	Jumlah kegiatan yang berhasil difasilitasi dengan baik untuk penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	TW.1	59,127,100	118,421,700	Sekretaris Daerah dan Kabag Tata Pemerintahan
			TW.2	1 Dokumen				TW.2	16,689,600		
			TW.3	0				TW.3	42,605,000		
			TW.4					TW.4	0		
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	TW.1	0	Pembinaan, Pengembangan, Penataan Kelembagaan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja	Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten	TW.1	163,968,800	169,924,800	Sekretaris Daerah dan Kabag Organisasi
			TW.2	1 Dokumen				TW.2	4,467,000		
			TW.3	0				TW.3	1,489,000		
			TW.4	2 Dokumen				TW.4	0		
3	Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	TW.1	0	Pembinaan, Pengembangan, Penataan Kelembagaan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan	Penerapan Reformasi dan Birokrasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten	TW.1	111,254,560	117,210,560	Sekretaris Daerah dan Kabag Organisasi
			TW.2	1 Dokumen				TW.2	4,467,000		
			TW.3	0				TW.3	1,489,000		
			TW.4	2 Dokumen				TW.4	0		
4	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	TW.1	0	Pembinaan, Pengembangan, Penataan Kelembagaan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan	Pengembangan dan Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Jumlah SKPD yang berpartisipasi pada Inovasi pelayanan publik	TW.1	67,298,660	74,954,660	Sekretaris Daerah dan Kabag TU dan Keuangan
			TW.2	0				TW.2	6,167,000		
			TW.3	0				TW.3	1,489,000		
			TW.4	1 Inovasi				TW.4	0		
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	TW.1	0	Pembinaan, Pengembangan, Penataan Kelembagaan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan		Jumlah laporan yang disusun sesuai ketentuan, (Bulanan, Triwulan/Rekon/Semester, CALK, LPPD Setda, LAKIP Setda dan SKM Setda)	TW.1	6,476,450		Sekretaris Daerah dan Kabag TU dan Keuangan
			TW.2	0				TW.2	2,618,350		
			TW.3	1 Dokumen				TW.3	2,998,750		
			TW.4	0				TW.4	1,218,750		

		Nilai ZI Sekretariat Daerah TW.1 0 TW.2 0 TW.3 1 Dokumen TW.4 0 Nilai SAKIP Sekretariat Daerah TW.1 0 TW.2 0 TW.3 1 Dokumen TW.4 0 Nilai SPIP Sekretariat Daerah TW.1 0 TW.2 0 TW.3 0 TW.4 1 Dokumen	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan yang disusun sesuai ketentuan, (Bulanan, Triwulan/Rekon/Semester, CALK, LPPD Setda, LAKIP Setda dan SKM Setda) TW.1 TW.2 TW.3 TW.4 Jumlah laporan yang disusun sesuai ketentuan, (Bulanan, Triwulan/Rekon/Semester, CALK, LPPD Setda, LAKIP Setda dan SKM Setda) TW.1 TW.2 TW.3 TW.4 Jumlah laporan yang disusun sesuai ketentuan, (Bulanan, Triwulan/Rekon/Semester, CALK, LPPD Setda, LAKIP Setda dan SKM Setda) TW.1 TW.2 TW.3 TW.4	13,312,300		
6	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	TW.1 0 TW.2 1 Dokumen TW.3 0 TW.4 1 Dokumen	Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas SDM	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	Jumlah administrasi kepegawaian lingkup Setda yang terselesaikan TW.1 15,000,000 TW.2 15,000,000 TW.3 30,000,000 TW.4 15,000,000	75,000,000	Sekretaris Daerah dan Kabag TU dan Keuangan
7	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	TW.1 10% TW.2 40% TW.3 50% TW.4 100%	Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi Perekonomian Pembangunan Daerah	Pembinaan, Fasilitasi dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah	Laporan terkait potensi Perekonomian TW.1 73,170,100 TW.2 152,121,100 TW.3 52,408,500 TW.4 14,570,000	292,269,700	Sekretaris Daerah Kabag Perekonomian Pembangunan

**RENCANA AKSI KINERJA 2020
SEKRETARIAT DAERAH**

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN					PENANGGUNG JAWAB		
No	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEU	ANGGARAN / DPA			
ESELON III												
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	TW.1	0	Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama antar Pemerintahan	Pembinaan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Umum	Jumlah rapat penyelenggaraan pemerintahan umum yang berhasil difasilitasi dengan baik		TW.1	44,288,300	169,852,100	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
			TW.2	4 kali					TW.2	43,500,000		
			TW.3	3 kali					TW.3	41,704,300		
			TW.4	4 kali					TW.4	40,359,500		
		Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan	TW.1	0	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan perayaan Hari Besar Nasional dan Kabupaten yang berhasil difasilitasi dengan baik		TW.1	0	217,287,800	
			TW.2	2 kali					TW.2	7,414,800		
			TW.3	3 kali					TW.3	24,380,000		
			TW.4	5 kali					TW.4	185,493,000		
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	TW.1	0	Pembinaan dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Pengamanan Batas Daerah	Pembinaan dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Pengamanan Batas Daerah	Jumlah permasalahan pada kegiatan tata batas antar daerah Kabupaten/Kota yang berhasil difasilitasi dengan baik		TW.1	59,127,100	118,421,700	
			TW.2	0				Jumlah kegiatan penyelenggara pemilu dan pilkada (Tim Desk) yang di fasilitasi dengan baik	TW.2	16,689,600		
		TW.3	0				TW.3		42,605,000			
		TW.4	0				TW.4		0			
		3	Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD			TW.1	0	Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama antar Pemerintahan	Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama Daerah		Jumlah kegiatan yang berhasil difasilitasi dengan baik untuk penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
TW.2	1 (dok)					TW.2	0					
TW.3	0					TW.3	0					
TW.4	1 (dok)					TW.4	0					
4	Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga	Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	TW.1	0	Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama Daerah	Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil difasilitasi dengan baik		TW.1	537,397,200	877,349,900	
			TW.2	4 Dokumen					TW.2	339,952,700		
			TW.3	0					TW.3	0		
			TW.4	0					TW.4	0		

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN					PENANGGUNG JAWAB
No	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEU	ANGGARAN / DPA	
ESELON III										
1	Meningkatnya Pelayanan terhadap stakeholder dalam hal produk hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Persentase Produk Hukum Daerah/lainnya yang harmonis	TW.1 0	Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan HAM, Dokumentasi Hukum	Fasilitasi Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum yang dikoreksi atau yang diharmonisasi		TW.1 318,929,800	392,329,800	Kepala Bagian Hukum
			TW.2 200 buah					TW.2 48,600,000		
			TW.3 100 buah					TW.3 18,600,000		
			TW.4 262 buah					TW.4 6,200,000		
2	Tingkat Penanganan masalah hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Persentase masalah hukum yang diselesaikan	TW.1 0		Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM Pemerintah Daerah	Jumlah masalah hukum yang di tangani		TW.1 333,528,700	439,528,700	
			TW.2 2 kali					TW.2 74,000,000		
3	Peningkatan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Hasil Penilaian atas Pemenuhan HAM	TW.3 2 kali			Terlaksananya kegiatan - kegiatan rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KPP HAM)		TW.3 24,000,000		
			TW.4 1 kali					TW.4 8,000,000		
4	Produk Hukum Daerah yang terdokumentasi dan di publikasikan	Persentase Produk Hukum Daerah yang terdokumentasi dan di publikasikan	TW.1 0		Fasilitasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Jumlah registrasi dan dokumentasi produk hukum daerah		TW.1 393,789,500	439,339,500	
			TW.2 100 eksemplar					TW.2 30,950,000		
			TW.3 250 eksemplar					TW.3 10,950,000		
			TW.4 100 Eksemplar					TW.4 3,650,000		

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN					PENANGGUNG JAWAB	
No	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEU	ANGGARAN / DPA		
ESELON III											
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	TW.1	0	Pembinaan, Pengembangan, Penataan Kelembagaan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja	Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun sesuai Pemenuhan 53 Tahun 2014		TW.1	163,968,800	169,924,800
			TW.2	0			Jumlah SKPD yang di diasistensi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		TW.2	4,467,000	
			TW.3	0					TW.3	1,489,000	
			TW.4	65 %					TW.4	0	
2	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal cukup	TW.1	0	Penerapan reformasi birokrasi pemerintah daerah	Jumlah laporan fasilitasi reformasi birokrasi		TW.1	111,254,560	117,210,560	
		Persentase SKPD dengan budaya kerja baik	TW.2	0		Jumlah SKPD yang di bina budaya kerja		TW.2	4,467,000		
			TW.3	0				TW.3	1,489,000		
			TW.4	1 dokumen				TW.4	0		
3	Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80	TW.1	0	Pembinaan, Pengembangan, Penataan Kelembagaan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan	Pengembangan dan Penataan ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen SOP yang sudah ditetapkan		TW.1	67,298,660	74,954,660
			TW.2	0					TW.2	6,167,000	
			TW.3	20 dokumen					TW.3	1,489,000	
			TW.4	20 dokumen					TW.4	0	
		Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	TW.1	4500 buah		Pembuatan ID Card Pegawai	Jumlah dokumen SOP yang sudah ditetapkan		TW.1	129,136,600	129,136,600
			TW.2	0					TW.2	0	
			TW.3	0					TW.3	0	
			TW.4	7 SOP					TW.4	0	
4	Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase Analisis evaluasi jabatan sesuai proporsinya	TW.1	0	Pengembangan dan Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan	Jumlah perangkat daerah yang memiliki informasi jabatan		TW.1	246,646,900	246,646,900	
			TW.2	20 SKPD				TW.2	0		
			TW.3	0				TW.3	0		
			TW.4	20 SKPD				TW.4	0		
		Persentase perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	TW.1	0	Pengembangan dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah SKPD yang telah memiliki uraian tugas rinci dan jelas		TW.1	69,293,020	69,293,020	
			TW.2	20 SKPD				TW.2	0		
			TW.3	0				TW.3	0		
			TW.4	20 SKPD				TW.4	0		

No	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN					PENANGGUNG JAWAB		
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEU	ANGGARAN / DPA			
ESELON III												
1	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	TW.1	3 bulan		Pembinaan, pengelolaan dan layanan pengadaan secara elektronik	Jumlah terlaksanakannya pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya		TW.1	102,484,000	206,698,000	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			TW.2	3 bulan				TW.2	51,799,000			
			TW.3	3 bulan				TW.3	26,799,000			
			TW.4	3 bulan				TW.4	25,616,000			
2	Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	TW.1	0	Pembinaan, Pengelolaan, Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Pembinaan dan fasilitasi pengadaan barang/jasa pemerintah	Jumlah terlaksanakannya kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu		TW.1	275,900,000	940,588,080	
			TW.2	0				TW.2	634,891,300			
			TW.3	0				TW.3	26,240,780			
			TW.4	150 paket				TW.4	3,556,000			
			TW.1	0		Pembinaan kompetensi dan evaluasi pelaporan	Jumlah fasilitasi pembinaan SKPD dalam pengadaan barang/jasa pemerintah		TW.1	197,196,700	387,834,700	
			TW.2	0				TW.2	188,272,000			
			TW.3	0				TW.3	1,183,000			
			TW.4	40 SKPD				TW.4	1,183,000			

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN					PENANGGUNG JAWAB			
No	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEU	ANGGARAN / DPA				
ESELON III													
1	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Persentase peningkatan lembaga sosial dan keagamaan	TW.1	0	Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Rakyat	Pembinaan, pengembangan, pemberdayaan kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Guru TK/TPA, Madin/MIS, Ponpes, dan Penyuluh agama yang diberi Intensif		TW.1	4,779,560,400	18,629,024,850	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
			TW.2	2 pendidikan					TW.2	4,627,127,800			
			TW.3	0					TW.3	4,695,336,650			
			TW.4	0					TW.4	4,527,000,000			
2	Meningkatnya layanan bantuan sosial keagamaan	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan	TW.1	20 organisasi/lembaga		Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Rakyat	Pembinaan, pengembangan, pemberdayaan sosial dan kebudayaan	Jumlah organisasi/lembaga sosial keagamaan yang diberikan bantuan hibah		TW.1	58,917,000	250,000,000	
			TW.2	20 organisasi/lembaga						TW.2	97,548,000		
			TW.3	20 organisasi/lembaga						TW.3	72,616,000		
			TW.4	13 organisasi/lembaga						TW.4	20,919,000		
3	Meningkatnya peran Organisasi/ Lembaga Keagamaan/SKPD Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	TW.1	0		Pembinaan, pengembangan, pemberdayaan pendidikan dan agama	Jumlah pendidikan keagamaan yang dibina		TW.1	1,144,499,500	3,782,000,000		
			TW.2	2 organisasi					TW.2	1,011,352,500			
			TW.3	2 organisasi					TW.3	1,120,168,000			
			TW.4	0					TW.4	505,980,000			

SASARAN		PROGRAM		KEGIATAN					PENANGGUNG JAWAB			
No	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEU	ANGGARAN / DPA				
ESELON III												
14	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah, kehumasan dan keprotokolanan	Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu Daerah yang terlayani keprotokolannya	TW.1	150	Pembinaan, Pengembangan, Fasilitasi Hubungan Masyarakat dan Keprotokolanan	Fasilitasi dan pelayanan protokoler pemerintah daerah	Jumlah kegiatan KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat yang terlayani keprotokolannya		TW.1	143,408,600	380,072,400	Kepala Bagian Humas dan Protokol
			TW.2	150					TW.2	100,393,800		
			TW.3	200					TW.3	98,880,000		
			TW.4	230					TW.4	37,390,000		
		Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	TW.1	50 kali		Pengembangan hubungan masyarakat	Jumlah pelayanan kehumasan KDH/WKDH/SKPD dan masyarakat		TW.1	97,857,200	321,817,600	
			TW.2	100 kali					TW.2	101,482,900		
			TW.3	100 kali					TW.3	91,341,000		
			TW.4	150 kali					TW.4	31,136,500		
			TW.1	2 kali		Pelaksanaan kegiatan pameran pembangunan	Jumlah liputan pendokumentasian KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat		TW.1	125,000,000	125,000,000	
			TW.2	2 kali					TW.2	0		
			TW.3	3 kali					TW.3	0		
			TW.4	2 kali					TW.4	0		
		Persentase kegiatan kehumasan KDH/WKDH/SKPD/Masyarakat yang terlayani	TW.1	20%	Kerjasama Informasi dan Mass Media	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah Publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah melalui media cetak, elektronik, online dan media sosial		TW.1	625,760,457	2,603,640,000	
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	TW.2				40%	Jumlah dokumen pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti			
		TW.3		70%			TW.3	564,314,157				
		TW.4		100%			TW.4	849,251,229				

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN					PENANGGUNG JAWAB	
No	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEU	ANGGARAN / DPA		
ESELON III											
1	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/SKPD/Masyarakat dengan baik	TW.1	0	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Jumlah layanan transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di lingkup Sekretariat Daerah terlayani dengan baik	TW.1	1,130,113,660	3,427,188,660	Kepala Bagian Umum
			TW.2	0				TW.2	739,023,000		
			TW.3	0				TW.3	819,023,000		
			TW.4	0				TW.4	739,029,000		
			TW.1	0		Penyediaan perlengkapan dan jasa bagi KDH/WKDH	Jumlah layanan pimpinan/Bagian/SKPD dan Masyarakat terlayani dengan baik	TW.1	75,000,000	75,000,000	
			TW.2	0				TW.2	0		
			TW.3	0				TW.3	0		
			TW.4	0				TW.4	0		
			TW.1	0		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi KDH/WKDH	Jumlah layanan pimpinan/Bagian/SKPD dan Masyarakat terlayani dengan baik	TW.1	962,000,000	2,798,000,000	
			TW.2	0				TW.2	612,000,000		
			TW.3	0				TW.3	612,000,000		
			TW.4	0				TW.4	612,000,000		
			TW.1	0		Penyediaan makanan dan minuman rumah jabatan	Jumlah layanan pimpinan/Bagian/SKPD dan Masyarakat terlayani dengan baik	TW.1	284,421,000	1,137,680,000	
			TW.2	0				TW.2	284,421,000		
			TW.3	0				TW.3	284,421,000		
			TW.4	0				TW.4	284,417,000		
			TW.1	0		Pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH	Jumlah layanan pimpinan/Bagian/SKPD dan Masyarakat terlayani dengan baik	TW.1	200,000,000	200,000,000	
			TW.2	0				TW.2	0		
			TW.3	0				TW.3	0		
			TW.4	0				TW.4	0		
			TW.1	0		Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah aset yang didistribusikan di Lingkup Sekretariat Daerah	TW.1	860,019,000	3,440,087,818	
			TW.2	0				TW.2	860,019,000		
			TW.3	0				TW.3	860,019,000		
			TW.4	0				TW.4	860,030,818		
			TW.1	0		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah layanan transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di lingkup Sekretariat Daerah terlayani dengan baik	TW.1	860,019,000	3,440,087,818	
			TW.2	0				TW.2	860,019,000		
			TW.3	0				TW.3	860,019,000		
			TW.4	0				TW.4	860,030,818		

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN					PENANGGUNG JAWAB	
No	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEU	ANGGARAN / DPA		
ESELON III											
2			TW.1	0	Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah aset yang didistribusikan di Lingkup Sekretariat Daerah		TW.1	67,800,000	454,372,000
			TW.2	0				TW.2	386,572,000		
			TW.3	0				TW.3	0		
			TW.4	0				TW.4	0		
			TW.1	0		Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan dinas	Jumlah Aset Sekretariat Daerah yang terkelola dan tercatat dengan baik		TW.1	0	444,720,000
			TW.2	0				TW.2	444,720,000		
			TW.3	0				TW.3	0		
			TW.4	0				TW.4	0		
	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda sarana prasarana / aset milik Setda terkelola dengan baik	TW.1	0	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan/dinas	Jumlah sarana dan prasarana/aset milik Setda yang terpelihara dan terkelola dengan baik		TW.1	95,910,000	383,640,000
			TW.2	0				TW.2	95,910,000		
			TW.3	0				TW.3	95,910,000		
			TW.4	0				TW.4	95,910,000		
			TW.1	0		Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana/aset milik Setda yang terpelihara dan terkelola dengan baik		TW.1	860,019,000	3,440,087,818
			TW.2	0				TW.2	860,019,000		
			TW.3	0				TW.3	860,019,000		
			TW.4	0				TW.4	860,030,818		
TW.1	0	Penyusunan tabulasi aset daerah	Jumlah dokumen analisa kebutuhan barang berupa rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) sesuai standar dan kebutuhan di lingkup Sekretariat Daerah		TW.1	32,593,000	119,500,000				
TW.2	0			TW.2	28,968,000						
TW.3	0			TW.3	28,968,000						
TW.4	0			TW.4	28,971,000						

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN					PENANGGUNG JAWAB							
No	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEU	ANGGARAN / DPA								
ESELON III																	
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Peningkatan komponen Area Perubahan RB Sekretariat Daerah	TW.1	0	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan yang disusun sesuai ketentuan, (Bulanan, Triwulan/Rekon/Semester, CALK, LPPD Setda, LAKIP Setda dan SKM Setda)	TW.1	6,476,450	13,312,300	Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan						
			TW.2	0				TW.2	2,618,350								
			TW.3	1 Dokumen				TW.3	2,998,750								
			TW.4	0				TW.4	1,218,750								
		Peningkatan komponen SAKIP Sekretariat Daerah	TW.1	0			Jumlah laporan yang disusun sesuai ketentuan, (Bulanan, Triwulan/Rekon/Semester, CALK, LPPD Setda, LAKIP Setda dan SKM Setda)	TW.1	-								
			TW.2	0				TW.2	-								
			TW.3	1 Dokumen				TW.3	-								
			TW.4	0				TW.4	-								
		Peningkatan komponen Area Perubahan ZI Sekretariat Daerah	TW.1	0			Jumlah laporan yang disusun sesuai ketentuan, (Bulanan, Triwulan/Rekon/Semester, CALK, LPPD Setda, LAKIP Setda dan SKM Setda)	TW.1	-								
			TW.2	0				TW.2	-								
			TW.3	1 Dokumen				TW.3	-								
			TW.4	0				TW.4	-								
		Persentase Peningkatan unsur SPIP Sekretariat Daerah	TW.1	0			Jumlah laporan yang disusun sesuai ketentuan, (Bulanan, Triwulan/Rekon/Semester, CALK, LPPD Setda, LAKIP Setda dan SKM Setda)	TW.1	-								
			TW.2	0				TW.2	-								
			TW.3	0				TW.3	-								
			TW.4	1 Dokumen				TW.4	-								
							TW.1	0	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai aturan, (Renstra Setda, Renja, RKA, DPA)	TW.1	12,304,300	45,800,000	
							TW.2	2 dokumen						TW.2	12,100,700		
							TW.3	2 dokumen						TW.3	10,697,500		
							TW.4	2 dokumen						TW.4	10,697,500		
	TW.1			200 buah/25 kali	Jumlah laporan yang disusun sesuai ketentuan, (Bulanan, Triwulan/Rekon/Semester, CALK, LPPD Setda, LAKIP Setda dan SKM Setda)	TW.1	5,100,000										
	TW.2			200 buah/25 kali		TW.2	4,425,000										
	TW.3			200 buah/25 kali		TW.3	5,100,000										
	TW.4			200 buah/25 kali		TW.4	4,425,000										
ESELON III																	

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN					PENANGGUNG JAWAB	
No	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEU	ANGGARAN / DPA		
ESELON III											
2	Meningkatnya layanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan keuangan	Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan Pimpinan/Bagian lingkup Sekretariat Daerah	TW.1	824 kali	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi		Persentase Pelayanan administrasi pimpinan daerah (KDH/WKDH/Sekda)	TW.1	1,493,241,450	5,209,173,814
			TW.2	824 kali				TW.2	1,373,162,450		
			TW.3	824 kali				TW.3	1,348,162,450		
			TW.4	824 kali				TW.4	994,607,464		
			TW.1	3 bulan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa penunjang kinerja		Jumlah administrasi kepegawaian lingkup Setda yang terselesaikan	TW.1	846,846,000	3,387,379,200
			TW.2	3 bulan				TW.2	846,846,000		
			TW.3	3 bulan				TW.3	846,846,000		

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN					PENANGGUNG JAWAB
No	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KEU	ANGGARAN / DPA	
ESELON III										
			TW.4	3 bulan				TW.4	846,841,200	
			TW.1	10 kali	Fasilitasi kegiatan staf ahli bupati	Persentase Pelayanan administrasi pimpinan daerah (KDH/WKDH/Sekda)		TW.1	32,250,000	65,750,000
			TW.2	20 kali				TW.2	14,500,000	
			TW.3	20 kali				TW.3	10,000,000	
			TW.4	20 kali				TW.4	9,000,000	
			TW.1	1 tahun	Peningkatan kemampuan teknis aparatur	Jumlah administrasi kepegawaian lingkup Setda yang terselesaikan		TW.1	15,000,000	75,000,000
			TW.2	0				TW.2	30,000,000	
			TW.3	0				TW.3	15,000,000	
			TW.4	0				TW.4	15,000,000	
			TW.1	0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah administrasi kepegawaian lingkup Setda yang terselesaikan		TW.1	0	206,250,000
			TW.2	255 stel				TW.2	206,250,000	
			TW.3	0				TW.3	0	
			TW.4	0				TW.4	0	



RENCANA KERJA TAHUNAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2020



SETELAH EVALUASI

KABUPATEN TANAH LAUT

**RENCANA KERJA TAHUNAN
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2020**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TK. CAPAIAN TARGET	INDIKATOR KINERJA MASUKKAN (INPUT)	SATUAN	TARGET MASUKAN (INPUT)	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Meningkatkan kualitas layanan masyarakat dengan berbasis teknologi informasi dalam rangka mendukung pembangunan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BAIK (85)	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SKM				61,521,100	Sekda dan Bagian Tata Usaha dan Keuangan	MISI KE - I "Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya"	
Meningkatkan Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	BB (85)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah Nilai ZI Sekretariat Daerah Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Nilai SPIP Sekretariat Daerah	85 82 82 3,5		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Nilai RB Nilai ZI Nilai SAKIP Nilai SPIP					Sekda dan Bagian Tata Usaha dan Keuangan	MISI KE - III "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"	
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Bidang Tata Usaha, Kepegawaian, Perencanaan Program dan Keuangan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Bagian Tata Usaha dan Keuangan	BB	Meningkatnya layanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan Pimpinan/Bagian lingkup Sekretariat Daerah	100%		Program Pelayanan Administasi Perkantoran	Nilai IKM	Baik			8,596,553,014			
							Penyediaan Rapat - rapat, Konsultasi, dan Koordinasi	Jumlah belanja tenaga ahli/narasumber/tenaga teknis lainnya	133 Orang		Input - SDM - Dana	Orang Rp	5 5.209.173.814	Bagian TU dan Keuangan	
							Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	Persentase perjalanan dinas, kamar penginapan, tamu Pemda, pemetaan jenajah, dan pengangkutan jenazah	12 Bulan			3.387.379.200	Kasubbag TU dan Kepegawaian		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TK. CAPAIAN TARGET	INDIKATOR KINERJA MASUKKAN (INPUT)	SATUAN	TARGET MASUKAN (INPUT)	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							<i>Fasilitasi Kegiatan Staf Ahli Bupati</i>	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan	-			0		
							Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Jumlah ASN	120			281,250,000		
							<i>Peningkatan Kemampuan Aparatur Teknis</i>	Jumlah SDM yang mendapat pelatihan dan bimbingan teknis	120			75,000,000		
							<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya</i>	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	0			0		
			Meningkatnya kualitas pelaporan lingkup Sekretariat Daerah	Persentase peningkatan mutu penyusunan pelaporan/kinerja yang tepat waktu sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku	100%		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Tingkat Maturitas Penerapan SPIP	Level 3			77,362,300	Bagian TU dan Keuangan	
							<i>Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD</i>	Jumlah dokumen perencanaan dan kinerja SKPD	8 Dokumen	Input - SDM - Dana	Orang Rp	11 45.800.000	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	
							<i>Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan</i>	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD	6 Dokumen			13,312,300		
							<i>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja</i>	Persentase belanja materai, persentase belanja transaksi keuangan, persentase buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%			19,050,000		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TK. CAPAIAN TARGET	INDIKATOR KINERJA MASUKKAN (INPUT)	SATUAN	TARGET MASUKAN (INPUT)	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Inovasi dalam Pelayanan Publik	Persentase peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Inovasi dalam Pelayanan Publik	100%	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	1		Pembinaan, Pengembangan, Penataan Kelembagaan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Aparatur dan Analisis Formasi Jabatan	Indeks Reformasi Birokrasi	B			807,166,540	Sekda dan Bagian Organisasi	MISI KE- II "Menciptakan Inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif "
			Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB Minimal B	80								Sekda dan Bagian Organisasi	MISI KE- III "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP Minimal BB	90									
Meningkatkan kualitas peningkatan kapasitas dan evaluasi kelembagaan, analisis jabatan, tatalaksana, pelayanan publik, pemberdayaan aparatur dan akuntabilitas kinerja	Persentase kualitas peningkatan kapasitas dan evaluasi kelembagaan, analisis jabatan, tatalaksana, pelayanan publik, pemberdayaan aparatur dan akuntabilitas kinerja	100%	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	70%		Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja	Jumlah dokumen	2 Dokumen	Input - SDM - Dana	Orang Rp	2 169.924.800	Bagian Organisasi	
			Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal cukup	20%		Penetapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen	1 Dokumen	Input - SDM - Dana	Orang Rp	2 117.210.560	Kasubbag Pemberdayaan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja	
				Persentase SKPD dengan budaya kerja baik	15%									
			Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80	100%		Pembuatan ID Card Pegawai	Jumlah ID Card	4500 Id Card	Input - SDM - Dana	Orang Rp	2 129.136.600	Bagian Organisasi	
				Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%		Pengembangan dan Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen	8 Dokumen	Input - SDM - Dana	Orang Rp	2 74.954.660	Kasubbag Tata Laksana dan Pelayanan Publik	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TK. CAPAIAN TARGET	INDIKATOR KINERJA MASUKKAN (INPUT)	SATUAN	TARGET MASUKAN (INPUT)	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	100%		<i>Pengembangan dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen	40 SKPD	Input - SDM - Dana	Orang Rp	3 69.293.020	Bagian Organisasi Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
				Persentase Analisa dan evauasi jabatan sesuai proporsinya	100%		<i>Pengembangan dan Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan</i>	Jumlah dokumen	40 SKPD	Input - SDM - Dana	Orang Rp	3 246.646.900		
Meningkatkan Penyelenggaraan Kepemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	BAIK (75)	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Sor LPPD Kabupaten	ST (3,075)		Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama Antar Pemerintah	Peningkatan Skor LPPD				1,165,623,700	Sekda dan Bagian Tata Pemerintahan	MISI KE-III "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan umum, dan pengembangan kerjasama	Persentase kualitas penyelenggaraan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan umum, dan pengembangan kerjasama	100%	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	100%		<i>Kegiatan Pembinaan dan Tata Kelola Pemerintahan Umum</i>	Jumlah dokumen	1 Dokumen	Input - SDM - Dana	Orang Rp	3 154.787.600	Bagian Tapem Kasubbag Kerjasama Pemerintahan	
				Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/ Kabupaten yang diselenggarakan	100%		<i>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</i>	Pelaksanaan HUT RI dan Pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut	2 Kali	Input - SDM - Dana	Orang Rp	4 212.152.000	Bagian Tapem Kasubbag Adm Pemerintahan	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	100%		<i>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Pengamanan Batas Daerah</i>	Jumlah dokumen	1 Dokumen	Input - SDM - Dana	Orang Rp	3 115.374.700	Bagian Tapem Kasubbag Otonomi Daerah	
				Persentase fasilitasi pelaksanaan pilkada (Presiden/ Gubernur/ Bupati)	100%		<i>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Pengamanan Batas Daerah</i>	Jumlah Kegiatan Monitoring	11 kali	Input - SDM - Dana	Orang Rp	3 115.374.700	Bagian Tapem Kasubbag Otonomi Daerah	
			Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	100%		<i>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Pengamanan Batas Daerah</i>	Jumlah dokumen	40 LPPD SKPD	Input - SDM - Dana	Orang Rp	3 115.374.700	Bagian Tapem Kasubbag Otonomi Daerah	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TK. CAPAIAN TARGET	INDIKATOR KINERJA MASUKKAN (INPUT)	SATUAN	TARGET MASUKAN (INPUT)	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
Meningkatkan penyelenggaraan pembentukan produk hukum, telaahan hukum dan kajian hukum, bantuan hukum dan HAM, dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan hukum	Persentase penyelenggaraan pembentukan produk hukum, telaahan hukum dan kajian hukum, bantuan hukum dan HAM, dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan hukum	100%	Meningkatnya Pelayanan terhadap stakeholder dalam hal produk hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Produk hukum Daerah/lainnya yang harmonis	100%		Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan HAM, Dokumentasi Hukum	Terfasilitasinya penyusunan produk hukum daerah/lainnya/ bantuan hukum dan HAM, Publikasi produk hukum daerah	100%	Input - SDM - Dana	Orang Rp	784.659.600 . 5 392.329.800	Bagian Hukum Kasubbag Pembentukan Produk Hukum Daerah	MISI KE - III "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"		
			Tingkat Penanganan masalah hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Persentase masalah hukum yang diselesaikan	100%		<i>Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM Pemerintah Daerah</i>	Nilai	Nilai 75	Input - SDM - Dana	Orang Rp	3 392.329.800	Bagian Hukum Kasubbag Bankum dan Hak Asasi Manusia			
			Peningkatan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Diraihnya predikat Kabupaten/ Kota Peduli HAM dengan Predikat Peduli HAM	Nilai 75											
			Produk Hukum Daerah yang terdokumentasi dan di publikasikan	Persentase Produk Hukum Daerah yang terdokumentasi dan di publikasikan	100%		<i>Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM Pemerintah Daerah</i>	Persentase	100%	Input - SDM - Dana	Orang Rp	3 439.528.700	Bagian Hukum Kasubbag Dokumentasi Informasi Hukum			
Meningkatkan kinerja pembinaan, pengawasan dan mengevaluasi publikasi dan pemberitaan pimpinan, pengelolaan informasi dan mengatur keprotokolan pimpinan dan tamu pimpinan	Persentase kinerja pembinaan, pengawasan dan mengevaluasi publikasi dan pemberitaan pimpinan, pengelolaan informasi dan mengatur keprotokolan pimpinan dan tamu pimpinan	100%	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah, kehumasan dan keprotokolan	Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	100%		Pembinaan, Pengembangan, Fasilitasi Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan	Nilai IKM	Baik	Input - SDM - Dana	Orang Rp	826.890.000 5 125.000.000	Bagian Humas dan Keprotokolan Plt. Kasubbag Hubungan Masyarakat	MISI KE - III "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"		
				Persentase kegiatan kehumasan KDH/WKDH/SKPD/ Masyarakat yang terlayani	100%		<i>Pengembangan Hubungan Masyarakat</i>	Jumlah terlaksananya kegiatan pameran pembangunan	5 Aduan				321.817.600			
				Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu daerah yang terlayani keprokolannya	100%		<i>Fasilitasi dan Pelayanan Protokol Pemerintah Daerah</i>	Persentase kegiatan keprotokolan KDH/WKDH/Kepala SKPD/tamu daerah sesuai jadwal secara tepat sasaran	100%		Input - SDM - Dana	Orang Rp	5 380.072.400		Bagian Humas dan Keprotokolan Kasubbag Keprotokolan	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TK. CAPAIAN TARGET	INDIKATOR KINERJA MASUKKAN (INPUT)	SATUAN	TARGET MASUKAN (INPUT)	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
				Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%		Program Kerjasama Informasi dan Mass Media <i>Kerjasama Informasi dan Mass Media</i>	Jumlah Tabloid Jumlah pemberitaan yang terekspose ke media	3 2160 Berita	Input - SDM - Dana	Orang Rp	2.603.640.000 8 2.603.640.000	Bagian Humas dan Keprotokolan Plt.Kasubbag Pemberitaan		
Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan bidang urusan umum dan perlengkapan, penyelenggaraan rumah tangga dan penataan asset	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Setda	Baik	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/ SKPD/ Masyarakat dengan baik	100%		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Baik			3,427,188,660		MISI KE- III "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"	
							<i>Penyediaan Jasa, Bahan, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran</i>	Jenis	7	Input - SDM - Dana	Orang Rp	3 + Pelaksana Bagian Umum 3.427.188.660			
							Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya	Nilai IKM	Baik			6,345,350,818			
							<i>Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Jabatan/Dinas</i>	Jenis Gudang	2			383,645,000			
							<i>Penyediaan Makanan dan Minuman</i>	Jumlah Orang	58262			2,076,898,000	Bagian Umum		
							<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran</i>	Jenis	27			3,440,087,818	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga		
							<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas</i>	Jumlah Bangunan	0			444,720,000			

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TK. CAPAIAN TARGET	INDIKATOR KINERJA MASUKKAN (INPUT)	SATUAN	TARGET MASUKAN (INPUT)	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							Fasilitasi Kegiatan dan Kebijakan KDH dan WKDH	Nilai IKM	Baik			4,210,680,000		
							Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi KDH/WKDH	Jumlah SKPD	96 Perjalanan Dinas KDH/WKDH			2,798,000,000		
							Penyediaan Perlengkapan dan Jasa Bagi KDH/WKDH	Jumlah pakaian dinas	2			75,000,000		
							Pemeliharaan Kesehatan KDH dan WKDH	Jumlah Orang	2			200,000,000		
							Penyediaan Makanan dan Minuman Rumah Jabatan	Jumlah orang	2			1,137,680,000		
			Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda terkait sarana prasarana/ aset milik Setda dikelola dengan baik	100%		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	Baik			119,500,000		
							Penyusunan Tabulasi Aset Daerah	WTP	30	Input - SDM - Dana	Orang Rp	3 + Pelaksana Bagian Umum 119.500.000		
							Pemenuhan, Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya	Nilai IKM	Baik			840,463,000		
							Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jenis	2			454,372,000		Bagian Umum Kasubbag Perlengkapan
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jenis	27			386,091,000		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TK. CAPAIAN TARGET	INDIKATOR KINERJA MASUKKAN (INPUT)	SATUAN	TARGET MASUKAN (INPUT)	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bidang sosial, kebudayaan, pendidikan, agama, kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat	Persentase kualitas penyelenggaraan bidang sosial, kebudayaan, pendidikan, agama, kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat sesuai ketentuan	100%	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Persentase peningkatan lembaga dan keagamaan	100%		<i>Kegiatan Pembinaan, Pengembangan, Pemberdayaan Sosail dan Kebudayaan</i>	Jumlah Organisasi	60 Organisasi	Input - SDM - Dana	Orang Rp	3 250.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat Kasubbag Sosial dan Kebudayaan	<i>MISI KE - III "Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)"</i>
			Meningkatnya peran Organisasi/lembaga pendidikan keagamaan dan kesejahteraan sosial	Persentase layanan kesejahteraan sosial bagi lembaga pendidikan keagamaan	100%		<i>Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat</i>	Jumlah Guru/Tenaga Pengajar	3090 Orang	Input - SDM - Dana	Orang Rp	3 18.629.024.850	Bagian Kesejahteraan Rakyat Kasubbag Kemasyarakatan dan Kesra	
			Meningkatnya peran Organisasi/ Lembaga Keagamaan/SKPD Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	100%		<i>Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Agama</i>	Jumlah Event	7 Event	Input - SDM - Dana	Orang Rp	9 3.782.000.000	Bagian Kesejahteraan Rakyat Kasubbag Pendidikan dan Agama	
Meningkatkan sinergitas pengelolaan perekonomian dan investasi	Persentase pengelolaan kebijakan perekonomian dan pembangunan	100%	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	100%		Pembinaan Pengembangan dan Fasilitasi Perekonomian Pembangunan Daerah	<i>Indeks Pembangunan Manusia</i>	<i>Nilai IKM</i>			793,405,120	Sekda dan Bagian Perekonomian Pembangunan	<i>MISI KE- V Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat</i>
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang fasilitasi pengembangan potensi perekonomian, Bina BUMD dan monitoring evaluasi perekonomian pembangunan	Persentase kualitas penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang fasilitasi pengembangan potensi perekonomian, Bina BUMD dan monitoring evaluasi perekonomian pembangunan	100%	Meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Presentase fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	100%		<i>Pembinaan, Fasilitasi dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah</i>	Jumlah Dokumen Kerjasama	2	Input - SDM - Dana	Orang Rp	3 292.269.700	Bagian Perekonomian Pembangunan Kasubbag Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian	
							<i>Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)</i>	Jumlah Dokumen BUMD	2 BUMD	Input - SDM - Dana	Orang Rp	2 283.047.460	Bagian Perekonomian Pembangunan Kasubbag Bina BUMD	
							<i>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perekonomian Pembangunan</i>	Jumlah Laporan Monev	3	Input - SDM - Dana	Orang Rp	3 218.087.960	Bagian Perekonomian Pembangunan Kasubbag Monev Perekonomian Pembangunan	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TK. CAPAIAN TARGET	INDIKATOR KINERJA MASUKKAN (INPUT)	SATUAN	TARGET MASUKAN (INPUT)	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja positif	75%		<i>Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)</i>	Jumlah Dokumen Kerjasama	2	Input - SDM - Dana	Orang Rp	3 292.269.700	Bagian Perekonomian Pembangunan Kasubbag Fasilitasi Pengembangan Potensi	
			Meningkatnya kualitas manajemen administrasi pembangunan yang proporsional sesuai dengan kewenangan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan	75%		<i>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perekonomian Pembangunan</i>	Jumlah Dokumen Pengembangan BUMD	2 BUMD	Input - SDM - Dana	Orang Rp	2 283.047.460	Bagian Perekonomian Pembangunan Kasubbag Bina BUMD	
			Meningkatnya hasil promosi potensi Daerah	Persentase peningkatan investasi	50%		<i>Pembinaan, Fasilitasi dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah</i>	Jumlah Laporan Monev	3	Input - SDM - Dana	Orang Rp	3 218.087.960	Bagian Perekonomian Pembangunan Kasubbag Monev Perekonomian Pembangunan	



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 40 /KEP-SEKDA/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 DAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT ,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel sebagai implementasi *Good Governance* dalam sistem pemerintahan diperlukan adanya pelaporan pencapaian kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan Instansi Pemerintah dan mengukur efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dalam melaksanakan program pembangunan berdasarkan rencana kinerja tahunan;
 - b. bahwa untuk mengukur pencapaian kinerja Sekretariat Daerah maka langkah yang dilakukan adalah dengan membuat dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun Kabupaten Tanah Laut 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 - c. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan

Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 53);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 7);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Sekretaris Daerah tentang pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 - b. mengadakan rapat koordinasi antar anggota Tim dalam merumuskan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 - c. melakukan tugas lapangan sehubungan pengumpulan data yang diperlukan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

- d. menelaah dan memahami bahan yang telah disiapkan juga menganalisa data dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- e. mengoreksi dalam penyelesaian pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- f. mendiskusikan dengan bagian - bagian terkait sehubungan pencarian data tambahan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut; dan
- g. mengadakan perbaikan atau perubahan sehubungan pemantapan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 30 Desember 2020

~~SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,~~


H. DAHNIAL KIFLI

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 NOMOR : 40/KEP-SEKDA/2020
 TANGGAL : 30 Desember 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 DAN
 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut	Pengarah
2.	Asisten Bidang Administrasi Umum	Ketua
3.	Kepala Bagian Organisasi	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
5.	Kasubbag Pelaporan	Anggota
6.	Kasubbag Perencanaan	Anggota
7.	Kasubbag Keuangan	Anggota
8.	Pejabat / Pelaksana Bagian Pemerintahan	Anggota
9.	Pejabat / Pelaksana Bagian Hukum	Anggota
10.	Pejabat / Pelaksana Bagian Pengadaan Barang /Jasa	Anggota
11.	Pejabat / Pelaksana Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA	Anggota
12.	Pejabat / Pelaksana Kesejahteraan Rakyat	Anggota
13.	Pejabat / Pelaksana Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
14.	Pejabat / Pelaksana Bagian Umum	Anggota
15.	Pelaksana Bagian Organisasi	Anggota
16.	Pelaksana Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota


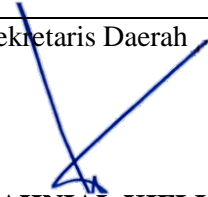
SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN TANAH LAUT,

H. DAHNIAL KIFLI

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKj)
SEKRETARIAT DAERAH**



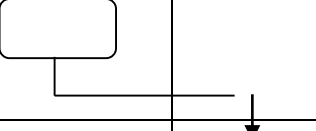

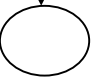
**BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

 <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT SEKRETARIAT DAERAH</p>	Nomor SOP	900/ / Perc & Keu
	Tanggal/Bulan Pembuatan	Januari 2021
	Tanggal Revisi 1	
	Tanggal Ewektif	
	Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">Sekretaris Daerah</p>  <p style="text-align: center;"><u>Drs. H. DAHNIAL KIFLI, MAP</u> NIP. 19640425 198703 1 012</p>
Nama SOP	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKj) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2020	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Tanah laut Nomor 25; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/693-KUM/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2018-2023; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah laut; Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 192/Kep-Sekda/2019 tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020; Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 40/Kep-Sekda/2020 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Mempunyai kemampuan menganalisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Mampu mengoperasikan computer. Memahami pedoman pengoperasian aplikasi SIPERJAKA dan E-SAKIP 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	

<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyusunan Renstra 2. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 3. SOP Rencana Kerja Anggaran (RKA) 4. SOP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tulis Kantor 2. komputer dengan aplikasi SIPERJAKA dan E-SAKIP 3. Dokumen Renstra (Rencana Strategis) 4. Dokumen Renja (Rencana Kerja) 5. Dokumen RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) 6. DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran)
<p>Peringatan</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakip sebagai dokumen pertanggungjawaban atas kinerja SKPD apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LAKIP ini tidak akan berjalan lancar. 	<p>Indikator Kinerja ,Target, Realisasi dan persentasi Capaian Kinerja</p>

NO	URAIAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		KEPALA BAGIAN TU DAN KEUANGAN	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PENGOLAH DAN PENYAJI DATA SUBBAG PERENCAAN DAN KEU	ASISTEN BIDANG ADMINIST RASI UMUM	SEKRETARIS DAERAH	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Memerintahkan penyusunan Lakip SKPD Sekretariat Daerah.						Disposisi Surat	20 menit	Disposisi Surat	
2.	Membuat format pengumpulan data dan informasi Kinerja dari Masing masing Bagian yang sudah disesuaikan dengan BKU yang disusun Bendahara Pengeluaran.						Format Penyusunan LAKIP SETDA	1 hari	Format Penyusunan LAKIP SETDA	
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi Kinerja tahunan kepada masing masing bagian						Format Penyusunan LAKIP SETDA	2 jam	Format Penyusunan LAKIP SETDA	
4.	Menyusun dan menghimpun format data dan informasi Kinerja dari masing masing bagian						Format Penyusunan LAKIP SETDA	3 jam	Format Penyusunan LAKIP SETDA	
5.	Menganalisa dan mengevaluasi data informasi Kinerja yang telah terkumpul dari masing masing bagian						Format Penyusunan LAKIP SETDA	1 minggu	Draf LAKIP SETDA	
6.	Menyusun dan membuat dokumen LAKIP SETDA	YA					Draf LAKIP SETDA	1 minggu	Dokumen LAKIP SETDA	
7.	Memeriksa dan mengoreksi Dokumen LAKIP SETDA						Dokumen LAKIP SETDA	2 hari	Dokumen LAKIP SETDA	
8.	Menyampaikan Dokumen LAKIP kepada Kepala SKPD untuk memintakan persetujuan						Dokumen LAKIP SETDA	2 jam	Dokumen LAKIP	
9.	Penandatanganan dokumen LAKIP SKPD oleh Kepala SKPD						Dokumen LAKIP SETDA	10 menit	Disposisi persetujuan dokumen LAKIP	



10.	Pembuatan Surat Pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat						Konsep surat pengantar	20 menit	Surat Pengantar	
11.	Penggandaan Dokumen LAKIP						Dokumen LAKIP SETDA	30 menit	Dokumen LAKIP SETDA	
12.	Pengiriman dokumen LAKIP SETDA ke BagianTata Pemerintahan dan Pengarsipan						Dokumen LAKIP SETDA	15 menit	Dokumen LAKIP SETDA	

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah